



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu dilakukan penataan ketatalaksanaan melalui penyusunan peta proses bisnis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 79 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dilakukan penyempurnaan sehingga harus diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peta Proses Bisnis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit kerja di lingkungan BPIP, agar dapat berkinerja dan menghasilkan keluaran sesuai dengan tugas dan fungsi BPIP serta bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara berjenjang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 79 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

ARSITEKTUR PETA PROSES BISNIS
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres Nomor 7 Tahun 2018) memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan birokrasi serta pelayanan publik kepada stakeholder/masyarakat. Pelayanan publik dari pemerintah menjadi hal yang sangat diperhatikan saat ini. Hal tersebut disebabkan banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap kontribusi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakannya. Masyarakat menuntut birokrasi yang efektif dan efisien dari pemerintahan dengan pelaku (birokrat) yang profesional dan berintegritas sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat luas, seluruh instansi pemerintah mulai melakukan berbagai program dalam pengelolaan pemerintah. Perkembangan pengelolaan pemerintah ini dilakukan agar mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang baik menuju kondisi *good governance* dalam pengelolaan pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai *good governance* adalah melalui program reformasi birokrasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk

menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Lebih lanjut, peta proses bisnis instansi pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan bahwa penyusunan peta proses bisnis diawali dari visi, misi, dan tujuan serta tugas dan fungsi organisasi yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya.

2. Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila (PIP), melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan PIP;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan PIP;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program PIP;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan PIP;
- e. pengaturan PIP;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PIP;
- h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sesuai dengan Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024, visi BPIP adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam rangka mencapai visi, misi BPIP adalah “BPIP mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Untuk menerjemahkan nilai, visi, dan misi yang dianut dan dipedomani organisasi BPIP, maka ditetapkan tujuan BPIP sebagai berikut:

- a. penguatan PIP secara nasional melalui Undang-Undang tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- b. BPIP sebagai koordinator pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/instansi di pemerintah pusat dan daerah;
- c. mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta demi mewujudkan visi, misi dan tujuan BPIP, BPIP yang dipimpin oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengarah memiliki susunan organisasi pelaksana sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretaris Utama;
- d. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan;
- e. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
- f. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
- g. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- i. Pusat.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan peta proses bisnis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

4. Daftar Istilah

- a. DHALKSS : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
- b. DSK : Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi
- c. DJP : Direktorat Jaringan dan Pembudayaan
- d. DAP : Direktorat Analisis dan Penyelarasan
- e. DA : Direktorat Advokasi
- f. DPRKR : Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi

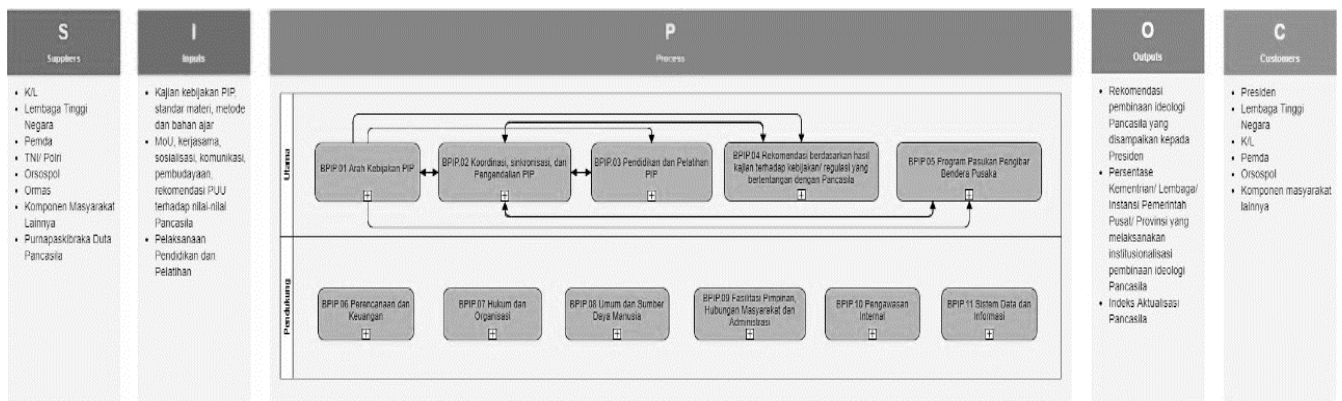
- g. DPKPIP : Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi
 h. DPMPPIP : Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila
 i. DPIPIP : Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila
 j. DPPP : Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan
 k. DSKPPP : Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
 l. DPelPP : Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
 m. DP : Direktorat Pengendalian
 n. DE : Direktorat Evaluasi
 o. PSDT : Pusat Data dan Teknologi Informasi
 p. BHO : Biro Hukum dan Organisasi
 q. BUS : Biro Umum dan SDM
 r. Wasnal : Biro Pengawasan Internal
 s. Faspim : Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi
 t. Renkeu : Biro Perencanaan dan Keuangan

5. Hasil Pekerjaan

Penyusunan arsitektur peta proses bisnis ini menghasilkan keluaran yang terdiri atas:

- Level Proses Bisnis Inti;
- Level Proses Bisnis Pendukung; dan
- Peta Proses Bisnis.

B. SIPOC (SUPPLIER, INPUT, PROCESS, OUTPUT CUSTOMER)



C. PEMETAAN TUGAS FUNGSI DAN DOMAIN PROSES BISNIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Tugas	Fungsi	Tujuan	Sasaran Strategis	Domain Proses Bisnis	
				Level 0	Level 1
Membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan PIP, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya	Perumusan arah kebijakan PIP (F1)	Penguatan PIP secara nasional melalui peraturan perundang-undangan (T3)	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional (SS3)	Arah Kebijakan PIP (BPIP.01)	Perumusan arah kebijakan PIP (BPIP.01.01)
	Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan PIP (F2)	Penguatan PIP secara nasional melalui peraturan perundang-undangan (T3)	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional (SS3)	Arah kebijakan PIP (BPIP.01)	Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan PIP (BPIP.01.02)
	Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program PIP (F3)	Penguatan PIP secara nasional melalui peraturan perundang-undangan (T3)	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional (SS3)	Arah kebijakan PIP (BPIP.01)	Pengaturan PIP (BPIP.01.03)
	Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan PIP (F4)	BPIP sebagai koordinator PIP dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/ lembaga/ instansi di pemerintah pusat dan daerah (T2)	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/ lembaga/ instansi di pemerintah pusat dan daerah (SS2)	Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP (BPIP.02)	Koordinasi dan sinkronisasi PIP (BPIP.02.01)
	Pengaturan PIP (F5)	Penguatan PIP secara nasional melalui peraturan	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis,	Arah kebijakan PIP	Pengaturan PIP (BPIP.01.03)

Tugas	Fungsi	Tujuan	Sasaran Strategis	Domain Proses Bisnis	
				Level 0	Level 1
		perundang-undangan (T3)	dan masif secara nasional (SS3)	(BPIP.01)	
	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP (F6)	Penguatan PIP secara nasional melalui peraturan perundangundangan (T3)	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional (SS3)	Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP (BPIP.02)	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP (BPIP.02.04)
	Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PIP (F7)	BPIP sebagai koordinator PIP dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/ lembaga/ instansi di pemerintah pusat dan daerah (T2)	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/ lembaga/ instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah (SS2)	Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP (BPIP.02)	Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, orsospol, dan komponen (BPIP.02.02)
	Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila (F8)	Penguatan PIP secara nasional melalui peraturan perundang-undangan (T3)	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional (SS3)	Arah Kebijakan PIP (BPIP.01)	Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila

Tugas	Fungsi	Tujuan	Sasaran Strategis	Domain Proses Bisnis	
				Level 0	Level 1
					(BPIP.01.04)
	Advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi (F9)	BPIP sebagai koordinator pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/ lembaga/ instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah (T2)	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/ lembaga/ instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah (SS2)	Rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila (BPIP.04)	Advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi (BPIP.04.01)
	Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (F10)	Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (SS1)	Pendidikan dan pelatihan (BPIP.03)	Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan (BPIP.03.01) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (BPIP.03.02)

Tugas	Fungsi	Tujuan	Sasaran Strategis	Domain Proses Bisnis	
				Level 0	Level 1
		(T1)			
	Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila (F11)	BPIP sebagai koordinator PIP dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/ instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah (T2)	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada kementerian/lembaga/ instansi di pemerintah pusat dan daerah (SS2)	Rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila (BPIP.04)	Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila (BPIP.04.02)
Program Paskibraka secara nasional di bawah koordinasi BPIP (Perpres No 51 tahun 2022)	Pembentukan Paskibraka (F12)	Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (SS1)	Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (BPIP.05)	Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (BPIP.05.01)

Tugas	Fungsi	Tujuan	Sasaran Strategis	Domain Proses Bisnis	
				Level 0	Level 1
		(T1)			
	Pelaksanaan tugas Paskibraka (F13)	Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara (T1)	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (SS1)	Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (BPIP.05)	Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (BPIP.05.01)
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila (F14)	Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (SS1)	Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (BPIP.05)	Pemberdayaan Purnapaskibraka (BPIP.05.02)

Tugas	Fungsi	Tujuan	Sasaran Strategis	Domain Proses Bisnis	
				Level 0	Level 1
		negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara (T1)			
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (F15)	Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara (T1)	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (SS1)	Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (BPIP.05)	Pemberdayaan Purnapaskibraka (BPIP.05.02)
	Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (F16)	Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (SS1)	Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (BPIP.05)	Pemberdayaan Purnapaskibraka (BPIP.05.02)

Tugas	Fungsi	Tujuan	Sasaran Strategis	Domain Proses Bisnis	
				Level 0	Level 1
		undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara (T1)			
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka (F17)	Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara (T1)	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (SS1)	Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (BPIP.05)	Pemberdayaan Purnapaskibraka (BPIP.05.02)

D. LEVEL PROSES BISNIS BPIP

1. Level Proses Bisnis Inti

BPIP-0-BPIP (Level 0)

BPIP.01- Arah Kebijakan PIP (Level 1)

BPIP.01.01-Perumusan Arah Kebijakan PIP (Level 2)

BPIP.01.01.01- Identifikasi dan analisis kebutuhan perumusan arah kebijakan PIP (Level 3)

BPIP.01.01.02- Pengkajian perumusan Arah Kebijakan PIP (Level 3)

BPIP.01.01.03- Akseptasi dokumen hasil kajian rumusan Arah Kebijakan PIP oleh Dewan Pengarah dan unsur pimpinan (Level 3)

BPIP.01.01.04- Penyusunan dokumen kebijakan hasil kajian rumusan arah kebijakan PIP (Level 3)

BPIP.01.01.05- Penyampaian dokumen kebijakan hasil kajian rumusan arah kebijakan PIP kepada *stakeholders* terkait (Level 3)

BPIP.01.02- Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila dan Peta Jalan PIP (Level 2)

BPIP.01.02.01-Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila (Level 3)

BPIP.01.02.01.01- Identifikasi dan analisis kebutuhan perumusan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila (Level 4)

BPIP.01.02.01.02- Pengkajian perumusan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila (Level 4)

BPIP.01.02.01.03- Akseptasi dokumen hasil kajian rumusan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila oleh Dewan Pengarah dan unsur pimpinan (Level 4)

BPIP.01.02.01.04- Penyusunan dokumen kebijakan hasil kajian rumusan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila (Level 4)

BPIP.01.02.01.05- Penyampaian dokumen kebijakan hasil kajian rumusan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila kepada *stakeholders* terkait (Level 4)

BPIP.01.02.02-Penyusunan peta jalan PIP (Level

3)

BPIP.01.02.02.01- Identifikasi dan analisis kebutuhan perumusan peta jalan PIP (Level 4)

BPIP.01.02.02.02- Pengkajian perumusan peta jalan PIP (Level 4)

BPIP.01.02.02.03- Akseptasi dokumen hasil kajian rumusan peta jalan PIP oleh Dewan

- Pengarah dan unsur pimpinan (Level 4)
- BPIP.01.02.02.04- Penyusunan dokumen kebijakan hasil kajian rumusan peta jalan PIP (Level 4)
- BPIP.01.02.02.05- Penyampaian dokumen kebijakan hasil kajian rumusan peta jalan PIP kepada *stakeholders* terkait (Level 4)
- BPIP.01.03-Pengaturan PIP (Level 2)
- BPIP.01.03.01-Pengkajian Implementasi Kebijakan PIP (Level 3)
- BPIP.01.03.01.01-Koordinasi implementasi PIP terhadap lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Level 4)
- BPIP.01.03.01.02-Perumusan kajian implementasi PIP terhadap lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Level 4)
- BPIP.01.03.02-Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya (Level 3)
- BPIP.01.03.02.01-Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Purnapasikbraka Indonesia (Level 4)
- BPIP.01.03.03-Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PIP (Level 3)
- BPIP.01.03.04-Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP (Level 3)
- BPIP.01.04-Pengkajian Materi dan Metodologi Pembelajaran Pancasila (Level 1)
- BPIP.01.04.01-Perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP (Level 2)
- BPIP.01.04.01.01-Perumusan standardisasi materi PIP (Level 3)
- BPIP.01.04.01.01.01-Identifikasi Materi PIP (*existing*) pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik,

komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Level 4)

BPIP.01.04.01.01.02-Pengkajian dan Penyusunan Materi PIP bagi lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Level 4)

BPIP.01.04.01.01.03-Reviu dan Uji Petik Materi PIP bagi lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Level 4)

BPIP.01.04.01.01.04-Penyusunan draf rekomendasi kebijakan Materi PIP bagi lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Level 4)

BPIP.01.04.01.02-Perumusan metode PIP

BPIP.01.04.01.02.01-Identifikasi Metode PIP (*existing*) pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Level 4)

BPIP.01.04.01.02.02-Pengkajian Metode PIP bagi lembaga tinggi negara dan kementerian/embaga (Level 4)

Organisasi Sosial Politik dan Purnapaskibraka Duta Pancasila; Komponen Masyarakat Lainnya (Level 4)

BPIP.01.04.01.02.03-Review dan Uji Petik Metode PIP bagi lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Level 4)

BPIP.01.04.01.02.04-Penyusunan draf rekomendasi kebijakan terkait dengan metoda PIP lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Level 4)

BPIP.02-Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian PIP (Level

1)

BPIP.02.01-Koordinasi dan sinkronisasi PIP (Level 2)

BPIP.02.01.01-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategis dan program teknis PIP dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya (Level 3)

BPIP.02.01.01.01-Koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja PIP dengan

lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Level 4)

BPIP.02.02-Pelaksanaan Sosialisasi dan Kerja Sama serta Hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat (Level 2)

BPIP.02.02.01-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategis dan program teknis PIP dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya (Level 3)

BPIP.02.02.02-Pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan Pancasila (Level 3)

BPIP.02.02.02.01-Pemantapan pranata pembudayaan PIP (Level 4)

BPIP.02.02.02.02-Inovasi pembudayaan PIP (Level 4)

BPIP.02.02.02.03-Pembangunan internalisasi nilai Pancasila dalam kesejahteraan dan aktualisasi nilai-nilai budaya yang mencerminkan nilai Pancasila (Level 4)

BPIP.02.02.02.04-Pembangunan proses dan tata kelola kekayaan serta pewarisan nilai-nilai budaya (Level 4)

BPIP.02.02.02.05-Pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila (Level 4)

BPIP.02.02.02.06-Pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas (Level 4)

BPIP.02.02.03-Pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya (Level 3)

BPIP.02.02.04-Pengembangan komunikasi dengan media massa (Level 3)

BPIP.02.02.05-Peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah, yang menghasilkan output Rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kerja sama PIP (Prosun, naskah kerja sama, rencana aksi) (Level 3)

BPIP.02.02.06-Pengembangan hubungan dengan orsospol dan komponen masyarakat lainnya dalam

rangka menggalang partisipasi komunitas, yang menghasilkan output komunitas (jejaring) yang menyebarkan PIP (Level 3)

BPIP.02.03-Pengendalian PIP (Level 2)

BPIP.02.03.01-Pengendalian pelaksanaan PIP

(Level 3)

BPIP.02.03.01.01-Penyusunan metode pengendalian pelaksanaan PIP (Level 4)

BPIP.02.03.01.02-Pengendalian pelaksanaan PIP untuk memastikan program pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan PIP, garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan PIP (Level 4)

BPIP.02.03.02-Penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP (Level 3)

BPIP.02.03.02.01-penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila agar selaras dengan arah kebijakan PIP, garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan PIP (Level 4)

BPIP.02.04-Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP (Level 2)

BPIP.02.04.01-Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PIP (Level 3)

BPIP.02.04.01.01-penyusunan metode evaluasi pelaksanaan PIP (Level 4)

BPIP.02.04.01.01.01-penyusunan metode evaluasi pelaksanaan PIP (Level 5)

BPIP.02.04.01.02-Pemantauan terhadap implementasi kebijakan PIP (Level 4)

BPIP.02.04.01.02.01-Pelaksanaan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PIP (Level 5)

BPIP.02.04.01.02.02-Pelaksanaan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, ASN, penyelenggara negara, organisasi masyarakat, organisasi, dan perusahaan asing serta media yang menentang ideologi negara (Level 5)

BPIP.02.04.01.02.03-Penanganan pendidik dan tenaga kependidikan, ASN, penyelenggara negara, organisasi masyarakat, organisasi, dan perusahaan asing serta media yang menentang ideologi negara (Level 5)

BPIP.02.04.02-Pelaksanaan pengukuran pelebagaan

Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara (Level 3)

BPIP.02.04.02.01-penyusunan metode pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara (Level 4)

BPIP.02.04.02.02-pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara (Level 4)

BPIP.02.04.02.02.01-Perencanaan kebijakan strategis dan program teknis evaluasi implementasi PIP (Level 5)

BPIP.02.04.02.02.02-Pengoordinasian kebijakan strategis dan program teknis evaluasi implementasi kebijakan PIP (Level 5)

BPIP.02.04.02.02.03-Pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis evaluasi implementasi kebijakan PIP (Level 5)

BPIP.02.04.02.02.04-pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara (Level 5)

BPIP.03-Pendidikan dan Pelatihan (Level 1)

BPIP.03.01- Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan (Level 2)

BPIP.03.01.01-Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan PIP (Level 3)

BPIP.03.01.01.01-Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan PIP bagi pengajar pendidikan dan pelatihan PIP serta pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.01.01.02-Diseminasi Standardisasi pendidikan dan pelatihan PIP bagi pengajar pendidikan dan pelatihan PIP serta pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.01.02-Penyusunan Kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP (Level 3)

BPIP.03.01.02.01-Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP bagi pengajar pendidikan dan pelatihan PIP serta pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.01.02.02-Diseminasi kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP bagi pengajar pendidikan dan pelatihan PIP serta pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.02- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Level

2)

BPIP.03.02.01-Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan PIP (Level 3)

BPIP.03.02.01.01-Penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.02.01.02-Perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.02.01.03-Penyusunan standar dan penyelenggaraan pemberian akreditasi kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.02.01.04-Sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.02.02-Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya (Level 3)

BPIP.03.02.02.01-Penyusunan dan pengembangan modul dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.02.02.02-Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pengajar pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.02.02.03-Fasilitasi penyediaan tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.02.02.04-Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.03.02.02.05-Pelaksanaan PIP dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota Paskibraka (Level 4)

BPIP.03.02.02.06-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PIP (Level 4)

BPIP.04- Rekomendasi Berdasarkan Hasil Kajian Terhadap Kebijakan atau Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila Kepada Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya (Level 1)

BPIP.04.01- Advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi (Level 2)

BPIP.04.01.01-Pelaksanaan advokasi PIP pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen

masyarakat lainnya (Level 3)

BPIP.04.01.01.01-Pencegahan, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah dan kendala dalam PIP (Level 4)

BPIP.04.01.01.02-penyelenggaraan advokasi terhadap lembaga tinggi negara kementerian/lembaga, pemerintahan daerah organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila terkait dengan perbuatan, sikap, atau permasalahan lain yang bertentangan dengan nilai Pancasila (Level 4)

BPIP.04.02- Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila (Level 2)

BPIP.04.02.01-Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi (Level 3)

BPIP.04.02.01.01-Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi (Level 4)

BPIP.04.02.02-Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara (Level 3)

BPIP.04.02.02.01-Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara (Level 4)

BPIP.04.02.02.02-Penyelenggaraan analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional terhadap nilai Pancasila (Level 4)

BPIP.04.02.03-Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila (Level 3)

BPIP.04.02.03.01-Pengelolaan laporan atau informasi mengenai kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila (Level 4)

BPIP.04.02.03.02-Pengawasan dan kajian kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila (Level 4)

BPIP.04.02.03.03-Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila (Level 4)

BPIP.05-Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Level 1)

BPIP.05.01- Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Level 2)

BPIP.05.01.01- Pembentukan Paskibraka (rekrutmen dan seleksi (Sosialisasi dan Pengumuman Dep. I), pemusatan pendidikan dan pelatihan (Dep. IV, Dep. V, Garnisun dan Lembaga Ketahanan Nasional/Lemhannas), pengukuhan Paskibraka (Setpres dan Dep. V)) (Level 3)

BPIP.05.01.02 - Pelaksanaan tugas Paskibraka (SetPres (17 Agst)), Dep. V dan Garnisun (1 Juni) (Level 3)

BPIP.05.02- Pemberdayaan Purnapaskibraka (Level 2)

BPIP.05.02.01- Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Level 3)

BPIP.05.02.02 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (PDP) (Level 3)

BPIP.05.02.03 - Pembinaan lanjutan kepada PDP (Level 3)

BPIP.05.02.04 - Pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan (Level 3)

BPIP.05.02.05 - Pembinaan terhadap Purnapaskibraka (Level 3)

BPIP.05.03- Pengelolaan Bendera Pusaka (Level 2)

BPIP.05.03.01- Pembuatan Duplikat Bendera Pusaka (Level 3)

BPIP.05.03.02 - Pendistribusian Duplikat Bendera Pusaka (Level 3)

BPIP.05.04- Pemantauan dan Evaluasi Program Paskibraka (Level 2)

BPIP.05.04.01- Pemantauan Program Paskibraka (Level 3)

BPIP.05.04.02 - Evaluasi Program Paskibraka (Level 3)

2. Level Proses Bisnis Pendukung

BPIP-0-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Level 0)

BPIP.06- Perencanaan dan Keuangan (Level 1)

BPIP.06.01-Pengordinasian program dan anggaran (Level 2)

BPIP.06.01.01-Penyusunan program (Level 3)

BPIP.06.01.01.01- Penyusunan rencana strategis (Level 4)

BPIP.06.01.01.01.01- Pengumpulan data dan informasi (Level 5)

BPIP.06.01.01.01.02- Penetapan rencana startegis (Level 5)

BPIP.06.01.01.02- Penyusunan rencana kerja (Level 4)

BPIP.06.01.01.02.01- Pengumpulan data dan informasi kegiatan tahunan unit

- kerja (Level 5)
- BPIP.06.01.01.02.02- Penyusunan program dan kegiatan (Level 5)
- BPIP.06.01.01.02.03- Penyusunan rencana kerja tahunan (Level 5)
- BPIP.06.01.01.03- Penyusunan perjanjian kinerja (Level 4)
 - BPIP.06.01.01.03.01- Pengumpulan data dan informasi kinerja (Level 5)
 - BPIP.06.01.01.03.02- Dialog kinerja (Level 5)
 - BPIP.06.01.01.03.03- Penetapan perjanjian kinerja (Level 5)
 - BPIP.06.01.01.03.04- Penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja (Level 5)
- BPIP.06.01.02- Penyusunan anggaran (Level 3)
- BPIP.06.01.02.01- Penyusunan *baseline* belanja pegawai dan operasional (Level 4)
 - BPIP.06.01.02.01.01- Pengumpulan data, informasi, dan realisasi belanja pegawai dan operasional (Level 5)
 - BPIP.06.01.02.01.02- Penyusunan *exercise* kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional (Level 5)
- BPIP.06.01.02.02- Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) (Level 4)
 - BPIP.06.01.02.02.01- Pengumpulan data kegiatan berlanjut dan tidak berlanjut (Level 5)
 - BPIP.06.01.02.02.02- Pengumpulan data usulan kegiatan baru (Level 5)
 - BPIP.06.01.02.02.03- Pemutakhiran kerangka pengeluaran jangka menengah (Level 5)
- BPIP.06.01.02.03- Penyusunan standar dan struktur biaya (Level 4)
 - BPIP.06.01.02.03.01- Pembuatan usulan standar biaya keluaran khusus (SBKK) (Level 5)
 - BPIP.06.01.02.03.01.01 Pengumpulan data dan informasi usulan SBKK unit kerja (Level 6)
 - BPIP.06.01.02.03.01.02- Pengusulan usulan SBKK (Level 6)
 - BPIP.06.01.02.03.02- Pembuatan usulan standar biaya masukan lainnya (SBML) (Level 5)
 - BPIP.06.01.02.03.02.01- Pengumpulan data dan informasi

BPIP.06.02.01-Monitoring dan evaluasi kinerja (Level 3)

BPIP.06.02.01.01- Penyusunan *baseline* belanja pegawai dan operasional (Level 4)

BPIP.06.02.01.02- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja (Level 4)

BPIP.06.02.02-Pelaporan kinerja (Level 3)

BPIP.06.02.01.01-Pelaporan kinerja triwulan (Level 4)

BPIP.06.02.01.01.01-Pengumpulan data capaian kinerja triwulan unit kerja penyusunan laporan kinerja triwulan (Level 5)

BPIP.06.02.01.01.02-Verifikasi dan validasi data capaian kinerja triwulan unit kinerja penyusunan laporan kinerja triwulan (Level 5)

BPIP.06.02.01.01.03-Penyampaian capaian kinerja dan kendala pelaksanaan kegiatan triwulan melalui aplikasi monitoring dan evaluasi elektronik (e-monev) penyusunan laporan kinerja triwulan (Level 5)

BPIP.06.02.01.01.04-Penyusunan laporan kinerja triwulan penyusunan laporan kinerja triwulan (Level 5)

BPIP.06.02.01.02-Pelaporan kinerja tahunan (Level 4)

BPIP.06.02.01.02.01- Pengumpulan data capaian kinerja tahunan unit kerja (Level 5)

BPIP.06.02.01.02.02- Verifikasi dan validasi data capaian kinerja tahunan unit kinerja (Level 5)

BPIP.06.02.01.02.03- Penyampaian capaian kinerja dan kendala pelaksanaan kegiatan tahunan melalui aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik (e-SAKIP) yang diakses pada laman esr.menpan.go.id (Level 5)

BPIP.06.02.01.03-Penyiapan laporan lainnya (Level 4)

BPIP.06.02.01.03.01-Penyusunan bahan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (Level 5)

BPIP.06.02.01.03.02-Penyusunan bahan kunjungan kerja (Level 5)

BPIP.06.02.01.03.03-Penyusunan bahan

pidato Presiden (Level 5)

BPIP.06.03-Pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan (Level 2)

BPIP.06.03.01-Verifikasi anggaran (Level 3)

BPIP.06.03.01.01- Pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan negara (Level 4)

BPIP.06.03.01.01.01- Verifikasi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) langsung kontraktual (Level 5)

BPIP.06.03.01.01.02- Verifikasi beban APBN langsung bendahara (Level 5)

BPIP.06.03.01.01.03- Verifikasi beban APBN surat perintah membayar (SPM) uang persediaan/tambahan uang persediaan (UP/TUP) (Level 5)

BPIP.06.03.01.01.04- Verifikasi beban APBN langsung ganti uang persediaan (GUP)/Nihil UP/TUP (Level 5)

BPIP.06.03.01.02- Pembuatan konsep peraturan, keputusan, atau pedoman pengelolaan keuangan, dan perubahannya dilingkungan BPIP (Level 4)

BPIP.06.03.01.03- Verifikasi dan penetapan rencana penarikan dana kegiatan dan laporan realisasi anggaran (Level 4)

BPIP.06.03.02-Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PIP (Level 3)

BPIP.06.03.02.01- Pembayaran gaji (Level 4)

BPIP.06.03.02.02- Pembayaran tunjangan kinerja (Level 4)

BPIP.06.03.02.03- Pembayaran uang makan (Level 4)

BPIP.06.03.02.04- Pembayaran belanja pegawai nonpegawai negeri sipil (PNS) (Level 4)

BPIP.06.03.02.05- Pembayaran hak keuangan Dewan Pengarah (Level 4)

BPIP.06.03.02.06- Penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) (Level 4)

BPIP.06.03.03- Pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan (Level 3)

BPIP.06.03.03.01- Penyusunan laporan keuangan (Level 4)

BPIP.06.03.03.01.01- Pengidentifikasian dokumen sumber (Level 5)

BPIP.06.03.03.01.02- Rekonsiliasi dan pengolahan data sumber (level 5)

BPIP.06.03.03.01.03- Penyusunan laporan keuangan unit akuntansi (Level

- 5)
 - BPIP.06.03.03.02- Pengendalian internal pelaporan keuangan (Level 4)
 - BPIP.06.03.04- Pengelolaan tuntutan ganti kerugian (TGR) (Level 3)
 - BPIP.06.03.04.01- Analisis piutang/TGR penyelesaian piutang/TGR (Level 4)
 - BPIP.06.03.04.02- Penyelesaian piutang/TGR penyelesaian piutang/TGR (Level 4)
 - BPIP.06.03.04.02.01- Penyelesaian TGR tahun berjalan/usulan unit kerja (Level 5)
 - BPIP.06.03.04.02.02- Penyelesaian TGR temuan auditor (Inspektorat/BPK RI) (Level 5)
 - BPIP.06.03.04.02.03- Piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (Level 5)
 - BPIP.06.03.04.02.04- Piutang lainnya (Level 5)
 - BPIP.06.04- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan (Level 1)
 - BPIP.06.04.01- Pengordinasian dan penyusunan perencanaan program dan anggaran biro (Level 2)
 - BPIP.06.04.01- Pengordinasian dan penyusunan perencanaan program dan anggaran biro (Level 3)
 - BPIP.06.04.01.01- Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran indikatif (Level 4)
 - BPIP.06.04.01.02- Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran definitif (Level 4)
 - BPIP.06.04.01.03- Penelaahan RKA-K/L (Level 4)
 - BPIP.06.04.01.04- Revisi anggaran (Level 4)
 - BPIP.06.04.01.05- Pelaporan capaian *output* (Level 4)
 - BPIP.06.04.01.06- Pelaporan kinerja (Level 4)
 - BPIP.06.04.02- Pengelolaan dan pelaporan keuangan biro (Level 3)
 - BPIP.06.04.02.01- Pengajuan TUP (Level 4)
 - BPIP.06.04.02.02- Pengelolaan kegiatan (Level 4)
 - BPIP.06.04.02.03- Pertanggungjawaban keuangan (Level 4)
 - BPIP.06.04.02.04- Pelaporan keuangan (Level 4)
 - BPIP.06.04.03- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro (Level 3)
 - BPIP.06.04.03.01- Manajemen sumber daya

- manusia unit kerja (Level 4)
- BPIP.06.04.03.02- Ketatausahaan dan kerumahtanggaan (Level 4)
 - BPIP.06.04.03.02.01- Penerbitan surat bebas temuan (Level 5)
 - BPIP.06.04.03.02.02- Pengajuan alat tulis kantor (ATK) (Level 5)
 - BPIP.06.04.03.02.03- Fasilitasi rapat (Level 5)
 - BPIP.06.04.03.02.03.01- Fasilitasi penyediaan ruang rapat (Level 6)
 - BPIP.06.04.03.02.03.02- Fasilitasi konsumsi kegiatan (Level 6)
 - BPIP.06.04.03.02.03.03- Fasilitasi penyediaan narasumber (Level 6)
 - BPIP.06.04.03.02.03.04- Fasilitasi rapat dalam jaringan (Level 6)
 - BPIP.06.04.03.02.04- Permohonan perbaikan dan/penambahan fasilitas (Level 5)
- BPIP.06.04.03.03- Pelaksanaan arsip dan persuratan (Level 4)
 - BPIP.06.04.03.03.01- Pengelolaan surat masuk (Level 5)
 - BPIP.06.04.03.03.02- Pengelolaan surat keluar (Level 5)
 - BPIP.06.04.03.03.03- Pemberkasan arsip aktif (Level 5)
 - BPIP.06.04.03.03.04- Penataan dan penyimpanan arsip inaktif (Level 5)
 - BPIP.06.04.03.03.05- Layanan peminjaman arsip (Level 5)
- BPIP.06.04.04- Organisasi dan ketatalaksanaan biro (Level 3)
 - BPIP.06.04.04.01- Penyusunan proses bisnis (Level 4)
 - BPIP.06.04.04.02- Penyusunan *Standar Operational Procedure* (SOP) (Level 4)
 - BPIP.06.04.04.03- Manajemen risiko (Level 4)
- BPIP.06.04.05- Pelaksanaan reformasi birokrasi biro (Level 3)
 - BPIP.06.04.05.01- Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja (Level 4)
 - BPIP.06.04.05.01.01- Penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi (Level 5)
 - BPIP.06.04.05.01.02- Dokumentasi

pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 5)
 BPIP.06.04.05.01.03- Pelaporan
 pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 5)
 BPIP.06.04.05.01.04- Pelaporan
 pelaksanaan penilaian mandiri
 pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)
 (Level 5)

BPIP.06.04.05.02- Pengelolaan SAKIP unit
 kerja (Level 4)

BPIP.06.04.05.03- Pengelolaan Sistem
 Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) unit
 kerja (Level 4)

BPIP.06.04.05.04- Pengelolaan Sistem
 Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) unit
 kerja (Level 4)

BPIP.06.04.05.05- Pengelolaan keterbukaan
 informasi publik (KIP) (Level 4)

BPIP.07-Hukum dan Organisasi (Level 1)

BPIP.07.01-Koordinasi dan penyusunan peraturan
 perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi dan
 informasi hukum, evaluasi, penelaahan, dan pendampingan
 hukum (Level 2)

BPIP.07.01.01- Pengoordinasian perencanaan,
 penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan,
 dan pengundangan peraturan perundang-undangan
 (Level 3)

BPIP.07.01.01.01- Pengoordinasian
 perencanaan, penyusunan, pembahasan,
 pengesahan/penetapan, dan pengundangan
 Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan
 Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden
 (Perpres) (Level 4)

BPIP.07.01.01.02- Pengoordinasian
 penyusunan UU, Perpu, PP, dan Perpres (Level
 4)

BPIP.07.01.01.02.01- Pengoordinasian
 perencanaan peraturan BPIP (Level 5)

BPIP.07.01.01.02.02- Pengoordinasian
 penyusunan peraturan BPIP (Level 5)

BPIP.07.01.01.02.03- Pengoordinasian
 pembahasan peraturan BPIP (Level 5)

BPIP.07.01.01.02.04- Pengoordinasian
 pengesahan/penetapan peraturan BPIP
 (Level 5)

BPIP.07.01.01.05- Pengoordinasian
 pengundangan peraturan BPIP (Level 5)

BPIP.07.01.01.03- Pengoordinasian
 pembahasan UU, Perpu, PP, dan Perpres (Level

- 4)
 - BPIP.07.01.01.04- Pengoordinasian pengesahan/penetapan UU, Perpu, PP, dan Perpres (Level 4)
 - BPIP.07.01.02- Pengoordinasian perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan produk hukum (Level 3)
 - BPIP.07.01.02.01- Pengoordinasian perencanaan/penyusunan Peraturan/Keputusan Ketua Dewan Pengarah, Keputusan Kepala, Keputusan Sekretaris Utama, dan Keputusan Deputi (Level 4)
 - BPIP.07.01.02.02- Pengoordinasian pembahasan Peraturan/Keputusan Ketua Dewan Pengarah, Keputusan Kepala, Keputusan Sekretaris Utama, dan Keputusan Deputi (Level 4)
 - BPIP.07.01.02.03- Pengoordinasian Penetapan Peraturan/Keputusan Ketua Dewan Pengarah, Keputusan Kepala, Keputusan Sekretaris Utama, dan Keputusan Deputi (Level 4)
 - BPIP.07.01.03- pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) (Level 3)
 - BPIP.07.01.03.01- Pengelolaan sistem pembentukan produk hukum BPIP (SNIPPER BPIP) (Level 4)
 - BPIP.07.01.03.02- Pengelolaan JDIH (Level 4)
 - BPIP.07.01.03.03- Pengelolaan sistem informasi evaluasi produk hukum (SIEVA) (Level 4)
 - BPIP.07.01.04- Penyediaan informasi produk hukum (Level 3)
 - BPIP.07.01.04.01- Pendokumentasian produk hukum (Level 4)
 - BPIP.07.01.04.02- Penyebarluasan produk hukum (Level 4)
 - BPIP.07.01.05- Pelaksanaan penelaahan hukum (Level 3)
 - BPIP.07.01.06- Pelaksanaan evaluasi produk hukum (Level 3)
 - BPIP.07.01.07- Pelaksanaan mediasi dan pendampingan hukum (Level 3)
 - BPIP.07.01.07.01- Pelaksanaan mediasi (Level 4)
 - BPIP.07.01.07.02- Pelaksanaan pendampingan hukum (Level 4)
- BPIP.07.02- Pembinaan, penataan organisasi (Level 2)
 - BPIP.07.02.01- Evaluasi organisasi (Level 3)
 - BPIP.07.02.02- Penataan organisasi (Level 3)

- BPIP.07.02.02.01- Penyusunan naskah akademik (Level 4)
- BPIP.07.02.02.02- Pembahasan naskah akademik (Level 4)
- BPIP.07.03- Pembinaan tata laksana dan reformasi birokrasi (Level 2)
 - BPIP.07.03.01- Pelaksanaan pembinaan dan penataan tata laksana (Level 3)
 - BPIP.07.03.01.01- Pemetaan proses bisnis (Level 4)
 - BPIP.07.03.01.01.01- Persiapan dan perencanaan proses bisnis (Level 5)
 - BPIP.07.03.01.01.02- Pengembangan penyusunan dengan level/tingkatan (Level 5)
 - BPIP.07.03.01.01.03- Penerapan/implmentasi proses bisnis (Level 5)
 - BPIP.07.03.01.01.04- Pemantauan dan evaluasi proses bisnis (Level 5)
 - BPIP.07.03.01.02- Pemetaan Standar Operasional Prosedur/SOP (Level 4)
 - BPIP.07.03.02- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 3)
 - BPIP.07.03.02.01- Pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 4)
 - BPIP.07.03.02.02- Pelaksanan zona integritas (ZI) (Level 4)
- BPIP.07.04- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum ada Organisasi (Level 2)
 - BPIP.07.04.01- Pengordinasian dan penyusunan perencanaan program dan anggaran biro (Level 3)
 - BPIP.07.04.01.01- Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran indikatif (Level 4)
 - BPIP.07.04.01.02- Penyusunan RKA-K/L pagu anggran definitif (Level 4)
 - BPIP.07.04.01.03- Penelaahan RKA-K/L (Level 4)
 - BPIP.07.04.01.04- Revisi anggaran (Level 4)
 - BPIP.07.04.01.05- Pelaporan capaian *output* (Level 4)
 - BPIP.07.04.01.06- Pelaporan kinerja (Level 4)
 - BPIP.07.04.02- Pengelolaan dan pelaporan keuangan biro (Level 3)
 - BPIP.07.04.02.01- Pengajuan tambahan uang persediaan (TUP) (Level 4)
 - BPIP.07.04.02.02- Pengelolaan kegiatan (Level

- 4)
 - BPIP.07.04.02.03- Pertanggungjawaban keuangan (Level 4)
 - BPIP.07.04.02.04- Pelaporan keuangan (Level 4)
- BPIP.07.04.03- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro (Level 3)
 - BPIP.07.04.03.01- Manajemen SDM unit kerja (Level 4)
 - BPIP.07.04.03.02- Ketatausahaan dan kerumahtanggaan (Level 4)
 - BPIP.07.04.03.02.01- Penerbitan surat bebas temuan (Level 5)
 - BPIP.07.04.03.02.02- Pengajuan alat tulis kantor (ATK) (Level 5)
 - BPIP.07.04.03.02.03- Fasilitasi rapat dalam jaringan dan luar jaringan (Level 5)
 - BPIP.07.04.03.02.04- Permohonan perbaikan/perawatan dan penambahan serta pengembalian fasilitas (Level 5)
 - BPIP.07.04.03.03- Pelaksanaan arsip dan persuratan (Level 4)
 - BPIP.07.04.03.03.01- Pengelolaan surat masuk (Level 5)
 - BPIP.07.04.03.03.02- Pengelolaan surat keluar (Level 5)
 - BPIP.07.04.03.03.03- Pemberkasan arsip aktif (Level 5)
 - BPIP.07.04.03.03.04- Penataan dan penyimpanan arsip inaktif (Level 5)
 - BPIP.07.04.03.03.05- Layanan peminjaman arsip (Level 5)
- BPIP.07.04.04- Organisasi dan ketatalaksanaan biro (Level 3)
 - BPIP.07.04.04.01- Penyusunan proses bisnis (Level 4)
 - BPIP.07.04.04.02- Penyusunan SOP (Level 4)
 - BPIP.07.04.04.03- Manajemen risiko (Level 4)
- BPIP.07.04.05- Pelaksanaan reformasi birokrasi biro (Level 3)
 - BPIP.07.04.05.01- Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja (Level 4)
 - BPIP.07.04.05.02- Pengelolaan SAKIP unit kerja (Level 4)
 - BPIP.07.04.05.03- Pengelolaan SPIP unit kerja (Level 4)
 - BPIP.07.04.05.04- Pengelolaan SPBE unit kerja

- (Level 4)
- BPIP.07.04.05.05- Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Level 4)
- BPIP.08- Umum dan SDM (Level 1)
 - BPIP.08.01- Koordinasi kerumahtanggaan (Level 2)
 - BPIP.08.01.01- Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan (Level 3)
 - BPIP.08.01.02- Pengelolaan sarana dan prasarana (Level 3)
 - BPIP.08.01.02.01- Perencanaan sarana dan prasarana (Level 4)
 - BPIP.08.01.02.01.01- Perencanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (Level 5)
 - BPIP.08.01.02.01.02- Perencanaan perawatan sarana dan prasarana (Level 5)
 - BPIP.08.01.02.01.03- Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana (Level 5)
 - BPIP.08.01.02.02- Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana (Level 4)
 - BPIP.08.01.02.02.01- Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana (Level 5)
 - BPIP.08.01.02.02.01.01- Pemeliharaan berkala (Level 6)
 - BPIP.08.01.02.02.01.02- Pemeliharaan insidentil (Level 6)
 - BPIP.08.01.02.02.02- Pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana (Level 5)
 - BPIP.08.01.02.03- Pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana (Level 4)
 - BPIP.08.01.03- Pengelolaan urusan dalam (Level 3)
 - BPIP.08.01.03.01- Pengelolaan layanan perkantoran (Level 4)
 - BPIP.08.01.03.02- Pengelolaan kendaraan dinas (Level 4)
 - BPIP.08.01.03.03- Peminjaman ruangan (Level 4)
 - BPIP.08.02- Layanan kesehatan (Level 2)
 - BPIP.08.02.01- Pengordinasian pelayanan layanan kesehatan (Level 3)
 - BPIP.08.03- Pengamanan dalam (Level 2)
 - BPIP.08.03.01- Pelaksanaan pengamanan dalam (Level 3)
- BPIP.08.04- Layanan pengadaan barang/jasa pemerintah

(PBJ) (Level 2)

BPIP.08.04.01- Pelaksanaan layanan PBJ (Level 3)

BPIP.08.04.01.01- Pengelolaan PBJ (Level 4)

BPIP.08.04.01.01.01- Inventarisasi paket PBJ (Level 5)

BPIP.08.04.01.01.02- Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa (Level 5)

BPIP.08.04.01.01.03- Penyusunan strategi PBJ (Level 5)

BPIP.08.04.01.01.04- Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan (Level 5)

BPIP.08.04.01.01.05- Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa (Level 5)

BPIP.08.04.01.01.05.01-

Pelaksanaan pemilihan melalui penyedia (Level 6)

BPIP.08.04.01.01.05.01.01

- Pemilihan penyedia prakualifikasi (level n)

BPIP.08.04.01.01.05.01.02

- Pemilihan penyedia pascakualifikasi (level n)

BPIP.08.04.01.01.05.01.03

- Pemilihan penyedia melalui tender cepat (level n)

BPIP.08.04.01.01.05.01.04

- Pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung (level n)

BPIP.08.04.01.01.05.02-

Pelaksanaan PBJ secara swakelola (Level 6)

BPIP.08.04.01.02- layanan PBJ (Level 4)

BPIP.08.04.01.02.01- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBJ (Level 5)

BPIP.08.04.01.02.02- Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ (Level 5)

BPIP.08.04.01.02.03- PBJ lainnya dengan nilai kurang dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Level 5)

BPIP.08.04.01.02.03.01- Usulan PBJ lainnya dengan nilai kurang dari Rp200.000.000,- (dua ratus

- juta rupiah) (Level 6)
- BPIP.08.04.01.02.03.02- Proses PBJ lainnya dengan nilai kurang dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Level 6)
- BPIP.08.04.01.02.04- PBJ lainnya dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Level 5)
 - BPIP.08.04.01.02.04.01- Usulan PBJ lainnya dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa Konsultansi dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Level 6)
 - BPIP.08.04.01.02.04.02- Pemilihan PBJ lainnya dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa Konsultansi dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Level 6)
- BPIP.08.04.02- Pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ (Level 3)
 - BPIP.08.04.02.01- Pembinaan SDM unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) (Level 4)
 - BPIP.08.04.02.02- Pembinaan pelaku PBJ (Level 4)
 - BPIP.08.04.02.03- Penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ (Level 4)
 - BPIP.08.04.02.04- Pengelolaan dan pengukuran kinerja PBJ (Level 4)
 - BPIP.08.04.02.05- Pengelolaan manajemen pengetahuan PBJ (Level 4)
 - BPIP.08.04.02.06- Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan (Level 4)
- BPIP.08.04.03- Pengelolaan pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (Level 3)
 - BPIP.08.04.03.01- Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) (Level 4)
- BPIP.08.04.04- Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis (Level 3)
 - BPIP.08.04.04.01- Bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi terkait PBJ (Level 4)
 - BPIP.08.04.04.01.01- Bimbingan teknis,

pendampingan dan konsultasi terkait
PBJ (Level 5)

BPIP.08.05- Pengelolaan barang milik negara (BMN) (Level 2)

BPIP.08.05.01- Penyusunan rencana kebutuhan dan
pengendalian serta pelaksanaan pengelolaan,
penyimpanan, penatausahaan, pengamanan,
penilaian, pendistribusian, inventarisasi,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
pembinaan, pengawasan, pelaporan BMN (Level 3)

(Level 4)
BPIP.08.05.01.01- Pengelolaan BMN

BPIP.08.05.01.01.01- Penggunaan BMN
(Level 5)

BPIP.08.05.01.01.01.01-
Penetapan status penggunaan
(Level 6)

BPIP.08.05.01.01.01.02- Alih
status BMN (Level 6)

BPIP.08.05.01.01.02- Pemindahtanganan
BMN (Level 5)

BPIP.08.05.01.01.02.01- Lelang
BMN (Level 6)

BPIP.08.05.01.01.02.02- Hibah
BMN (Level 6)

BPIP.08.05.01.01.03- Penghapusan BMN
(Level 5)

BPIP.08.05.01.01.04- Pengawasan dan
pengendalian BMN (Level 5)

BPIP.08.05.01.01.04.01- Pelaporan
pengawasan dalam pengawasan dan
pengendalian (wasdal) BMN (Level
6)

BPIP.08.05.01.01.04.02-
Pengendalian
penggunaan/peminjaman BMN
(Level 6)

BPIP.08.05.01.02- Penatausahaan BMN (Level
4)

BPIP.08.05.01.02.01- Perencanaan
kebutuhan BMN (Level 5)

BPIP.08.05.01.02.02- Pembukuan BMN
(Level 5)

BPIP.08.05.01.02.03- Inventarisasi BMN
(Level 5)

BPIP.08.05.01.02.04- Pelaporan BMN
(Level 5)

BPIP.08.05.01.02.04.01- Pelaporan
kuasa pengguna barang (KPB)

- penatausahaan BMN (Level 6)
- BPIP.08.05.01.02.04.02 Pelaporan pengguna barang (PB) (Level 6)
- BPIP.08.05.01.02.04.03- Pelaporan KPB pengelolaan BMN (Level 6)
 - BPIP.08.05.01.02.04.03.01 - Penyusunan laporan BMN (Level n)
 - BPIP.08.05.01.02.04.03.02 - Penyusunan laporan barang persediaan (Level n)
- BPIP.08.05.01.03- Layanan BMN (Level 4)
 - BPIP.08.05.01.03.01- Pengelolaan BMN unit kerja (Level 5)
 - BPIP.08.05.01.03.02- Penatausahaan BMN unit kerja (Level 5)
- BPIP.08.06- Pembinaan mental SDM (Level 2)
- BPIP.08.07- Pengelolaan karier dan kinerja SDM (Level 2)
 - BPIP.08.07.01- Perencanaan, penyusunan, penetapan kebutuhan, dan pengadaan SDM (Level 3)
 - BPIP.08.07.01.01- Penyusunan analisis beban kerja (Level 4)
 - BPIP.08.07.01.01.01- Pengumpulan data beban kerja (Level 5)
 - BPIP.08.07.01.01.02- Perhitungan kebutuhan pegawai (Level 5)
 - BPIP.08.07.01.02- Perencanaan SDM (Level 4)
 - BPIP.08.07.01.02.01- Penyusunan rencana kebutuhan SDM (Level 5)
 - BPIP.08.07.01.02.02- Pemrosesan *digital signature* (Level 5)
 - BPIP.08.07.01.03- Pengadaan SDM (Level 4)
 - BPIP.08.07.01.03.01- Pengadaan ASN (Level 5)
 - BPIP.08.07.01.03.01.01- Pengusulan formasi calon pegawai negeri sipil (PNS) (Level 6)
 - BPIP.08.07.01.03.01.02- Pengumuman pengadaan calon PNS (Level 6)
 - BPIP.08.07.01.03.01.03- Penerimaan berkas calon PNS (Level 6)
 - BPIP.08.07.01.03.01.04- Pelaksanaan ujian calon PNS (Level 6)

- 6)
 - BPIP.08.07.01.03.01.05-
Pemberkasan calon PNS (Level 6)
 - BPIP.08.07.01.03.01.06-
Pengangkatan calon PNS (Level 6)
 - BPIP.08.07.01.03.02- Pengadaan jabatan
pimpinan tinggi (JPT) (Level 5)
 - BPIP.08.07.01.04- Penempatan calon PNS
(Level 4)
 - BPIP.08.07.01.05- Penataan SDM (Level 4)
 - BPIP.08.07.02- Pelaksanaan pengembangan karir,
pola karir, promosi dan mutasi (Level 3)
 - BPIP.08.07.02.01- Pengembangan SDM (Level
4)
 - BPIP.08.07.02.01.01- Standardisasi
jabatan (Level 5)
 - BPIP.08.07.01.02.01.01-
Penyusunan kamus kompetensi
teknis struktural (Level 6)
 - BPIP.08.07.01.02.01.02-
Penyusunan standar kompetensi
teknis jabatan struktural, jabatan
administrasi, dan semua jabatan di
BPIP (Level 6)
 - BPIP.08.07.01.02.01.02.01
- Pengumpulan data (Level
n)
 - BPIP.08.07.01.02.01.02.02
- Identifikasi kompetensi
Teknis (Level n)
 - BPIP.08.07.01.02.01.02.03
- Penyusunan persyaratan
jabatan (Level n)
 - BPIP.08.07.01.02.01.02.04
- Standar kompetensi
teknis dan persyaratan
jabatan (Level n)
 - BPIP.08.07.01.02.01.02.05
- Penetapan standar
kompetensi teknis jabatan
struktural (Level n)
 - BPIP.08.07.01.02.02- Penilaian
kompetensi (Level 5)
 - BPIP.08.07.01.02.02.01-
Perencanaan dan Penilaian
kompetensi (Level 6)
 - BPIP.08.07.01.02.02.02- Persiapan
pelaksanaan penilaian kompetensi

(Level 6)
BPIP.08.07.01.02.02.03-
Pelaksanaan penilaian kompetensi

(Level 6)
BPIP.08.07.01.02.02.04- Pengisian
individual development plan (Level
6)

BPIP.08.07.01.02.02.05-
Pemantauan dan evaluasi penilaian
kompetensi (Level 6)

BPIP.08.07.01.02.02.05.01
- Evaluasi
penyelenggaraan penilaian
kompetensi (Level n)

BPIP.08.07.01.02.02.0
5.01.01- Penilaian
kelayakan organisasi
(Level n+1)

BPIP.08.07.01.02.02.0
5.01.02- Penilaian
kelayakan SDM (Level
n+1)

BPIP.08.07.01.02.02.0
5.01.03- Penilaian
kualifikasi tim
penilaian kompetensi
(Level n+1)

BPIP.08.07.01.02.02.0
5.01.04- Penilaian
kelayakan metode dan
pelaksanaan
kompetensi (Level
n+1)

BPIP.08.07.01.02.02.05.02
- Evaluasi penilaian
kompetensi (Level n)

BPIP.08.07.01.02.03- Penyusunan
rencana kebutuhan dan pengembangan
kompetensi (Level 5)

BPIP.08.07.01.06.03.01-
Penginventarisasian rencana
pengembangan kompetensi (Level 6)

BPIP.08.07.01.06.03.02- Verifikasi
rencana pengembangan
kompetensi (Level 6)

BPIP.08.07.01.06.03.03-
Pemvalidasian rencana kebutuhan
pengembangan kompetensi (Level

- 6)
- BPIP.08.07.01.02.04- Pelaksanaan pengembangan kompetensi (Level 5)
- BPIP.08.07.01.02.04.01- Pendidikan (Level 6)
- BPIP.08.07.01.02.04.01.01 - Pemantauan dan evaluasi pendidikan (Level n)
- BPIP.08.07.01.02.04.01.02 - Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi pendidikan (Level n)
- BPIP.08.07.01.02.04.01.03 - Peningkatan gelar akademik (Level n)
- BPIP.08.07.01.02.04.01.04 - Penyesuaian ijazah (Level n)
- BPIP.08.07.01.02.04.01.05 - Evaluasi hasil pelaksanaan peningkatan pendidikan (Level n)
- BPIP.08.07.01.02.04.02- Pelatihan (Level 6)
- BPIP.08.07.01.02.04.02.01 - Pelatihan klasikal (Level n)
- BPIP.08.07.01.02.04.02.02 - Pelatihan nonklasikal (Level n)
- BPIP.08.07.01.02.05- Evaluasi pengembangan kompetensi (Level 5)
- BPIP.08.07.01.02.06- Manajemen talenta ASN (Level 5)
- BPIP.08.07.01.02.06.01- Akuisisi talenta (Level 6)
- BPIP.08.07.01.02.06.02- Pengembangan talenta (Level 6)
- BPIP.08.07.01.02.06.03- Retensi talenta (Level 6)
- BPIP.08.07.01.02.06.04- Pemantauan dan evaluasi talenta (Level 6)
- BPIP.08.07.01.02.07- Pengelolaan pola karir (Level 5)
- BPIP.08.07.01.02.08- Pelaksanaan promosi (Level 5)
- BPIP.08.07.02.02- Pengelolaan mutasi SDM

(Level 4)

BPIP.08.07.02.02.01- Mutasi umum

(Level 5)

BPIP.08.07.02.02.01.01-

Pengaktifan kembali (Level 6)

BPIP.08.07.02.02.01.02-

Penempatan PNS (Level 6)

BPIP.08.07.02.02.01.03-

Pelantikan dan sumpah jabatan
(Level 6)

BPIP.08.07.02.02.01.04- Mutasi
pegawai (Level 6)

BPIP.08.07.02.02.01.04.01

- Perpindahan pegawai
dalam instansi (Level n)

BPIP.08.07.02.02.01.04.02

- Perpindahan pegawai
antarinstansi (eksternal-
internal) (Level n)

BPIP.08.07.02.02.01.04.03

- Perpindahan pegawai
antarinstansi (internal-
eksternal) (Level n)

BPIP.08.07.02.02.01.05-

Pemberhentian SDM (Level 6)

BPIP.08.07.02.02.01.05.01

- Pemberhentian
sementara dari PNS (Level
n)

BPIP.08.07.02.02.01.05.02

- Pemberhentian dari PNS
(Level n)

BPIP.08.07.02.02.01.0

5.02.01-

Pemberhentian

dengan hak pensiun
(Level n+1)

BPIP.08.07.02.02.01.0

5.02.02-

Pemberhentian tanpa
hak pensiun (Level
n+1)

BPIP.08.07.02.02.01.06- Kenaikan
pangkat (Level 6)

BPIP.08.07.02.02.01.07- Fasilitasi
ujian dinas (Level 6)

BPIP.08.07.02.02.02- Pengelolaan
jabatan fungsional dan mutasi (Level 5)

BPIP.08.07.03- pelaksanaan pengelolaan kinerja

SDM (Level 3)

BPIP.08.07.03.01- Perencanaan kinerja (Level 4)

BPIP.08.07.03.01.01- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (Level 5)

BPIP.08.07.03.01.02- Reviu kinerja (Level 5)

BPIP.08.07.03.01.03- Penetapan SKP (Level 5)

(Level 4) BPIP.08.07.03.02- Pemantauan kinerja

(Level 4) BPIP.08.07.03.03- Pembinaan kinerja

BPIP.08.07.03.03.01- Bimbingan kinerja (Level 5)

BPIP.08.07.03.03.02- Konseling kinerja (Level 5)

BPIP.08.07.03.03.03- Rekomendasi perubahan SKP (Level 5)

BPIP.08.07.03.04- Penilaian dan evaluasi kinerja (Level 4)

BPIP.08.07.03.05- Tindak lanjut (Level 4)

BPIP.08.07.03.06- Pengelolaan sistem informasi kinerja (Level 4)

BPIP.08.07.03.06.01- Pengelolaan pengguna/*user* (Level 5)

BPIP.08.07.03.06.02- Pengelolaan *helpdesk system* (Level 5)

BPIP.08.07.04- Pengelolaan administrasi penegakan kode etik dan kode perilaku, kesejahteraan perilaku serta disiplin (Level 3)

BPIP.08.07.04.01- Kartu pegawai (Level 4)

BPIP.08.07.04.01.01- Kartu pegawai baru (Level 5)

BPIP.08.07.04.01.02- Kartu pegawai hilang/salah data (Level 5)

BPIP.08.07.04.02- Penerbitan kartu istri/kartu suami baru/hilang/salah data (Level 4)

BPIP.08.07.04.03- Cuti di luar tanggungan negara (CLTN) (Level 4)

BPIP.08.07.04.03.01- Pengajuan baru CLTN (Level 5)

BPIP.08.07.04.03.02- Perpanjangan CLTN (Level 5)

BPIP.08.07.04.03.03- Pengaktifan CLTN (Level 5)

BPIP.08.07.04.04- Jaminan kesehatan utama (Jamkestama) (Level 4)

BPIP.08.07.04.05- Pembinaan disiplin (Level 4)

- BPIP.08.07.04.06- Perceraian (Level 4)
- BPIP.08.07.04.07- Penghargaan (Level 4)
 - BPIP.08.07.04.07.01- Penghargaan Satyalencana Karya Satya (Level 5)
 - BPIP.08.07.04.07.02- Penghargaan Tanda jasa lainnya (Level 5)
- BPIP.08.07.05- Pengelolaan data dan informasi (Level 3)
 - BPIP.08.07.05.01- Pengelolaan tata naskah pegawai (Level 4)
 - BPIP.08.07.05.02- Pelayanan informasi SDM (Level 4)
 - BPIP.08.07.05.02.01- Permintaan data dan informasi SDM (Level 5)
 - BPIP.08.07.05.02.02- Pemutakhiran informasi (Level 5)
 - BPIP.08.07.05.02.03- Evaluasi KIP (Level 5)
 - BPIP.08.07.05.02.04- Pelaksanaan survei layanan (Level 5)
 - BPIP.08.07.05.02.05- Perbaikan data kehadiran pegawai (Level 5)
 - BPIP.08.07.05.03- Layanan SDM (Level 4)
 - BPIP.08.07.05.03.01- Hukuman disiplin pegawai ringan (Level 5)
 - BPIP.08.07.05.03.02- Fasilitasi kenaikan gaji berkala (KGB) (Level 5)
 - BPIP.08.07.05.03.03- Pencatatan/perubahan data keluarga, kelahiran, pernikahan/perceraian (Level 5)
 - BPIP.08.07.05.03.04- Penetapan kecelakaan kerja, penetapan penyakit akibat kerja dan penetapan tewas (Level 5)
 - BPIP.08.07.05.03.05- Laporan pembayaran tidak sesuai (Level 5)
 - BPIP.08.07.05.03.06- Penerbitan surat izin cerai/keterangan perceraian (Level 5)
 - BPIP.08.07.05.03.07- Tugas belajar (Level 5)
- BPIP.08.07.06- Penyiapan administrasi penggajian dan tunjangan (Level 3)
- BPIP.08.07.07- pelaksanaan pengangkatan kepangkatan dan jabatan SDM (Level 3)
- BPIP.08.08- penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (Level 2)
 - BPIP.08.08.01- Pengordinasian dan penyusunan

perencanaan program dan anggaran biro (Level 3)

BPIP.08.08.01.01- Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran indikatif (Level 4)

BPIP.08.08.01.02- Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran definitif (Level 4)

BPIP.08.08.01.03- Penelaahan RKA-K/L (Level 4)

BPIP.08.08.01.04- Revisi anggaran (Level 4)

BPIP.08.08.01.05- Pelaporan capaian *output* (Level 4)

BPIP.08.08.01.06- Pelaporan kinerja (Level 4)

BPIP.08.08.02- Pengelolaan dan pelaporan keuangan biro (Level 3)

BPIP.08.08.02.01- Pengajuan TUP (Level 4)

BPIP.08.08.02.02- Pengelolaan kegiatan (Level 4)

BPIP.08.08.02.03- Pertanggungjawaban keuangan (Level 4)

BPIP.08.08.02.04- Pelaporan keuangan (Level 4)

BPIP.08.08.03- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtangan biro (Level 3)

BPIP.08.08.03.01- Manajemen SDM unit kerja (Level 4)

BPIP.08.08.03.02- Ketatausahaan dan kerumahtangaan (Level 4)

BPIP.08.08.03.02.01- Penerbitan surat bebas temuan (Level 5)

BPIP.08.08.03.02.02- Pengajuan ATK (Level 5)

BPIP.08.08.03.02.03- Fasilitasi rapat (Level 5)

BPIP.08.08.03.02.03.01- Fasilitasi penyediaan ruang rapat (Level 6)

BPIP.08.08.03.02.03.02- Fasilitasi konsumsi kegiatan (Level 6)

BPIP.08.08.03.02.03.03- Fasilitasi penyediaan narasumber (Level 6)

BPIP.08.08.03.02.03.04- Fasilitasi rapat dalam jaringan (Level 6)

BPIP.08.08.03.02.04- Permohonan perbaikan/perawatan dan penambahan serta pengembalian fasilitas (Level 5)

BPIP.08.08.03.03- Pelaksanaan arsip dan persuratan (Level 4)

BPIP.08.08.03.03.01- Pengelolaan surat masuk (Level 5)

BPIP.08.08.03.03.02- Pengelolaan surat

- keluar (Level 5)
- BPIP.08.08.03.03.03- Pemberkasan arsip aktif (Level 5)
- BPIP.08.08.03.03.04- Penataan dan penyimpanan arsip inaktif (Level 5)
- BPIP.08.08.03.03.05- Layanan peminjaman arsip (Level 5)
- BPIP.08.08.04- Organisasi dan ketatalaksanaan biro (Level 3)
 - BPIP.08.08.04,01- Penyusunan proses bisnis (Level 4)
 - (Level 4) BPIP.08.08.04,02- Penyusunan SOP
 - (Level 4) BPIP.08.08.04,03- Manajemen risiko
- BPIP.08.08.05- Pelaksanaan reformasi birokrasi biro (Level 3)
 - BPIP.08.08.05.01- Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja (Level 4)
 - BPIP.08.08.05.01.01- Penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi (Level 5)
 - BPIP.08.08.05.01.02- Dokumentasi pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 5)
 - BPIP.08.08.05.01.03- Pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 5)
 - BPIP.08.08.05.01.04- Pelaporan pelaksanaan PMPRB (Level 5)
 - BPIP.08.08.05.02- Pengelolaan SAKIP unit kerja (Level 4)
 - BPIP.08.08.05.03- Pengelolaan SPIP unit kerja (Level 4)
 - BPIP.08.08.05.04- Pengelolaan SPBE unit kerja (Level 4)
 - BPIP.08.08.05.05- Pengelolaan KIP (Level 4)
- BPIP.09- Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi (Level 1)
 - BPIP.09.01- Pelaksanaan urusan fasilitasi kerumahtanggan, keprotokolan, dan pengamanan Pimpinan (Level 2)
 - BPIP.09.01.01- Perencanaan, penyelenggaraan rapat, penyusunan risalah rapat, dan pendokumentasian hasil rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli (Level 3)
 - BPIP.09.01.01.01- Koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, penyelenggaraan dan materi rapat Pimpinan (Level 4)
 - BPIP.09.01.01.02- Penyusunan risalah dan pendokumentasian rapat yang dihadiri

- Pimpinan (Level 4)
- BPIP.09.01.01.03- Pengaturan jadwal kegiatan Pimpinan, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli (Level 4)
- BPIP.09.01.02- Pengelolaan keprotokolan dan pengamanan Pimpinan (Level 3)
 - BPIP.09.01.02.01- Penjadwalan agenda pimpinan (Level 4)
 - BPIP.09.01.02.02- Protokol pimpinan dan hubungan antar lembaga (Level 4)
 - BPIP.09.01.02.02.01- Keprotokolan Pimpinan (Level 5)
 - BPIP.09.01.02.02.01.01- Pelaksanaan upacara kedinasan (Level 6)
 - BPIP.09.01.02.02.01.02- Penerimaan tamu pimpinan (Level 6)
 - BPIP.09.01.02.02.01.03- Pengolahan bahan tayang dan laporan rapat Pimpinan (Level 6)
 - BPIP.09.01.02.02.01.04- Penyelenggaraan rapat Pimpinan (Level 6)
 - BPIP.09.01.02.02.02- Hubungan antarlembaga (Level 5)
 - BPIP.09.01.02.02.02.01- Pendampingan RDP dengan DPR RI (Level 6)
 - BPIP.09.01.02.02.02.02- Pendampingan kunjungan kerja luar kota pimpinan (Level 6)
 - BPIP.09.01.02.03- Pengordinasian sekretaris Pimpinan (Level 4)
- BPIP.09.01.03- Pengoordinasian penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu Pimpinan (Level 3)
 - BPIP.09.01.03.01- Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu Pimpinan (Level 4)
- BPIP.09.02- Pengelolaan hubungan masyarakat (Level 2)
 - BPIP.09.02.01- Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (Level 3)
 - BPIP.09.02.01.01- Penyusunan dan pengelolaan strategi komunikasi umum (Level 4)
 - BPIP.09.02.01.01.01- Penyusunan strategi komunikasi umum (Level 5)
 - BPIP.09.02.01.01.02- Pelaksanaan implmentasi strategi komunikasi publik

- internal (Level 5)
- BPIP.09.02.01.01.03- Pelaksanaan implmentasi strategi komunikasi publik eksternal (Level 5)
- BPIP.09.02.01.02- Penyusunan dan pengelolaan strategi komunikasi krisis (Level 4)
- BPIP.09.02.01.03- Pelaksanaan hubungan media (Level 4)
 - BPIP.09.02.01.03.01- Pengoordinasian pelaksanaan peliputan kegiatan BPIP (Level 5)
 - BPIP.09.02.01.03.02- Pengoordinasian perencanaan, penyiapan bahan, dan publikasi pemberitaan Pimpinan (Level 5)
 - BPIP.09.02.01.03.03- Pengoordinasian pelaksanaan wawancara, peliputan kunjungan pers dan jumpa pers (Level 5)
 - BPIP.09.02.01.03.04- Pengoordinasian *media center* (Level 5)
 - BPIP.09.02.01.03.05- Pengoordinasian monitoring dan analisis pemberitaan media dan opini publik terhadap BPIP (Level 5)
- BPIP.09.02.02- Pengelolaan pelayanan publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (Level 3)
 - BPIP.09.02.02.01- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik (Level 4)
 - BPIP.09.02.02.02- Penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria pelayanan publik (Level 4)
 - BPIP.09.02.02.03- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola pelayanan publik (Level 4)
 - BPIP.09.02.02.04- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola pelayanan publik (Level 4)
 - BPIP.09.02.02.05- Pengelolaan PPID (Level 4)
 - BPIP.09.02.02.05.01- Pengelolaan permohonan pelayanan informasi publik (Level 5)
 - BPIP.09.02.02.05.02- Pendokumentasian informasi publik (Level 5)
 - BPIP.09.02.02.05.03- Penyusunan daftar informasi publik (DIP) (Level 5)
 - BPIP.09.02.02.05.04- Pemutakhiran DIP

- (Level 5)
- BPIP.09.02.02.05.05- Pengelolaan keberatan atas informasi publik (Level 5)
- BPIP.09.02.02.05.06- Penanganan sengketa informasi publik (Level 5)
- BPIP.09.02.02.05.07- Pemeliharaan konten portal PPID (Level 5)
- BPIP.09.02.02.05.08- Pengaduan PPID (Level 5)
- BPIP.09.02.02.05.09- Pengelolaan laporan tahunan PPID (Level 5)
- BPIP.09.02.02.06- Inovasi pelayanan publik (Level 4)
- BPIP.09.02.02.07- Pengelolaan survei kepuasan masyarakat (SKM) (Level 4)
 - BPIP.09.02.02.07.01- Pengelolaan survei pemilik layanan internal unit kerja (Level 5)
 - BPIP.09.02.02.07.02- Pengelolaan SKM(Level 5)
- BPIP.09.02.02.08- Pengelolaan forum komunikasi publik (FKP) (Level 4)
- BPIP.09.02.02.09- Pengordinasian pelaksanaan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik (Level 4)
- BPIP.09.02.03- Pengelolaan publikasi dan dokumentasi (Level 3)
 - BPIP.09.02.03.01- Pengelolaan sosial media dan e-publikasi (Level 4)
 - BPIP.09.02.03.02- Pengelolaan konten media elektronik resmi BPIP (Level 4)
 - BPIP.09.02.03.03- Pelaksanaan pameran dan *event* (Level 4)
- BPIP.09.02.04- Pengelolaan pelaksanaan hubungan masyarakat (Level 3)
 - BPIP.09.02.04.01- Pengelolaan pengaduan masyarakat *offline* dan kanal BPIP (Level 4)
 - BPIP.09.02.04.02- Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) (Level 4)
 - BPIP.09.02.04.03- Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) (Level 4)
 - BPIP.09.02.04.04- Pengordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) (Level 4)

BPIP.09.03- Pengaduan masyarakat (Level 2)

BPIP.09.03.01-Penerimaan pengaduan (Level 3)

BPIP.09.03.02-Penanganan pengaduan (Level 3)

BPIP.09.03.03-Dokumentasi dan pelaporan pengaduan (Level 3)

BPIP.09.04- Pengelolaan pelayanan administrasi (Level 2)

BPIP.09.04.01- Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Utama, Deputi, dan Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi (Level 3)

BPIP.09.04.01.01- Pengordinasian dan penyusunan perencanaan program dan anggaran biro/deputi (Level 4)

BPIP.09.04.01.01.01- Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran indikatif (Level 5)

BPIP.09.04.01.01.02- Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran definitif (Level 5)

BPIP.09.04.01.01.03- Penelaahan RKA-K/L (Level 5)

BPIP.09.04.01.01.04- Revisi anggaran (Level 5)

BPIP.09.04.01.01.05- Pelaporan capaian *output* (Level 5)

BPIP.09.04.01.01.06- Pelaporan kinerja (Level 5)

BPIP.09.04.01.02- Pengelolaan dan pelaporan keuangan biro/deputi (Level 4)

BPIP.09.04.01.02.01- Pengajuan TUP (Level 5)

BPIP.09.04.01.02.02- Pengelolaan kegiatan (Level 5)

BPIP.09.04.01.02.03- Pertanggungjawaban keuangan (Level 5)

BPIP.09.04.01.02.04- Pelaporan keuangan (Level 5)

BPIP.09.04.01.02.05- Manajemen SDM unit kerja (Level 5)

BPIP.09.04.01.03- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro /deputi (Level 4)

BPIP.09.04.01.03.01- Ketatausahaan dan kerumahtanggaan (Level 5)

BPIP.09.04.01.03.01.01- Penerbitan surat bebas temuan (Level 6)

BPIP.09.04.01.03.01.02-

- Pengajuan ATK (Level 6)
- BPIP.09.04.01.03.01.03-
- Fasilitasi rapat (Level 6)
 - BPIP.09.04.01.03.01.03.01
 - Fasilitasi Penyediaan ruang rapat (Level n)
 - BPIP.09.04.01.03.01.03.02
 - Fasilitasi konsumsi kegiatan (Level n)
 - BPIP.09.04.01.03.01.03.03
 - Fasilitasi penyediaan narasumber (Level n)
 - BPIP.09.04.01.03.01.03.04
 - Fasilitasi rapat dalam jaringan (Level n)
- BPIP.09.04.01.03.01.04-
- Permohonan perbaikan/ perawatan dan penambahan serta pengembalian fasilitas (Level 6)
- BPIP.09.04.01.03.02- Pelaksanaan arsip dan persuratan (Level 5)
 - BPIP.09.04.01.03.02.01-
 - Pengelolaan surat masuk (Level 6)
 - BPIP.09.04.01.03.02.02-
 - Pengelolaan surat keluar (Level 6)
 - BPIP.09.04.01.03.02.03-
 - Pemberkasan arsip aktif (Level 6)
 - BPIP.09.04.01.03.02.04-
 - Penataan dan penyimpanan arsip inaktif (Level 6)
 - BPIP.09.04.01.03.02.05-
 - Layanan peminjaman arsip (Level 6)
- BPIP.09.04.01.04- organisasi dan ketatalaksanaan biro (Level 4)
 - BPIP.09.04.01.04.01- Penyusunan proses bisnis (Level 5)
 - BPIP.09.04.01.04.02- Penyusunan SOP (Level 5)
 - BPIP.09.04.01.04.03- Manajemen risiko (Level 5)
- BPIP.09.04.01.05- Pelaksanaan reformasi birokrasi biro (Level 4)
 - BPIP.09.04.01.05.01- Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja (Level 5)
 - BPIP.09.04.01.05.01.01-

- Penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi (Level 6)
BPIP.09.04.01.05.01.02-
- Dokumentasi pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 6)
BPIP.09.04.01.05.01.03-
- Pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 6)
BPIP.09.04.01.05.01.04-
- Pelaporan pelaksanaan PMPRB (Level 6)
BPIP.09.04.01.05.02- Pengelolaan SAKIP unit kerja (Level 5)
- BPIP.09.04.01.05.03- Pengelolaan SPIP unit kerja (Level 5)
- BPIP.09.04.01.05.04- Pengelolaan SPBE unit kerja (Level 5)
- BPIP.09.04.01.05.05- Pengelolaan KIP (Level 5)
- BPIP.09.04.01.06- Pelaksanaan pelaporan (Level 4)
- BPIP.09.04.01.06.01- Pengordinasian bahan rapat terbatas dan pleno (Level 5)
- BPIP.09.04.01.06.02- Pengordinasian pelaksanaan SKM atas layanan BPIP pada lingkungan deputi (Level 5)
- BPIP.09.04.02- Pengelolaan arsip (Level 3)
- BPIP.09.04.02.01- Penyusunan kebijakan kearsipan (Level 4)
- BPIP.09.04.02.02- Pengelolaan arsip dinamis (Level 4)
- BPIP.09.04.02.02.01- Penciptaan arsip (Level 5)
- BPIP.09.04.02.02.01.01- Pembuatan arsip (Level 6)
- BPIP.09.04.02.02.01.02- Penerimaan arsip (Level 6)
- BPIP.09.04.02.02.02- Pemeliharaan arsip (Level 5)
- BPIP.09.04.02.02.02.01- Pemberkasan arsip aktif (Level 6)
- BPIP.09.04.02.02.02.02- Penyimpanan arsip (Level 6)
- BPIP.09.04.02.02.02.03- Alih media arsip (Level 6)
- BPIP.09.04.02.02.02.04- Pemeliharaan arsip vital (Level 6)
- BPIP.09.04.02.02.02.05- Pemberkasaan arsip terjaga

- (Level 6)
- BPIP.09.04.02.02.02.06-
Penataan arsip inaktif (Level 6)
- BPIP.09.04.02.02.03- Penggunaan arsip
(Level 5)
- BPIP.09.04.02.02.03.01-
Peminjaman arsip (Level 6)
- BPIP.09.04.02.02.03.02-
Penyajian arsip (Level 6)
- BPIP.09.04.02.02.04- Penyusutan arsip
(Level 5)
- BPIP.09.04.02.02.04.01-
Pemindahan arsip inaktif (Level
6)
- BPIP.09.04.02.02.04.02-
Pemusnahan arsip (Level 6)
- BPIP.09.04.02.02.04.03-
Penyerahan arsip statis (Level 6)
- BPIP.09.04.02.03- Pembinaan kearsipan (Level
4)
- BPIP.09.04.02.03.01- Perencanaan
kegiatan kearsipan (Level 5)
- BPIP.09.04.02.03.02- Bimbingan,
fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
kearsipan (Level 5)
- BPIP.09.04.02.03.03- Sosialisasi
kearsipan (Level 5)
- BPIP.09.04.02.03.04- Pendidikan dan
pelatihan kearsipan (Level 5)
- BPIP.09.04.02.03.05- Supervisi dan
evaluasi kearsipan (Level 5)
- BPIP.09.04.02.04- Pengawasan arsip
(Level 4)
- BPIP.09.04.03-Perizinan perjalanan dinas luar negeri
(Level 3)
- BPIP.10- Biro Pengawasan Internal (Level 1)
- BPIP.10.01- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan
intern (Level 2)
- BPIP.10.01.01- Penyusunan pedoman teknis
pengawasan (Level 3)
- BPIP.10.01.02- Penyusunan SOP kegiatan
pengawasan (Level 3)
- BPIP.10.01.03- Penyusunan program kerja
pengawasan tahunan (PKPT) (Level 3)
- BPIP.10.02- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap
kinerja dan keuangan (Level 2)
- BPIP.10.02.01- Pelaksanaan audit (Level 3)
- BPIP.10.02.02- Pelaksanaan reviu (Level 3)
- BPIP.10.02.03- Pelaksanaan pemantauan (Level 3)

- BPIP.10.02.04- Pelaksanaan evaluasi (Level 3)
- BPIP.10.02.05- Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya (Level 3)
- BPIP.10.03- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan (Level 2)
 - BPIP.10.03.01- Pelaksanaan audit tujuan tertentu (Level 3)
 - BPIP.10.03.02- Pelaksanaan reviu tujuan tertentu (Level 3)
 - BPIP.10.03.03- Pelaksanaan pemantauan tujuan tertentu (Level 3)
 - BPIP.10.03.04- Pelaksanaan evaluasi tujuan tertentu (Level 3)
 - BPIP.10.03.05- Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya untuk tujuan tertentu (Level 3)
- BPIP.10.04- Penyusunan laporan hasil pengawasan (Level 2)
- BPIP.10.05- Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Pengawasan Internal (Level 2)
 - BPIP.10.05.01- Pengordinasian dan penyusunan perencanaan program dan anggaran biro (Level 3)
 - BPIP.10.05.01.01- Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran indikatif (Level 4)
 - BPIP.10.05.01.02- Penyusunan RKA-K/L pagu anggran definitif (Level 4)
 - BPIP.10.05.01.03- Penelaahan RKA-K/L (Level 4)
 - BPIP.10.05.01.04- Revisi anggaran (Level 4)
 - BPIP.10.05.01.05- Pelaporan capaian *output* (Level 4)
 - BPIP.10.05.01.06- Pelaporan kinerja (Level 4)
 - BPIP.10.05.02- Pengelolaan dan pelaporan keuangan biro (Level 3)
 - BPIP.10.05.02.01- Pengajuan TUP (Level 4)
 - BPIP.10.05.02.02- Pengelolaan kegiatan (Level 4)
 - BPIP.10.05.02.03- Pertanggungjawaban keuangan (Level 4)
 - BPIP.10.05.02.04- Pelaporan keuangan (Level 4)
 - BPIP.10.05.03- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan biro (Level 3)
 - BPIP.10.05.03.01- Manajemen SDM unit kerja (Level 4)
 - BPIP.10.05.03.02- Ketatausahaan dan kerumahtangaan (Level 4)
 - BPIP.10.05.03.02.01- Penerbitan surat bebas temuan (Level 5)
 - BPIP.10.05.03.02.02- Pengajuan ATK

- (Level 5)
- BPIP.10.05.03.02.03- Fasilitasi rapat (Level 5)
 - BPIP.10.05.03.02.03.01- Fasilitasi penyediaan ruang rapat (Level 6)
 - BPIP.10.05.03.02.03.02- Fasilitasi konsumsi kegiatan (Level 6)
 - BPIP.10.05.03.02.03.03- Fasilitasi penyediaan narasumber (Level 6)
 - BPIP.10.05.03.02.03.04- Fasilitasi rapat dalam jaringan (Level 6)
 - BPIP.10.05.03.02.04- Permohonan perbaikan/perawatan dan penambahan serta pengembalian fasilitas (Level 5)
- BPIP.10.05.03.03- Pelaksanaan arsip dan persuratan (Level 4)
 - BPIP.10.05.03.03.01- Pengelolaan surat masuk (Level 5)
 - BPIP.10.05.03.03.02- Pengelolaan surat keluar (Level 5)
 - BPIP.10.05.03.03.03- Pemberkasan arsip aktif (Level 5)
 - BPIP.10.05.03.03.04- Penataan dan penyimpanan arsip inaktif (Level 5)
 - BPIP.10.05.03.03.05- Layanan peminjaman arsip (Level 5)
- BPIP.10.05.04- Organisasi dan ketatalaksanaan biro (Level 3)
 - BPIP.10.05.04.01- Penyusunan proses bisnis (Level 4)
 - (Level 4) BPIP.10.05.04.02- Penyusunan SOP
 - (Level 4) BPIP.10.05.04.03- Manajemen risiko
- BPIP.10.05.05- Pelaksanaan reformasi birokrasi biro (Level 3)
 - BPIP.10.05.05.01- Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja (Level 4)
 - BPIP.10.05.05.01.01- Penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi (Level 5)
 - BPIP.10.05.05.01.02- Dokumentasi pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 5)
 - BPIP.10.05.05.01.03- Pelaporan

- pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 5)
- BPIP.10.05.05.01.04- Pelaporan pelaksanaan PMPRB (Level 5)
- BPIP.10.05.05.02- Pengelolaan SAKIP unit kerja (Level 4)
- BPIP.10.05.05.03- Pengelolaan SPIP unit kerja (Level 4)
- BPIP.10.05.05.04- Pengelolaan SPBE unit kerja (Level 4)
- BPIP.10.05.05.05- Pengelolaan KIP (Level 4)
- BPIP.11- Pengembangan sistem informasi (Level 1)
- BPIP.11.01- Pengembangan sistem informasi (Level 2)
 - BPIP.11.01.01- Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE BPIP (Level 3)
 - BPIP.11.01.01- Pengembangan arsitektur proses bisnis (Level 4)
 - BPIP.11.01.02- Pengembangan arsitektur layanan (Level 4)
 - BPIP.11.01.03- Pengembangan arsitektur data dan informasi (Level 4)
 - BPIP.11.01.04- Pengembangan arsitektur aplikasi (Level 4)
 - BPIP.11.01.05- pengembangan arsitektur infrastruktur (Level 4)
 - BPIP.11.01.06- Pengembangan arsitektur keamanan (Level 4)
 - BPIP.11.01.07- Penyusunan peta rencana SPBE BPIP (Level 4)
 - BPIP.11.01.02- Penyusunan kebijakan SPBE BPIP (Level 3)
 - BPIP.11.01.03- Evaluasi dan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) BPIP (Level 3)
 - BPIP.11.01.03.01- Audit TIK BPIP (Level 4)
 - BPIP.11.01.03.02- Evaluasi SPBE BPIP (Level 4)
 - BPIP.11.01.04- Manajemen SPBE (Level 3)
 - BPIP.11.01.04.01- Manajemen risiko (Level 4)
 - BPIP.11.01.04.02- Manajemen pengetahuan (Level 4)
 - BPIP.11.01.04.03- Manajemen data (Level 4)
 - BPIP.11.01.04.04- Manajemen perubahan (Level 4)
 - BPIP.11.01.04.05- Manajemen kompetensi SDM (Level 4)
 - BPIP.11.01.04.06- Manajemen keamanan informasi (Level 4)
 - BPIP.11.01.04.07- Manajemen aset TIK

(Level 4)

- BPIP.11.01.04.08- Manajemen layanan (Level 4)
- BPIP.11.01.05- Layanan SPBE (Level 3)
 - BPIP.11.01.05.01- Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik (Level 4)
 - BPIP.11.01.05.02- Layanan publik berbasis elektronik (Level 4)
- BPIP.11.02- Pengembangan tata kelola SPBE (Level 2)
 - BPIP.11.02.01- Perencanaan pengembangan sistem informasi (SI) (Level 3)
 - BPIP.11.02.02- Analisis pengembangan SI (Level 3)
 - BPIP.11.02.03- Desain pengembangan SI (Level 3)
 - BPIP.11.02.04- Implementasi SI (Level 3)
 - BPIP.11.02.05- Pemeliharaan SI (Level 3)
- BPIP.11.03- Pengembangan dan SI (Level 2)
 - BPIP.11.03.01- Pengembangan dan pengelolaan satu data BPIP (Level 3)
 - BPIP.11.03.02- Pengembangan dan pengelolaan *analytics and business intelligence* (Level 3)
- BPIP.11.04- Pengembangan, pengelolaan data, dan informasi (Level 2)
 - BPIP.11.04.01- Perencanaan infrastruktur teknologi informasi (TI) (Level 3)
 - BPIP.11.04.02- Pengembangan dan pengujian infrastruktur TI (Level 3)
 - BPIP.11.04.03- Perilisan dan penerapan infrastruktur TI (Level 3)
 - BPIP.11.04.04- Pengoperasian dan monitoring serta evaluasi infrastruktur TI (Level 3)
 - BPIP.11.04.05- Program dan penerapan teknologi informasi (Level 3)
 - BPIP.11.04.05.01- Pengelolaan layanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (PSrE) (Level 4)
 - BPIP.11.04.05.01.01- Pengelolaan dokumen prosedur PSrE (Level 5)
 - BPIP.11.04.05.01.02- Pengelolaan *log* transaksi dan sistem PSrE (Level 5)
 - BPIP.11.04.05.01.03- Pengelolaan perangkat PSrE (Level 5)
 - BPIP.11.04.05.01.04- Pengelolaan hak akses personil PSrE (Level 5)
 - BPIP.11.04.05.01.05- Pengelolaan insiden dan keberlangsungan bisnis PSrE (Level 5)
 - BPIP.11.04.05.01.06- Pengelolaan sistem PSrE (Level 5)
 - BPIP.11.04.05.01- Pengelolaan layanan *Cloud*

and Data Center (Level 4)

- BPIP.11.04.05.01.01- Pengelolaan dokumen terkait layanan (Level 5)
- BPIP.11.04.05.01.02- Monitoring layanan (Level 5)
- BPIP.11.04.05.01.03- Pengelolaan *log* perangkat layanan (Level 5)
- BPIP.11.04.05.01.04- Pengelolaan perangkat pendukung (Level 5)
- BPIP.11.04.05.01.05- Pengelolaan hak akses (Level 5)
- BPIP.11.04.05.01.06- Pengelolaan penanganan insiden (Level 5)
- BPIP.11.04.05.01.07- Pengelolaan perangkat utama (Level 5)
- BPIP.11.04.06- Pengoperasian layanan TI (Level 3)
- BPIP.11.04.06.01- Pengelolaan *event* (Level 4)
- BPIP.11.04.06.02- Pengelolaan insiden (Level 4)
- BPIP.11.04.06.03- Pengelolaan masalah (Level 4)
- BPIP.11.04.06.04- Pemenuhan permintaan (Level 4)
- BPIP.11.04.06.05- Pengelolaan akses (Level 4)
- BPIP.11.05- Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi (Level 2)
- BPIP.11.05.01- Pengoordinasian dan penyusunan perencanaan program dan anggaran biro (Level 3)
 - BPIP.11.05.01.01- Penyusunan RKA-K/L Pagu anggaran indikatif (Level 4)
 - BPIP.11.05.01.02- Penyusunan RKA-K/L pagu (Level 4)
 - BPIP.11.05.01.03- Penelaahan RKA-K/L (Level 4)
 - BPIP.11.05.01.04- Revisi anggaran (Level 4)
 - BPIP.11.05.01.05- Pelaporan capaian *output* (Level 4)
 - BPIP.11.05.01.06- Pelaporan kinerja (Level 4)
- BPIP.11.05.02- Pengelolaan dan pelaporan keuangan biro (Level 3)
 - BPIP.11.05.02.01- Pengajuan TUP (Level 4)
 - BPIP.11.05.02.02- Pengelolaan kegiatan (Level 4)
 - BPIP.11.05.02.03- Pertanggungjawaban keuangan (Level 4)
 - BPIP.11.05.02.04- Pelaporan keuangan (Level 4)
- BPIP.11.05.03- Pelaksanaan urusan ketatausahaan

dan kerumahtanggaan biro (Level 3)

BPIP.11.05.03.01- Manajemen SDM unit kerja (Level 4)

BPIP.11.05.03.02- Ketatausahaan dan kerumahtanggaan (Level 4)

BPIP.11.05.03.02.01- Penerbitan surat bebas temuan (Level 5)

BPIP.11.05.03.02.02- Pengajuan ATK (Level 5)

BPIP.11.05.03.02.03- Fasilitasi rapat (Level 5)

BPIP.11.05.03.02.03.01- Fasilitasi penyediaan ruang rapat (Level 6)

BPIP.11.05.03.02.03.02- Fasilitasi konsumsi kegiatan (Level 6)

BPIP.11.05.03.02.03.03- Fasilitasi Penyediaan narasumber (Level 6)

BPIP.11.05.03.02.03.04- Fasilitasi rapat tautan rapat dalam jaringan (Level 6)

BPIP.11.05.03.03- Pelaksanaan arsip dan persuratan (Level 4)

BPIP.11.05.03.03.01- permohonan perbaikan dan/atau penambahan fasilitas (Level 5)

BPIP.11.05.03.03.02- Pengelolaan surat masuk (Level 5)

BPIP.11.05.03.03.03- Pengelolaan surat keluar (Level 5)

BPIP.11.05.03.03.04- Pemberkasan arsip aktif (Level 5)

BPIP.11.05.03.03.05- Penataan dan penyimpanan arsip inaktif (Level 5)

BPIP.11.05.03.03.06- Layanan peminjaman arsip (Level 5)

BPIP.11.05.04- Organisasi dan ketatalaksanaan biro (Level 3)

BPIP.11.05.04.01- Penyusunan proses bisnis (Level 4)

BPIP.11.05.04.02- Penyusunan SOP (Level 4)

BPIP.11.05.04.03- Manajemen risiko (Level 4)

BPIP.11.05.04.04- Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja (Level 4)

BPIP.11.05.05- Pelaksanaan reformasi birokrasi biro (Level 3)

BPIP.11.05.05.01- Pengelolaan reformasi

birokrasi unit kerja (Level 4)

BPIP.11.05.05.01.01- Penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi (Level 5)

BPIP.11.05.05.01.02- Dokumentasi pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 5)

BPIP.11.05.05.01.03- Pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi (Level 5)

BPIP.11.05.05.01.04- Pelaporan pelaksanaan PMPRB (Level 5)

BPIP.11.05.05.02- Pengelolaan SAKIP unit kerja (Level 4)

BPIP.11.05.05.03- Pengelolaan SPIP unit kerja (Level 4)

BPIP.11.05.05.04- Pengelolaan SPBE unit kerja (Level 4)

BPIP.11.05.05.05- Pengelolaan KIP (Level 4)

E. PEMETAAN PROSES BISNIS TERHADAP UNIT ORGANISASI DAN UNIT KERJA

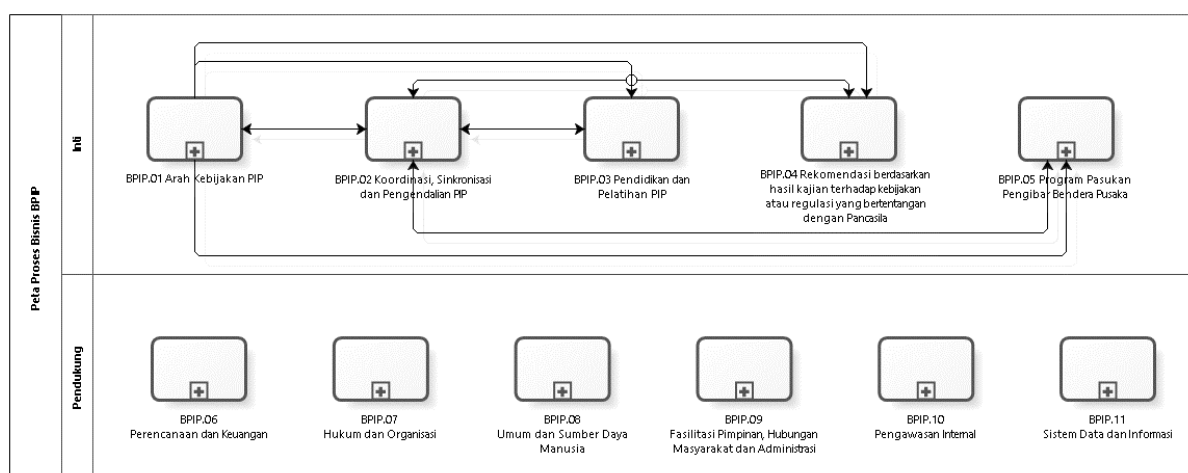
Level 0	Level 1	Unit Organisasi
BPIP.0		BPIP
	BPIP.01- Arah kebijakan PIP	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
	BPIP.02- Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP	- Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan - Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
	BPIP.03- Pendidikan dan pelatihan PIP	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
	BPIP.04- Rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
	BPIP.05- Program Paskibraka	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Level 2	Unit Kerja
BPIP.01.01-Perumusan arah kebijakan PIP	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (DPKPIP)
BPIP.01.02- Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan PIP	DPKPIP
BPIP.01.03-Pengaturan PIP	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (DPIPIP) (BPIP.01.03.01 & BPIP.01.03.02) DPKPIP (BPIP.01.03.03 & BPIP.01.03.04)
BPIP.01.04- Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (DPMPPIP)
BPIP.02.01- Koordinasi dan sinkronisasi PIP	Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama (DHALKS)
BPIP.02.02- Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PIP	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan (DJP) BPIP.02.02.01, BPIP.02.02.02, & BPIP.02.02.06) Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi (DSK) BPIP.02.02.03 & BPIP.02.02.04

Level 2	Unit Kerja
	DHALKS (BPIP.02.02.05)
BPIP.02.03- Pengendalian PIP	Direktorat Pengendalian (DP) (BPIP.02.03.01 & BPIP.02.03.02)
BPIP.02.04- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP	Direktorat Evaluasi (DE)
BPIP.03.01- Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan	Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (DSKPP)
BPIP.03.02- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan (DPPP) (BPIP.03.02.01) Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (DPeIPP) (BPIP.03.02.02)
BPIP.04.01- Advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi	Direktorat Advokasi (DA)
BPIP.04.02- Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila	Direktorat Analisis dan Penyelarasan (DAP) (BPIP.04.02.01) & Direktorat Penyusunan Rekomendasi, Kebijakan, dan Regulasi (DPRKR) (BPIP.04.02.03)
BPIP.05.01- Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	DP
BPIP.05.02- Pemberdayaan Purnapaskibraka	DP
BPIP.05.03- Pengelolaan Bendera Pusaka	DP
BPIP.05.04- Pemantauan dan evaluasi Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	DP

F. ARSITEKTUR PETA PROSES BISNIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategis serta struktur organisasi dan tata kerja BPIP menjalankan 5 (lima) proses bisnis utama, yaitu:

- a. BPIP.01-Arah Kebijakan PIP;
- b. BPIP.02-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian PIP;
- c. BPIP.03-Pendidikan dan Pelatihan PIP;
- d. BPIP.04-Rekomendasi Berdasarkan Hasil Kajian terhadap Kebijakan atau Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila kepada Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya; dan
- e. BPIP.05-Program Paskibraka.

Kelima proses bisnis utama tersebut didukung dengan 6 (enam) proses bisnis pendukung, yaitu:

- a. BPIP.06-Perencanaan dan Keuangan;
- b. BPIP.07-Hukum dan Organisasi;
- c. BPIP.08-Umum dan Sumber Daya Manusia;
- d. BPIP.09-Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;
- e. BPIP.10-Pengawasan Internal; dan
- f. BPIP.11-Pengembangan Sistem Data dan Informasi.

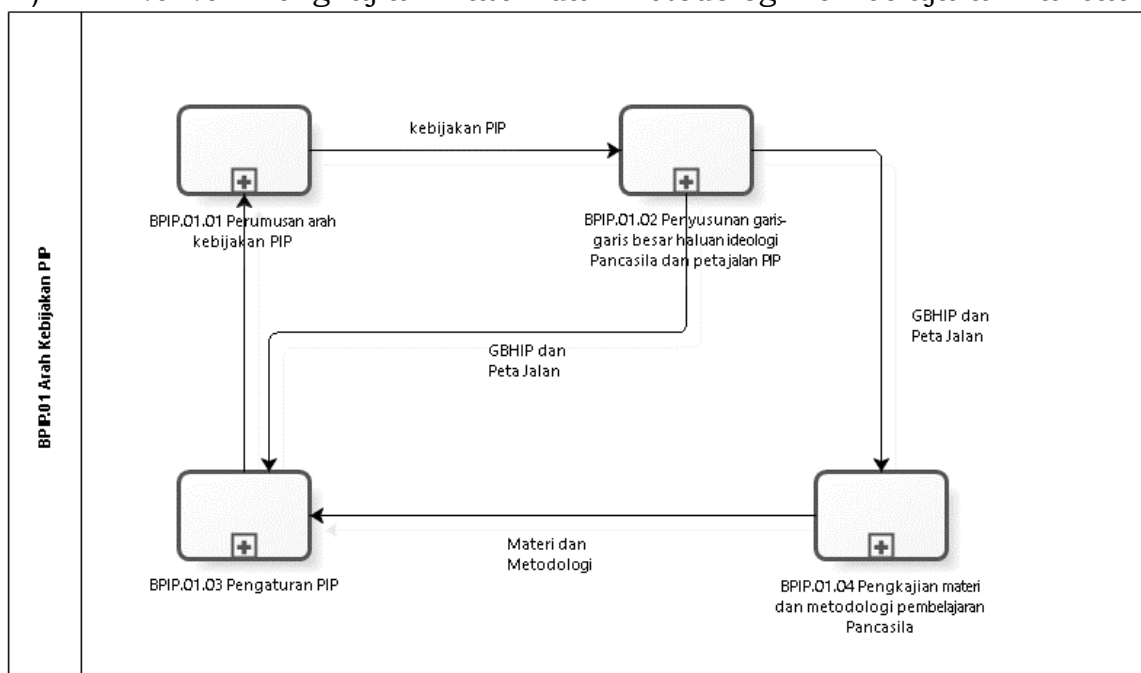
PROSES BISNIS UTAMA

a. Deputi Bidang Pengkajian Materi

Level 1 BPIP.01-Arah Kebijakan PIP

Level 2:

- 1) BPIP.01.01-Perumusan Arah Kebijakan PIP;
- 2) BPIP.01.02- Penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila dan Peta Jalan PIP;
- 3) BPIP.01.03-Pengaturan PIP; dan
- 4) BPIP.01.04-Pengkajian Materi dan Metodologi Pembelajaran Pancasila.



Deskripsi Proses Bisnis Arah Kebijakan PIP:

Proses bisnis Arah Kebijakan PIP mencakup proses-proses yang dijalankan BPIP dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan PIP sebagai bentuk dukungan kebijakan kepada stakeholders internal dan eksternal BPIP. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke

dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

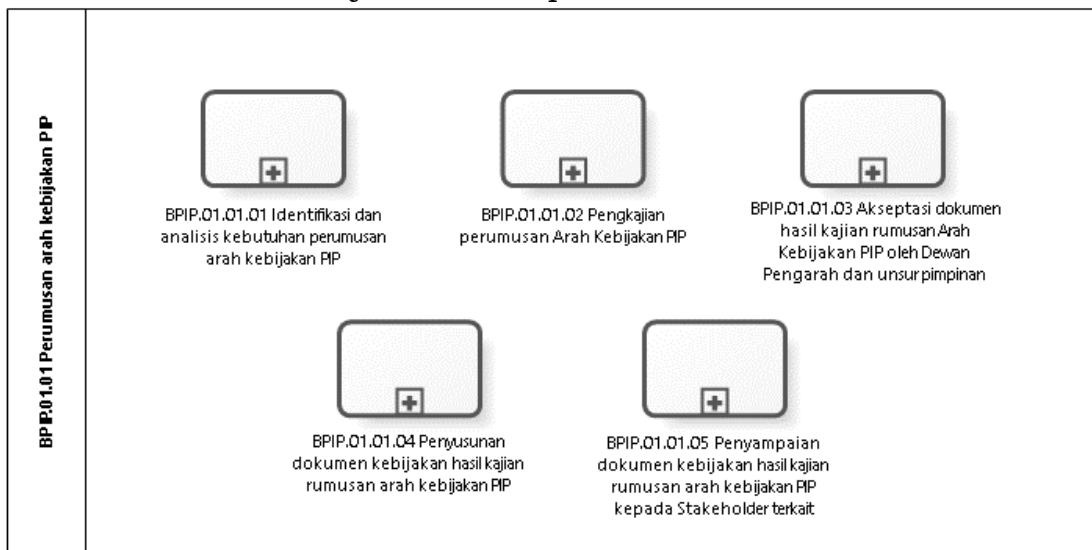
- 1) BPIP.01.01-Perumusan Arah Kebijakan PIP;
- 2) BPIP.01.02- Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila dan Peta Jalan PIP;
- 3) BPIP.01.03-Pengaturan PIP; dan
- 4) BPIP.01.04-Pengkajian Materi dan Metodologi Pembelajaran Pancasila.

- 1) Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (DPKPIP)

Level 2 BPIP.01.01-Perumusan arah kebijakan PIP

Level 3:

- a) BPIP.01.01.01-Identifikasi dan analisis kebutuhan perumusan arah kebijakan PIP;
- b) BPIP.01.01.02-Pengkajian perumusan arah kebijakan PIP;
- c) BPIP.01.01.03-Akseptasi dokumen hasil kajian rumusan arah kebijakan PIP oleh Dewan Pengarah dan unsur pimpinan;
- d) BPIP.01.01.04-Penyusunan dokumen kebijakan hasil kajian rumusan arah kebijakan arah kebijakan n PIP; dan
- e) BPIP.01.01.05-Penyampaian dokumen kebijakan hasil kajian rumusan arah kebijakan PIP kepada *stakeholders* terkait.

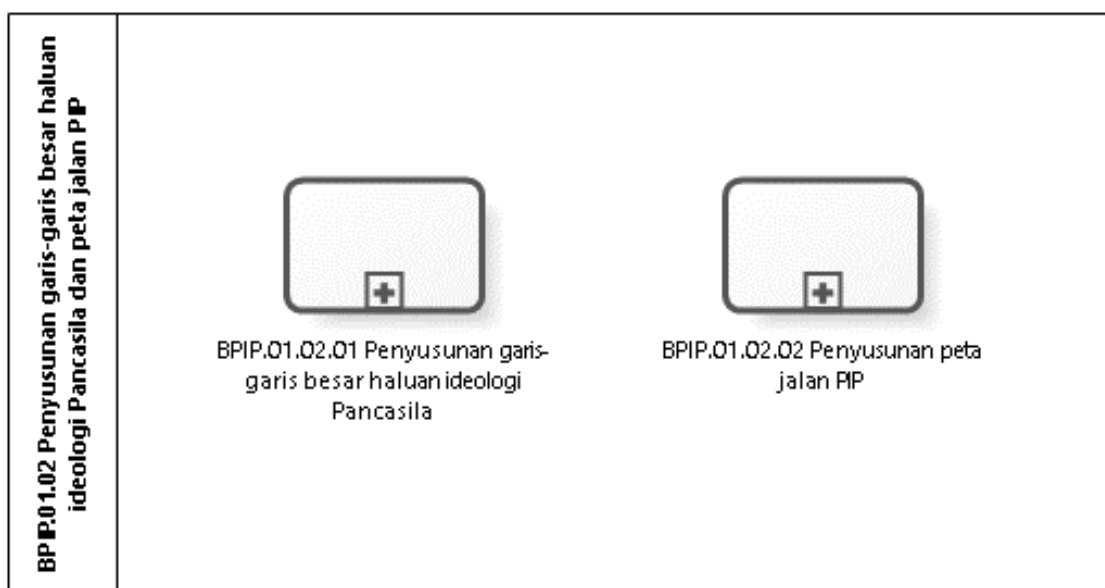


Proses bisnis perumusan arah kebijakan PIP merupakan proses yang dijalankan BPIP dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan PIP sebagai bentuk dukungan kebijakan kepada *stakeholders* internal dan eksternal BPIP. Proses tersebut adalah perumusan arah kebijakan PIP, dengan *output* arah kebijakan PIP.

Level 2 BPIP.01.02-Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan PIP

Level 3:

- a) BPIP.01.02.01-Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila; dan
- b) BPIP.01.02.02-Penyusunan peta jalan PIP.



Proses bisnis penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan PIP mencakup proses-proses yang dijalankan BPIP dalam merumuskan dan menetapkan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan PIP. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

- a) BPIP.01.02.01- Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, dengan *output* garis besar ideologi Pancasila; dan
- b) BPIP.01.02.02- Penyusunan peta jalan PIP, dengan *output* peta jalan PIP.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.01.02.01- Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila mencakup 5 (lima) proses, yaitu:

- a) BPIP.01.02.01.01- Identifikasi dan analisis kebutuhan perumusan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila;
- b) BPIP.01.02.01.02- Pengkajian perumusan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila;
- c) BPIP.01.02.01.03- Akseptasi dokumen hasil kajian rumusan GBHIP oleh Dewan Pengarah dan unsur pimpinan;
- d) BPIP.01.02.01.04- Penyusunan dokumen kebijakan hasil kajian rumusan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila; dan
- e) BPIP.01.02.01.05- Penyampaian dokumen kebijakan hasil kajian rumusan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila kepada *stakeholder* terkait.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.01.02.02- Penyusunan peta jalan PIP mencakup 5 (lima) proses, yaitu:

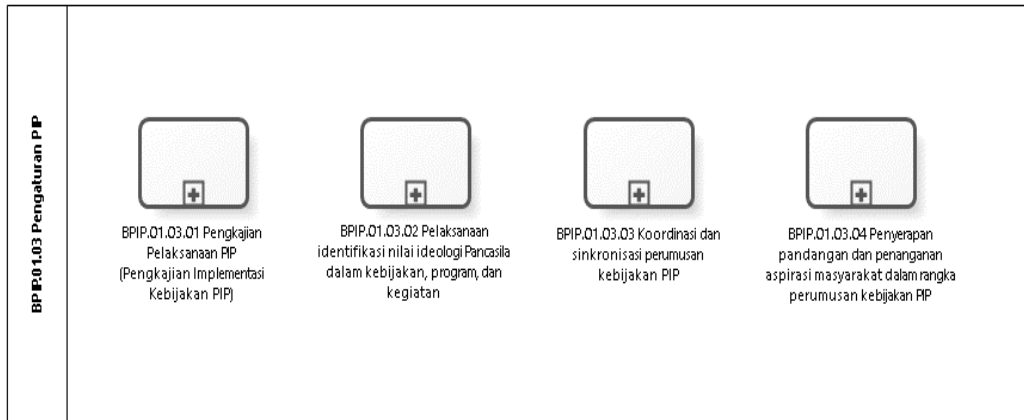
- a) BPIP.01.02.02.01- Identifikasi dan analisis kebutuhan perumusan peta jalan PIP;
- b) BPIP.01.02.02.02- Pengkajian perumusan peta jalan PIP;
- c) BPIP.01.02.02.03- Akseptasi dokumen hasil kajian rumusan peta jalan PIP oleh Dewan Pengarah dan unsur pimpinan;
- d) BPIP.01.02.02.04- Penyusunan dokumen kebijakan hasil kajian rumusan peta jalan PIP; dan
- e) BPIP.01.02.02.05- Penyampaian dokumen kebijakan hasil kajian rumusan peta jalan PIP kepada *stakeholders* terkait.

- 2) Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (DPIPIP)

Level 2 BPIP.01.03-Pengaturan PIP

Level 3:

- a) BPIP.01.03.01-Pengkajian pelaksanaan PIP (pengkajian implementasi kebijakan PIP);
- b) BPIP.01.03.02-Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- c) BPIP.01.03.03-Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PIP; dan
- d) BPIP.01.03.04-Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP.



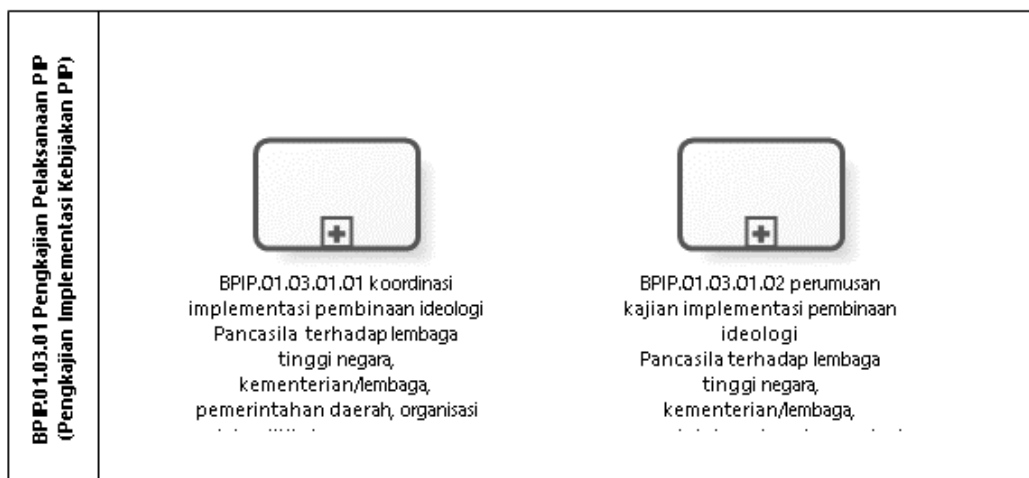
Proses bisnis Pengaturan PIP mencakup proses-proses yang dijalankan BPIP dalam mengatur kajian, identifikasi, koordinasi, dan penanganan aspirasi dalam perumusan kebijakan PIP. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

- a) BPIP.01.03.01- Pengkajian implementasi kebijakan PIP, dengan *output* hasil kajian implementasi kebijakan PIP;
- b) BPIP.01.03.02- Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, dengan *output* rekomendasi hasil identifikasi nilai Pancasila yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- c) BPIP.01.03.03-Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PIP, dengan *output* rumusan kebijakan PIP; dan
- d) BPIP.01.03.04-Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP, dengan *output* Rumusan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan PIP.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.01.03.01- Pengkajian Implementasi Kebijakan PIP mencakup 2 (dua) proses, yaitu:

- a) BPIP.01.03.01.01-Koordinasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila terhadap lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- b) BPIP.01.03.01.02-Perumusan kajian implementasi pembinaan

ideologi Pancasila terhadap lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.



Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.01.03.02- Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, dengan *output* rekomendasi hasil identifikasi nilai Pancasila yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, mencakup proses:

BPIP.01.03.02.01-Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Purnapasikbraka Indonesia.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.01.03.03-Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PIP mencakup 4 (empat) proses, yaitu:

- a) BPIP.01.03.03.01-Identifikasi kebutuhan pengkajian kebijakan PIP melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- b) BPIP.01.03.03.02-Pengkajian kebijakan PIP;
- c) BPIP.01.03.03.03-Penyusunan laporan hasil pengkajian kebijakan PIP dan rekomendasi kebijakan PIP; dan
- d) BPIP.01.03.03.04-Diseminasi dan advokasi hasil pengkajian kebijakan PIP.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.01.03.04-Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP mencakup 3 (tiga) proses, yaitu:

- a) BPIP.01.03.04.01-Pengumpulan dan identifikasi pandangan serta aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP;
- b) BPIP.01.03.04.02-Penyusunan telaahan hasil pandangan dan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP; dan
- c) BPIP.01.03.04.03-Penyampaian telaahan hasil pandangan dan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan PIP

kepada *stakeholders* terkait.

- 3) Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (DPMPPIP)
Level 2 BPIP.01.04-Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila.

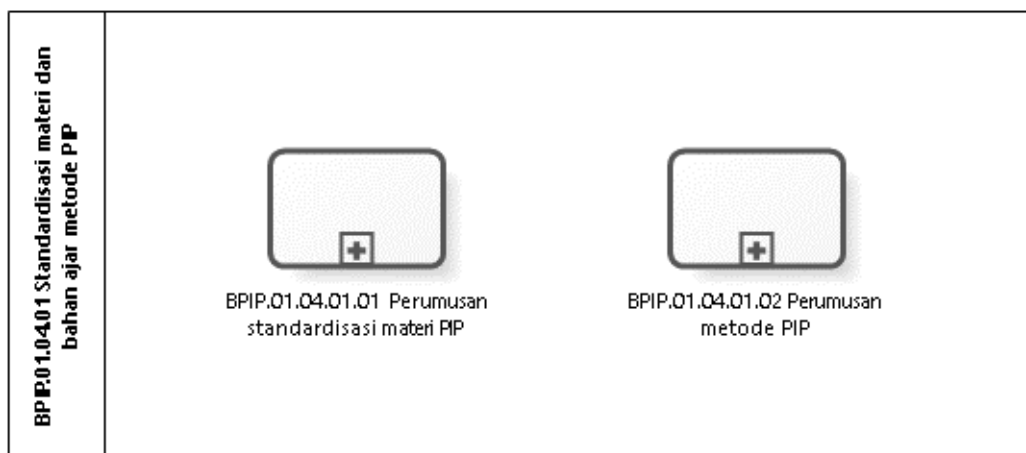
Level 3: BPIP.01.04.01-Perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila.



Proses bisnis pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila mencakup proses yang dijalankan BPIP dalam mengkaji materi dan metodologi pembelajaran Pancasila. Proses tersebut adalah BPIP.01.04.01- Perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila, dengan *output* standardisasi materi dan bahan ajar metode PIP.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.01.04.01-Perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila mencakup 2 (dua) proses, yaitu:

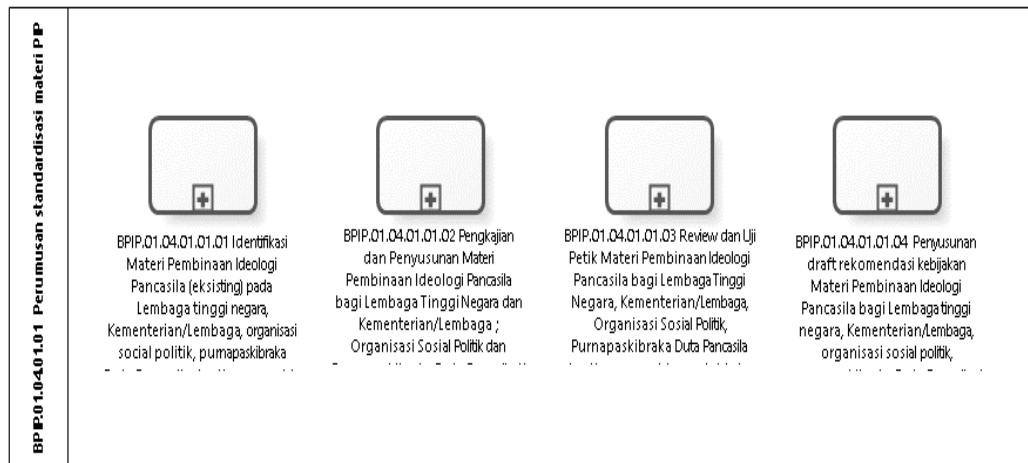
- a) BPIP.01.04.01.01-Perumusan standardisasi materi PIP; dan
- b) BPIP.01.04.01.02-Perumusan metode PIP.



Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.01.04.01.01-Perumusan standardisasi materi PIP mencakup 4 (empat) proses, yaitu:

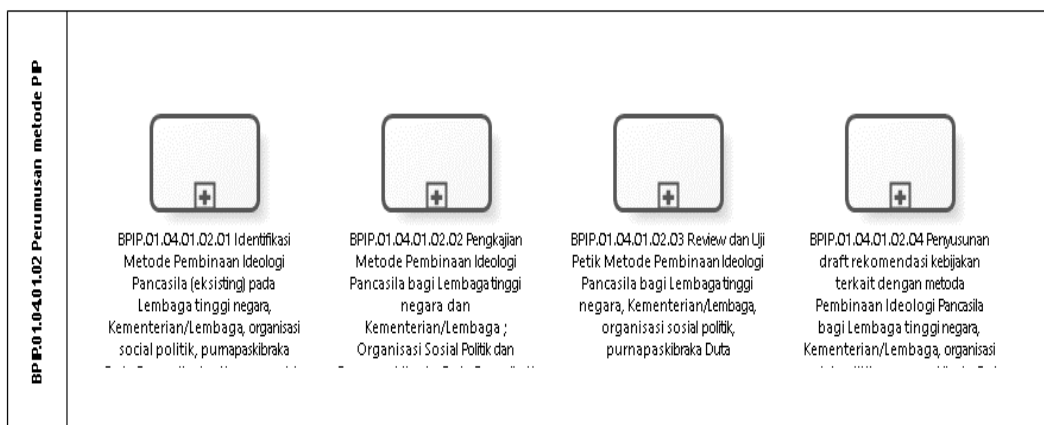
- a) BPIP.01.04.01.01.01-Identifikasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (eksisting) pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- b) BPIP.01.04.01.01.02-Pengkajian dan Penyusunan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen

- masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- c) BPIP.01.04.01.01.03-Review dan Uji Petik Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, Purnapaskibraka Duta Pancasila dan komponen masyarakat lainnya; dan
- d) BPIP.01.04.01.01.04-Penyusunan draft rekomendasi kebijakan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;



Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.01.04.01.02-Perumusan metode PIP mencakup 4 (empat) proses, yaitu:

- a) BPIP.01.04.01.02.01- Identifikasi Metode Pembinaan Ideologi Pancasila (eksisting) pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- b) BPIP.01.04.01.02.02- Pengkajian Metode Pembinaan Ideologi Pancasila bagi lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- c) BPIP.01.04.01.02.03- Review dan uji petik metode pembinaan ideologi pancasila bagi lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- d) BPIP.01.04.01.02.04- Penyusunan draft rekomendasi kebijakan terkait dengan metoda pembinaan ideologi pancasila bagi lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

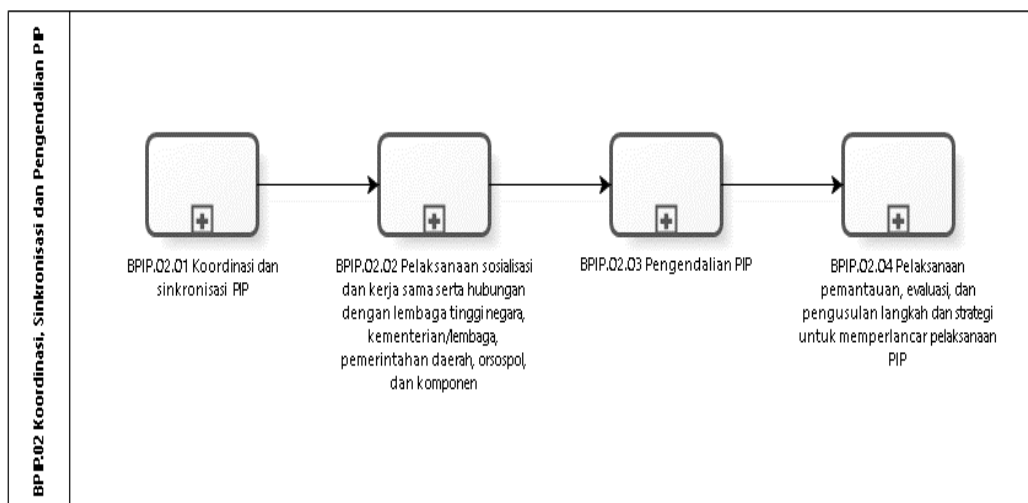


- b. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan

Level 1 BPIP.02-Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian PIP

Level 2:

- 1) BPIP.02.01-Koordinasi dan sinkronisasi PIP; dan
- 2) BPIP.02.02-Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya.



Deskripsi proses bisnis koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian PIP:

Proses bisnis koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian PIP mencakup proses-proses yang dijalankan BPIP dalam koordinasi, sosialisasi dan kerja sama, pengendalian, dan pemantauan dan evaluasi. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

- 1) BPIP.02.01-Koordinasi dan sinkronisasi PIP; dan
- 2) BPIP.02.02-Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, orsospol, dan komponen masyarakat.

- 1) Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama (DHALKSS)

Level 2 BPIP.02.01-Koordinasi dan sinkronisasi PIP

Level 3 BPIP.02.01.01- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

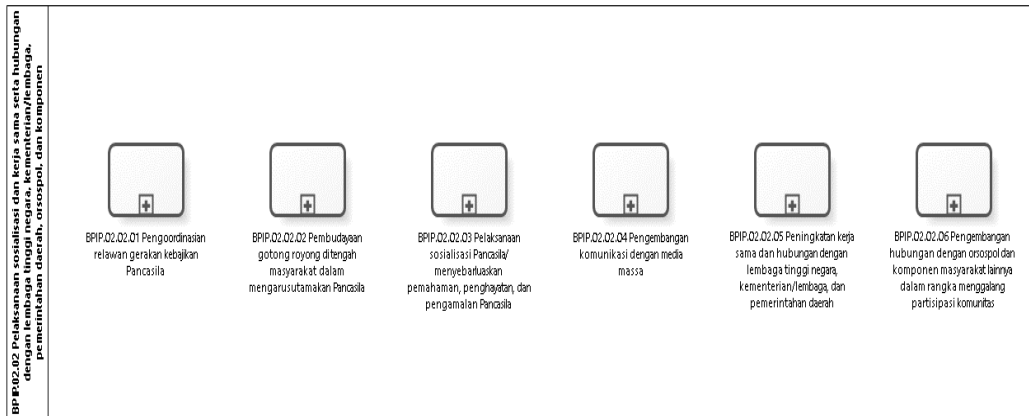
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.01.01- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila mencakup proses:

BPIP.02.01.01.01- Koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Level 2 BPIP.02.02- Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga,

pemerintahan daerah, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PIP

Level 3 BPIP.02.02.05- Peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah.



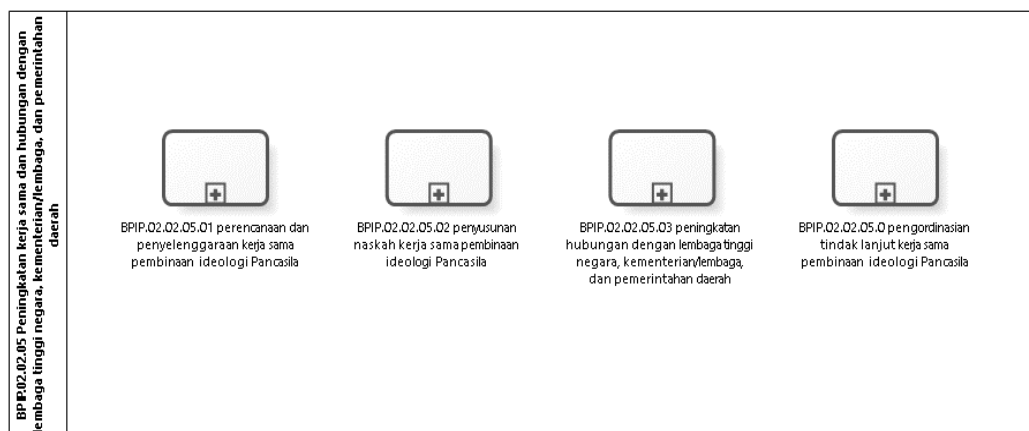
Deskripsi proses bisnis pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya:

Proses bisnis Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya merupakan proses-proses yang dijalankan BPIP dalam menjalankan sosialisasi dan kerja sama. Proses tersebut, yaitu:

BPIP.02.02.05- Peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.02.05- Peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mencakup 4 (empat) proses, yaitu:

- BPIP.02.02.05.01-Perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila;
- BPIP.02.02.05.02-Penyusunan naskah kerja sama pembinaan ideologi Pancasila;
- BPIP.02.02.05.03-Peningkatan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah; dan
- BPIP.02.02.05.04-Pengordinasian tindak lanjut kerja sama pembinaan ideologi Pancasila.

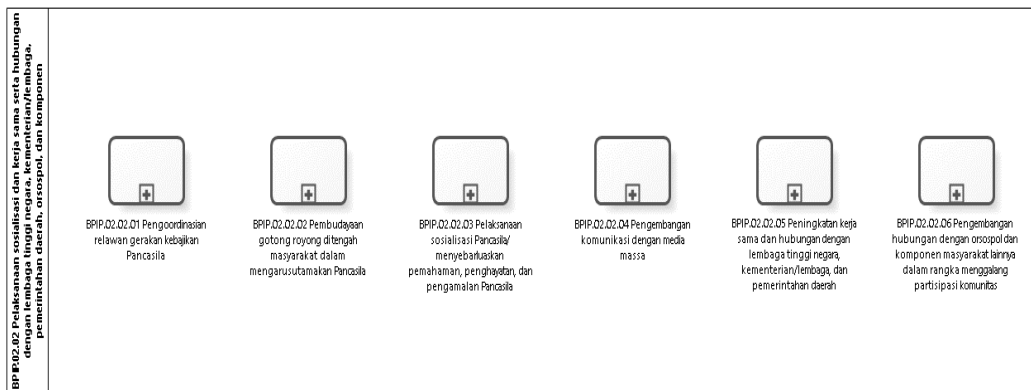


2) Direktorat Jaringan dan Pembudayaan (DJP)

Level 2 BPIP.02.02- Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Level 3 :

- a) BPIP.02.02.01-Pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
- b) BPIP.02.02.02-Pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan Pancasila; dan
- c) BPIP.02.02.06-Pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas.



Deskripsi Proses Bisnis Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya:

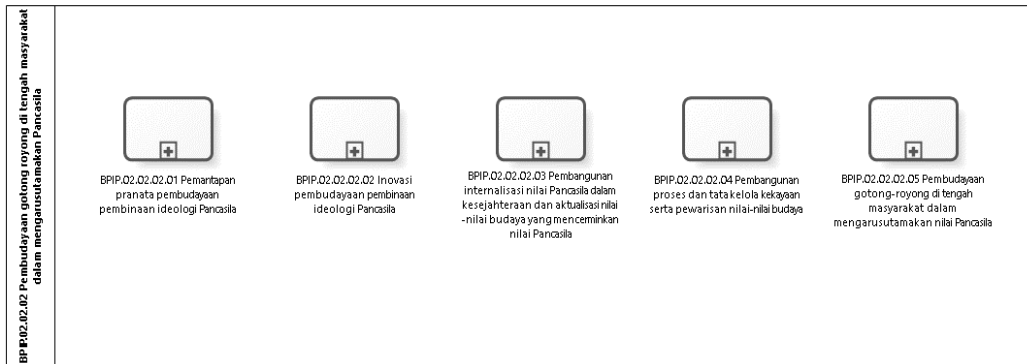
Proses bisnis Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya merupakan proses-proses yang dijalankan BPIP dalam menjalankan sosialisasi dan kerja sama. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

- a) BPIP.02.02.01-Pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila, yang menghasilkan *output* relawan gerakan kebajikan Pancasila yang melaksanakan PIP;
- b) BPIP.02.02.02-Pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan Pancasila, yang menghasilkan output Integrasi PIP terhadap budaya/kearifan lokal; dan
- c) BPIP.02.02.06-Pengembangan hubungan dengan orsospol dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.02.02-Pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan Pancasila, yang menghasilkan output Integrasi PIP terhadap budaya/kearifan lokal mencakup 5 (lima) proses, yaitu:

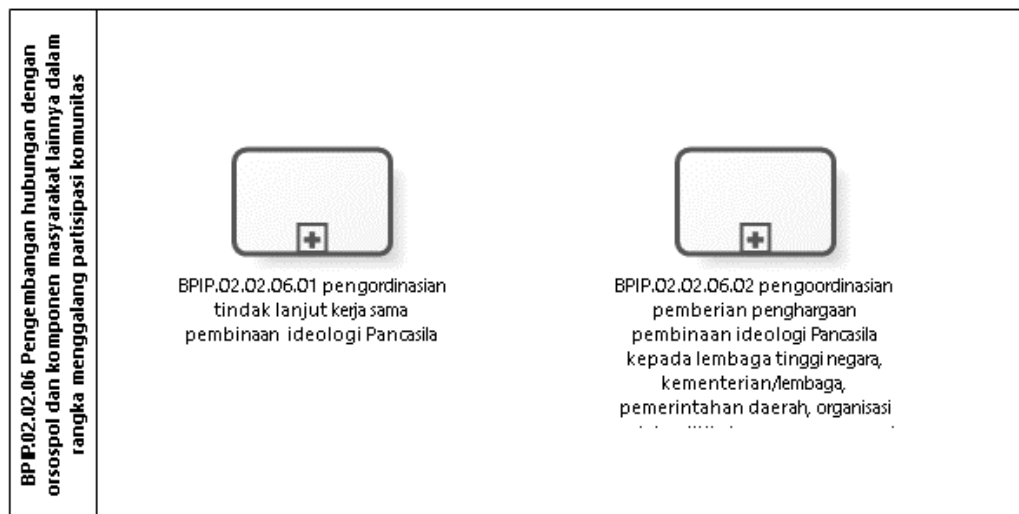
- a) BPIP.02.02.02.01- Pemantapan pranata pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila;
- b) BPIP.02.02.02.02- Inovasi pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila;
- c) BPIP.02.02.02.03- Pembangunan internalisasi nilai Pancasila dalam kesejahteraan dan aktualisasi nilai-nilai budaya yang mencerminkan nilai Pancasila;

- d) BPIP.02.02.02.04- Pembangunan proses dan tata kelola kekayaan serta pewarisan nilai-nilai budaya; dan
- e) BPIP.02.02.02.05- Pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila.



Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.02.06- Pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam rangka menggalang partisipasi komunitas mencakup 2 (dua) proses, yaitu:

- a) BPIP.02.02.06.01-Pelaksanaan pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
- b) BPIP.02.02.06.02-Pengoordinasian pemberian penghargaan pembinaan ideologi Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.



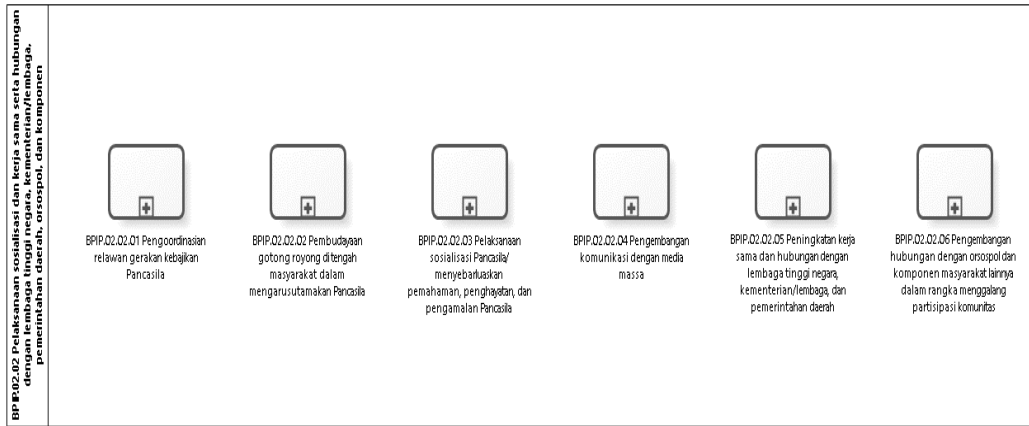
3) Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi (DSK)

Level 2 BPIP.02.02- Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Level 3:

- a) BPIP.02.02.03-Pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya; dan

b) BPIP.02.02.04-Pengembangan komunikasi dengan media massa.



Deskripsi Proses Bisnis Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya:

Proses bisnis pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya merupakan proses-proses yang dijalankan BPIP dalam menjalankan sosialisasi dan kerja sama. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

- a) BPIP.02.02.03-Pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya; dan
- b) BPIP.02.02.04-Pengembangan komunikasi dengan media massa.

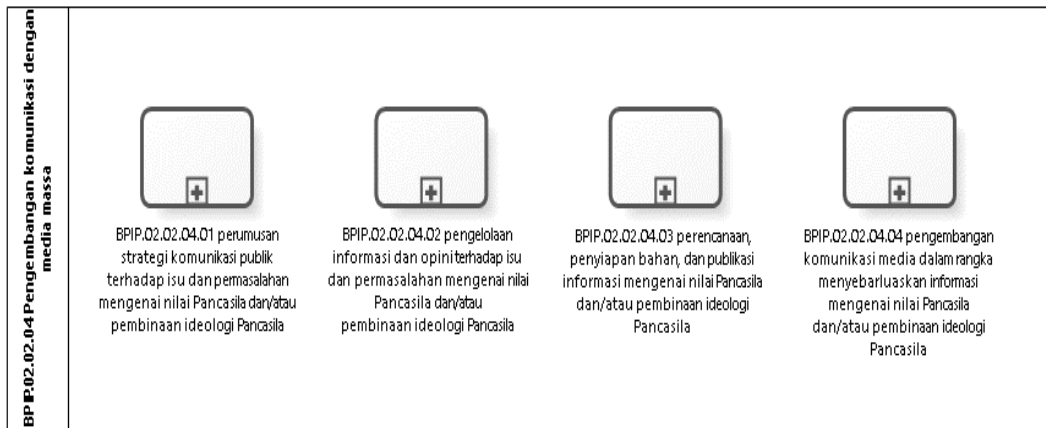
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.02.03-Pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya komunitas mencakup proses:

BPIP.02.02.03.01-Perencanaan dan penyelenggaraan sosialisasi Pancasila atau penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.02.04-Pengembangan komunikasi dengan media massa mencakup 4 (empat) proses, yaitu:

- a) BPIP.02.02.04.01-Perumusan strategi komunikasi publik terhadap isu dan permasalahan mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila;
- b) BPIP.02.02.04.02-Pengelolaan informasi dan opini terhadap isu dan permasalahan mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila;
- c) BPIP.02.02.04.03-Perencanaan, penyiapan bahan, dan publikasi informasi mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila; dan
- d) BPIP.02.02.04.04-Pengembangan komunikasi media dalam rangka

menyebarkan informasi mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila.

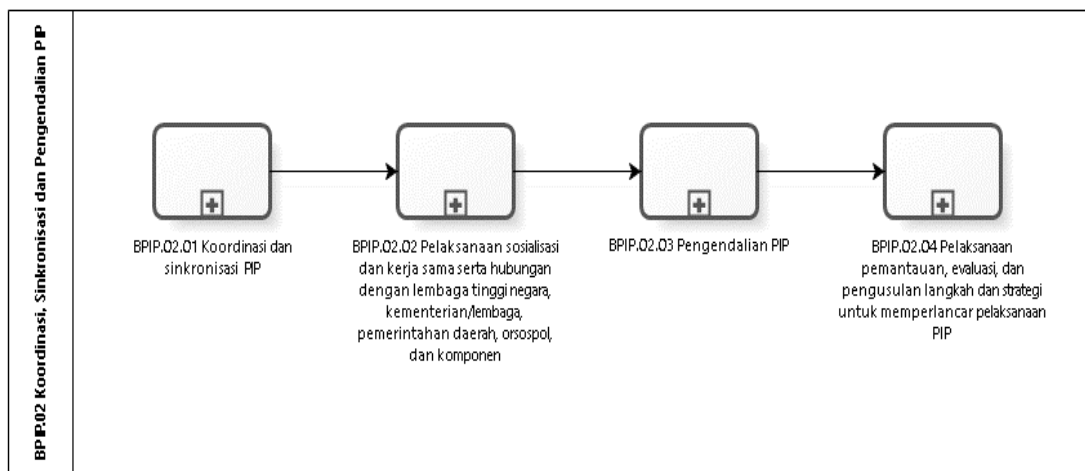


c. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Level 1 BPIP.02-Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian PIP

Level 2:

- 1) BPIP.02.03-Pengendalian PIP; dan
- 2) BPIP.02.04-Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP.



Deskripsi Proses Bisnis Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian PIP:

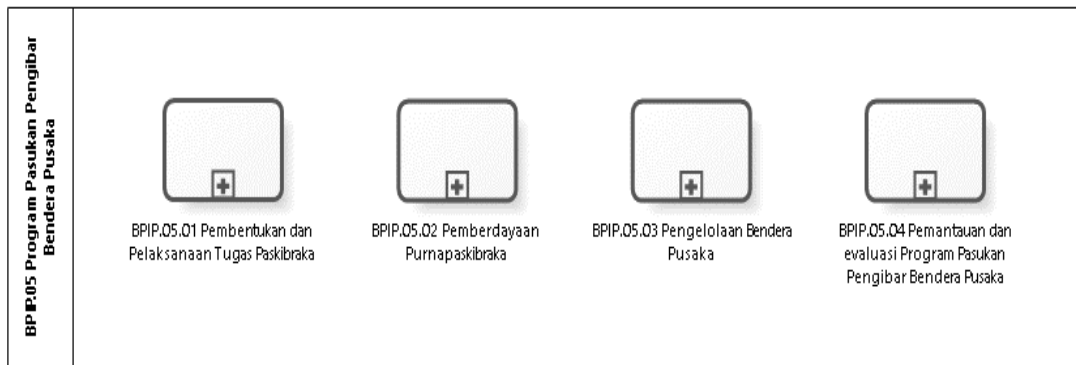
Proses bisnis koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian PIP mencakup proses-proses yang dijalankan BPIP dalam koordinasi, sosialisasi dan kerja sama, pengendalian, dan pemantauan dan evaluasi. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

- 1) BPIP.02.03- Pengendalian PIP; dan
- 2) BPIP.02.04- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP.

Level 1 BPIP.05- Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

Level 2:

- 1) BPIP.05.01- Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 2) BPIP.05.02- Pemberdayaan Purnapaskibraka;
- 3) BPIP.05.03- Pengelolaan Bendera Pusaka; dan
- 4) BPIP.05.04- Pemantauan dan evaluasi program Paskibraka.



Deskripsi proses bisnis Program Paskibraka:

Proses bisnis Program Paskibraka mencakup proses-proses yang dijalankan BPIP dalam mengelola Paskibraka. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

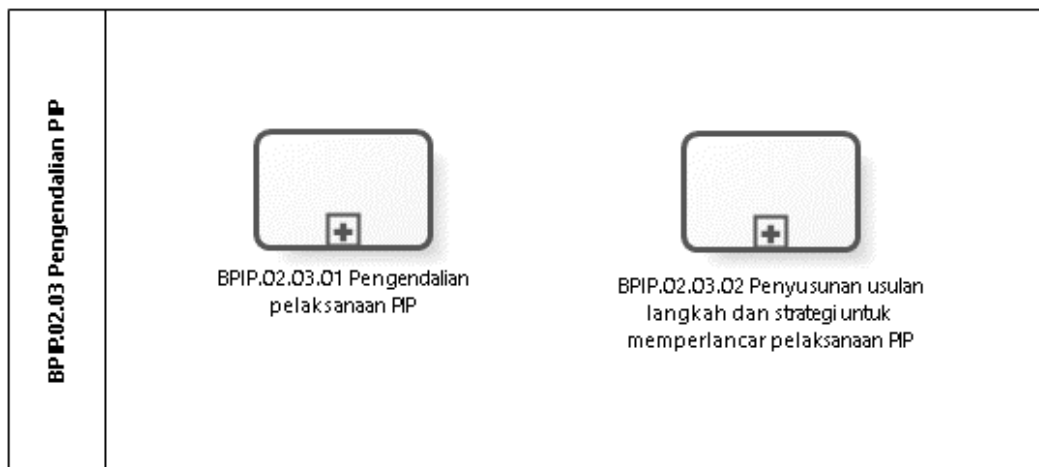
- 1) BPIP.05.01-Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 2) BPIP.05.02-Pemberdayaan Purnapaskibraka;
- 3) BPIP.05.03-Pengelolaan Bendera Pusaka; dan
- 4) BPIP.05.04-Pemantauan dan evaluasi program Paskibraka.

- 1) Direktorat Pengendalian (DP)

Level 2 BPIP.02.03- Pengendalian PIP

Level 3:

- a) BPIP.02.03.01-Pengendalian pelaksanaan PIP, yang menghasilkan *output* hasil pengendalian pelaksanaan PIP; dan
- b) BPIP.02.03.02-Penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP, yang menghasilkan *output* rekomendasi/usulan langkah dan strategi untuk memperlancar PIP.



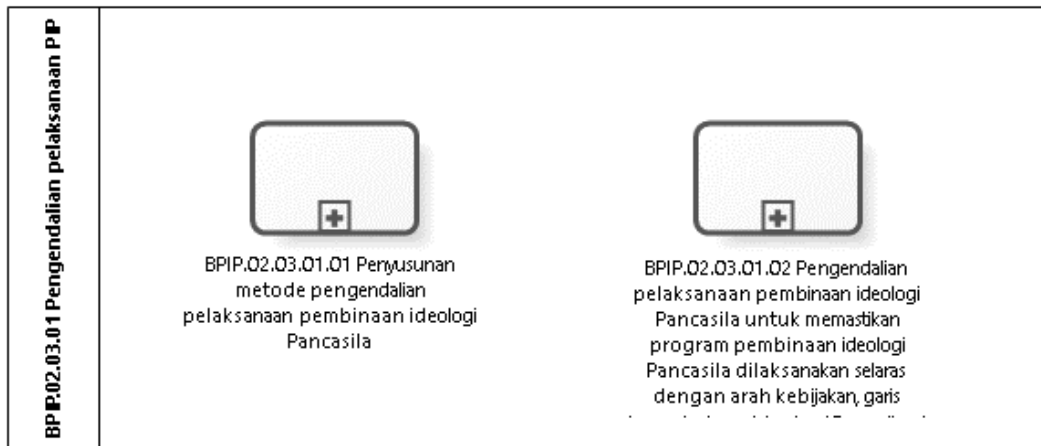
Deskripsi Proses Bisnis Pengendalian PIP:

Proses bisnis Pengendalian PIP merupakan proses-proses yang dijalankan BPIP dalam pengendalian dan usulan langkah strategis pelaksanaan PIP. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

- a) BPIP.02.03.01- Pengendalian pelaksanaan PIP, yang menghasilkan *output* hasil pengendalian pelaksanaan PIP; dan
- b) BPIP.02.03.02- Penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP, yang menghasilkan *output* rekomendasi/usulan langkah dan strategi untuk memperlancar PIP.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.03.01- Pengendalian pelaksanaan PIP, yang menghasilkan *output* Hasil pengendalian pelaksanaan PIP mencakup 2 (dua) proses, yaitu:

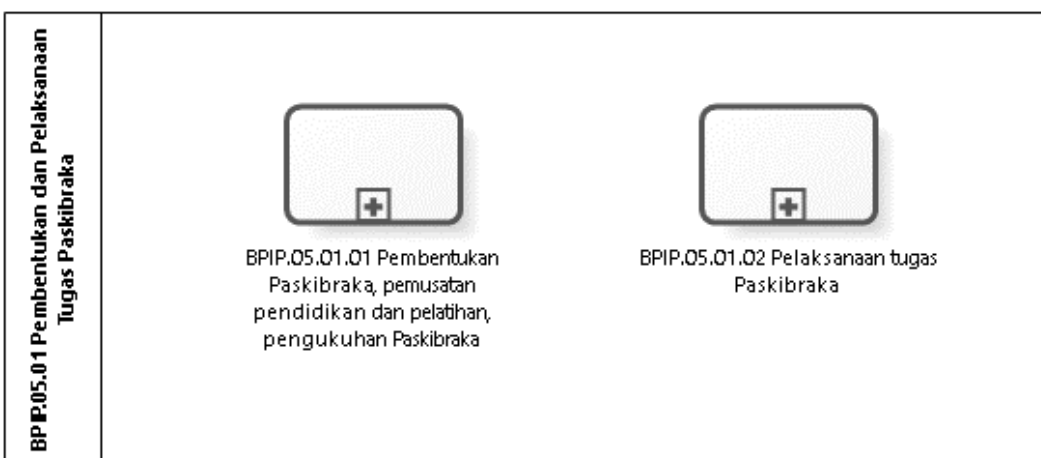
- a) BPIP.02.03.01.01- Penyusunan metode pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- b) BPIP.02.03.01.02- Pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk memastikan program pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan, GBHIP, dan peta jalan PIP.



Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.03.02- Penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP, yang menghasilkan *output* rekomendasi/usulan langkah dan strategi untuk memperlancar PIP mencakup proses yaitu: BPIP.02.03.02.01 - penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila agar selaras dengan arah kebijakan, GBHIP, dan peta jalan PIP.

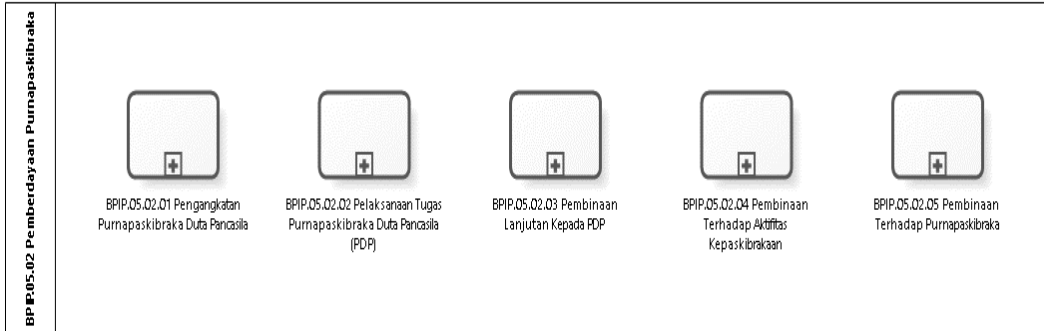
Level 2 BPIP.05.01- Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka
Level 3

- a) BPIP.05.01.01- Pembentukan Paskibraka (rekrutmen dan seleksi (Sosialisasi dan Pengumuman -> Dep. I), pemusatan pendidikan dan pelatihan (Dep. IV, Dep. V, Garnisun dan Lemhanas), pengukuhan Paskibraka (Setpres dan Dep. V)); dan
- b) BPIP.05.01.02- Pelaksanaan tugas Paskibraka (SetPres (17 Agst), Dep. V dan Garnisun (1 Juni)).



Level 2 BPIP.05.02- Pemberdayaan Purnapaskibraka
Level 3:

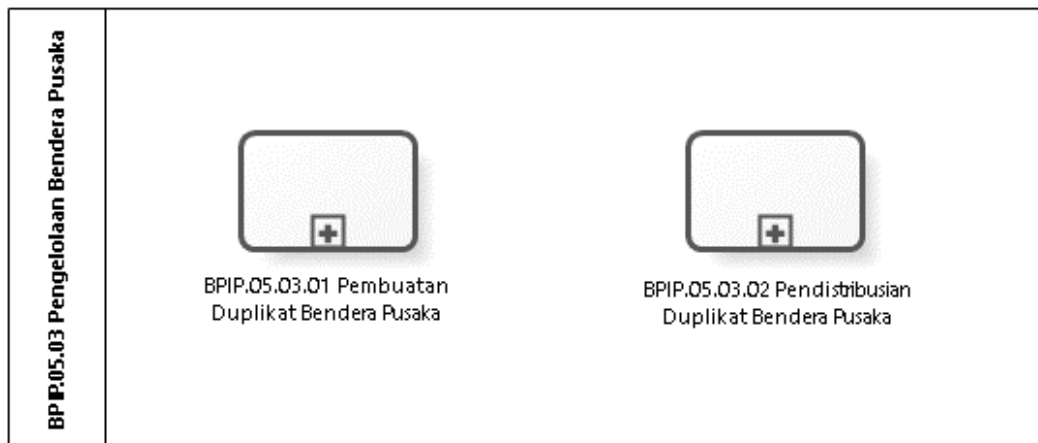
- a) BPIP.05.02.01- Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- b) BPIP.05.02.02- Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- c) BPIP.05.02.03- Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- d) BPIP.05.02.04- Pembinaan terhadap aktifitas Kepaskibrakaan; dan
- e) BPIP.05.02.05- Pembinaan terhadap Purnapaskibraka.



Level 2 BPIP.05.03- Pengelolaan Bendera Pusaka

Level 3

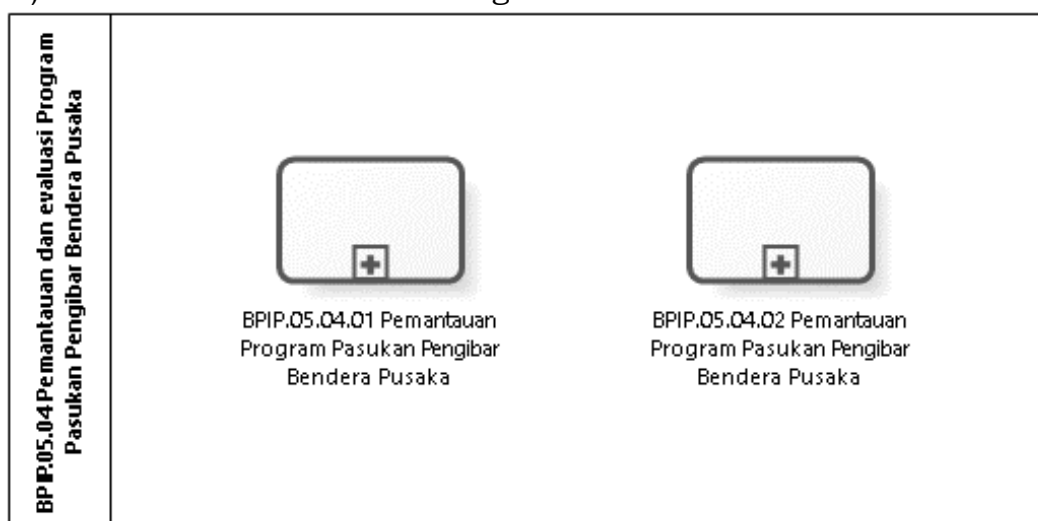
- a) BPIP.05.03.01-Pembuatan Duplikat Bendera Pusaka; dan
- b) BPIP.05.03.02-Pendistribusian Duplikat Bendera Pusaka.



Level 2 BPIP.05.04- Pemantauan dan evaluasi Program Paskibraka

Level 3

- a) BPIP.05.04.01-Pemantauan Program Paskibraka; dan
- b) BPIP.05.04.02-Evaluasi Program Paskibraka.



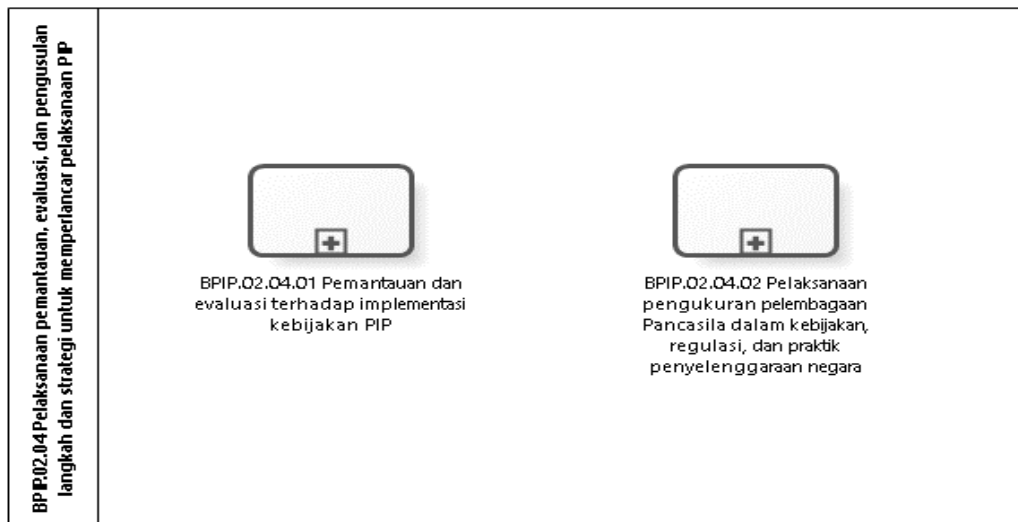
2) Direktorat Evaluasi (DE)

Level 2 BPIP.02.04- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP.

Level 3

- a) BPIP.02.04.01- Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PIP; dan
- b) BPIP.02.04.02- Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara.



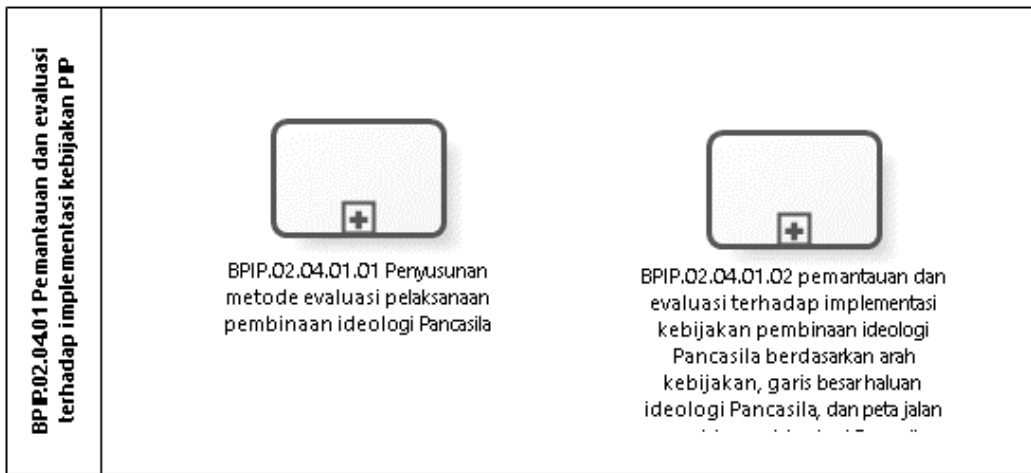
Deskripsi proses bisnis pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP:

Proses bisnis pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP merupakan proses yang dijalankan BPIP dalam pemantauan dan pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

- a) BPIP.02.04.01- Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PIP; dan
- b) BPIP.02.04.02- Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara.

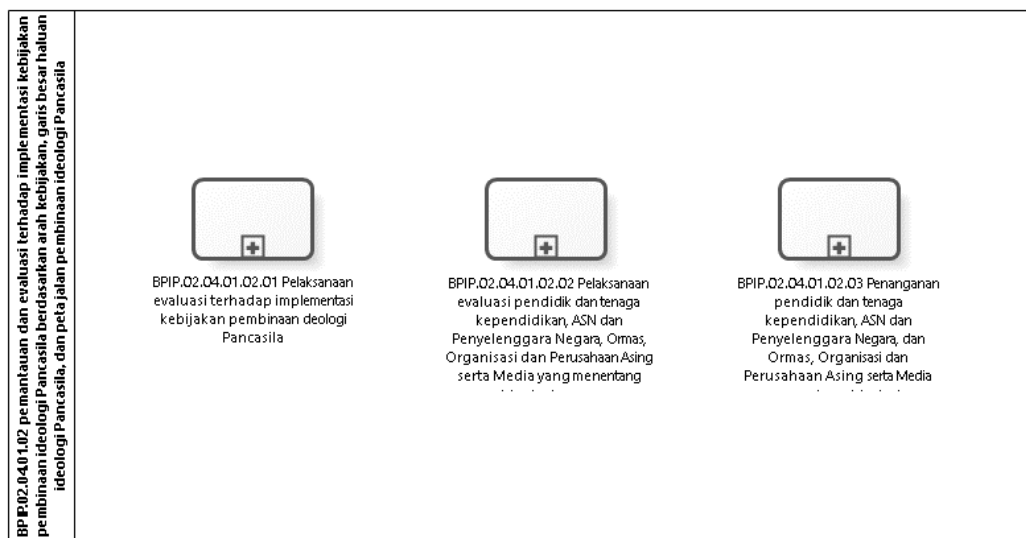
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.04.01- Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PIP mencakup proses:

- a) BPIP.02.04.01.01- Penyusunan metode evaluasi pelaksanaan PIP; dan
- b) BPIP.02.04.01.02- Pemantauan terhadap implementasi kebijakan PIP.



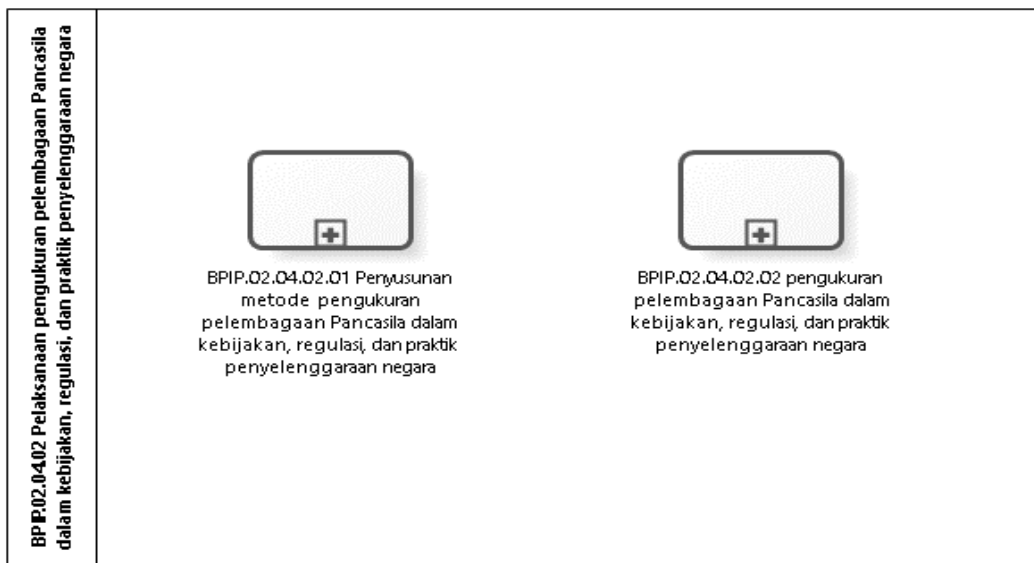
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.04.01.02- Pemantauan terhadap implementasi kebijakan PIP mencakup proses:

- a) BPIP.02.04.01.02.01- Pemantauan terhadap implementasi kebijakan PIP;
- b) BPIP.02.04.01.02.02- Pelaksanaan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, ASN, dan penyelenggara negara, dan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang menentang ideologi negara; dan
- c) BPIP.02.04.01.02.02- Penanganan pendidik dan tenaga kependidikan, ASN, dan penyelenggara negara, dan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang menentang ideologi negara.



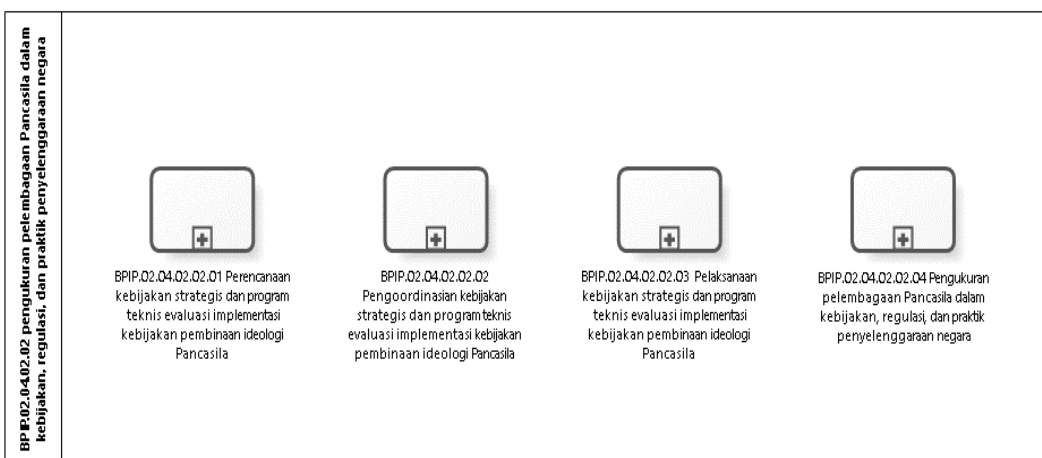
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.04.02- Pelaksanaan pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara mencakup proses:

- a) BPIP.02.04.02.01- Penyusunan metode pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara; dan
- b) BPIP.02.04.02.02- Pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara.



Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.02.04.02.02- Pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara, mencakup proses:

- a) BPIP.02.04.02.02.01- Perencanaan kebijakan strategis dan program teknis evaluasi implementasi kebijakan PIP;
- b) BPIP.02.04.02.02.02- Pengoordinasian kebijakan strategis dan program teknis evaluasi implementasi kebijakan PIP;
- c) BPIP.02.04.02.02.03- Pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis evaluasi implementasi kebijakan PIP; dan
- d) BPIP.02.04.02.02.04- Pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara.

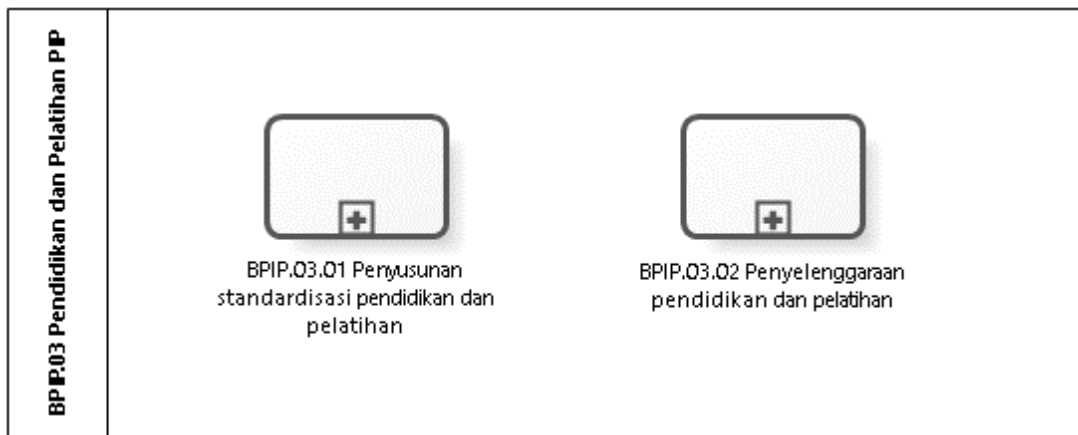


d. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Level 1 BPIP.03- Pendidikan dan pelatihan PIP

Level 2:

- 1) BPIP.03.01- Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan; dan
- 2) BPIP.03.02- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.



Deskripsi Proses Bisnis Pendidikan dan Pelatihan:

Proses bisnis koordinasi pendidikan dan pelatihan mencakup proses-proses yang dijalankan BPIP dalam menyusun standar dan penyelenggaraan pendidikan. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

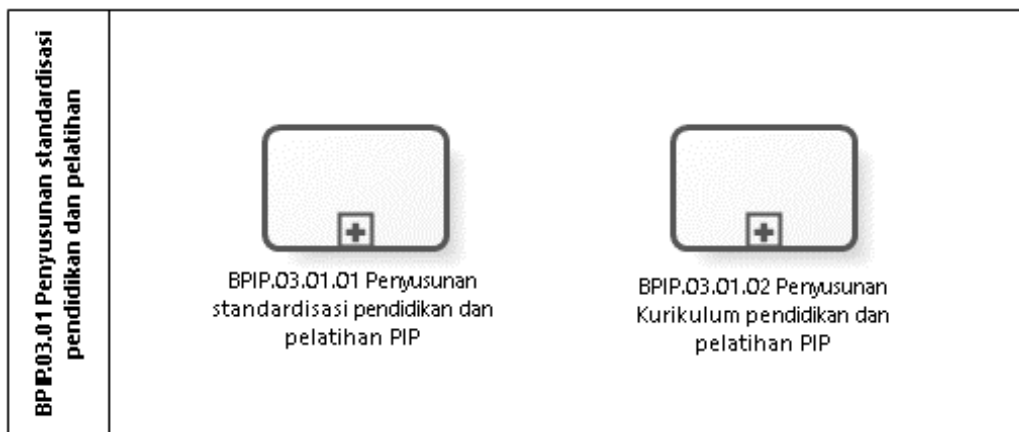
- 1) BPIP.03.01- Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan; dan
- 2) BPIP.03.02- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

- 1) Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (DSKPP)

Level 2 BPIP.03.01- Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan

Level 3

- a) BPIP.03.01.01- Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan PIP; dan
- b) BPIP.03.01.02- Penyusunan Kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP.



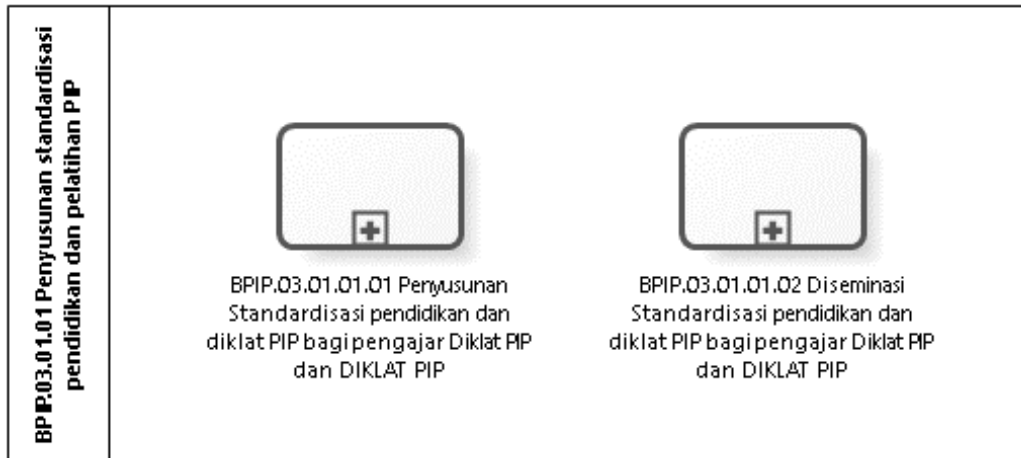
Deskripsi Proses Bisnis Pendidikan dan Pelatihan:

Proses bisnis Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan mencakup proses-proses yang dijalankan BPIP dalam menyusun standar dan penyelenggaraan pendidikan. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

- a) BPIP.03.01.01- Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan PIP; dan
- b) BPIP.03.01.02- Penyusunan Kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP.

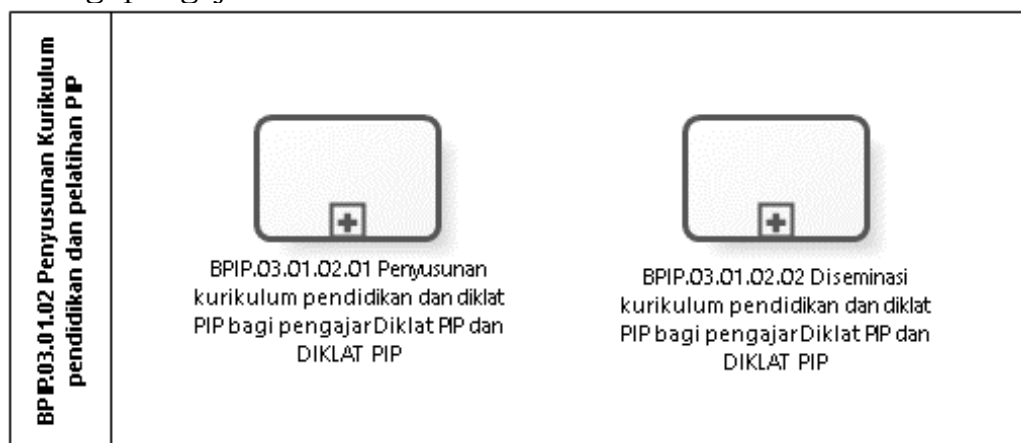
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.03.01.01- Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan PIP mencakup proses:

- a) BPIP.03.01.01.01 - Penyusunan Standardisasi pendidikan dan diklat PIP bagi pengajar Diklat PIP dan Diklat PIP; dan
 b) BPIP.03.01.01.02- Diseminasi Standardisasi pendidikan dan diklat PIP bagi pengajar Diklat PIP dan Diklat PIP.

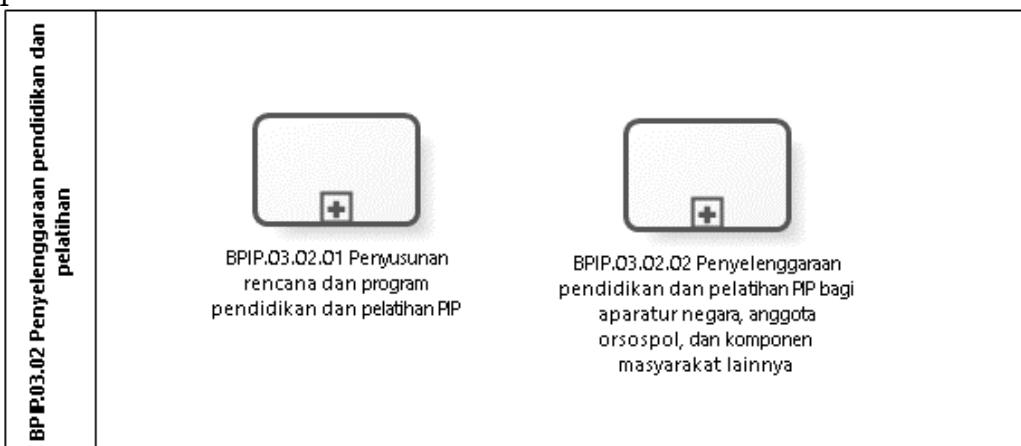


Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.03.01.02- Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan PIP mencakup proses:

- a) BPIP.03.01.02.01 - Penyusunan kurikulum pendidikan dan diklat PIP bagi pengajar Diklat PIP dan DIKLAT PIP; dan
 b) BPIP.03.01.02.02- Diseminasi kurikulum pendidikan dan diklat PIP bagi pengajar Diklat PIP dan DIKLAT PIP.



- 2) Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (DPPP)
 Level 2 BPIP.03.02- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 Level 3
 BPIP.03.02.01- Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan PIP



Deskripsi Proses Bisnis Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan:

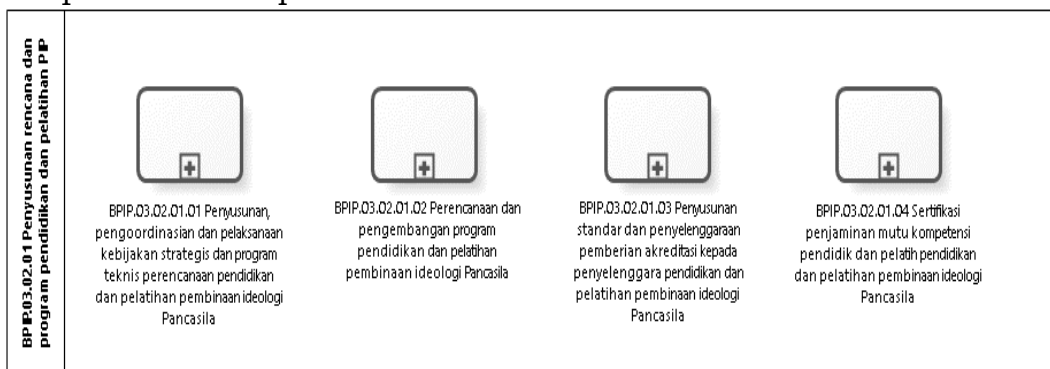
Proses bisnis Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan proses-proses yang dijalankan BPIP dalam menyusun rencana dan penyelenggaraan diklat. Proses tersebut, yaitu:

BPIP.03.02.01- Penyusunan rencana dan program Diklat PIP, yang menghasilkan output:

- a) Dokumen Perencanaan program Diklat PIP; dan
- b) Pendidik dan Pelatih Diklat PIP yang tersertifikasi.

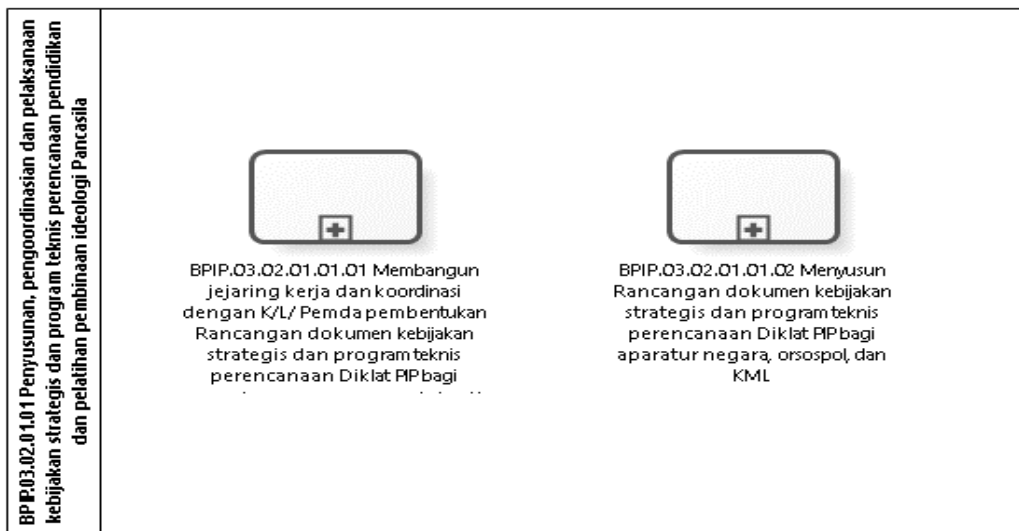
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.03.02.01- Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan PIP mencakup proses:

- a) BPIP.03.02.01.01- Penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perencanaan Diklat PIP;
- b) BPIP.03.02.01.02- Perencanaan dan pengembangan program Diklat PIP;
- c) BPIP.03.02.01.03- Penyusunan standar dan penyelenggaraan pemberian akreditasi kepada penyelenggara Diklat PIP dan
- d) BPIP.03.02.01.04- Sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih Diklat PIP.



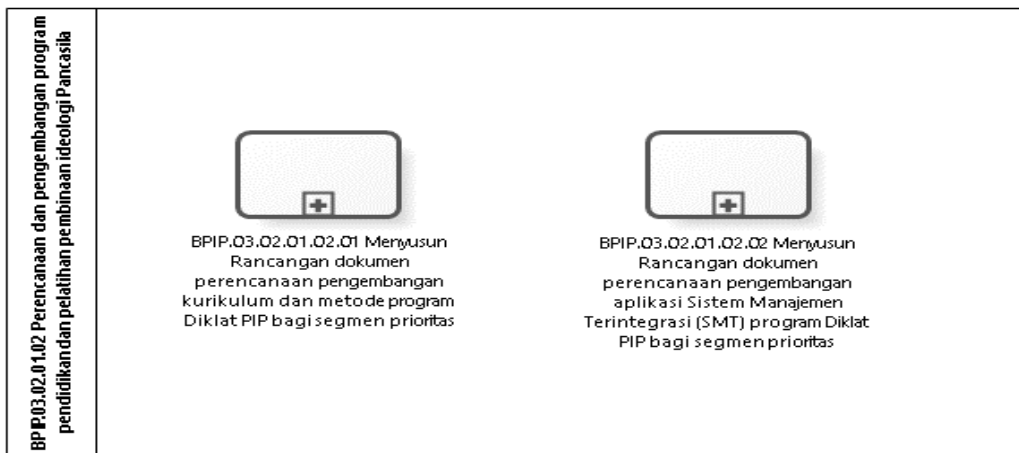
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.03.02.01.01- Penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perencanaan Diklat PIP mencakup proses:

- a) BPIP.03.02.01.01.01- Membangun jejaring kerja dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pembentukan rancangan dokumen kebijakan strategis dan program teknis perencanaan Diklat PIP bagi aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
- b) BPIP.03.02.01.01.02- Menyusun rancangan dokumen kebijakan strategis dan program teknis perencanaan Diklat PIP bagi aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.



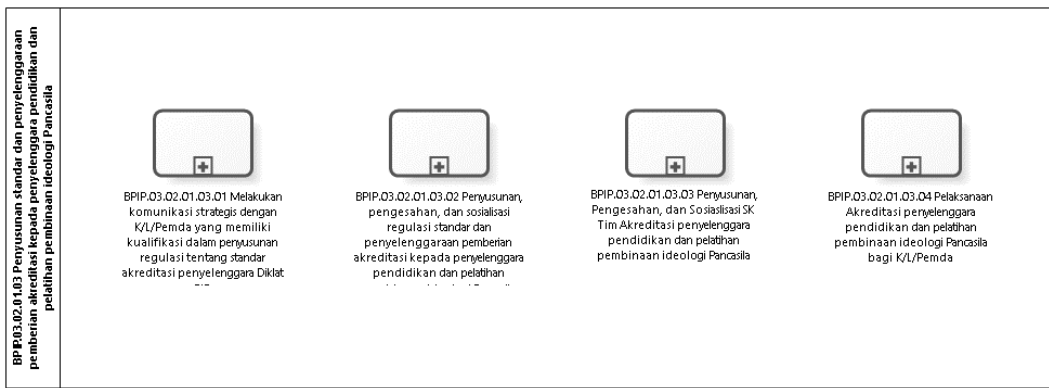
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.03.02.01.02-Perencanaan dan pengembangan program Diklat PIP mencakup proses:

- a) BPIP.03.02.01.02.01- Menyusun rancangan dokumen perencanaan pengembangan kurikulum dan metode program Diklat PIP bagi segmen prioritas; dan
- b) BPIP.03.02.01.02.02- Menyusun Rancangan dokumen perencanaan pengembangan aplikasi Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) program Diklat PIP bagi segmen prioritas.



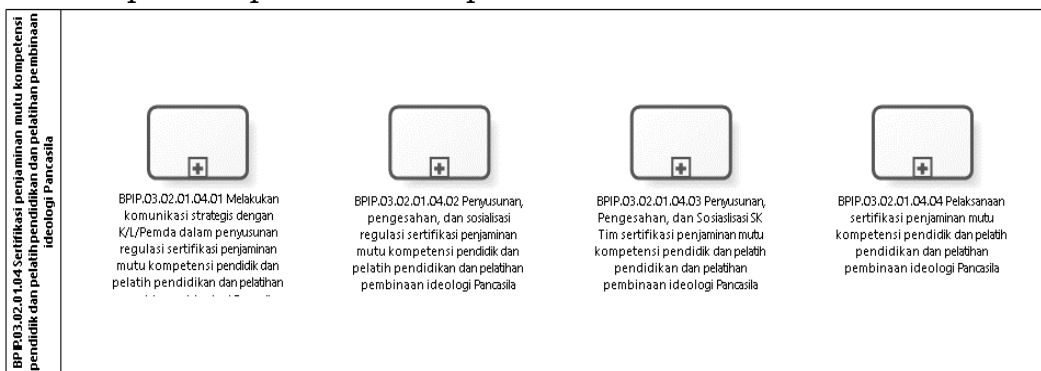
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.03.02.01.03- Penyusunan standar dan penyelenggaraan pemberian akreditasi kepada penyelenggara Diklat PIP mencakup proses:

- a) BPIP.03.02.01.03.01- Melakukan komunikasi strategis dengan K/L/Pemda yang memiliki kualifikasi dalam penyusunan regulasi tentang standar akreditasi penyelenggara Diklat PIP;
- b) BPIP.03.02.01.03.02- Penyusunan, pengesahan, dan sosialisasi regulasi standar dan penyelenggaraan pemberian akreditasi kepada penyelenggara Diklat PIP;
- c) BPIP.03.02.01.03.03- Penyusunan, pengesahan, dan sosialisasi keputusan penetapan tim akreditasi penyelenggara Diklat PIP; dan
- d) BPIP.03.02.01.03.04- Pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP bagi K/L/Pemda.



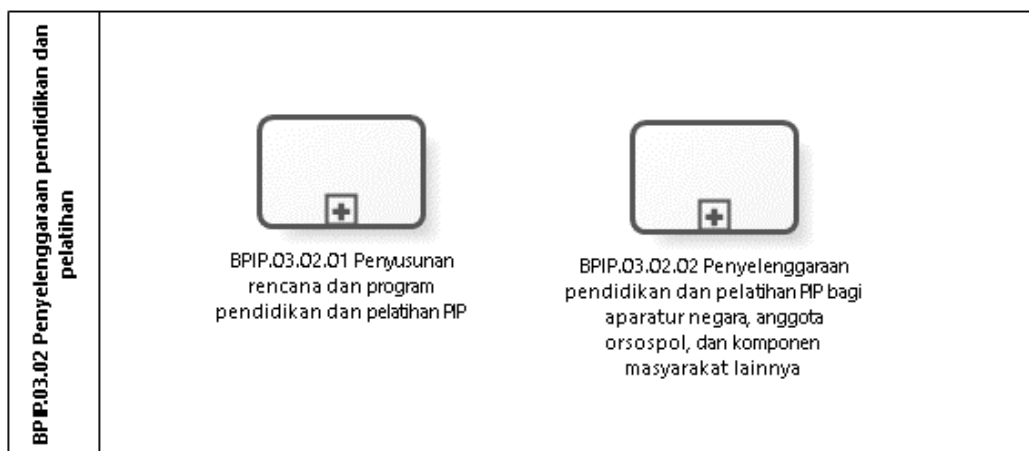
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BP.P.03.02.01.04- Sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih Diklat PIP mencakup proses:

- BP.P.03.02.01.04.01-Melakukan komunikasi strategis dengan K/L/Pemda dalam penyusunan regulasi sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih Diklat PIP;
- BP.P.03.02.01.04.02-Penyusunan, pengesahan, dan sosialisasi regulasi sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih Diklat PIP;
- BP.P.03.02.01.04.03-Penyusunan, pengesahan, dan sosiaslisasi keputusan penetapan tim sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih Diklat PIP; dan
- BP.P.03.02.01.04.04-Pelaksanaan sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih Diklat PIP.



3) Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (DPelPP) Level 2 BP.P.03.02- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Level 3 :

BP.P.03.02.02- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.



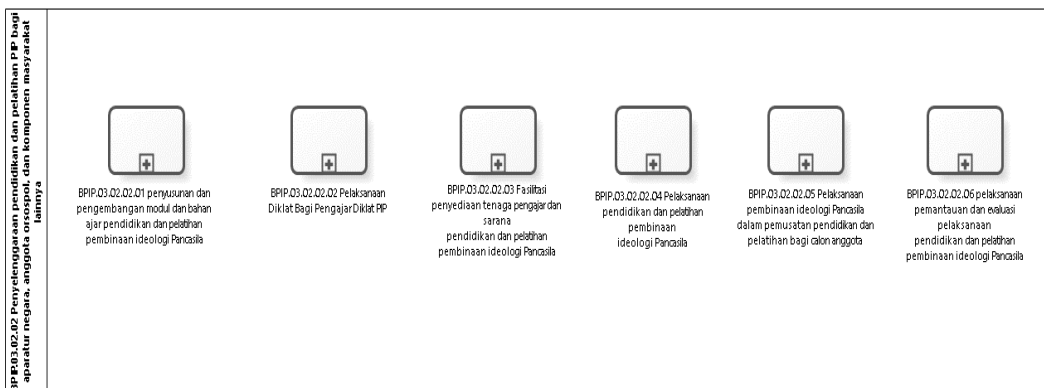
Deskripsi proses bisnis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP: Proses bisnis penyelenggaraan Diklat PIP merupakan proses-proses yang dijalankan BPIP dalam menyusun rencana dan penyelenggaraan Diklat PIP. Proses tersebut, yaitu:

BPIP.03.02.02- Penyelenggaraan Diklat PIP bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, yang menghasilkan *output*:

- a) modul dan bahan ajar;
- b) laporan pelaksanaan Diklat PIP; dan
- c) laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.03.02.02- Penyelenggaraan Diklat PIP bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya mencakup proses:

- a) BPIP.03.02.02.01- Penyusunan dan pengembangan modul dan bahan ajar Diklat PIP;
- b) BPIP.03.02.02.02- Pelaksanaan Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP;
- c) BPIP.03.02.02.03- Fasilitasi penyediaan tenaga pengajar dan sarana Diklat PIP;
- d) BPIP.03.02.02.04- Pelaksanaan Diklat PIP;
- e) BPIP.03.02.02.05- Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam pemusatan diklat bagi calon anggota Paskibraka; dan
- f) BPIP.03.02.02.06- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat PIP.

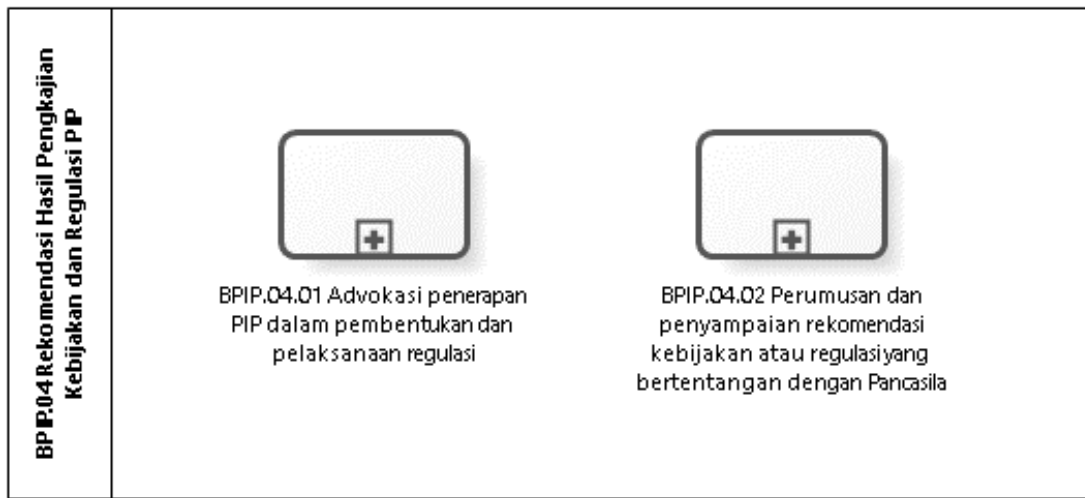


e. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

Level 1 BPIP.04- Rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya.

Level 2:

- 1) BPIP.04.01- Advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi; dan
- 2) BPIP.04.02-Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.



Deskripsi proses bisnis rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik dan komunitas masyarakat lainnya:

Proses bisnis rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik dan komunitas masyarakat lainnya, mencakup proses-proses yang dijalankan BPIP dalam melaksanakan advokasi dan perumusan rekomendasi.

Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

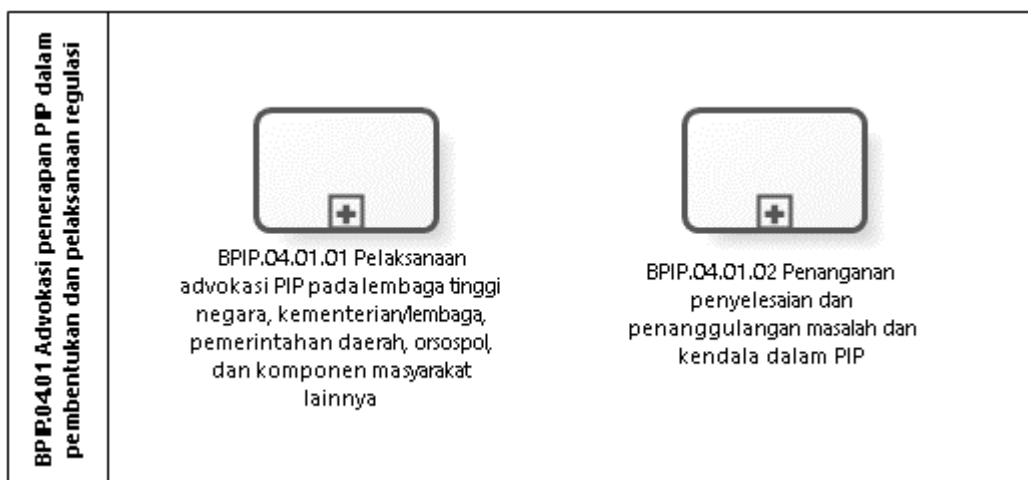
- 1) BPIP.04.01- Advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi; dan
- 2) BPIP.04.02- Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

1) Direktorat Advokasi (DA)

Level 2 BPIP.04.01- Advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi.

Level 3:

- a) BPIP.04.01.01- Pelaksanaan advokasi PIP pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
- b) BPIP.04.01.02- Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam PIP.



Deskripsi proses bisnis advokasi penerapan PIP dalam pembentukan

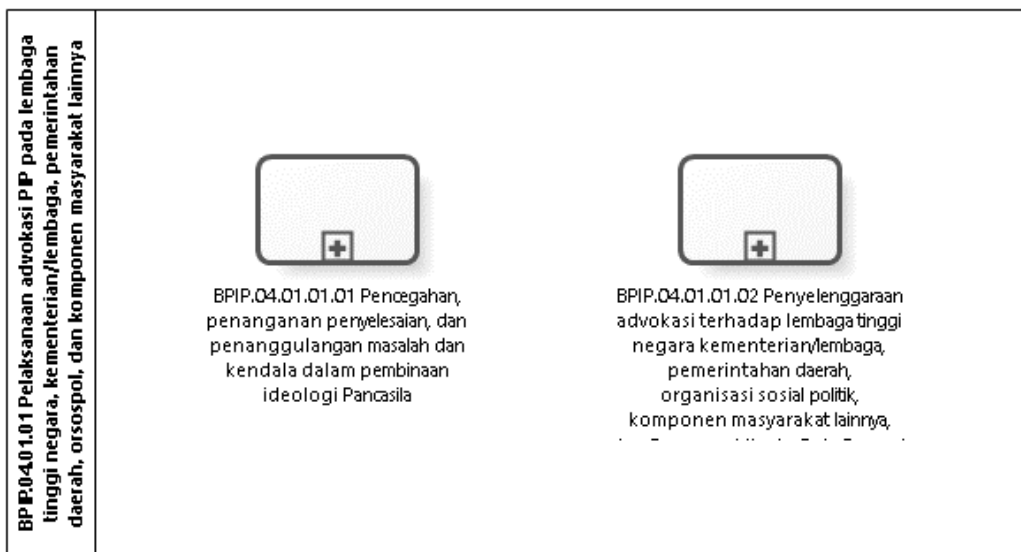
dan pelaksanaan regulasi:

Proses bisnis advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi merupakan proses-proses yang dijalankan BPIP dalam melaksanakan advokasi dan penyelesaian masalah PIP. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

- a) BPIP.04.01.01-Pelaksanaan advokasi PIP pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Dengan *output* rekomendasi penyelesaian pencegahan, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah dan kendala dalam PIP; dan
- b) BPIP.04.01.02-Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam PIP. Dengan *output* rekomendasi penanggulangan terhadap masalah dan kendala dalam PIP (laporan, pengaduan, dan informasi).

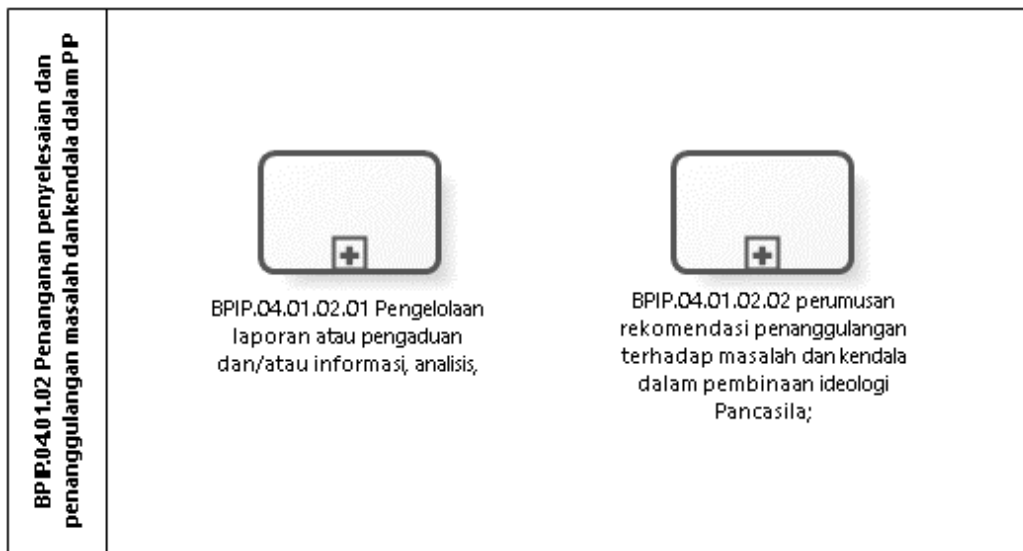
Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.04.01.01-Pelaksanaan advokasi PIP pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya mencakup proses:

- a) BPIP.04.01.01.01- Pencegahan, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
- b) BPIP.04.01.01.02- Penyelenggaraan advokasi terhadap lembaga tinggi negara kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila terkait dengan perbuatan, sikap, atau permasalahan lain yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

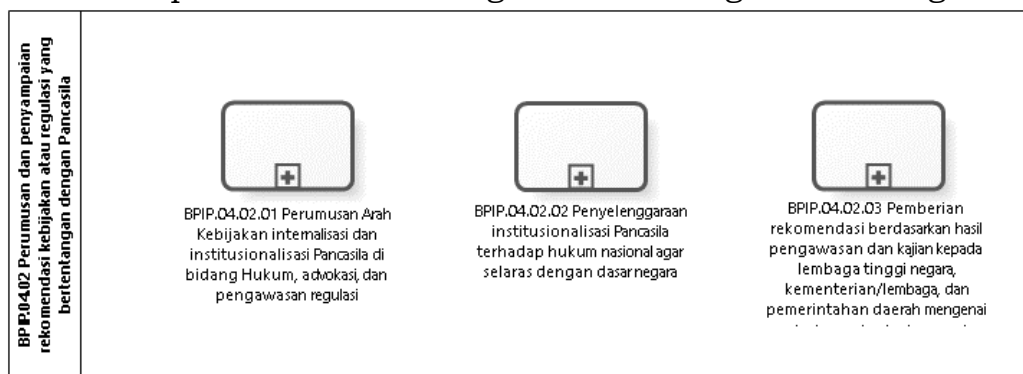


Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.04.01.02-Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam PIP mencakup proses:

- a) BPIP.04.01.02.01- pengelolaan laporan atau pengaduan dan/atau informasi, analisis; dan
- b) BPIP.04.01.02.02- perumusan rekomendasi penanggulangan terhadap masalah dan kendala dalam PIP.



- 2) Direktorat Analisis dan Penyelarasan (DAP)
 Level 2 BPIP.04.02- Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
 Level 3:
- a) BPIP.04.02.01- Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi; dan
 - b) BPIP.04.02.02- Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara.



Deskripsi proses bisnis perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila:

Proses bisnis perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila merupakan proses-proses yang dijalankan BPIP dalam merumuskan arah kebijakan, penyelenggaraan institusional dan pemberian rekomendasi. Proses-proses tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan bidang dan cakupannya, yaitu:

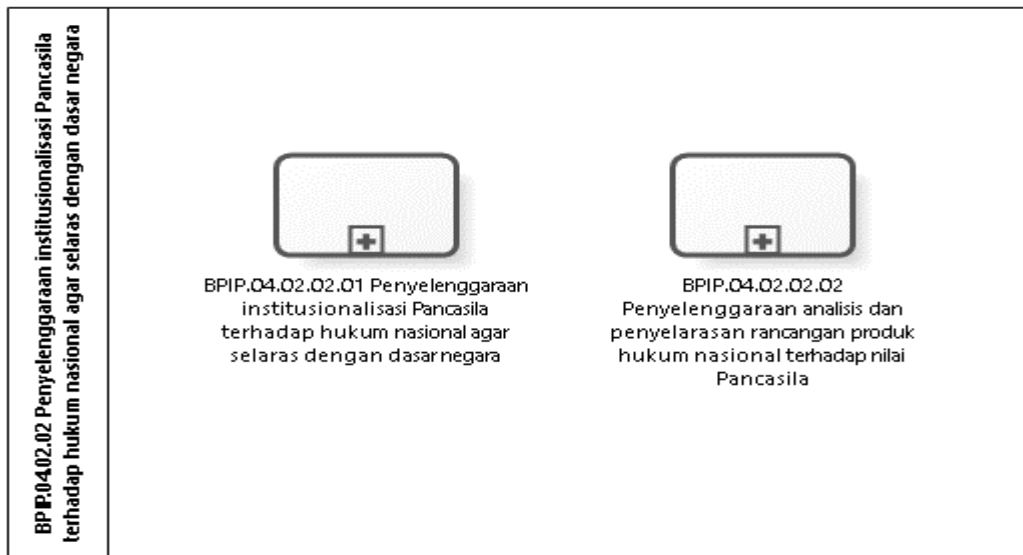
- a) BPIP.04.02.01- Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi. Dengan *output* arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila; dan
- b) BPIP.04.02.02- Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara. Dengan *output* laporan analisis dan penyelarasan.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.04.02.01- Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang Hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi mencakup proses:

BPIP.04.02.01.01- Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.04.02.02- Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara mencakup proses:

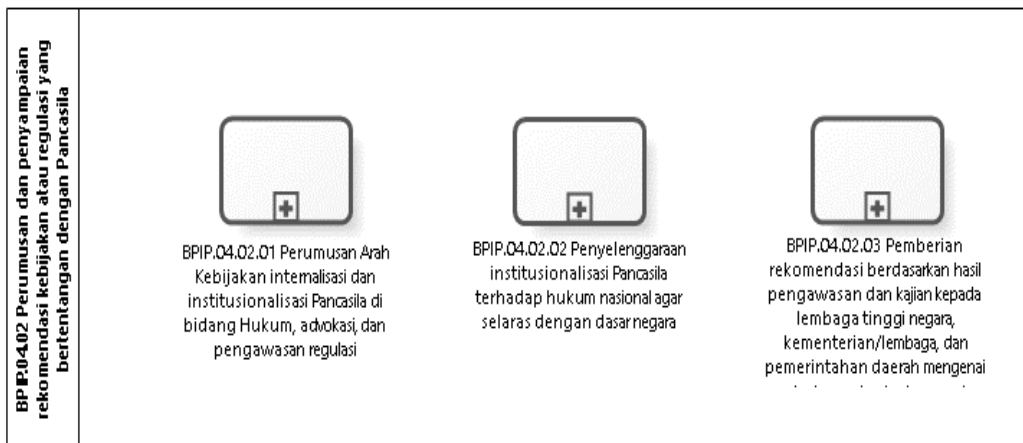
- a) BPIP.04.02.02.01- Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara; dan
- b) BPIP.04.02.02.02- Penyelenggaraan analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional terhadap nilai Pancasila.



- 3) Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi (DPRKR) Level 2 BPIP.04.02- Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Level 3:

BPIP.04.02.03- Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.



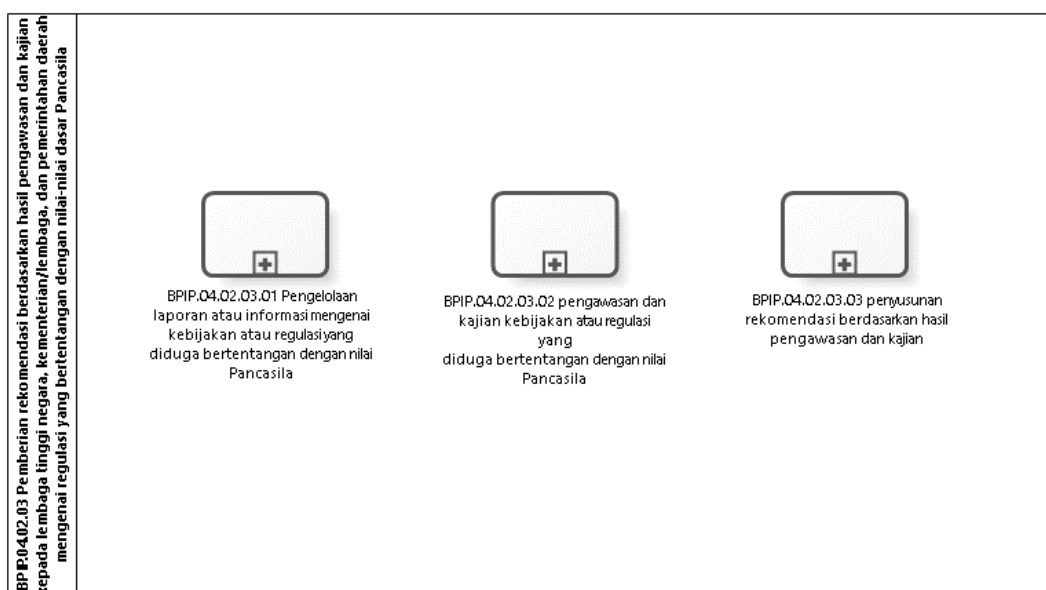
Deskripsi proses bisnis perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila:

Proses bisnis perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila merupakan proses-proses yang dijalankan BPIP dalam merumuskan arah kebijakan, penyelenggaraan institusional dan pemberian rekomendasi. Proses tersebut, yaitu:

BPIP.04.02.03- Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan *output* konsep rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila.

Mengacu pada kebutuhan organisasi, proses bisnis BPIP.04.02.03- Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila mencakup proses:

- a) BPIP.04.02.03.01- Pengelolaan laporan atau informasi mengenai kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila;
- b) BPIP.04.02.03.02- Pengawasan dan kajian kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila; dan
- c) BPIP.04.02.03.0- Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian.



PROSES BISNIS PENDUKUNG

a. Biro Perencanaan dan Keuangan

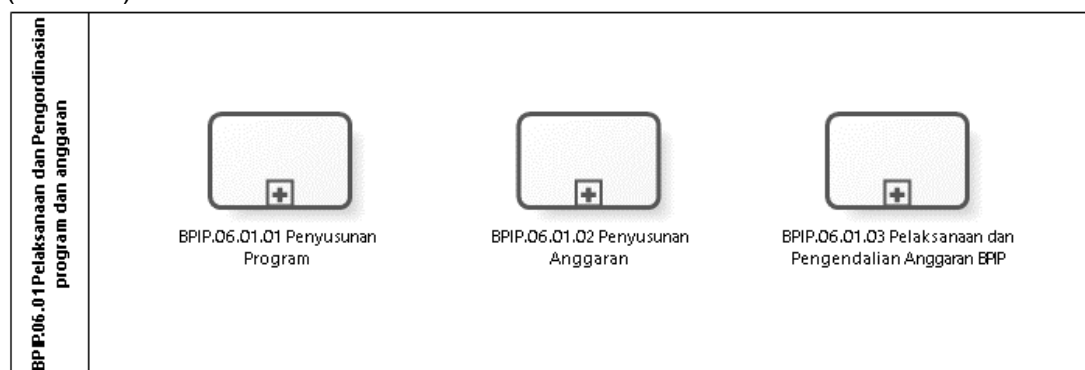
Level 1 BPIP.06- Perencanaan dan Keuangan

Level 2:

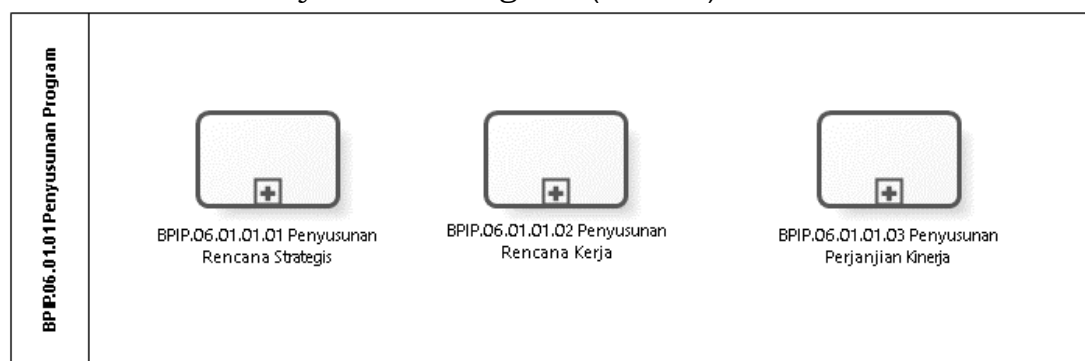
- 1) BPIP.06.01- Pelaksanaan dan pengordinasian program dan anggaran;
- 2) BPIP.06.02- Pelaksanaan dan Pengordinasian evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- 3) BPIP.06.03- Pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- 4) BPIP.06.04- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro perencanaan dan keuangan.



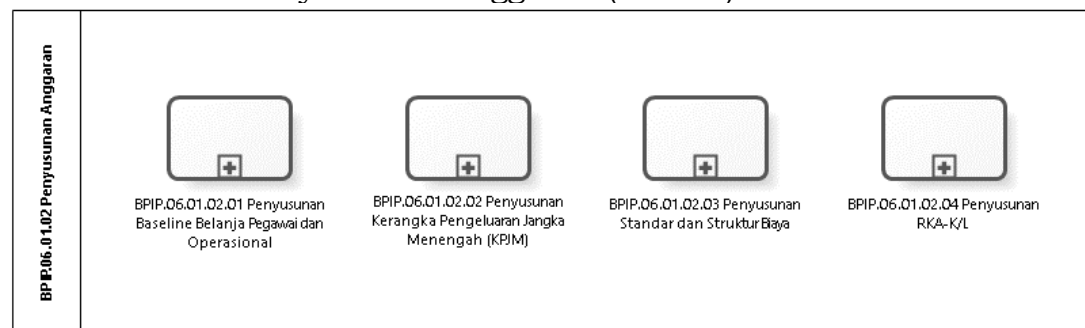
BPIP.06.01- Pelaksanaan dan Pengordinasian Program dan Anggaran (Level 2)



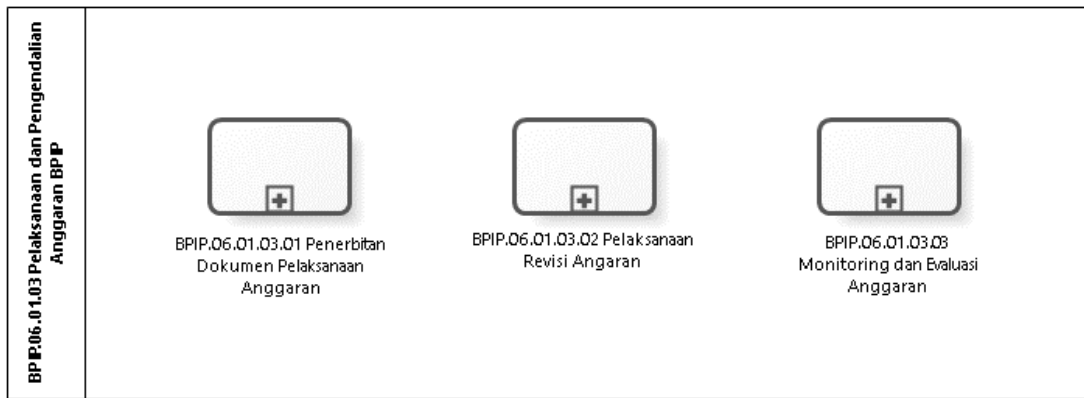
BPIP.06.01.01-Penyusunan Program (Level 3)



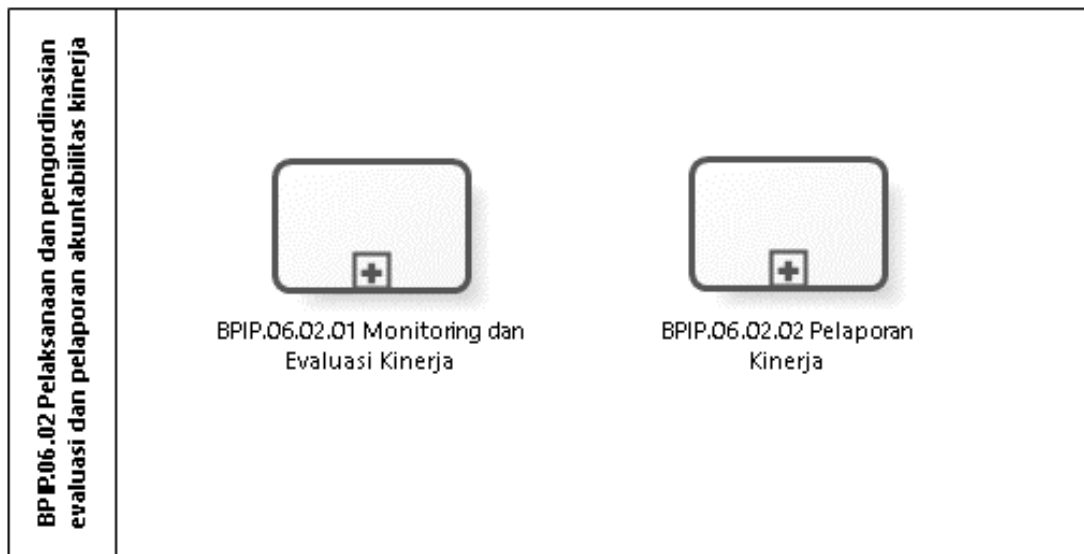
BPIP.06.01.02-Penyusunan Anggaran (Level 3)



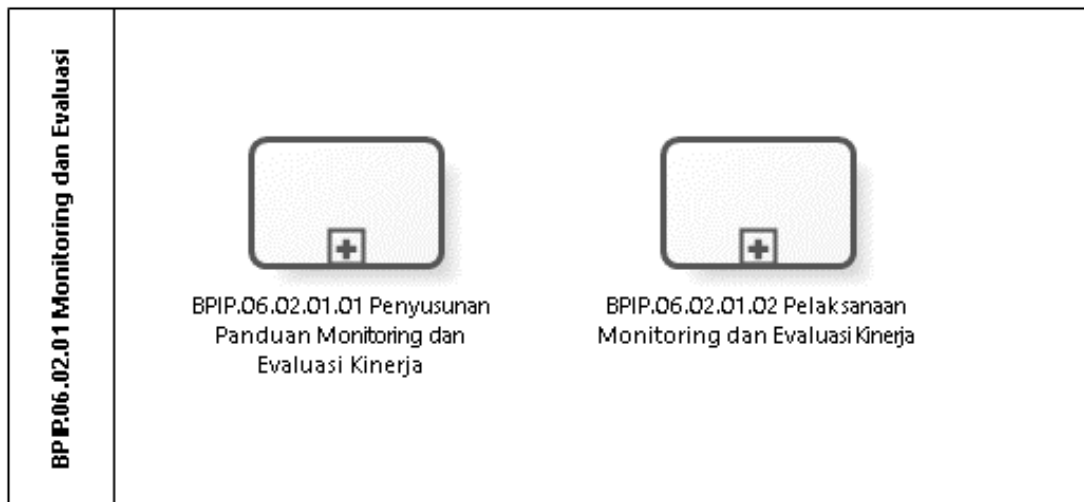
BPIP.06.01.03-Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran BPIP (Level 3)



BPIP.06.02- Pelaksanaan dan Pengordinasian Evaluasi dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja (Level 2)



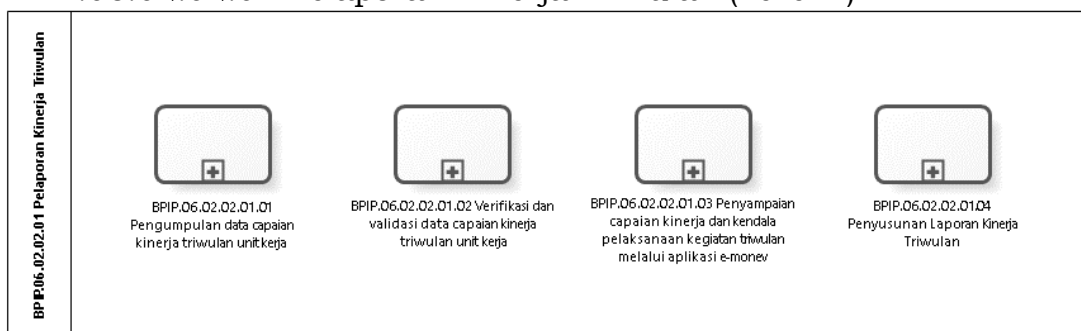
BPIP.06.02.01- Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Level 3)



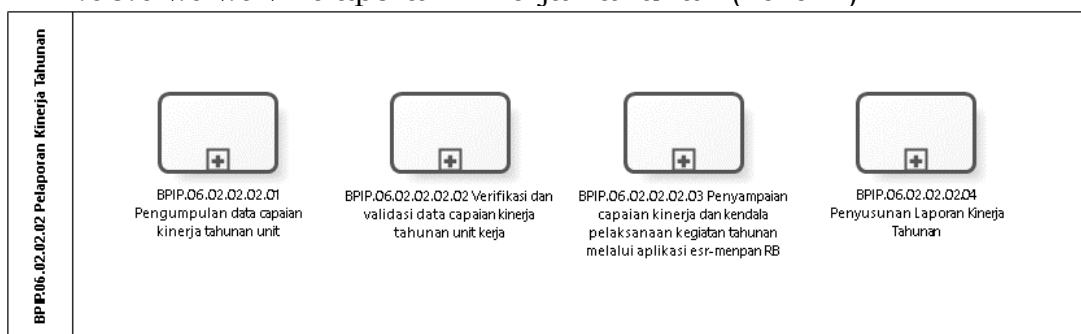
BPIP.06.02.02- Pelaporan Kinerja (Level 3)



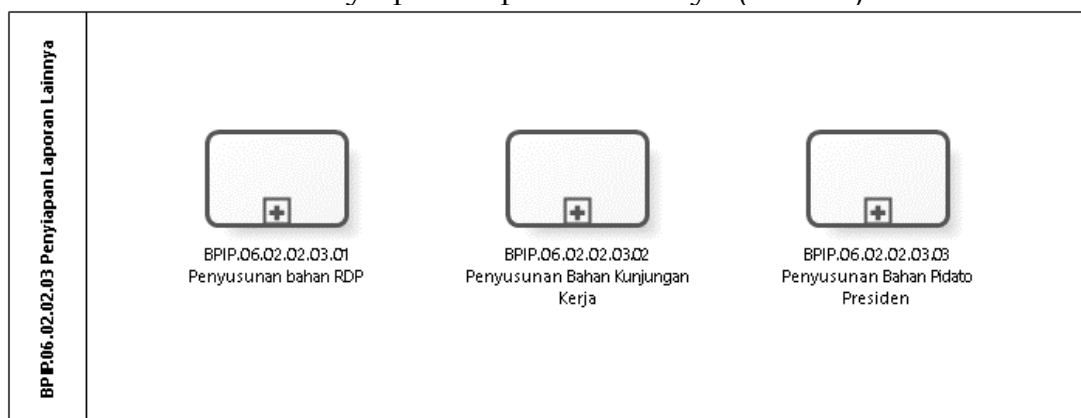
BPIP.06.02.02.01-Pelaporan Kinerja Triwulan (Level 4)



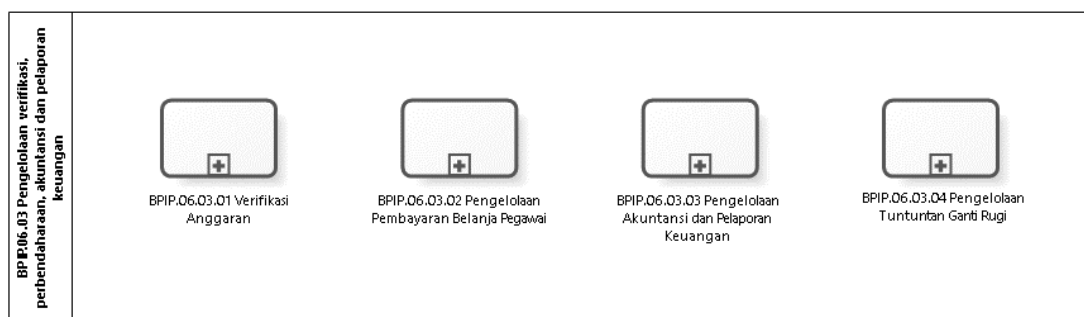
BPIP.06.02.02.02-Pelaporan Kinerja Tahunan (Level 4)



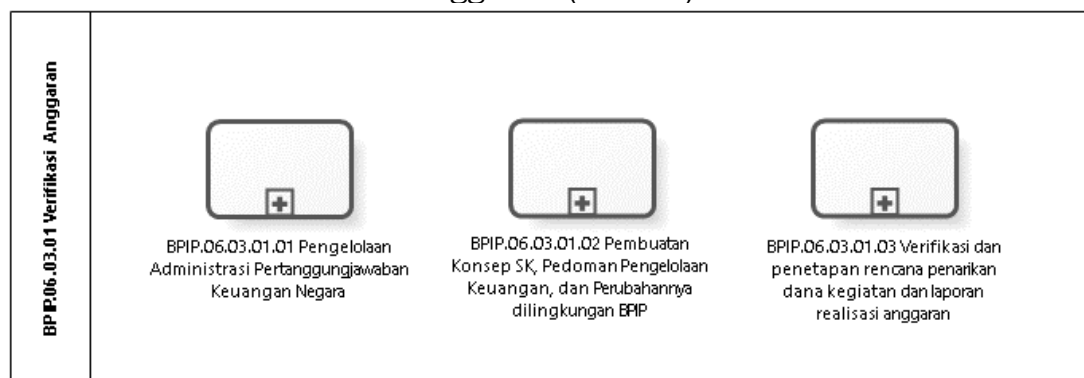
BPIP.06.02.02.03-Penyiapan Laporan Lainnya (Level 4)



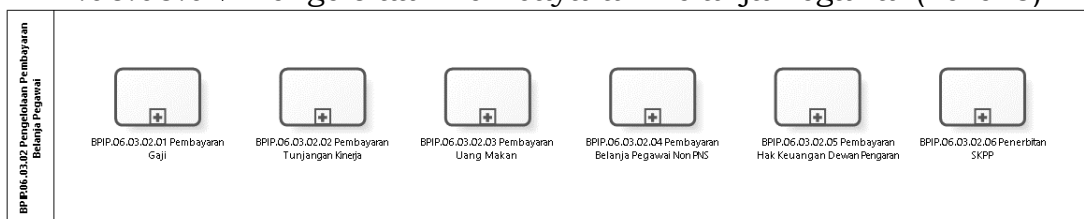
BPIP.06.03- Pengelolaan Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Level 2)



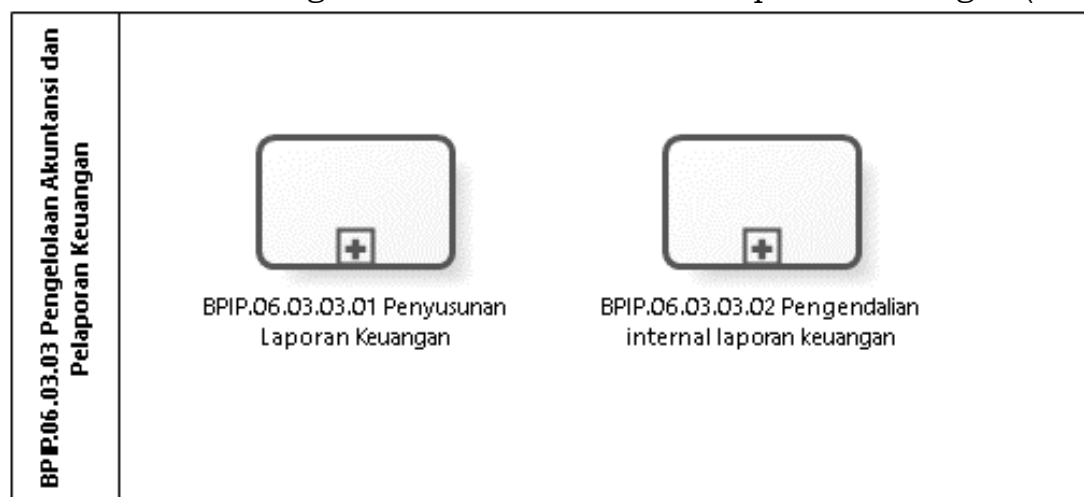
BPIP.06.03.01- Verifikasi Anggaran (Level 3)



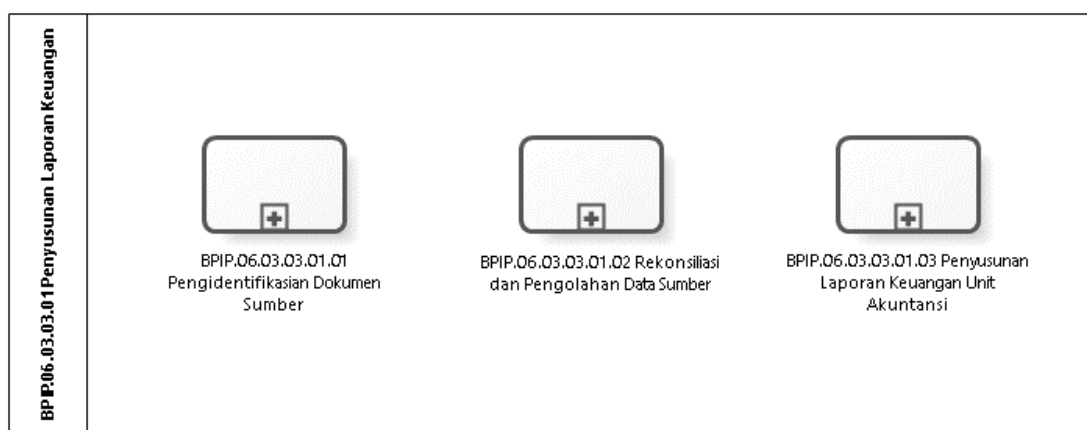
BPIP.06.03.02- Pengelolaan Pembayaran Belanja Pegawai (Level 3)



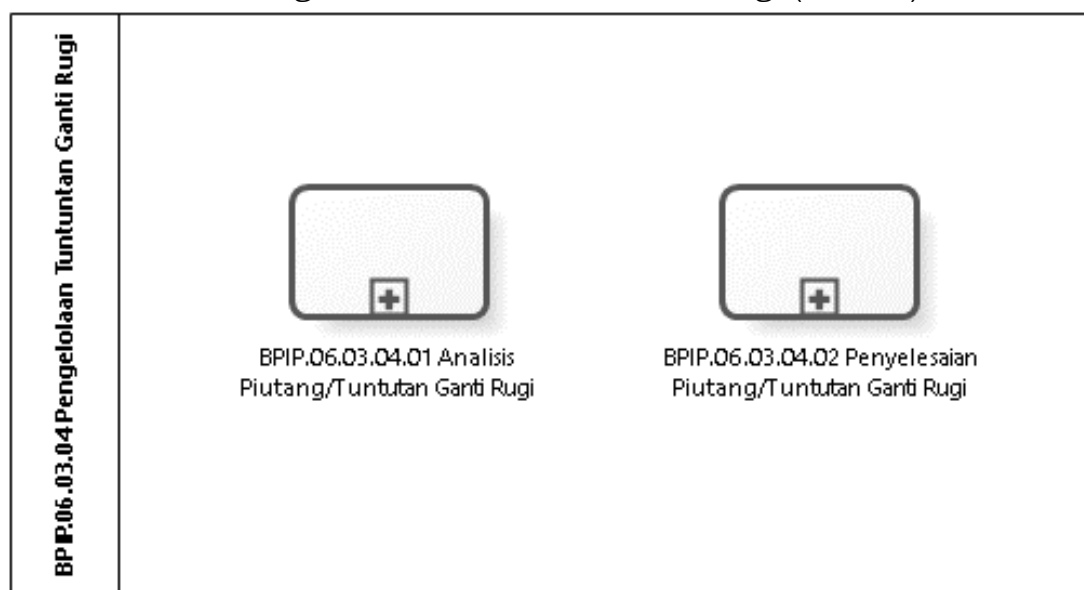
BPIP.06.03.03- Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Level 3)



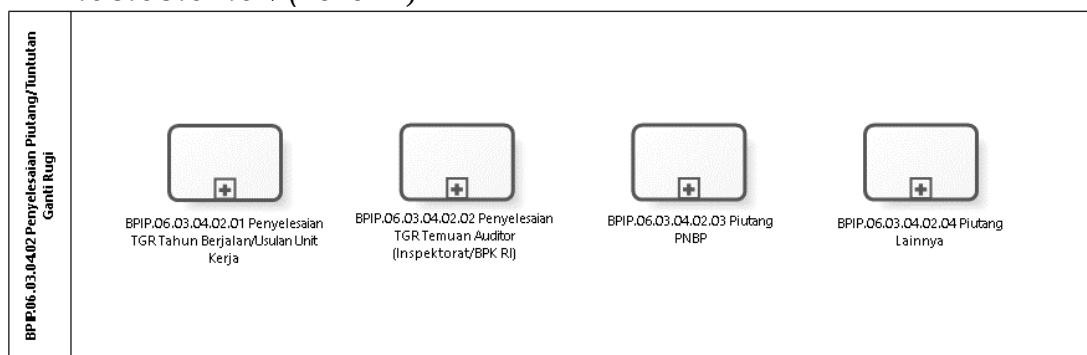
BPIP.06.03.03.01- Penyusunan Laporan Keuangan (Level 4)



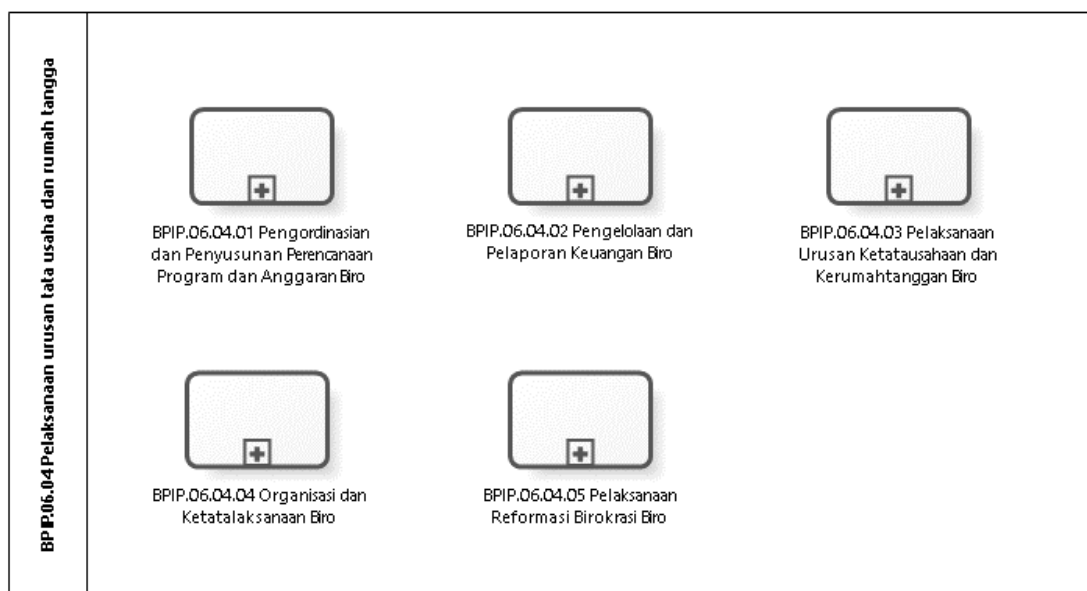
BPIP.06.03.04-Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi (Level 3)



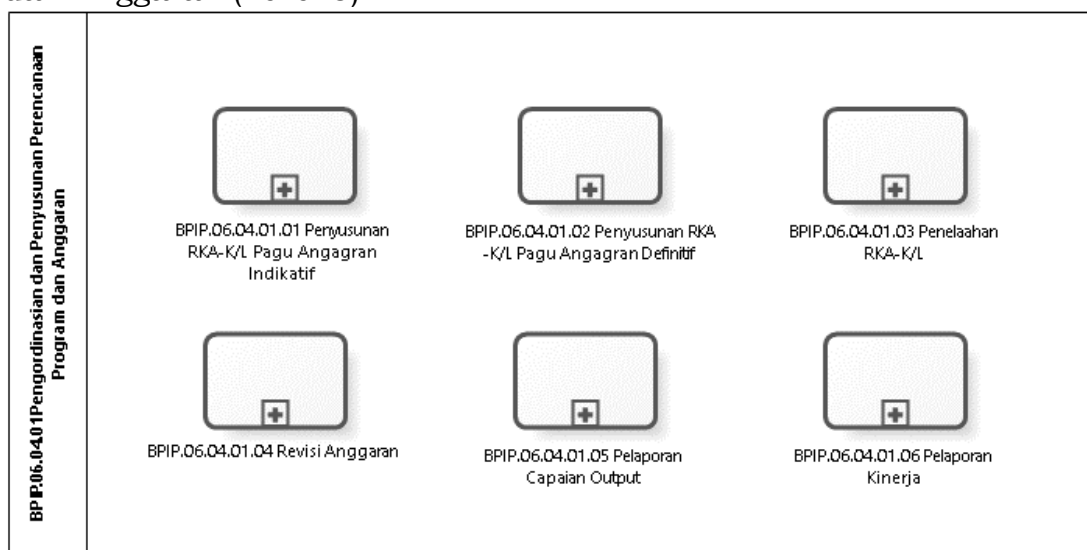
BPIP.06.03.04.02 (Level 4)



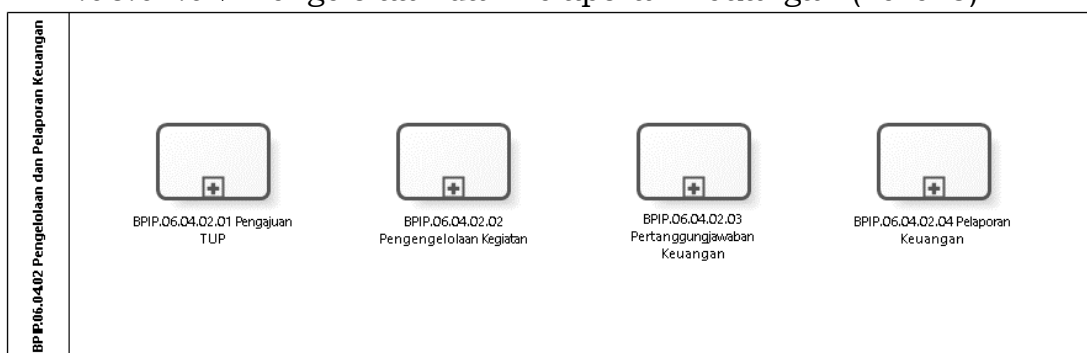
BPIP.06.04-Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Perencanaan dan Keuangan (Level 2)






BPIP.06.04.01- Pengordinasian dan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran (Level 3)







BPIP.06.04.02- Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan (Level 3)







BPIP.06.04.03-Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggan (Level 3)

BPIP.06.04.03 Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan	 BPIP.06.04.03.01 Manajemen SDM unit kerja	 BPIP.06.04.03.02 Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan	 BPIP.06.04.03.03 Pelaksanaan Arsip dan Persuratan
--	--	---	--

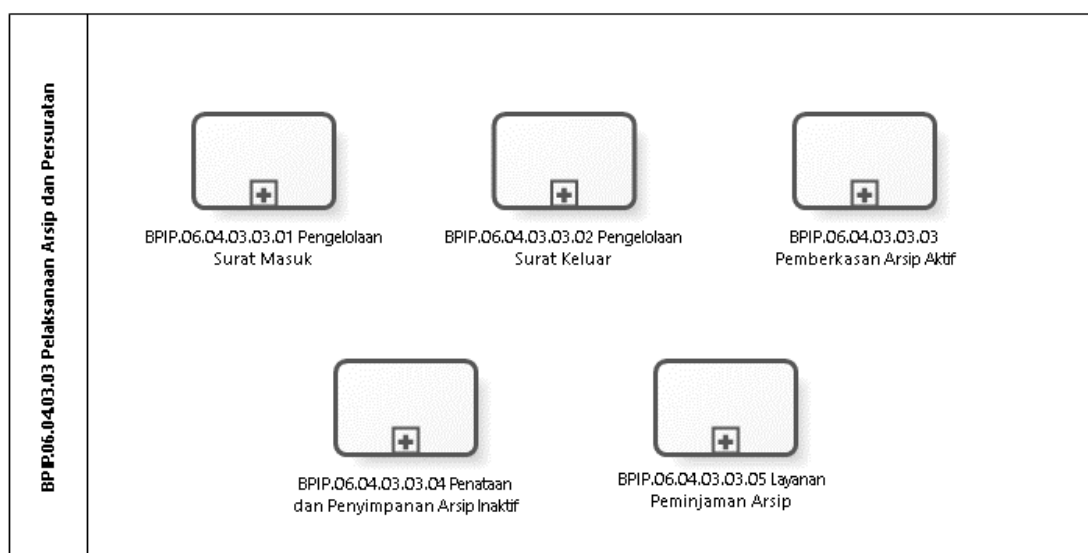
BPIP.06.04.03.02-Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Level 4)

BPIP.06.04.03.02 Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan	 BPIP.06.04.03.02.01 Penerbitan Surat Bebas Temuan	 BPIP.06.04.03.02.02 Pengajuan ATK	 BPIP.06.04.03.02.03 Fasilitasi Rapat	 BPIP.06.04.03.02.04 Pemohonan Perbaikan dan/Penambahan Fasilitas
--	--	--	---	---

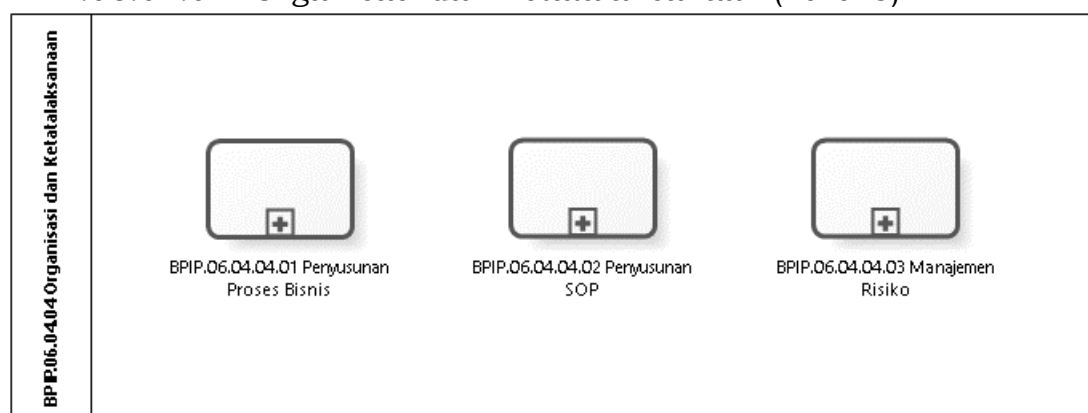
BPIP.06.04.03.02.03-Fasilitasi Rapat (Level 5)

BPIP.06.04.03.02.03 Fasilitasi Rapat	 BPIP.06.04.03.02.03.01 Fasilitasi Penyediaan Ruang Rapat	 BPIP.06.04.03.02.03.02 Fasilitasi Konsumsi Kegiatan	 BPIP.06.04.03.02.03.03 Fasilitasi Penyediaan Narasumber	 BPIP.06.04.03.02.03.04 Fasilitasi Link Zoom
--------------------------------------	---	--	---	--

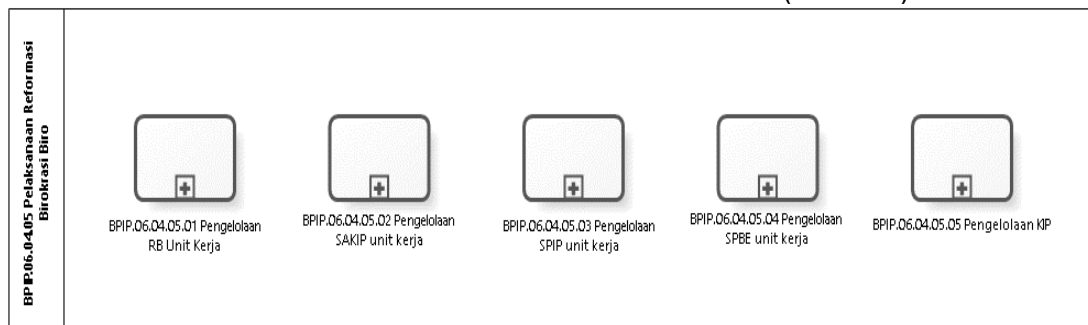
BPIP.06.04.03.03- Pelaksanaan Arsip dan Persuratan (Level 4)



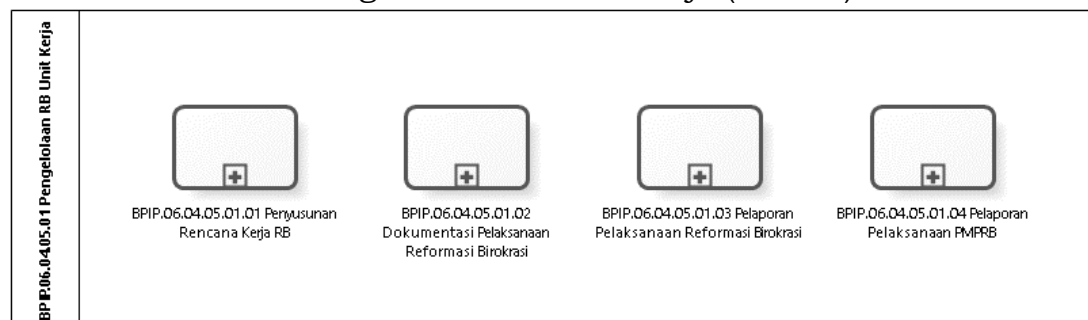
BPIP.06.04.04- Organisasi dan Ketatalaksanaan (Level 3)



BPIP.06.04.05- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Level 3)



BPIP.06.04.05.01- Pengelolaan RB Unit Kerja (Level 4)



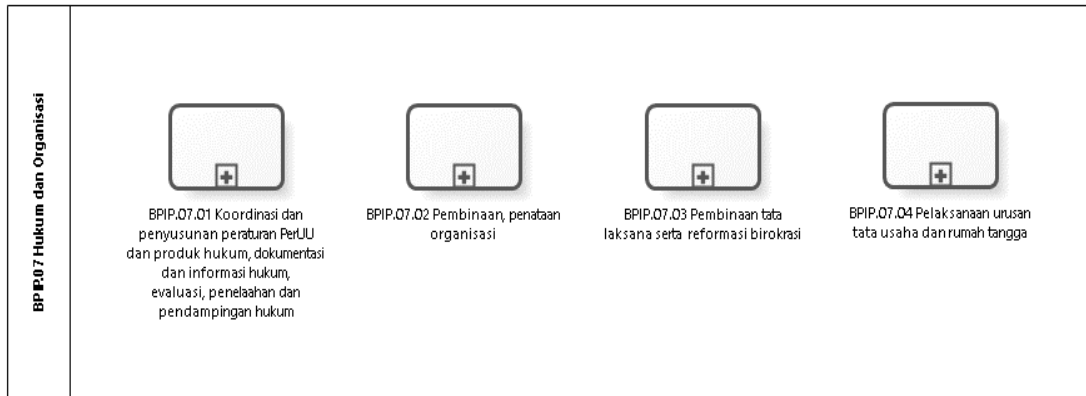
b. Biro Hukum dan Organisasi

Level 1 BPIP.07-Hukum dan Organisasi

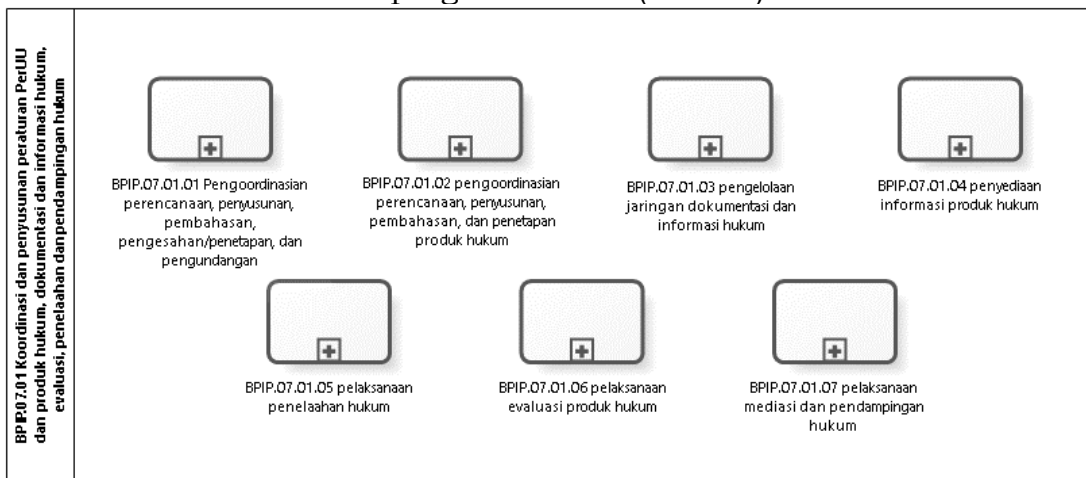
Level 2:

- 1) BPIP.07.01- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum,

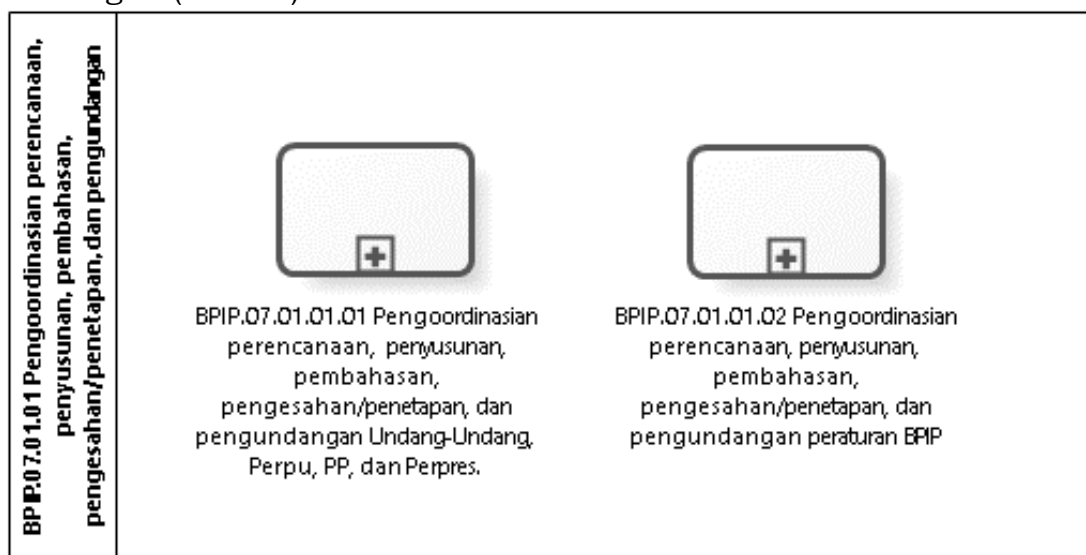
- evaluasi, penelaahan dan pendampingan hukum;
- 2) BPIP.07.02- Pembinaan dan Penataan Organisasi;
- 3) BPIP.07.03- Pembinaan Tata Laksana Serta Reformasi Birokrasi; dan
- 4) BPIP.07.04-Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum dan Organisasi.



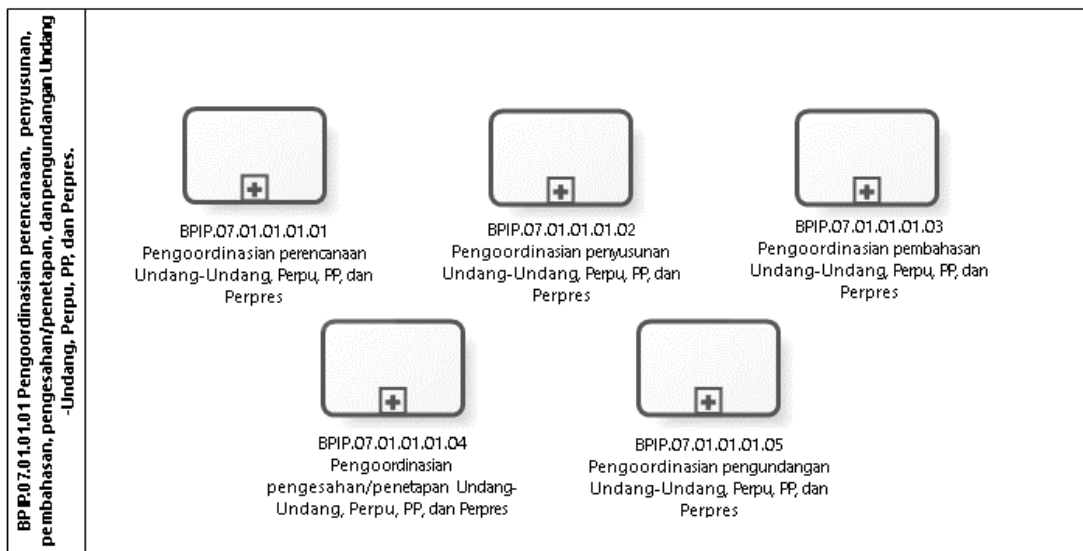
BPIP.07.01- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Evaluasi, Penelaahan dan Pendampingan Hukum (Level 2)



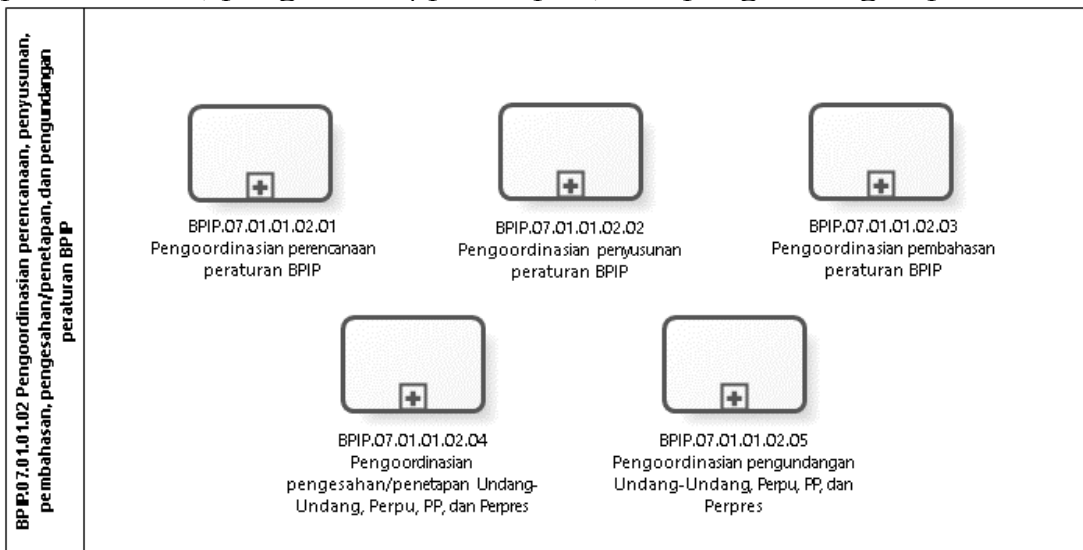
BPIP.07.01.01- Pengoordinasian perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/ penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan (Level 3)



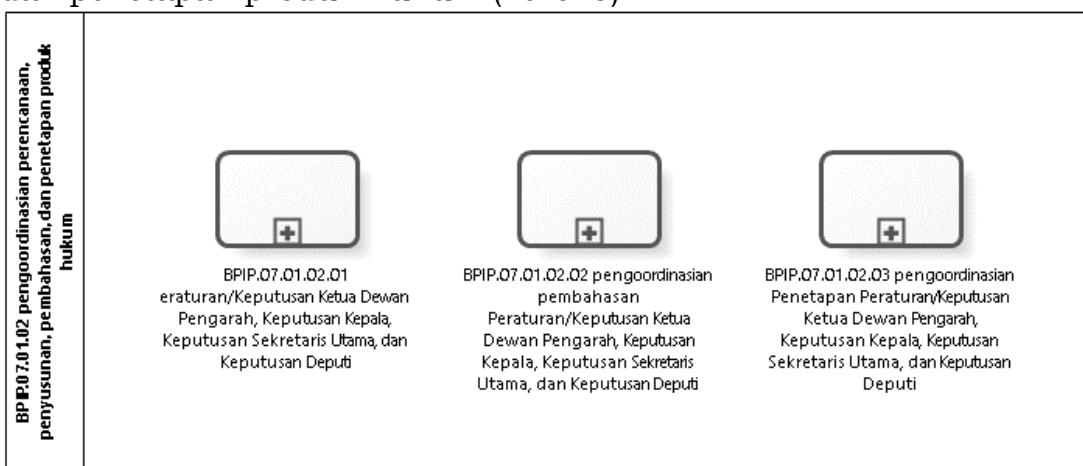
BPIP.07.01.01.01-Pengoordinasian perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/ penetapan, dan pengundangan Undang-Undang, Perpu, PP, dan Perpres.



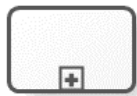

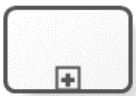
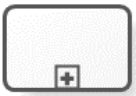
BPIP.07.01.01.02-Pengoordinasian perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan peraturan BPIP





BPIP.07.01.02- Pengoordinasian perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan produk hukum (Level 3)





BPIP.07.01.03-Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (Level 3)

BPIP.07.01.03 pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	 <p>BPIP.07.01.03.01 Pengelolaan SNIPPER</p>	 <p>BPIP.07.01.03.02 Pengelolaan JDIH</p>	 <p>BPIP.07.01.03.03 Pengelolaan SI Evaluasi Produk Hukum</p>	 <p>BPIP.07.01.03.04 Pengelolaan Survei Kepuasan Pelanggan</p>
--	---	--	---	---

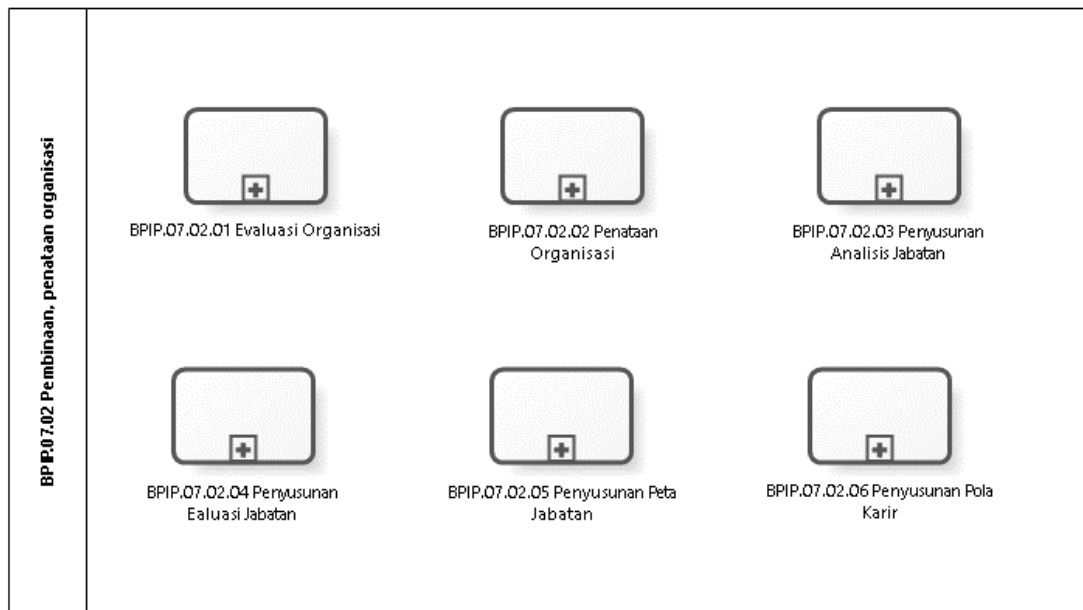
BPIP.07.01.04-Penyediaan informasi produk hukum (Level 3)

BPIP.07.01.04 Penyediaan informasi produk hukum	 <p>BPIP.07.01.04.01 Pendokumentasian Produk Hukum</p>	 <p>BPIP.07.01.04.02 Penyebarluasan Produk Hukum</p>
---	---	--

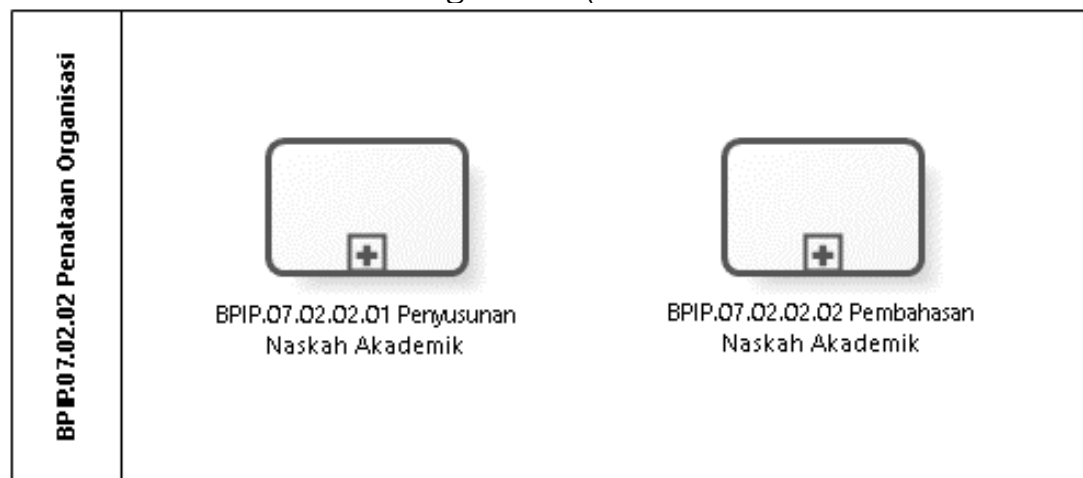
BPIP.07.01.07-Pelaksanaan mediasi dan pendampingan hukum (Level 3)

BPIP.07.01.07 pelaksanaan mediasi dan pendampingan hukum	 <p>BPIP.07.01.07.01 Pelaksanaan mediasi</p>	 <p>BPIP.07.01.07.02 Pelaksanaan pendampingan hukum</p>
--	---	---

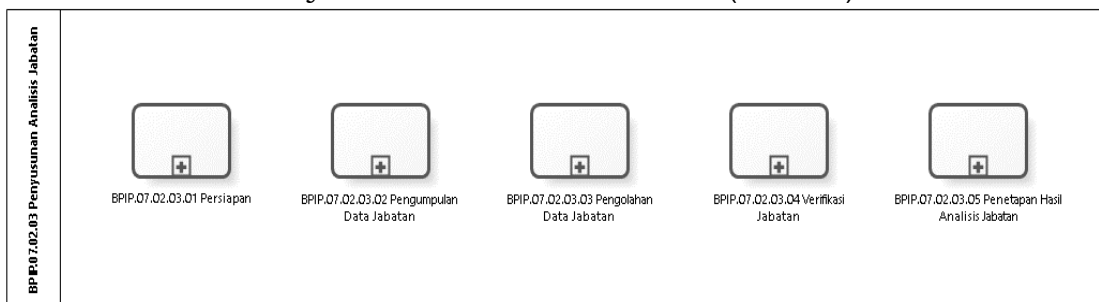
BPIP.07.02- Pembinaan dan Penataan Organisasi (Level 2)



BPIP.07.02.02- Penataan Organisasi (Level 3)



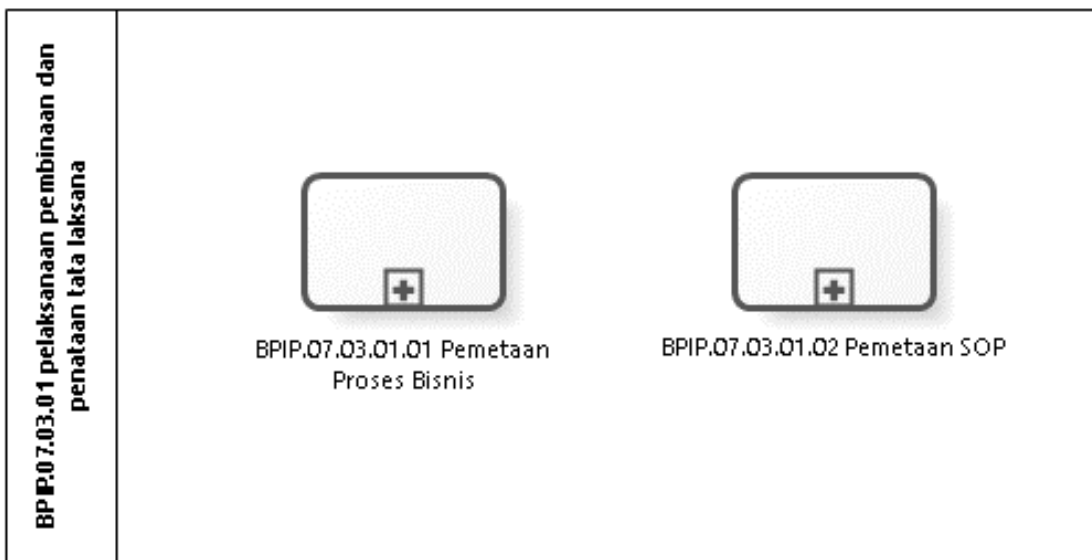
BPIP.07.02.03- Penyusunan Analisis Jabatan (Level 3)



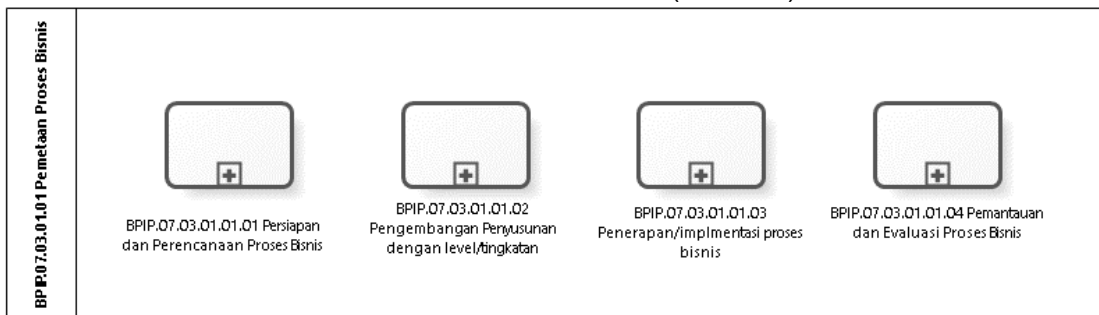
BPIP.07.03- Pembinaan Tata Laksana Serta Reformasi Birokrasi (Level 2)



BPIP.07.03.01- Pelaksanaan pembinaan dan penataan tata laksana (Level 3)



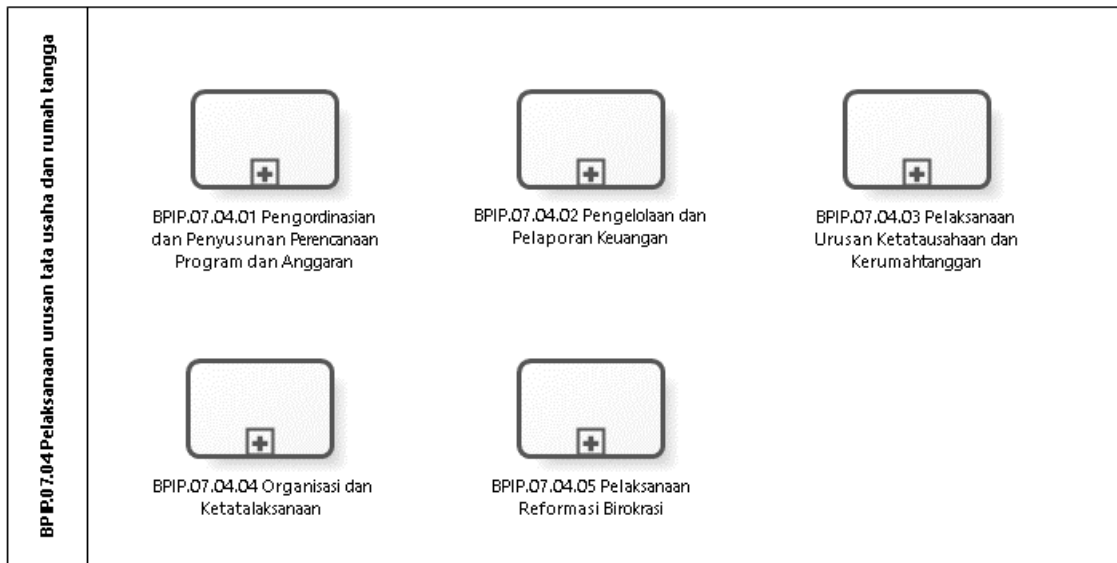
BPIP.07.03.01.01-Pemetaan Proses Bisnis (Level 4)



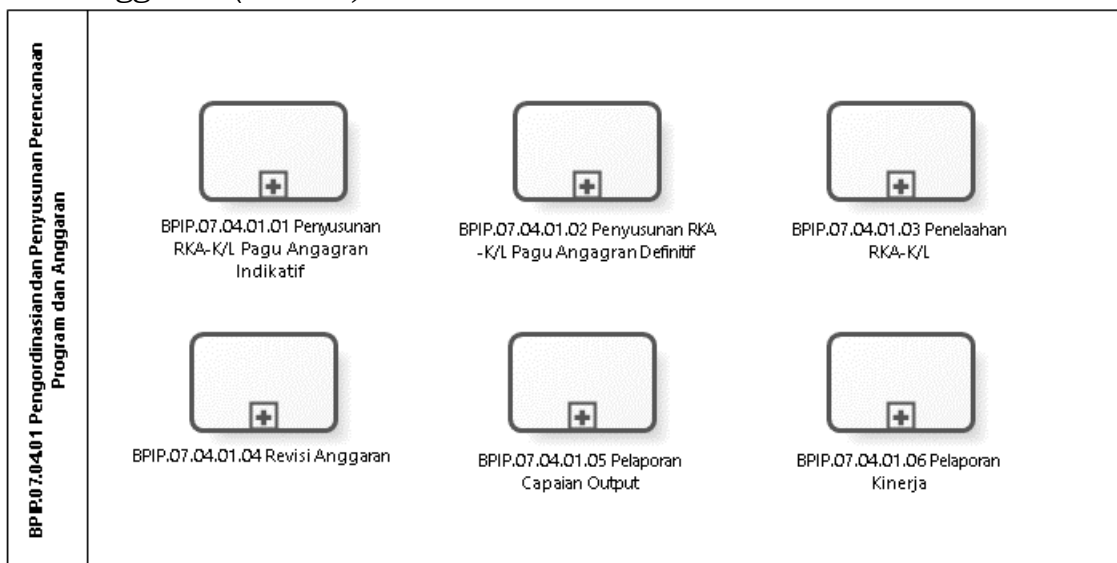
BPIP.07.03.02- Pengoordinasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Level 3)



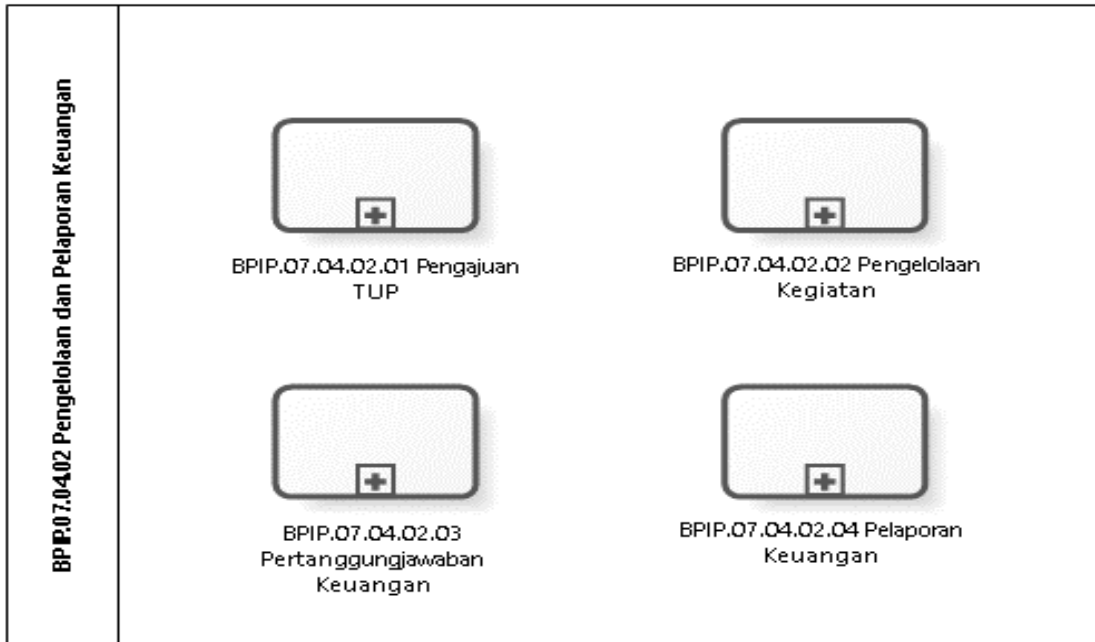
BPIP.07.04- Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Hukum dan Organisasi (Level 2)



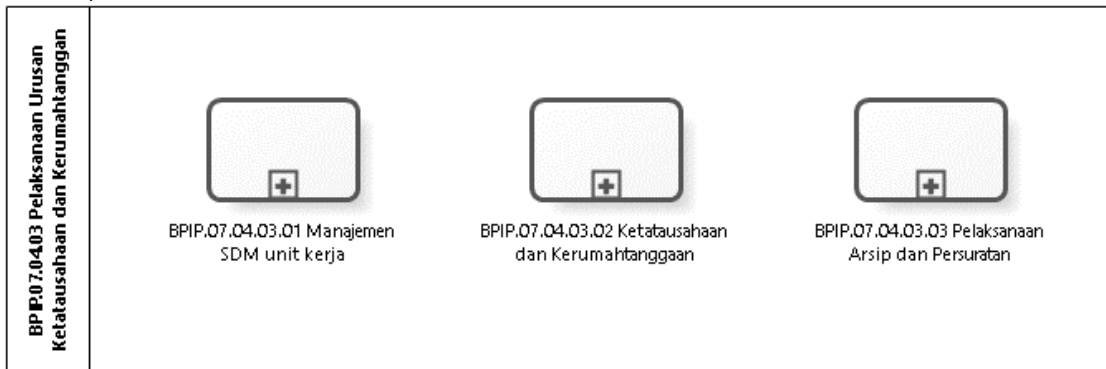
BPIP.07.04.01- Pengordinasian dan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran (Level 3)



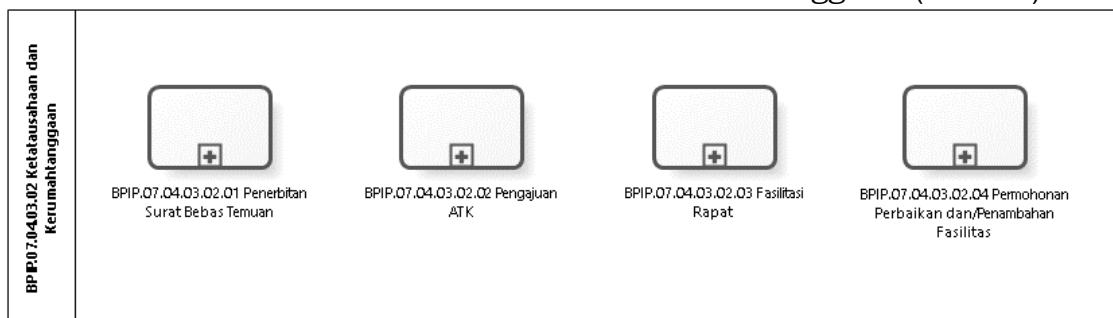
BPIP.07.04.02- Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan (Level 3)



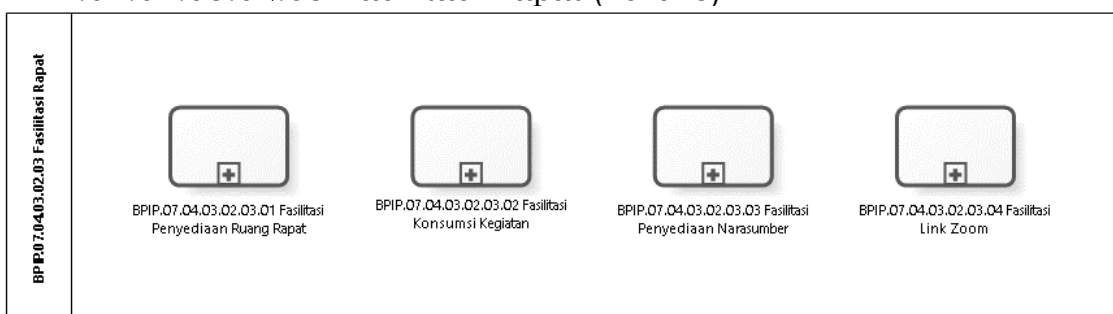
BPIP.07.04.03- Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Level 3)



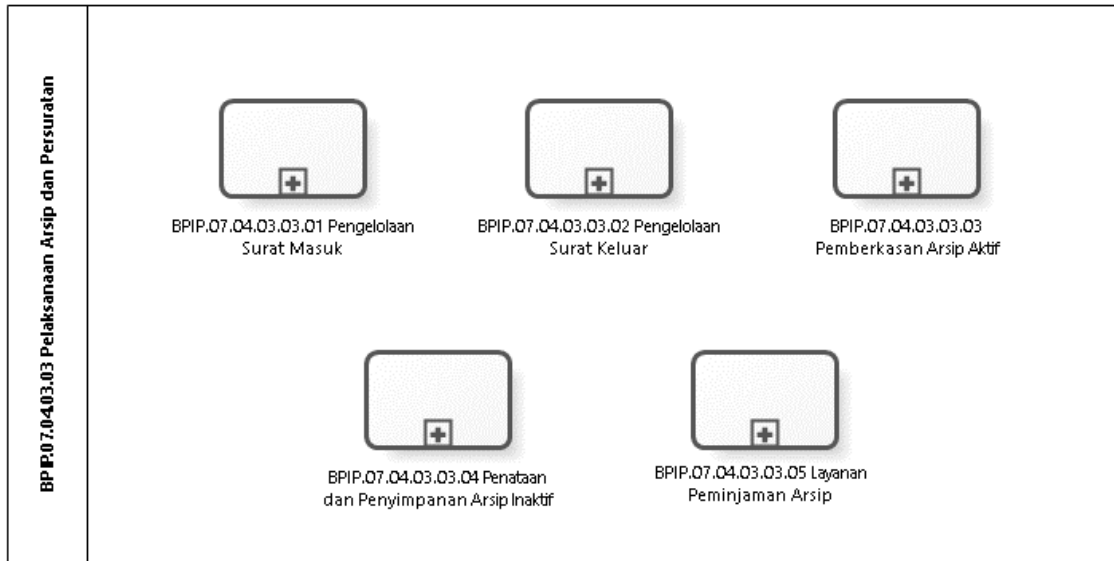
BPIP.07.04.03.02- Ketatausahaan dan kerumahtanggaan (Level 4)



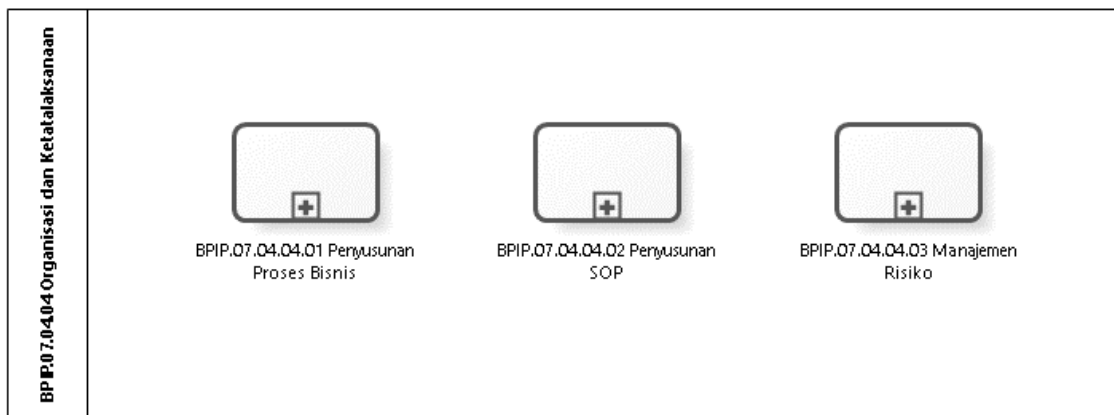
BPIP.07.04.03.02.03-Fasilitasi Rapat (Level 5)



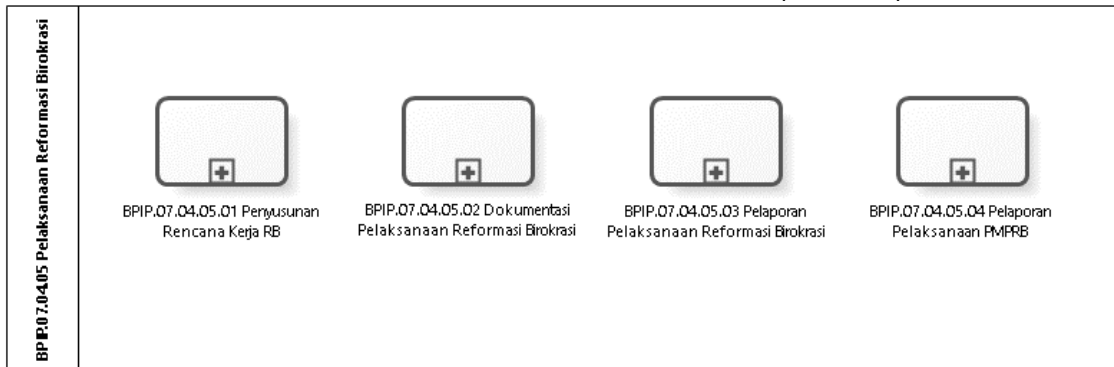
BPIP.07.04.03.03- Pelaksanaan Arsip dan Persuratan (Level 4)



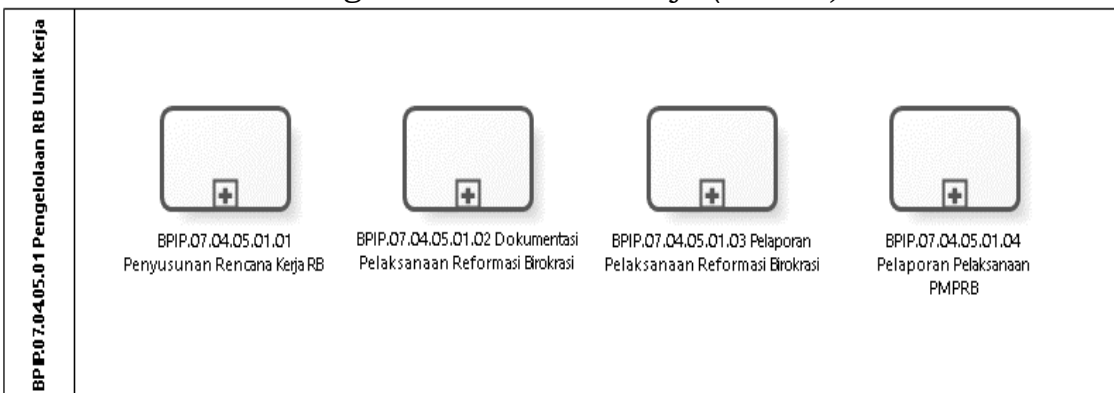
BPIP.07.04.04- Organisasi dan Ketatalaksanaan (Level 3)



BPIP.07.04.05- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Level 3)



BPIP.07.04.05.01-Pengelolaan RB Unit Kerja (Level 4)

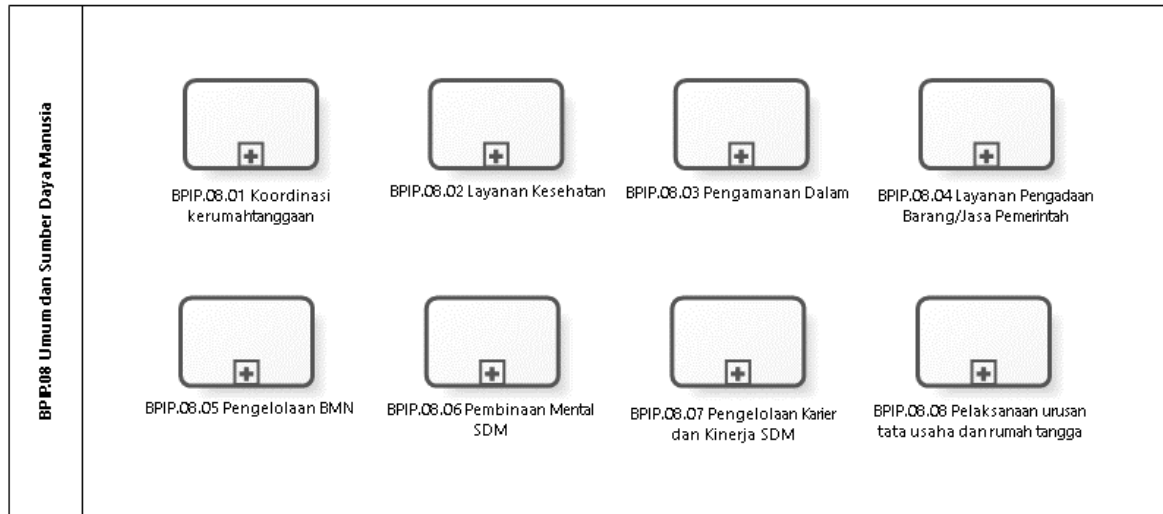


c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

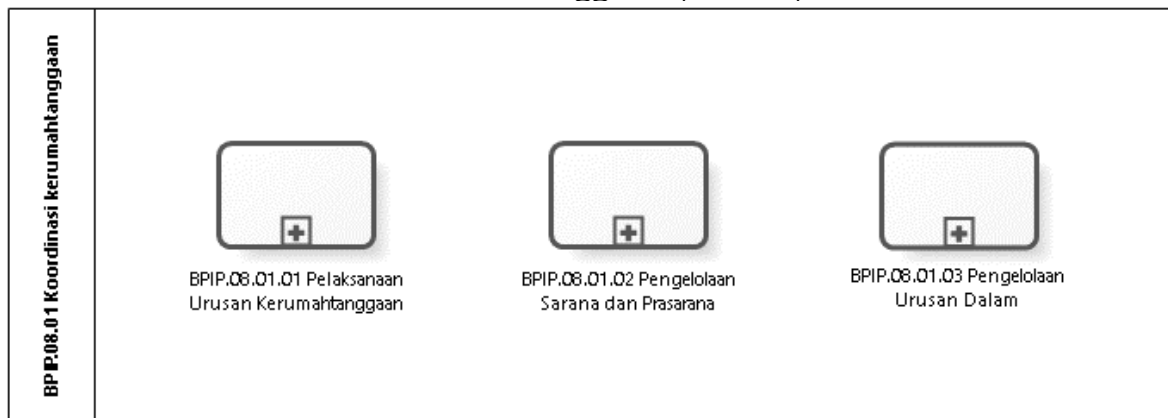
Level 1 BPIP.08-Umum dan SDM

Level 2:

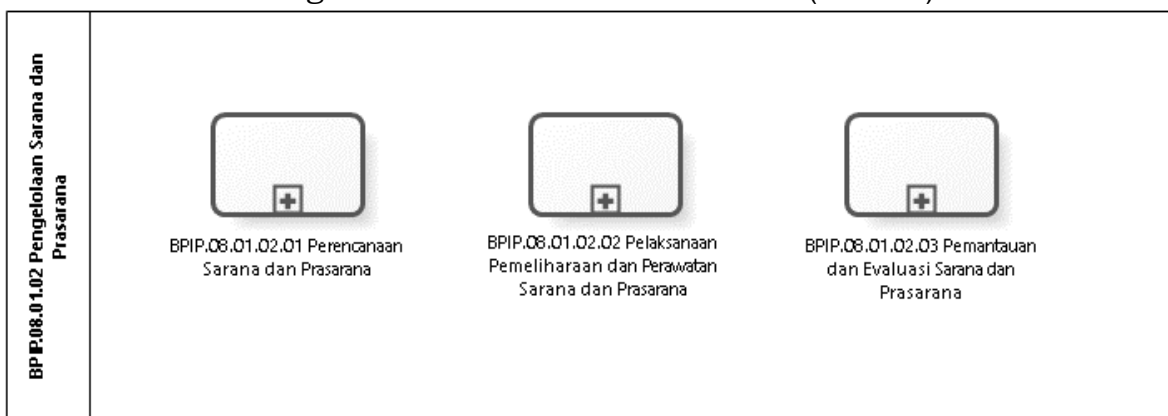
- 1) BPIP.08.01-Koordinasi kerumahtanggaan;
- 2) BPIP.08.02-Layanan kesehatan;
- 3) BPIP.08.03-Pengamanan dalam;
- 4) BPIP.08.04-Layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 5) BPIP.08.05-Pengelolaan BMN;
- 6) BPIP.08.06-Pembinaan mental SDM;
- 7) BPIP.08.07-Pengelolaan karier dan kinerja SDM; dan
- 8) BPIP.08.08-penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.



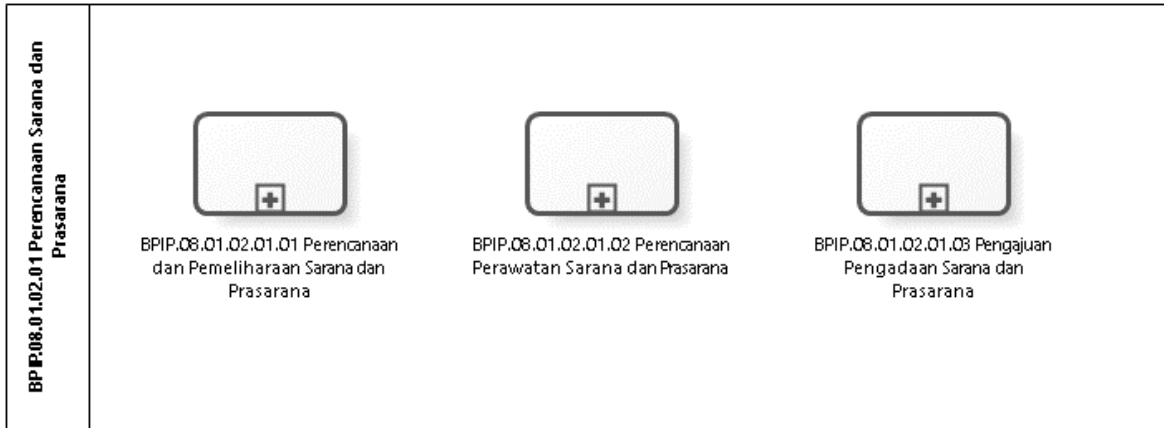
BPIP.08.01- Koordinasi Kerumahtanggaan (Level 2)



BPIP.08.01.02- Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Level 3)



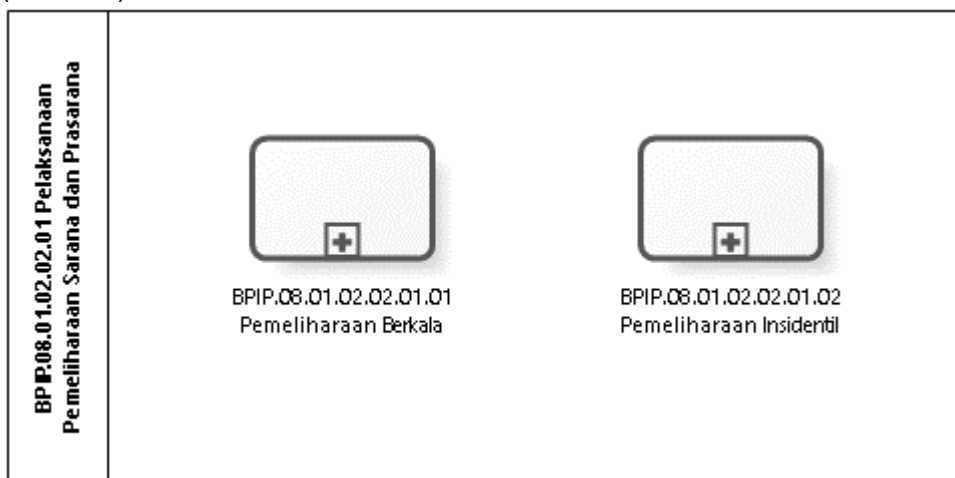
BPIP.08.01.02.01-Perencanaan Sarana dan Prasarana (Level 4)



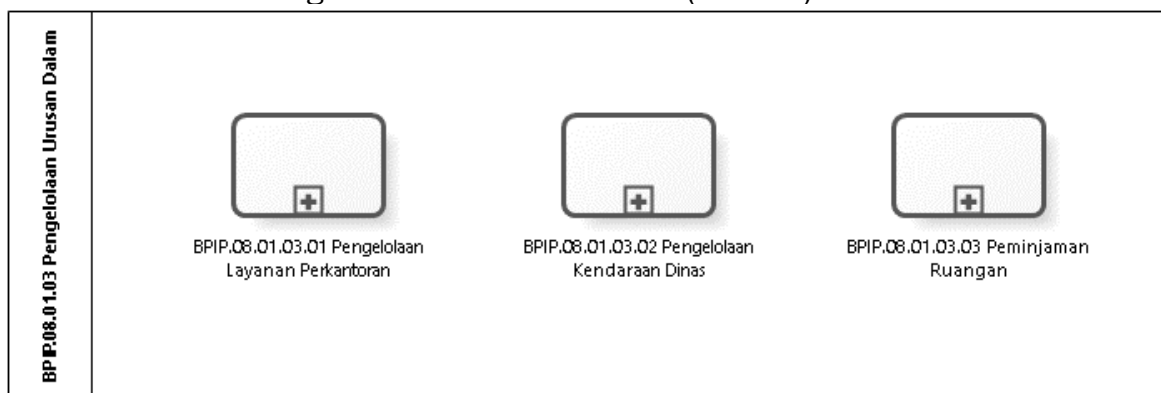
BPIP.08.01.02.02- Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana (Level 4)



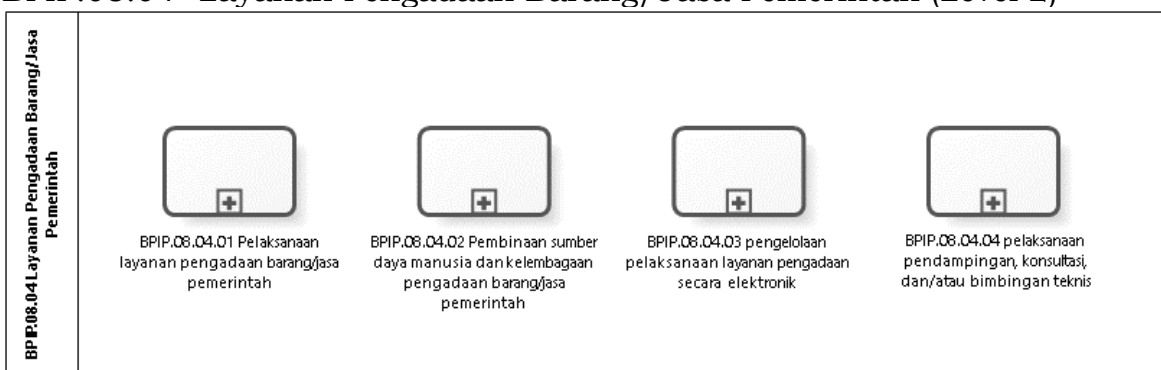
BPIP.08.01.02.02.01-Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Level 5)



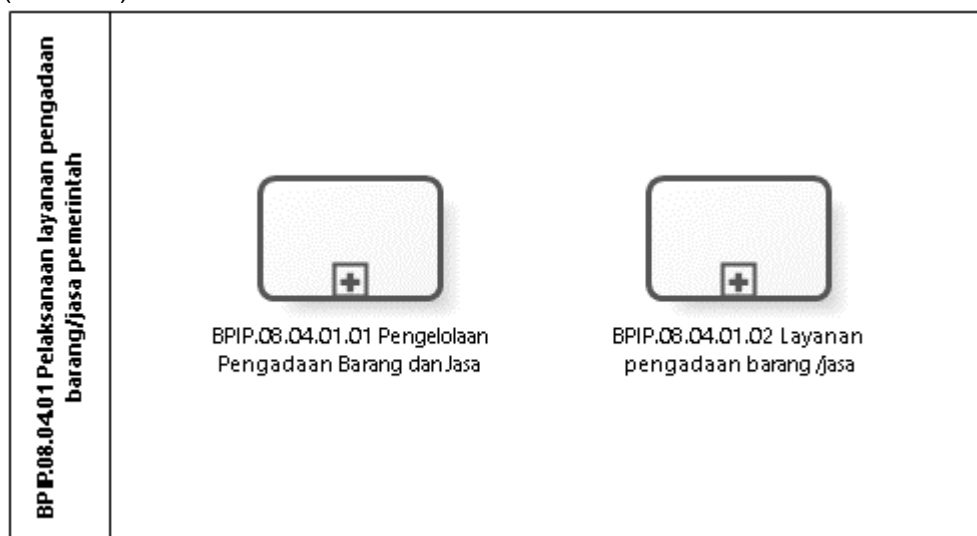
BPIP.08.01.03- Pengelolaan Urusan Dalam (Level 3)



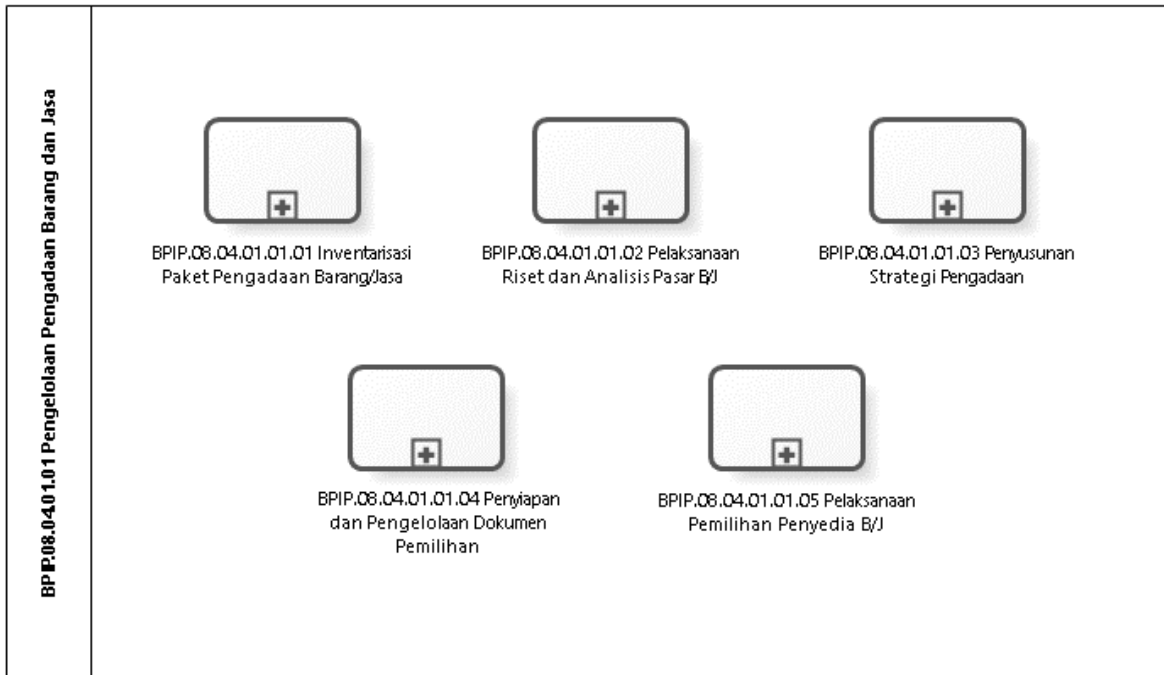
BPIP.08.04- Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Level 2)



BPIP.08.04.01-Pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah (Level 3)



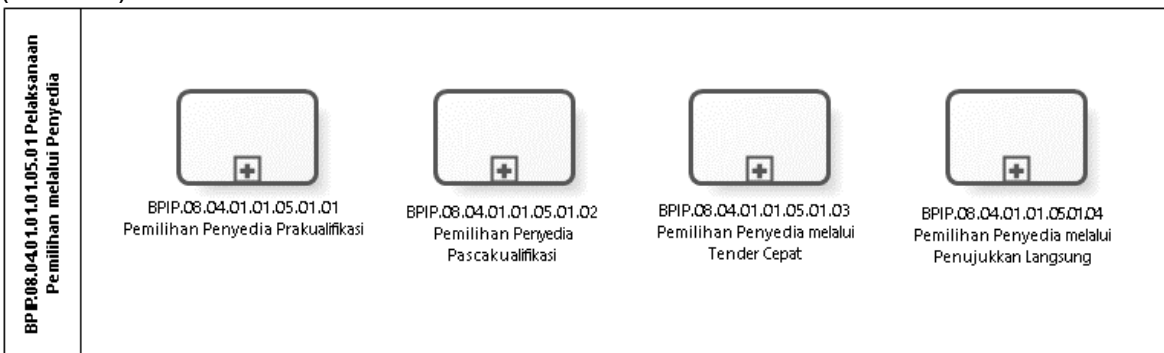
BPIP.08.04.01.01- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Level 4)



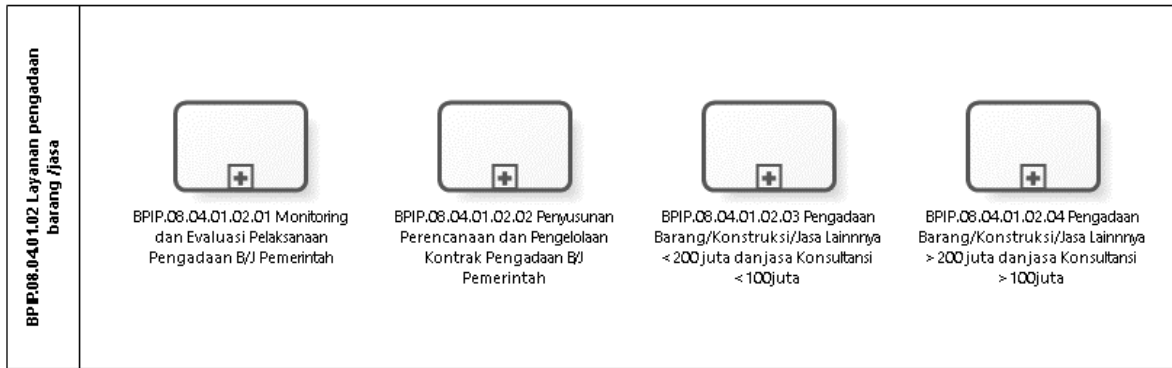
BPIP.08.04.01.01.05 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa (Level 5)



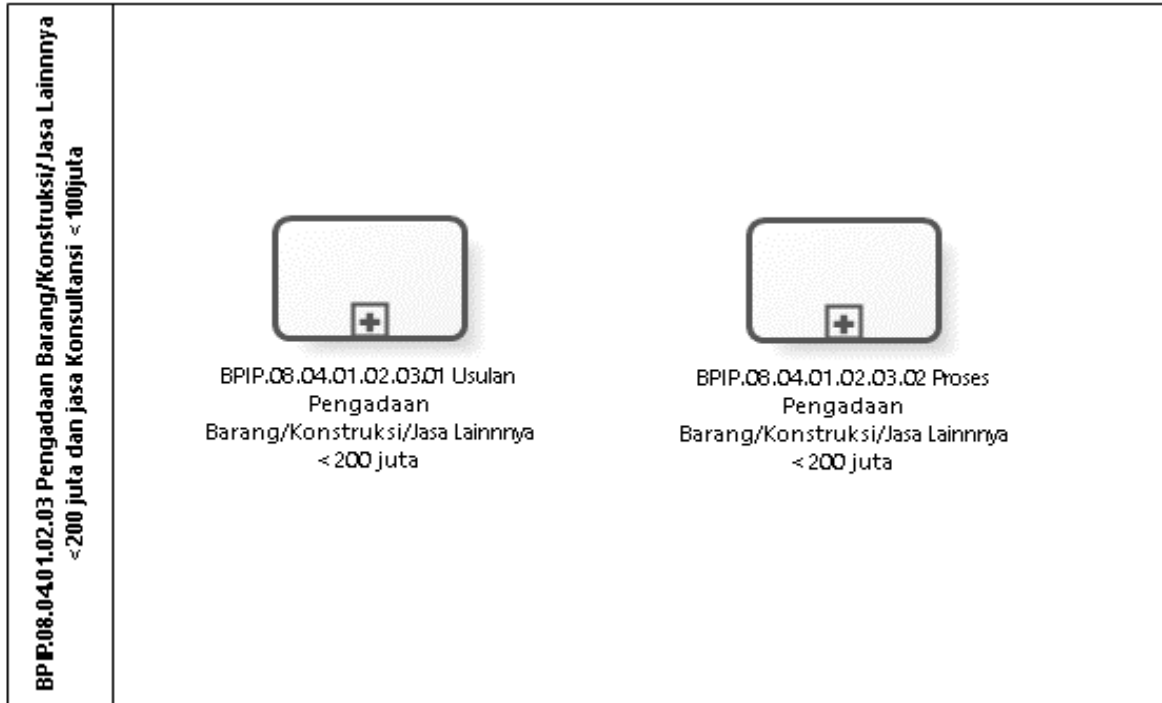
BPIP.08.04.01.01.05.01 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa (Level 6)



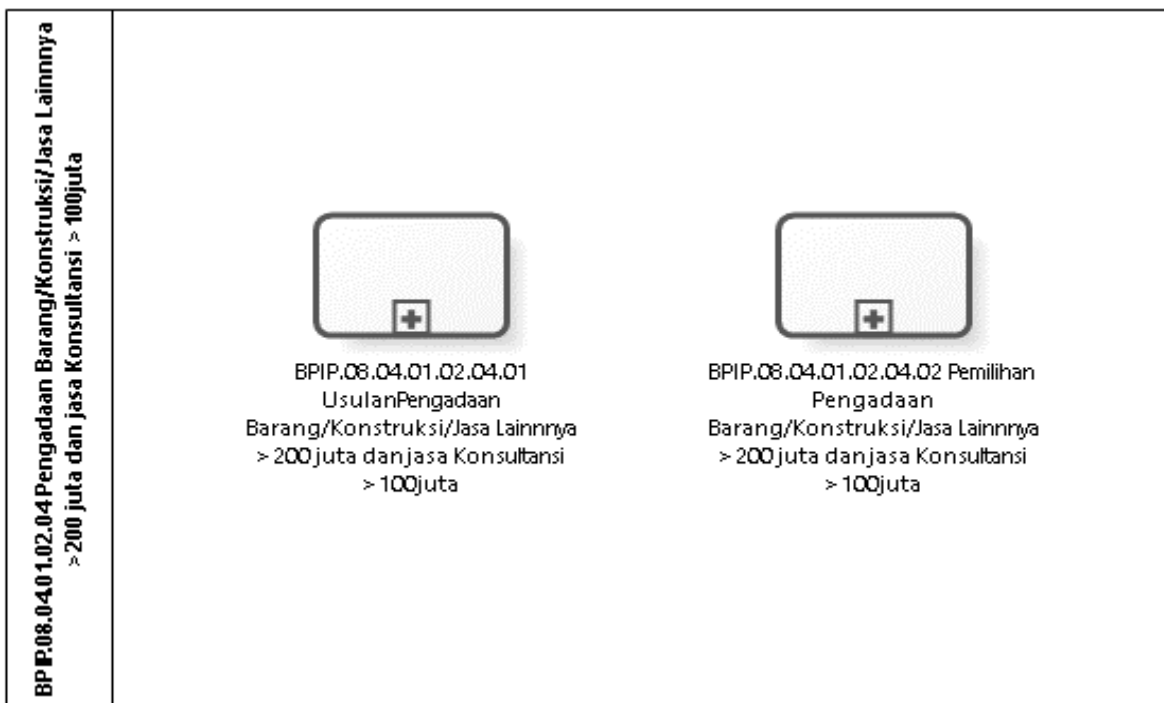
BPIP.08.04.01.02-Layanan pengadaan barang/jasa (Level 4)



BPIP.08.04.01.02.03-Layanan pengadaan barang/jasa (Level 5)

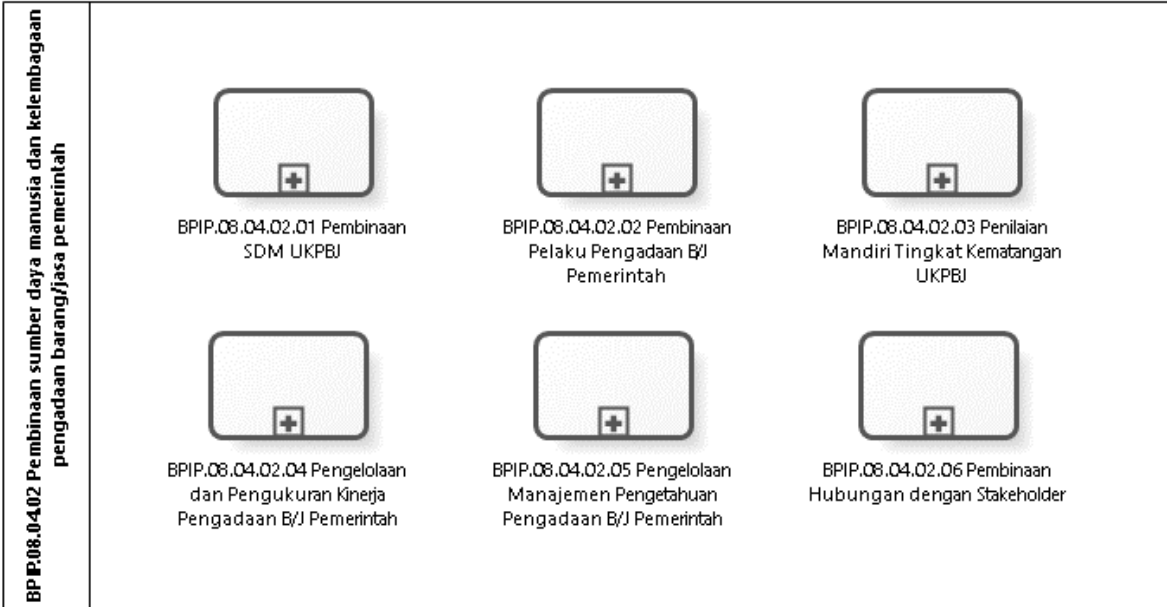


BPIP.08.04.01.02.04-Layanan pengadaan barang/jasa (Level 5)

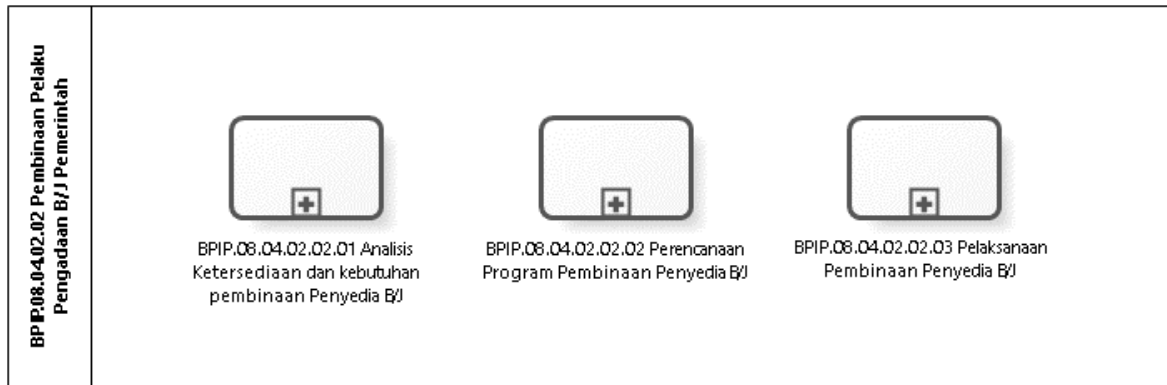


BPIP.08.04.02-Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan

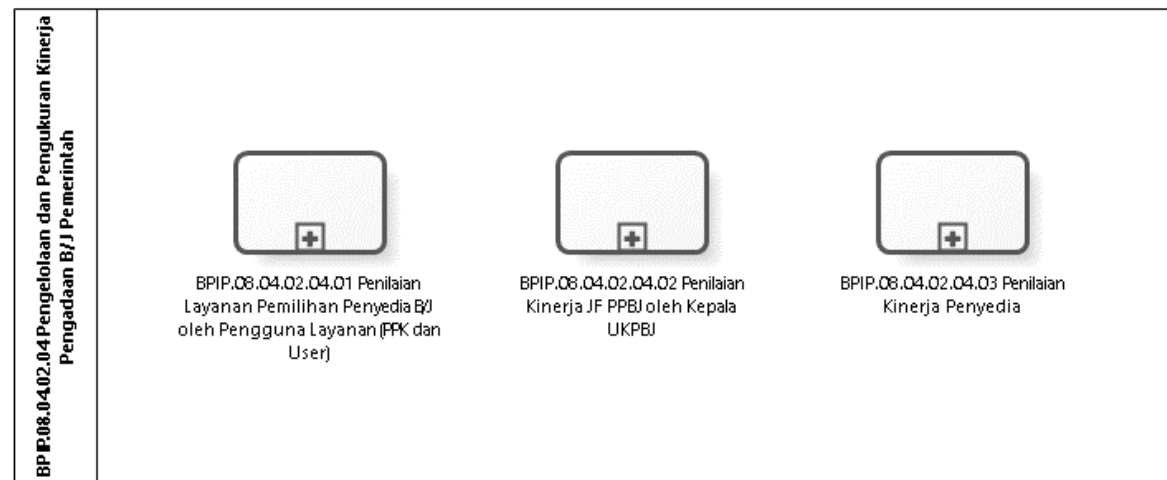
pengadaan barang/jasa pemerintah (Level 3)



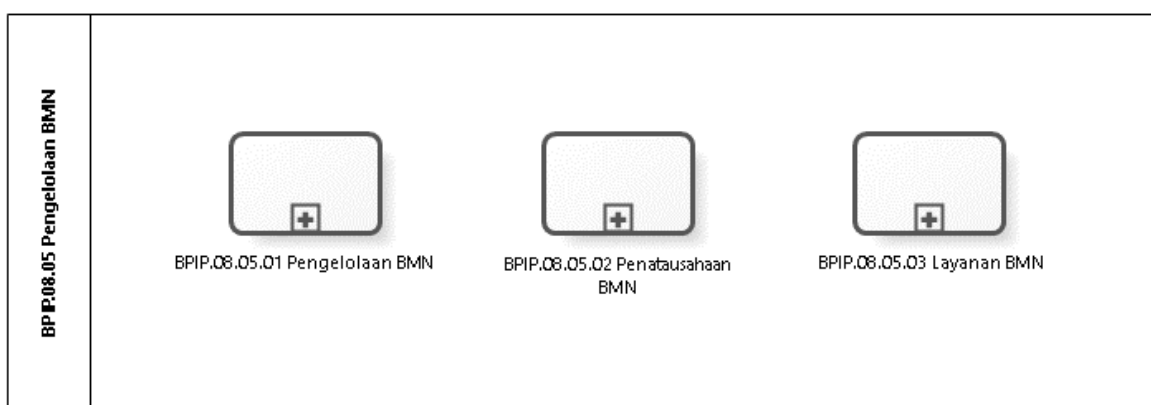
BPIP.08.04.02.02- Pembinaan Pelaku Pengadaan B/J Pemerintah (Level 4)



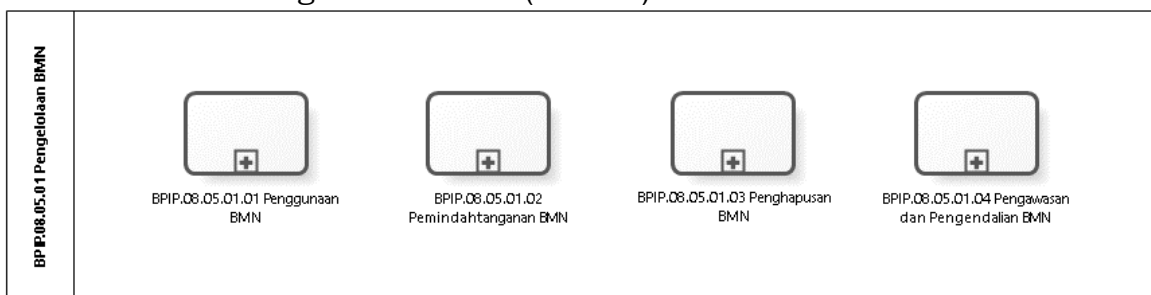
BPIP.08.04.02.04 Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Level 4)



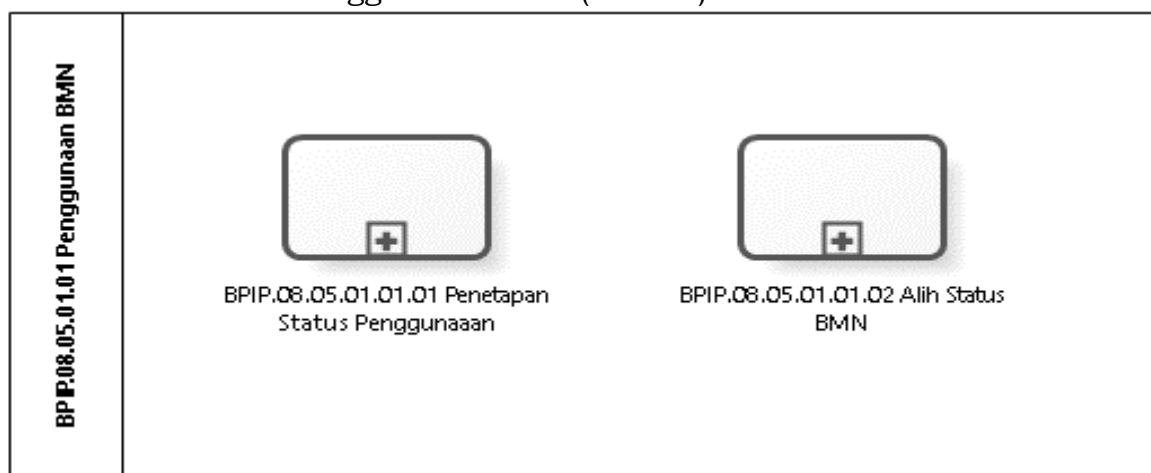
BPIP.08.05- Pengelolaan BMN (Level 2)



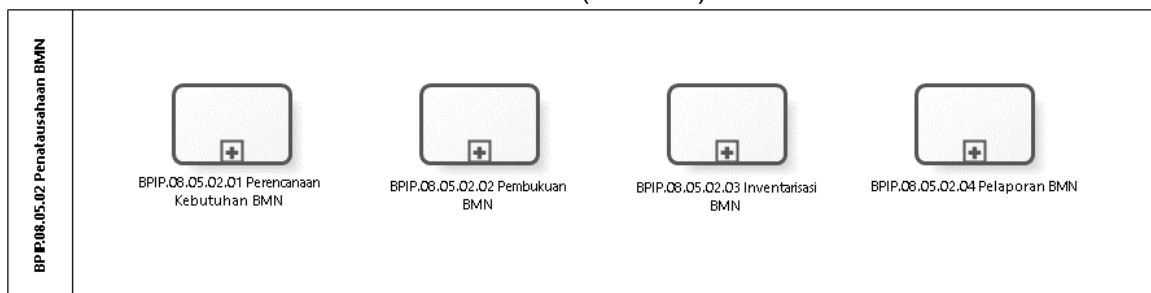
BPIP.08.05.01-Pengelolaan BMN (Level 3)



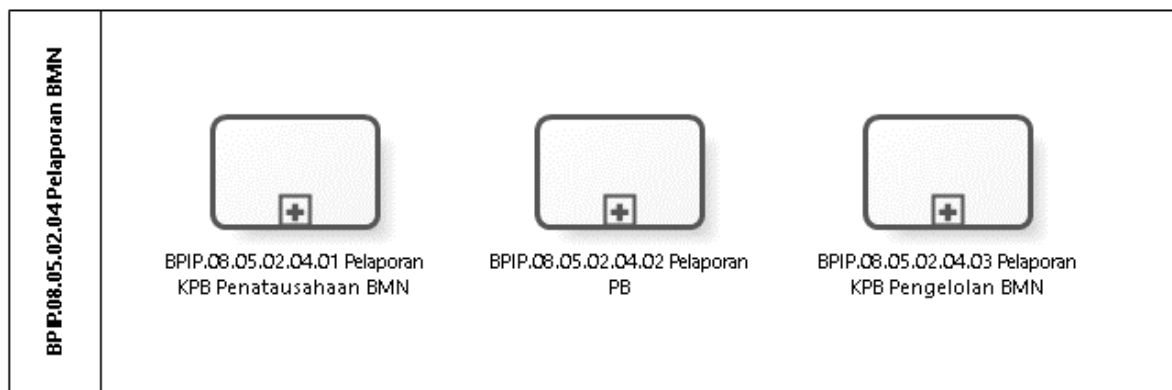
BPIP.08.05.01.01-Penggunaan BMN (Level 4)



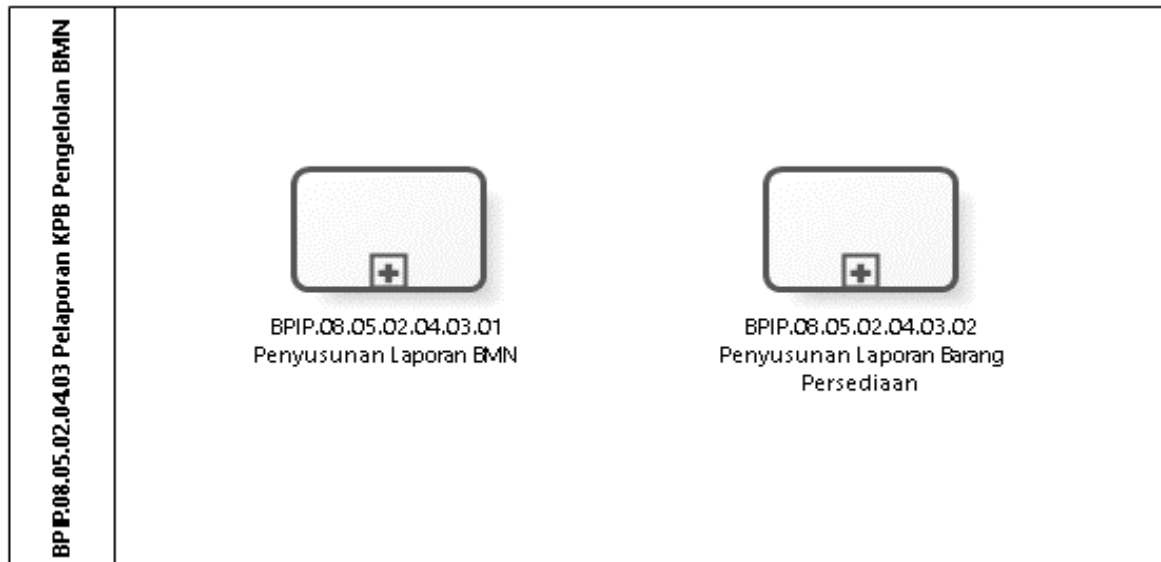
BPIP.08.05.02-Penatausahaan BMN (Level 3)



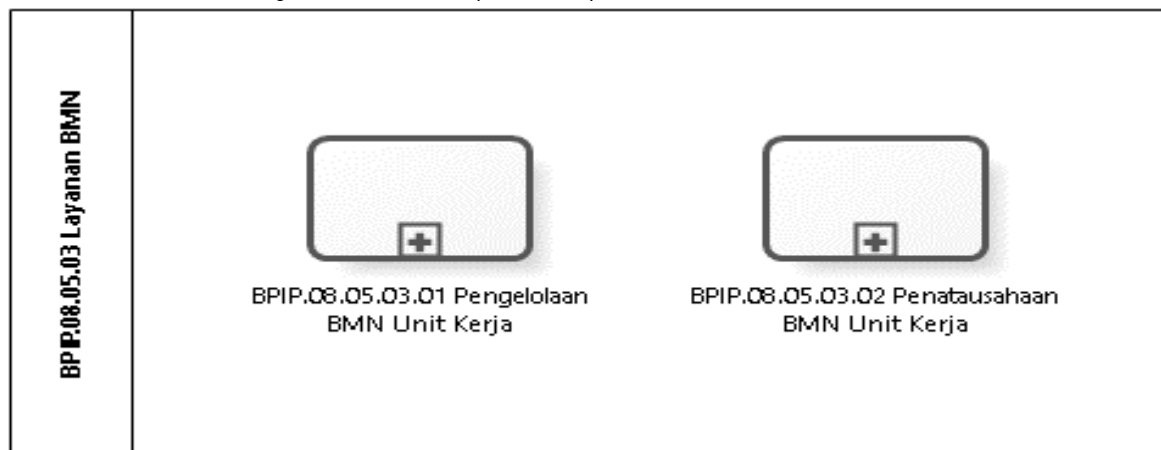
BPIP.08.05.02.04-Pelaporan BMN (Level 4)



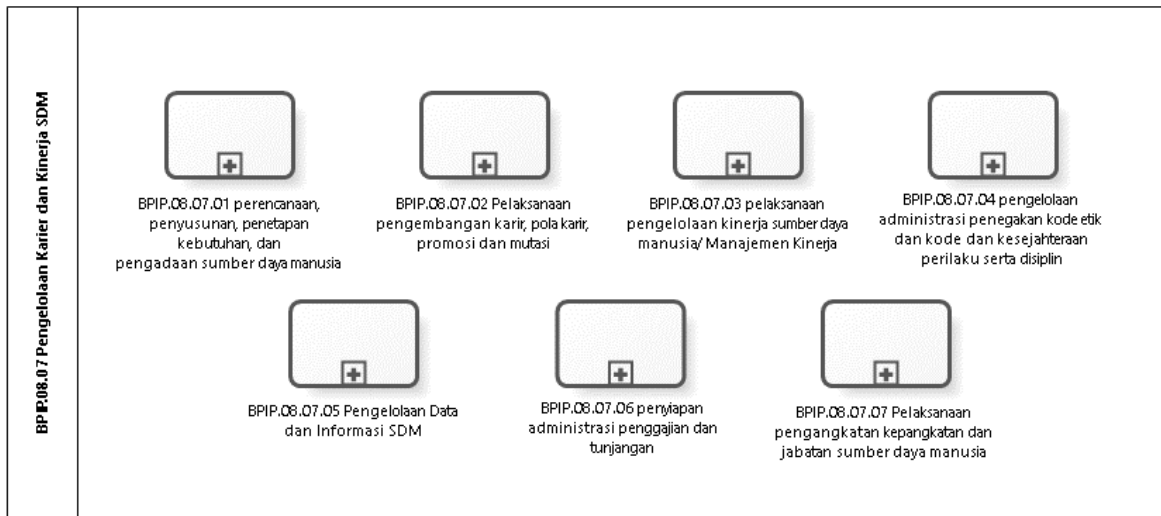
BPIP.08.05.02.04.03-Pelaporan BMN (Level 5)



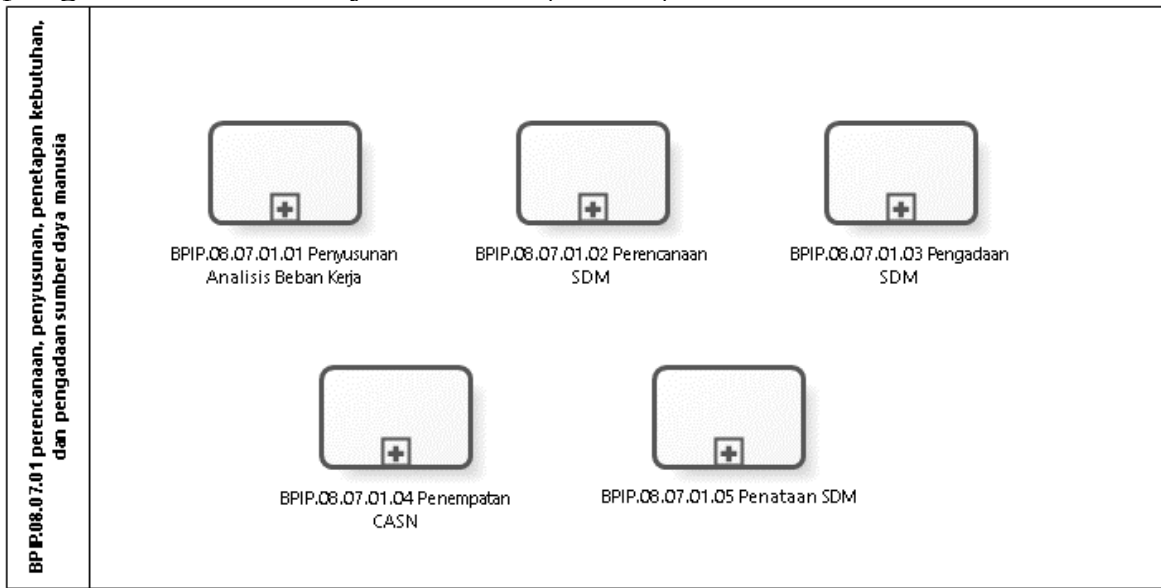
BPIP.08.05.03-Layanan BMN (Level 3)



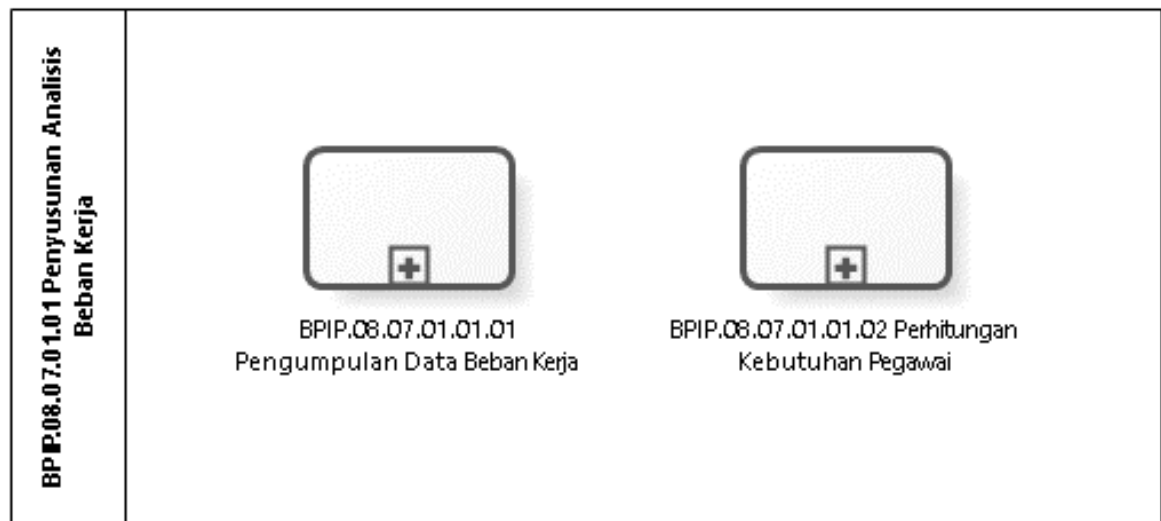
BPIP.08.07- Pengelolaan Karier dan Kinerja SDM (Level 2)



BPIP.08.07.01-Perencanaan, penyusunan, penetapan kebutuhan, dan pengadaan sumber daya manusia (Level 3)





BPIP.08.07.01.01-Penyusunan Analisis Beban Kerja (Level 4)





BPIP.08.07.01.02-Perencanaan SDM (Level 4)

BP.P.08.07.01.02 Perencanaan SDM	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.08.07.01.02.01 Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.08.07.01.02.02 Pemrosesan Digital Signature</p> </div> </div>
---	---

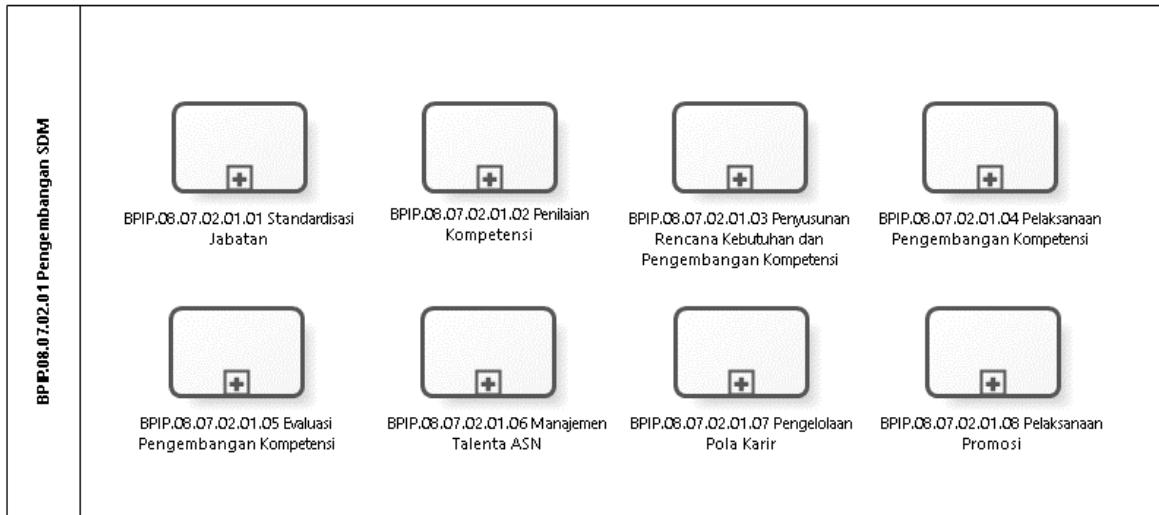
BPIP.08.07.01.03-Pengadaan SDM (Level 4)

BP.P.08.07.01.03 Pengadaan SDM	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.08.07.01.03.01 Pengadaan ASN</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.08.07.01.03.02 Pengadaan JPT</p> </div> </div>
---------------------------------------	--

BPIP.08.07.02- Pelaksanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi (Level 3)

BP.P.08.07.02 Pelaksanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.08.07.02.01 Pengembangan SDM</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.08.07.02.02 Pengelolaan Mutasi SDM</p> </div> </div>
---	--

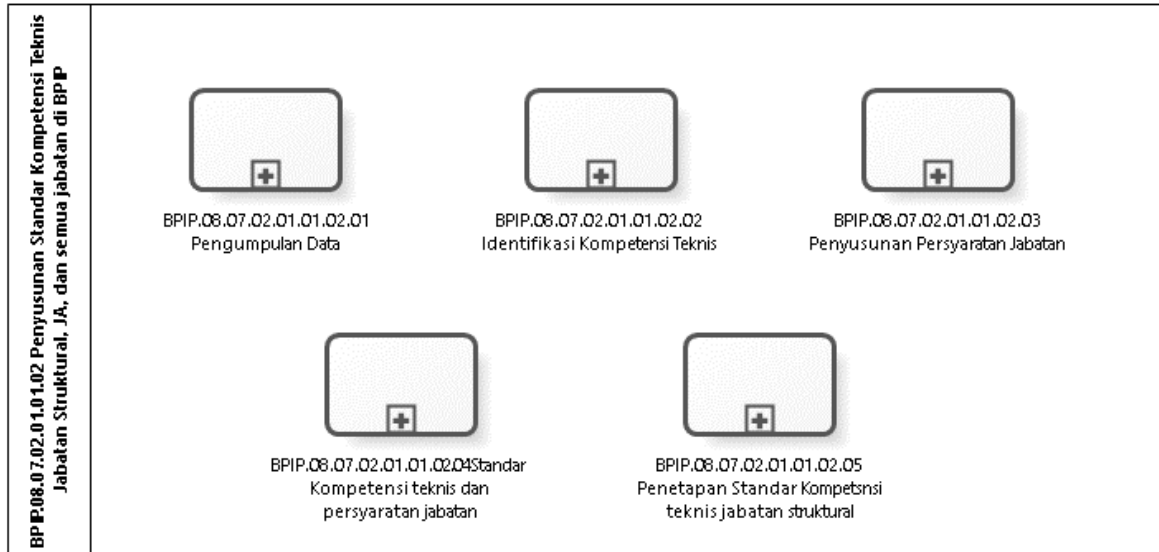
BPIP.08.07.02.01- Pengembangan SDM (Level 4)



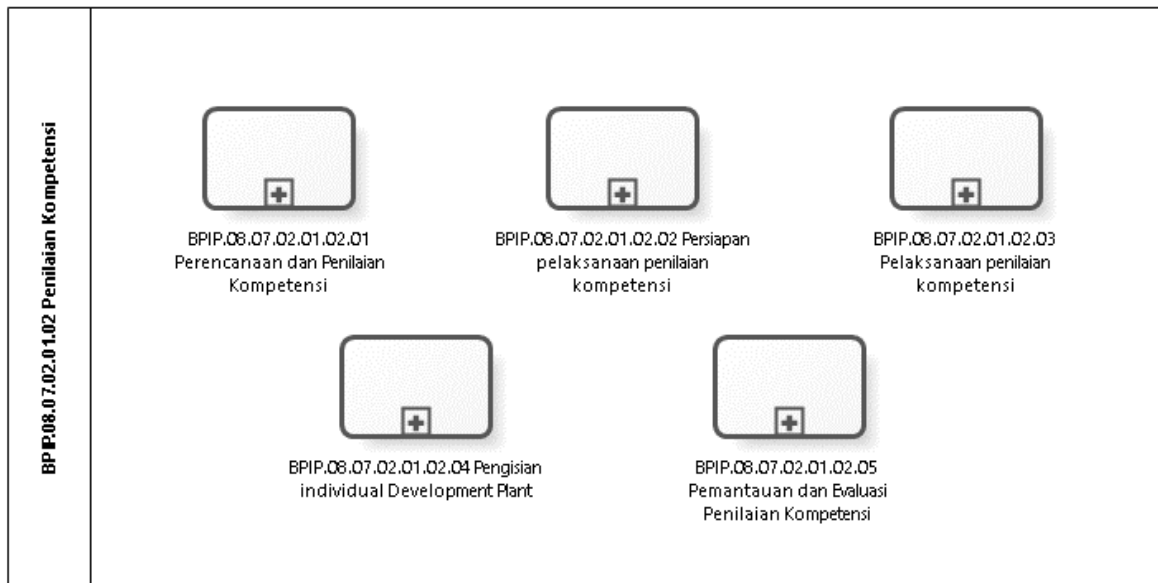
BPIP.08.07.02.01.01- Standarisasi Jabatan (Level 5)



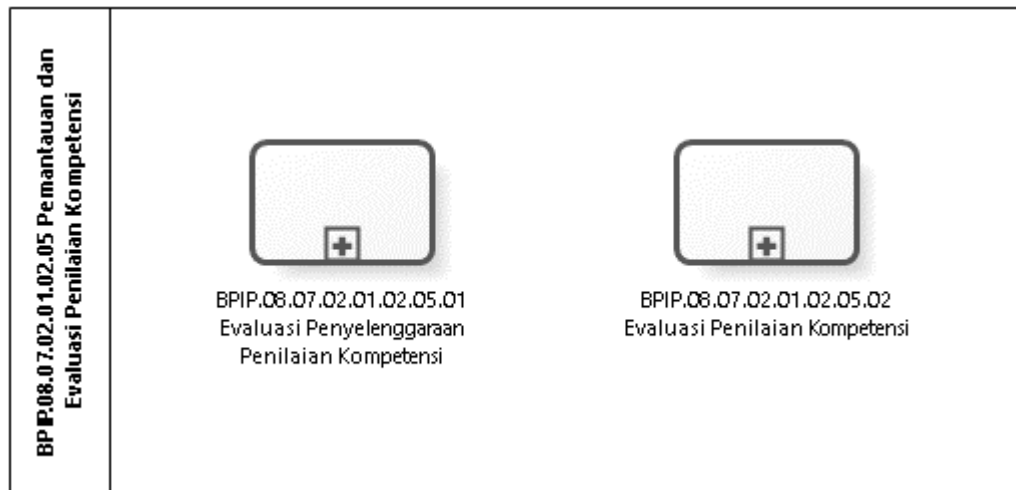
BPIP.08.07.02.01.01.02- Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Struktural, JA, dan semua jabatan di BPIP (Level 6)



BPIP.08.07.02.01.02- Penilaian Kompetensi (Level 5)



BPIP.07.02.01.02.05-Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kompetensi (Level 6)

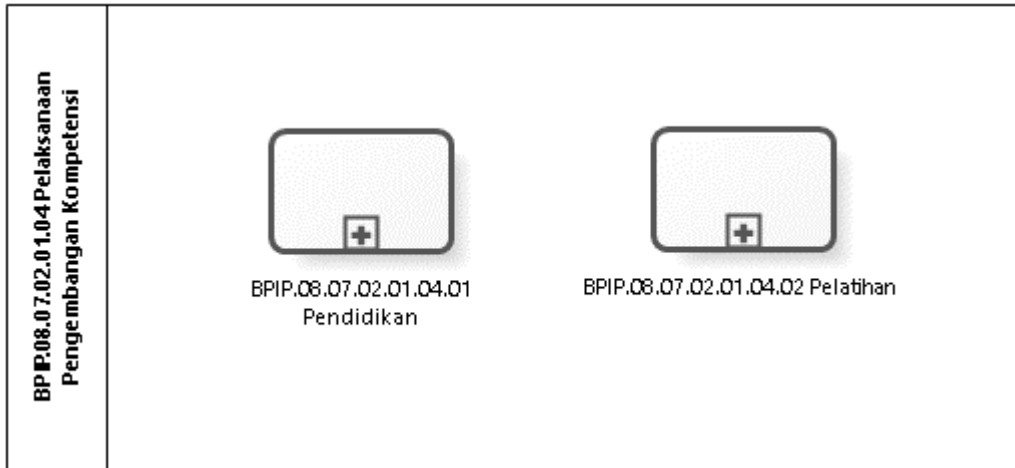


Evaluasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, mencakup kegiatan:

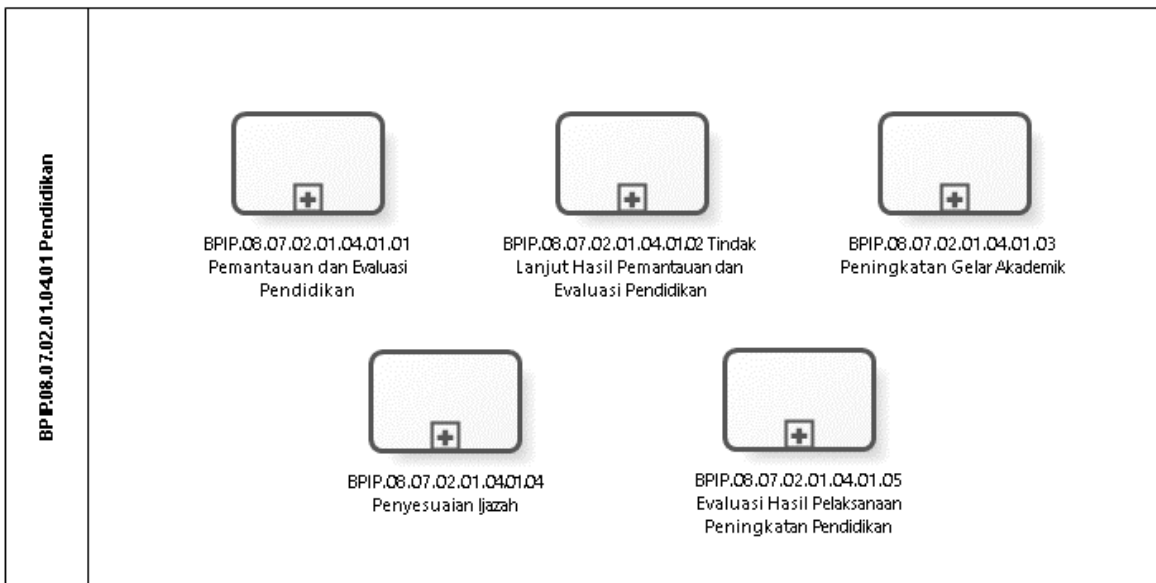
- 1) BPIP.08.07.02.01.02.05.01.01-Penilaian Kelayakan Organisasi;
- 2) BPIP.08.07.02.01.02.05.01.02-Penilaian Kelayakan SDM;
- 3) BPIP.08.07.02.01.02.05.01.03-Penilaian Kualifikasi Tim Penilaian Kompetensi; dan
- 4) BPIP.08.07.02.01.02.05.01.04-Penilaian Kelayakan Metode dan Pelaksanaan Kompetensi.

3.9.2.1.3. BPIP.08.07.02.01.03-Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengembangan Kompetensi (Level 5)

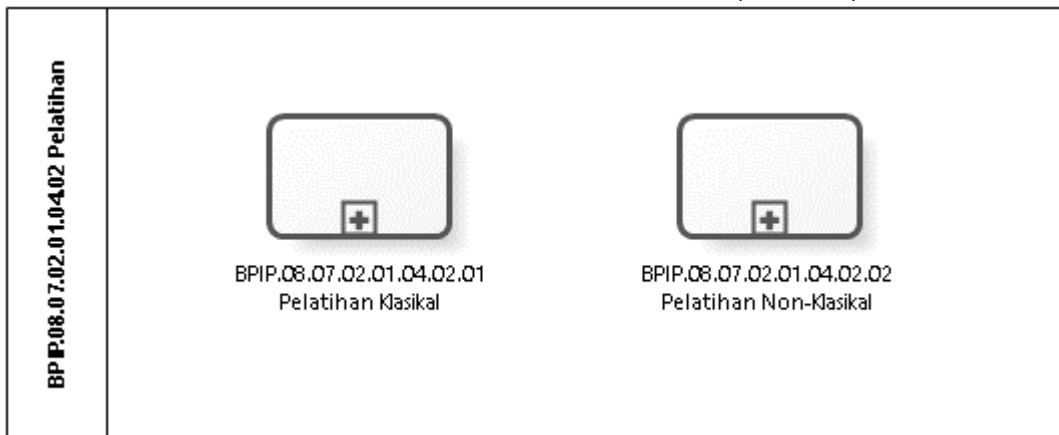
3.9.2.1.4. BPIP.08.07.02.01.04- Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (Level 5)



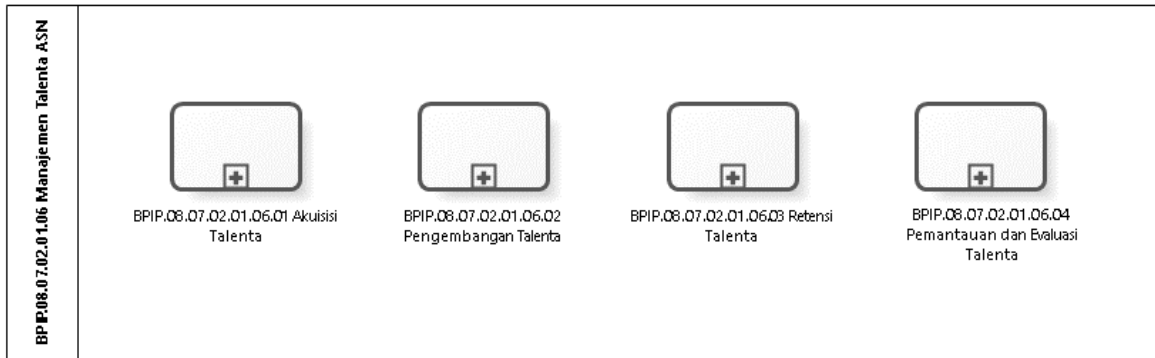
3.9.2.1.4.1. BPIP.08.07.02.01.04.01-Pendidikan (Level 6)



3.9.2.1.4.2. BPIP.08.07.02.01.04.02-Pelatihan (Level 6)



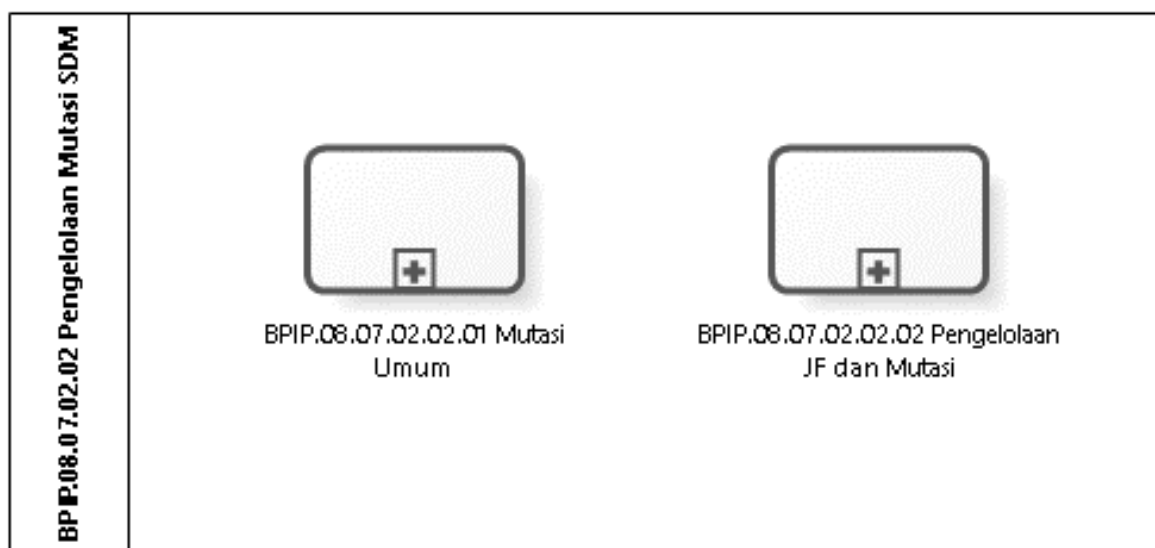
3.9.2.1.5. BPIP.08.07.02.01.06-Manajemen Talenta ASN (Level 5)



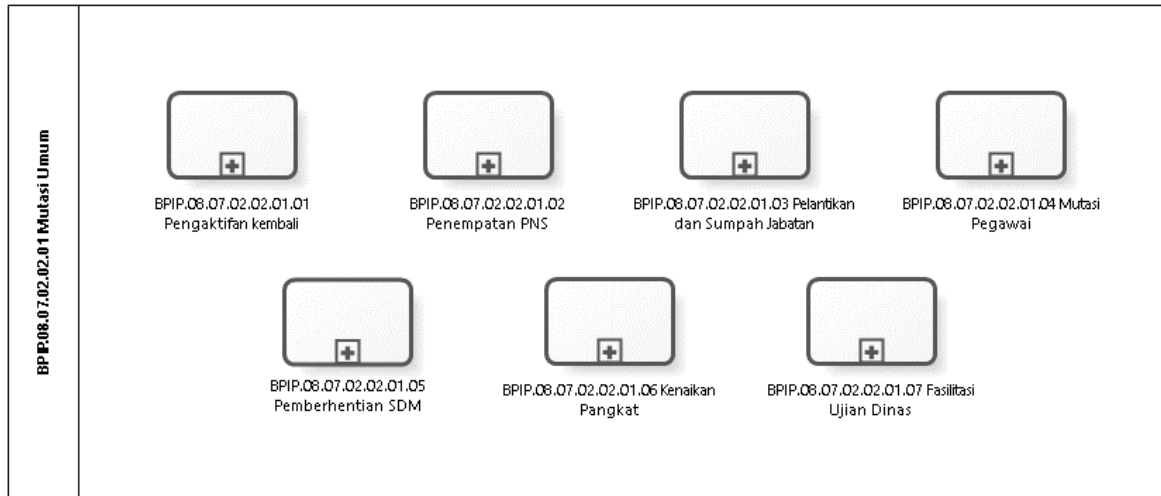
BPIP.08.07.02.01.06.02-Pengembangan Talenta (Level 6)



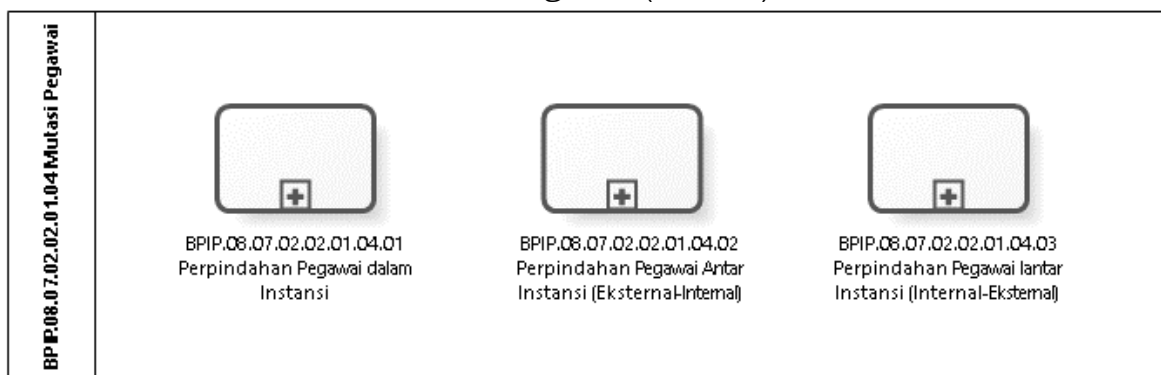
BPIP.08.07.02.02-Pengelolaan Mutasi SDM (Level 4)



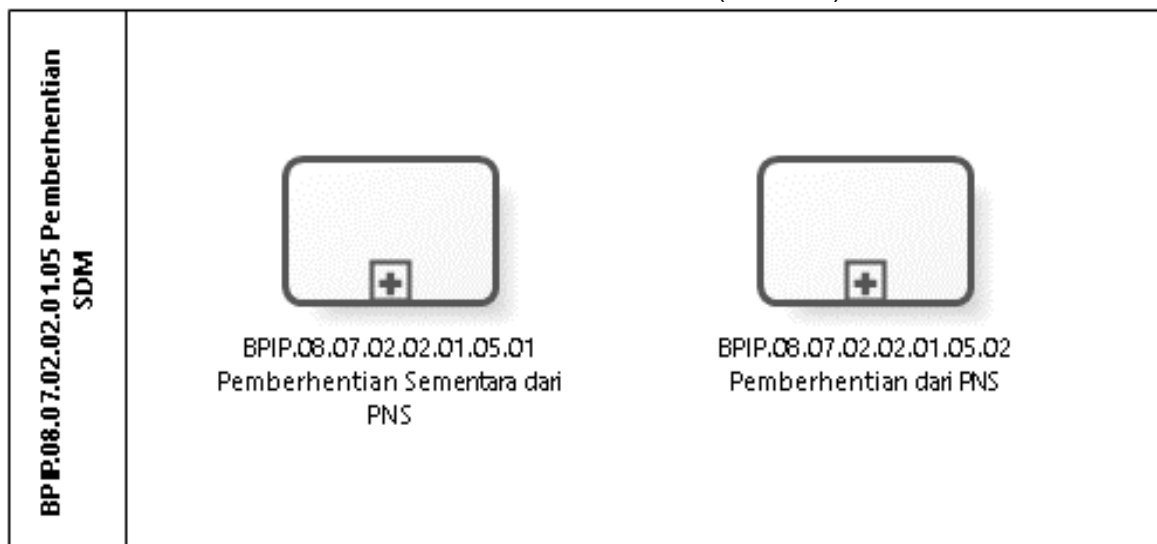
BPIP.08.07.02.02.01-Mutasi Umum (Level 5)



BPIP.08.07.02.02.01.04-Mutasi Pegawai (Level 6)









BPIP.08.07.02.02.01.05-Pemberhentian SDM (Level 6)



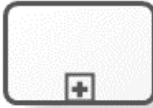


Pemberhentian dari PNS, mencakup kegiatan:

- 1) 08.07.02.02.01.05.02.01-Pemberhentian dengan Hak Pensiun
- 2) 08.07.02.02.01.05.02.02-Pemberhentian tanpa Hak Pensiun

BPIP.08.07.03- Pelaksanaan pengelolaan kinerja sumber daya/ Manajemen Kinerja (Level 3)

BPIP.08.07.03 pelaksanaan pengelolaan kinerja sumber daya manusia/ Manajemen Kinerja			
	BPIP.08.07.03.01 Perencanaan Kinerja	BPIP.08.07.03.02 Pemantauan Kinerja	BPIP.08.07.03.03 Pembinaan Kinerja
			
	BPIP.08.07.03.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja	BPIP.08.07.03.05 Tindak Lanjut	BPIP.08.07.03.06 Pengelolaan SI Kinerja

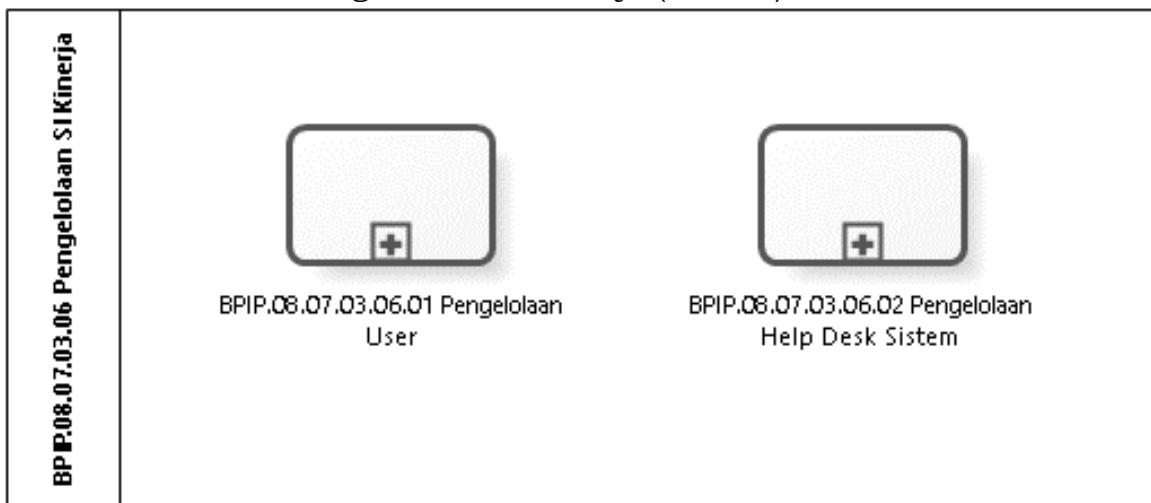
BPIP.08.07.03.01-Perencanaan Kinerja (Level 4)

BPIP.08.07.03.01 Perencanaan Kinerja			
	BPIP.08.07.03.01.01 Penyesuaian SKP	BPIP.08.07.03.01.02 Reviu kinerja	BPIP.08.07.03.01.03 Penetapan SKP

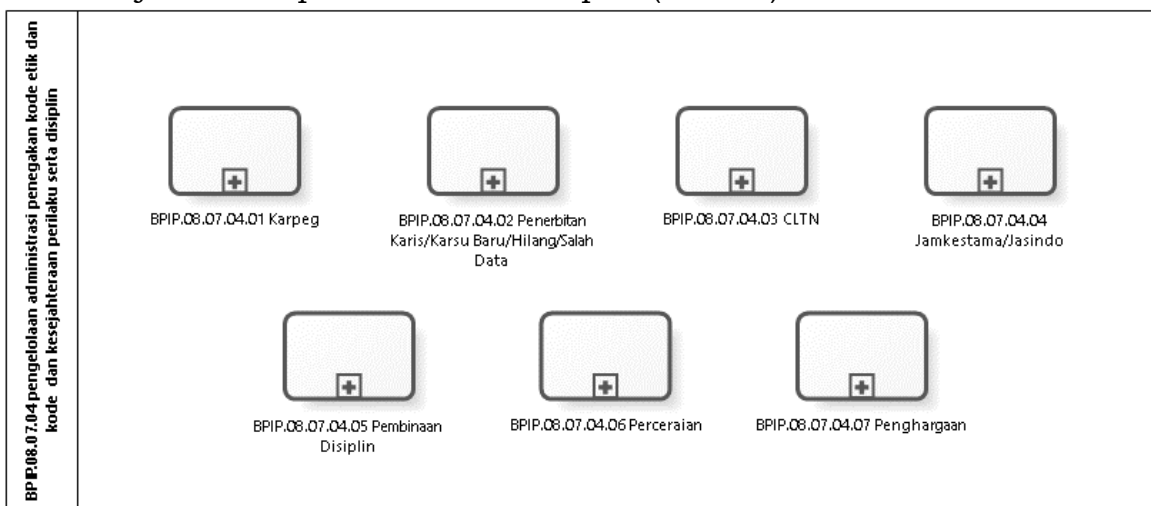
BPIP.08.07.03.03- Pembinaan Kinerja (Level 4)

BPIP.08.07.03.03 Pembinaan Kinerja			
	BPIP.08.07.03.03.01 Bimbingan Kinerja	BPIP.08.07.03.03.02 Konseling Kinerja	BPIP.08.07.03.03.03 Rekomendasi Perubahan SKP

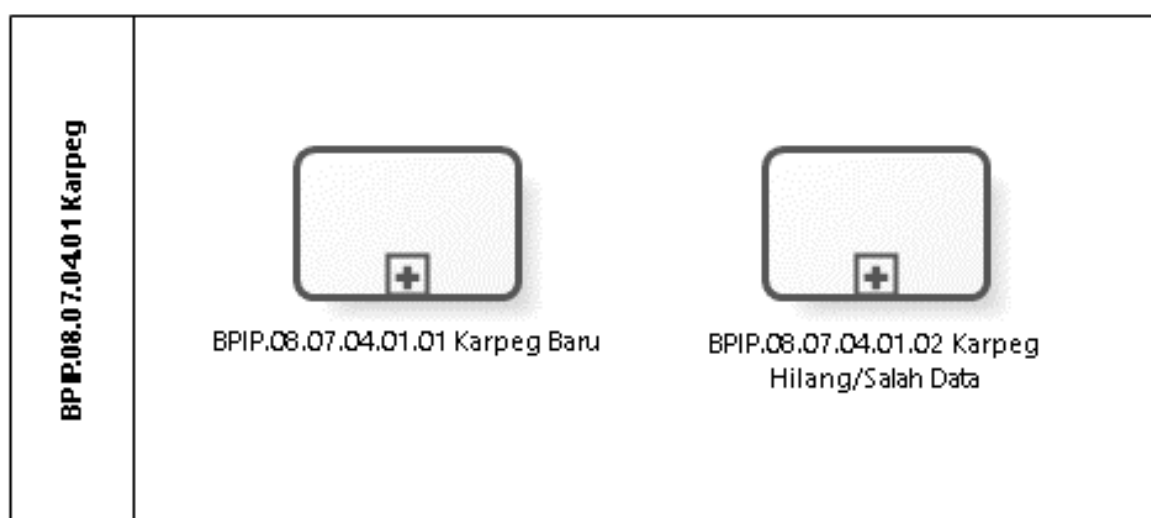
BPIP.08.07.03.06- Pengelolaan SI Kinerja (Level 4)



BPIP.08.07.04- Pengelolaan administrasi penegakan kode etik dan kode dan kesejahteraan perilaku serta disiplin (Level 3)





BPIP.08.07.04.01-Karpeg (Level 4)



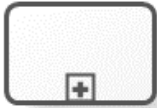


BPIP.08.07.04.03-Cuti Diluar Tanggungan Negara (Level 4)

BPIP.08.07.04.03 CLTN	 BPIP.08.07.04.03.01 Pengajuan Baru Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	 BPIP.08.07.04.03.02 Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	 BPIP.08.07.04.03.03 Pengaktifan Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)
------------------------------	--	--	---

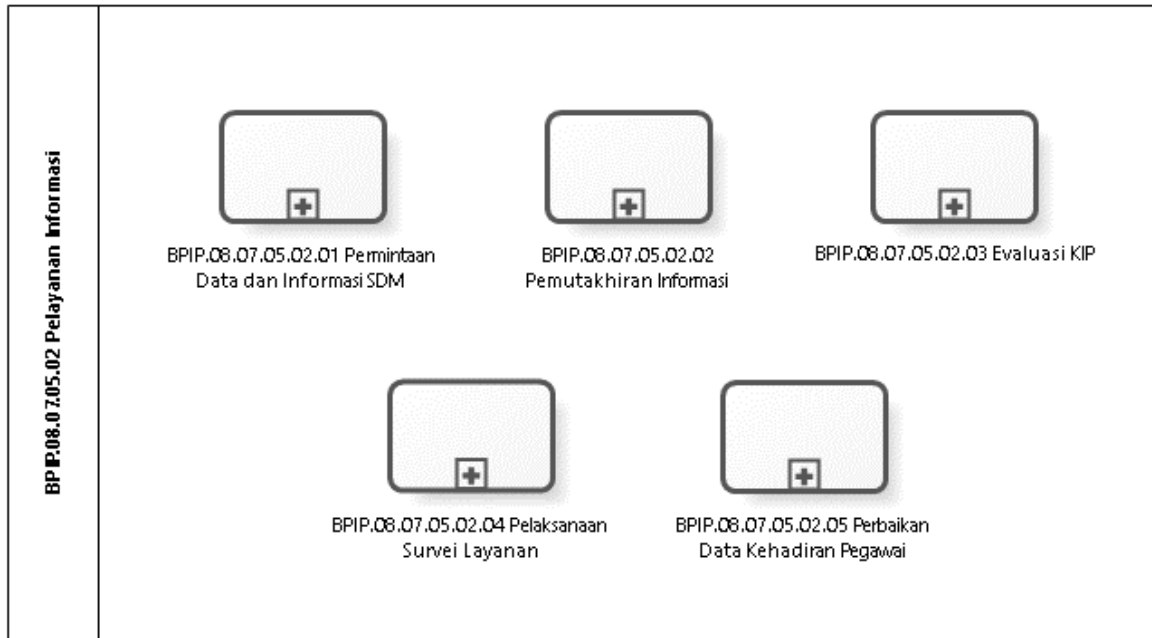
BPIP.08.07.04.07-Penghargaan (Level 4)

BPIP.08.07.04.07 Penghargaan	 BPIP.08.07.04.07.01 Penghargaan Satyalencana	 BPIP.08.07.04.07.02 Penghargaan Tanda Jasa Lainnya
-------------------------------------	---	--

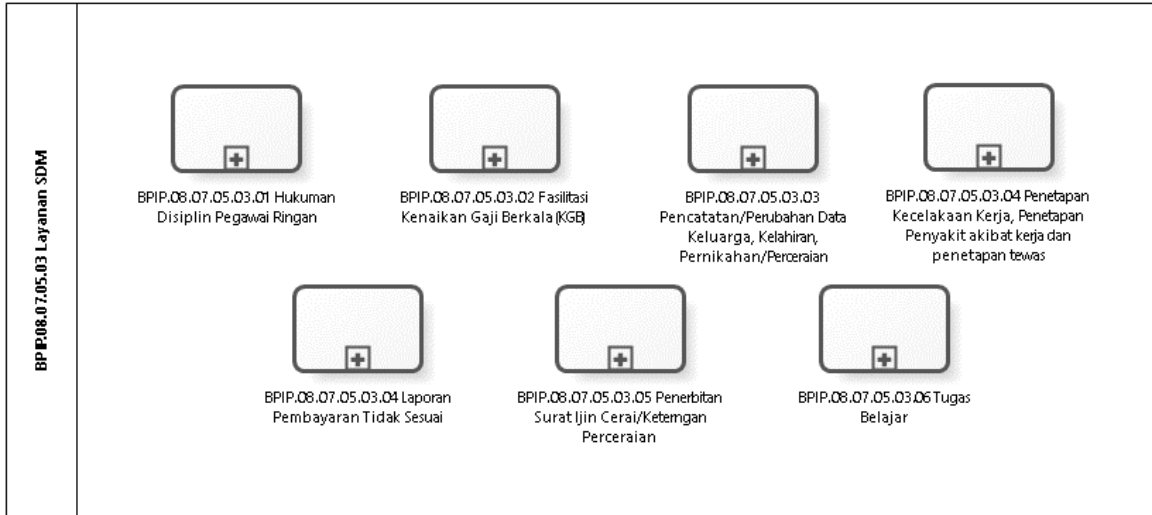
BPIP.08.07.05- Pengelolaan Data dan Informasi (Level 3)

BPIP.08.07.05 Pengelolaan Data dan Informasi SDM	 BPIP.08.07.05.01 Pengelolaan Tata Naskah Pegawai	 BPIP.08.07.05.02 Pelayanan Informasi	 BPIP.08.07.05.03 Layanan SDM
---	---	---	---

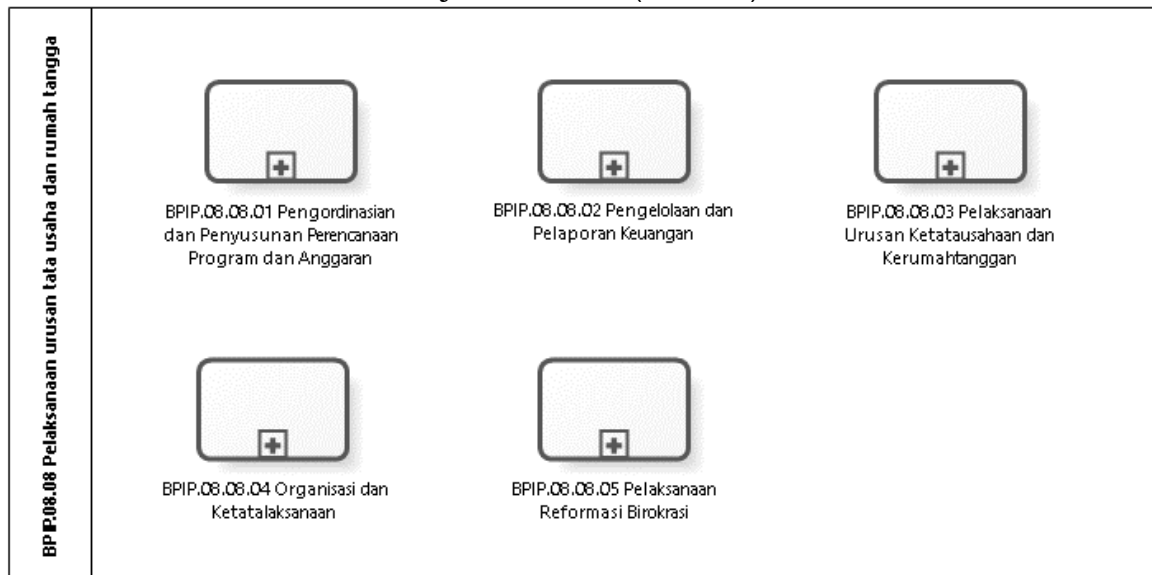
BPIP.08.07.05.02-Pelayanan Informasi (Level 4)



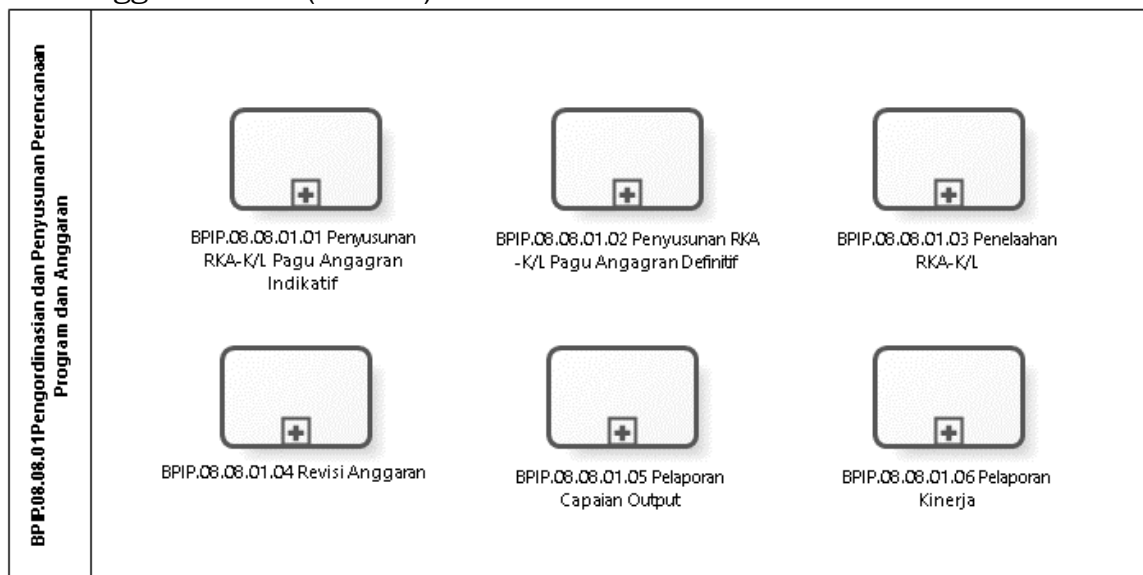
BPIP.08.07.05.03-Layanan SDM (Level 4)



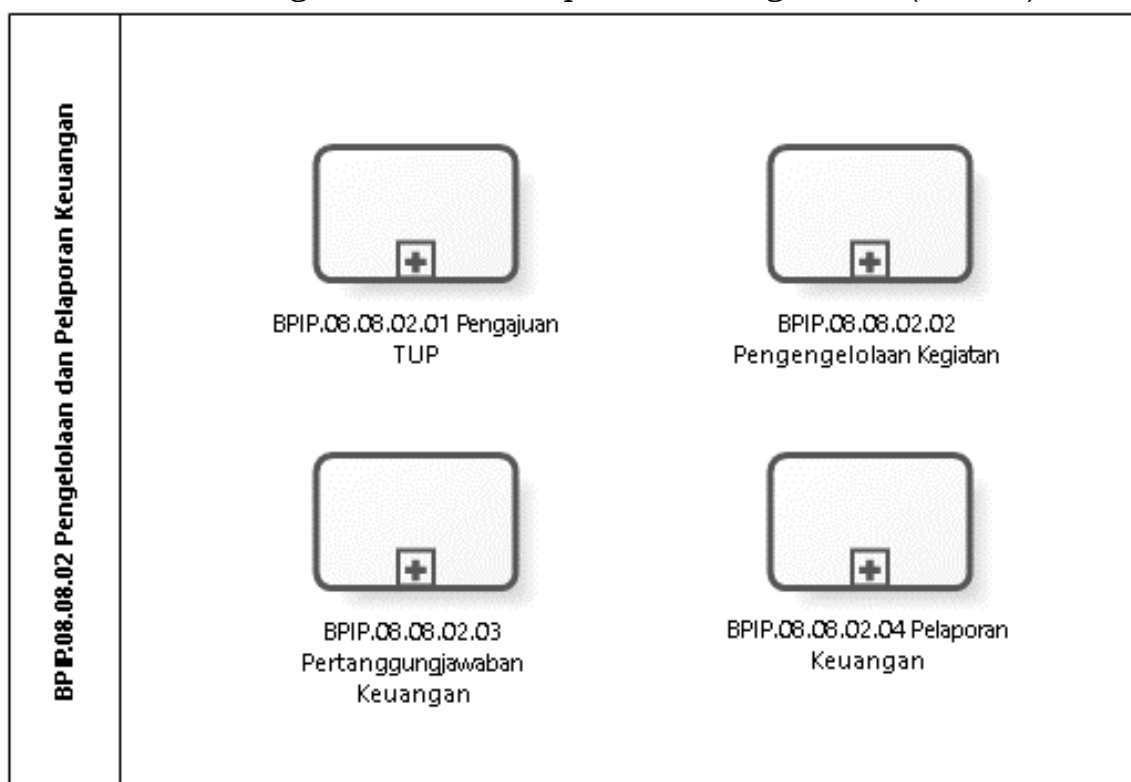
BPIP.08.08- Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (Level 2)



BPIP.08.08.01- Pengordinasian dan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Biro (Level 3)



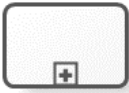
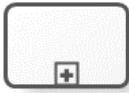
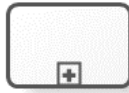
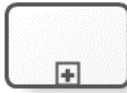
BPIP.08.08.02- Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Biro (Level 3)







BPIP.08.08.03- Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggan Biro (Level 3)








BPIP.08.08.03.02-Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Level 4)

BPIP.08.08.03.02 Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan	 <p>BPIP.08.08.03.02.01 Penerbitan Surat Bebas Temuan</p>	 <p>BPIP.08.08.03.02.02 Pengajuan ATK</p>	 <p>BPIP.08.08.03.02.03 Fasilitasi Rapat</p>	 <p>BPIP.08.08.03.02.04 Pemohonan Perbaikan dan/Penambahan Fasilitas</p>
--	--	--	--	---

BPIP.08.08.03.02.03-Fasilitasi Rapat (Level 5)

BPIP.08.08.03.02.03 Fasilitasi Rapat	 <p>BPIP.08.08.03.02.03.01 Fasilitasi Penyediaan Ruang Rapat</p>	 <p>BPIP.08.08.03.02.03.02 Fasilitasi Konsumsi Kegiatan</p>	 <p>BPIP.08.08.03.02.03.03 Fasilitasi Penyediaan Narasumber</p>	 <p>BPIP.08.08.03.02.03.04 Fasilitasi Link Zoom</p>
--------------------------------------	---	--	---	--

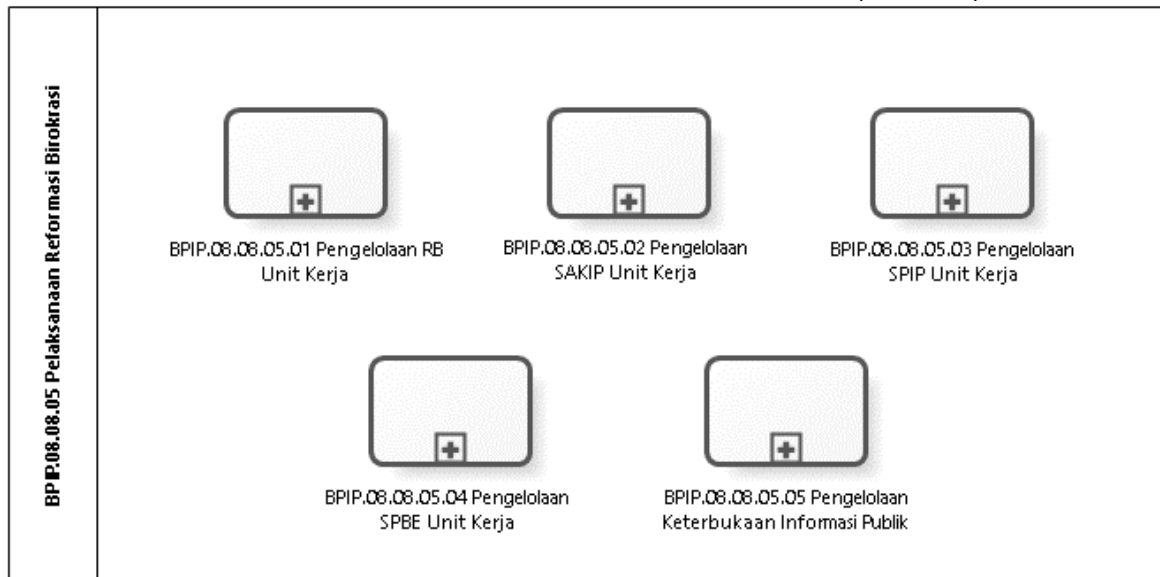
BPIP.08.08.03.03- Pelaksanaan Arsip dan Persuratan (Level 4)

BPIP.08.08.03.03 Pelaksanaan Arsip dan Persuratan	 <p>BPIP.08.08.03.03.01 Pengelolaan Surat Masuk</p>	 <p>BPIP.08.08.03.03.02 Pengelolaan Surat Keluar</p>	 <p>BPIP.08.08.03.03.03 Pemberkasan Arsip Aktif</p>
	 <p>BPIP.08.08.03.03.04 Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif</p>	 <p>BPIP.08.08.03.03.05 Layanan Peminjaman Arsip</p>	

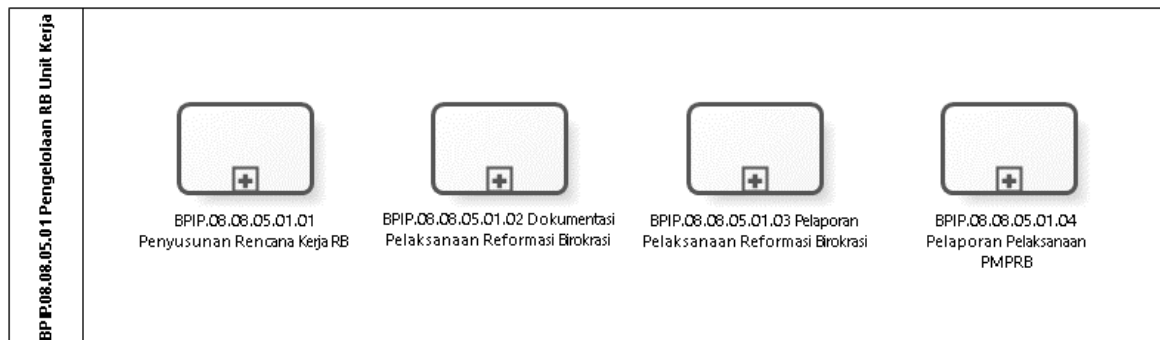
BPIP.08.08.04- Organisasi dan Ketatalaksanaan Biro (Level 3)

BPIP.08.08.04 Organisasi dan Ketatalaksanaan	 <p>BPIP.08.08.04.01 Penyusunan Proses Bisnis</p>	 <p>BPIP.08.08.04.02 Penyusunan SOP</p>	 <p>BPIP.08.08.04.03 Manajemen Risiko</p>
--	--	--	--

BPIP.08.08.05- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro (Level 3)

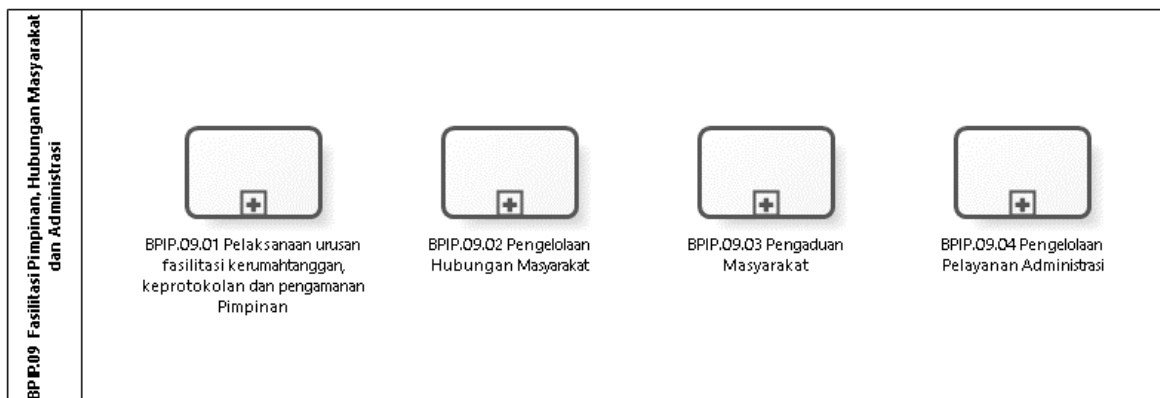


BPIP.08.08.05.01- Pengelolaan RB Unit Kerja (Level 4)






a. Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Level 1 BPIP.09-Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi
Level 2:



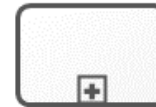
- 1) BPIP.09.01-Pelaksanaan urusan fasilitasi kerumahtanggan, keprotokolan dan pengamanan Pimpinan
- 2) BPIP.09.02-Pengelolaan Hubungan Masyarakat
- 3) BPIP.09.03-Pengaduan Masyarakat
- 4) BPIP.09.04-Pengelolaan Pelayanan Administrasi






BPIP.09.01- Pelaksanaan Urusan Fasilitasi Kerumahtanggan, Keprotokolan dan Pengamanan Pimpinan (Level 2)

BP.P.09.01 Pelaksanaan urusan fasilitasi kerumah tanggangan, keprotokolan dan pengamanan Pimpinan	<div style="text-align: center;">  <p>BPIP.09.01.01 perencanaan, penyelenggaraan rapat, penyusunan risalah rapat, dan pendokumentasian hasil rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan, staf khusus Dewan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.09.01.02 pengelolaan keprotokolan dan pengamanan Pimpinan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.09.01.03 Pengoordinasian penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu Pimpinan</p> </div>
--	---

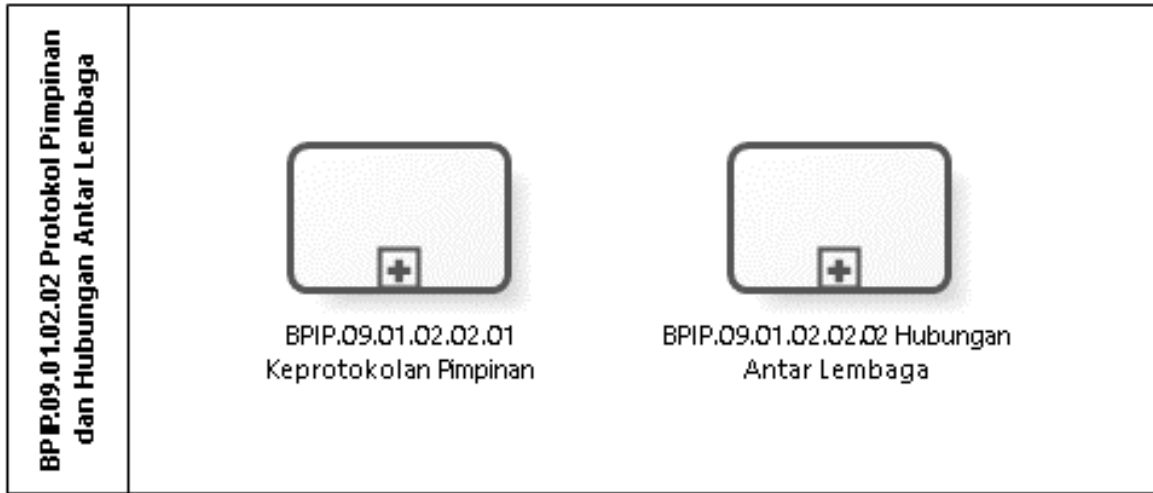
BPIP.09.01.01- Perencanaan, penyelenggaraan rapat, penyusunan Risalah rapat, dan pendokumentasian hasil rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan, staf khusus Dewan Pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli (Level 3)

BP.P.09.01 Pelaksanaan urusan fasilitasi kerumah tanggangan, keprotokolan dan pengamanan Pimpinan	<div style="text-align: center;">  <p>BPIP.09.01.01 perencanaan, penyelenggaraan rapat, penyusunan risalah rapat, dan pendokumentasian hasil rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan, staf khusus Dewan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.09.01.02 pengelolaan keprotokolan dan pengamanan Pimpinan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.09.01.03 Pengoordinasian penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu Pimpinan</p> </div>
--	---

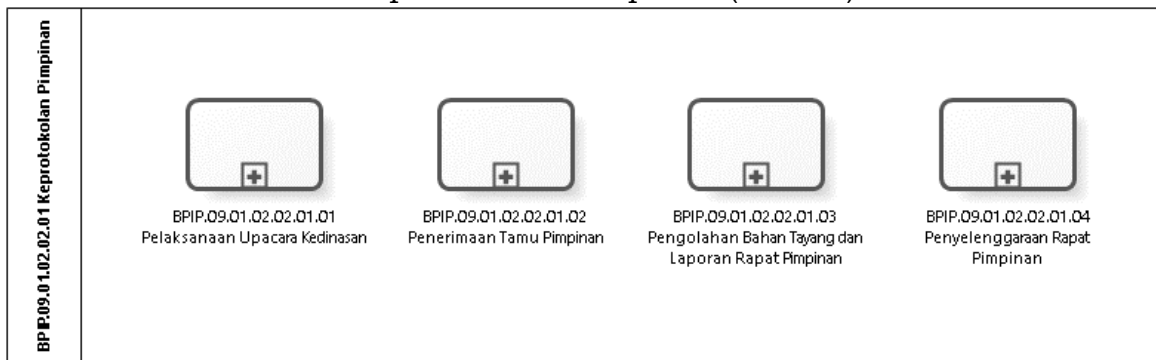
BPIP.09.01.02- Pengelolaan keprotokolan dan pengamanan Pimpinan (Level 3)

BP.P.09.01.02 pengelolaan keprotokolan dan pengamanan Pimpinan	<div style="text-align: center;">  <p>BPIP.09.01.02.01 Penjadwalan Agenda Pimpinan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.09.01.02.02 Protokol Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BPIP.09.01.02.03 Pengoordinasian Sekretaris Pimpinan</p> </div>
---	---

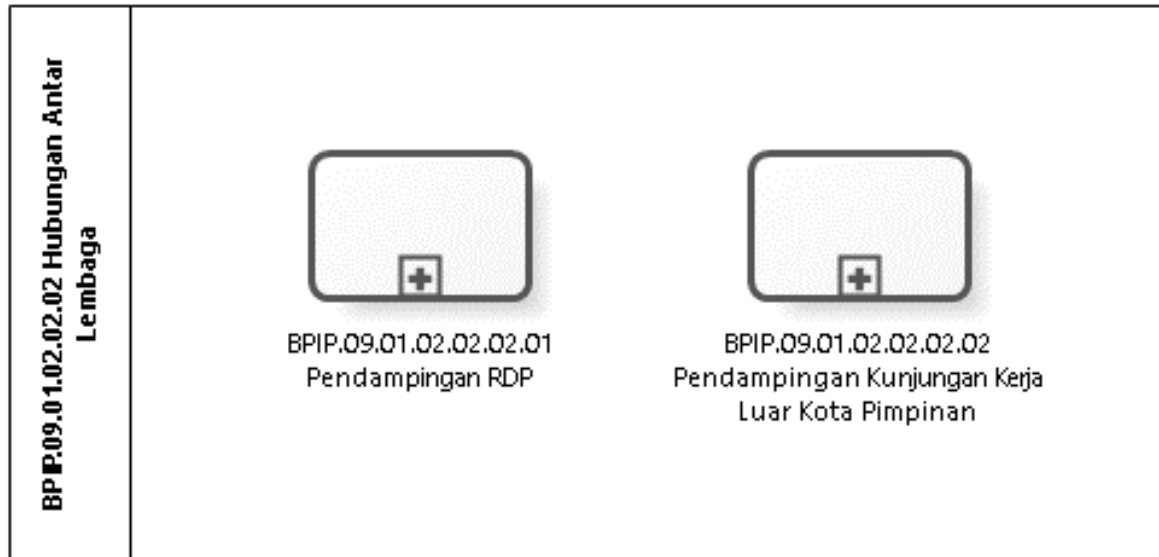
BPIP.09.01.02.02- Protokol Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga (Level 4)



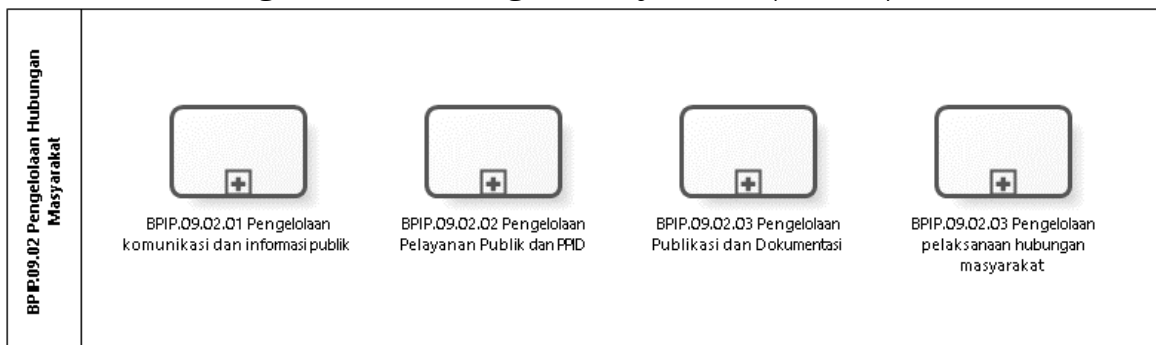
BPIP.09.01.02.02.01- Keprotokolan Pimpinan (Level 5)



BPIP.09.01.02.02.02- Hubungan Antar Lembaga (Level 5)



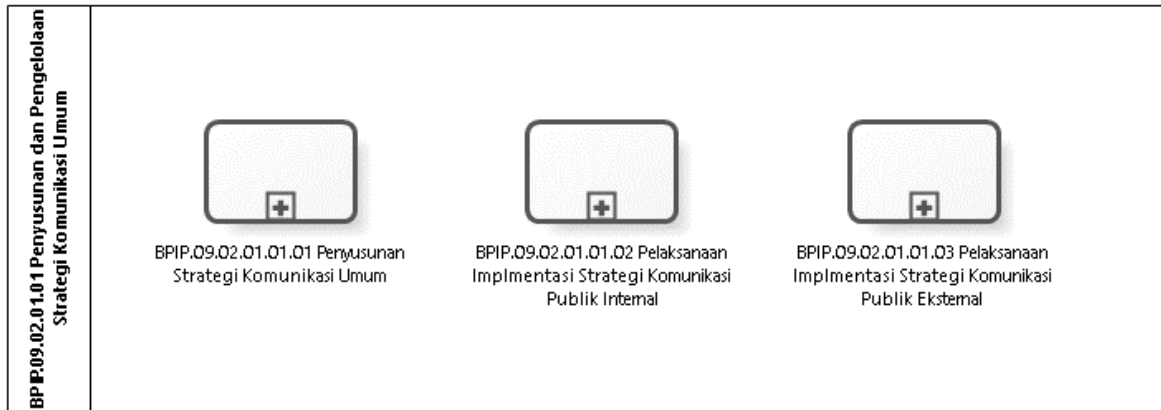
BPIP.09.02- Pengelolaan Hubungan Masyarakat (Level 2)



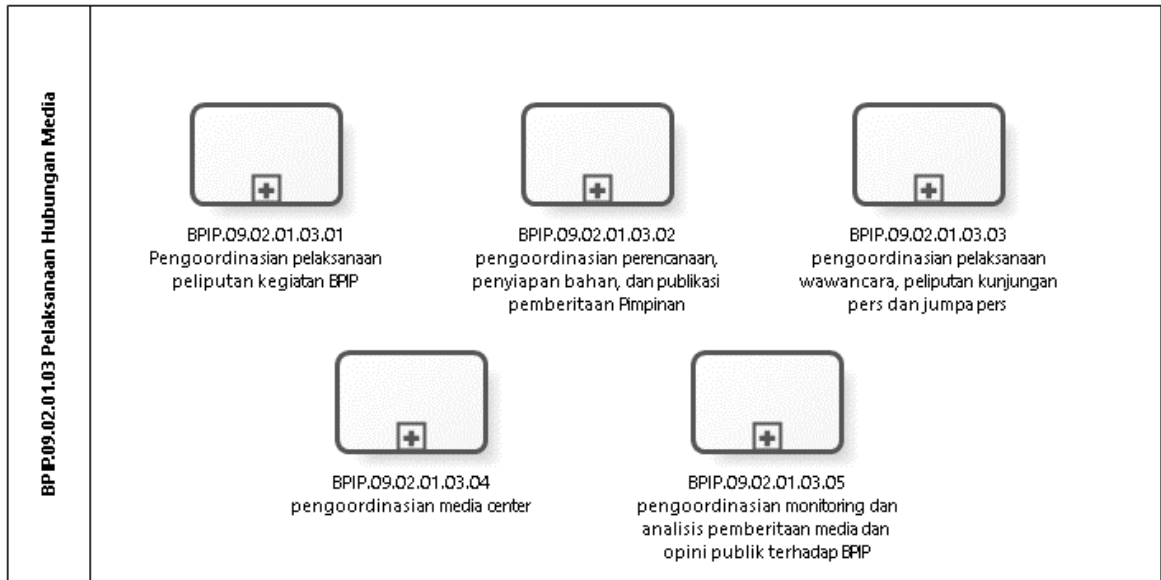
BPIP.09.02.01-Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (Level 3)












BPIP.09.02.01.01-Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (Level 4)




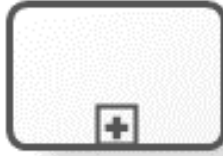
BPIP.09.02.01.03- Pelaksanaan Hubungan Media (Level 4)



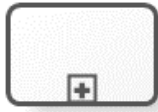
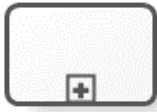

BPIP.09.02.02.05- Pengelolaan PPID (Level 4)

BPIP.09.02.02.05 Pengelolaan PPID					
	BPIP.09.02.02.05.01 Pengelolaan Permohonan Pelayanan Informasi Publik	BPIP.09.02.02.05.02 Pendokumentasian Informasi Publik	BPIP.09.02.02.05.03 Penyusunan Daftar Informasi Publik	BPIP.09.02.02.05.04 Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	BPIP.09.02.02.05.05 Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik
					
	BPIP.09.02.02.05.06 Penanganan Sengketa Informasi Publik	BPIP.09.02.02.05.07 Pemeliharaan Konten Portal PPID	BPIP.09.02.02.05.08 Pengaduan PPID	BPIP.09.02.02.05.09 Pengelolaan Laporan Tahunan PPID	




BPIP.09.02.02.07- Pengelolaan SKM (Level 4)

BPIP.09.02.02.07 Pengelolaan SKM		
	BPIP.09.02.02.07.01 Pengelolaan Survei Pemilik Layanan Internal Unit Kerja	BPIP.09.02.02.07.02 Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat

BPIP.09.02.03- Pengelolaan Publikasi dan Dokumentasi (Level 3)

BPIP.09.02.03 Pengelolaan Publikasi dan Dokumentasi			
	BPIP.09.02.03.01 Pengelolaan Sosial Media dan e-publikasi	BPIP.09.02.03.02 Pengelolaan Konten Media Elektronik Resmi BPIP	BPIP.09.02.03.03 Pelaksanaan pameran dan event


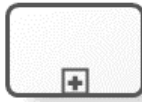
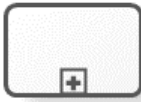
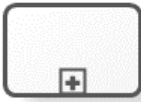
BPIP.09.02.04- Pengelolaan pelaksanaan hubungan masyarakat (Level 3)

BPIP.09.02.03 Pengelolaan pelaksanaan hubungan masyarakat				
	BPIP.09.02.03.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Offline dan kanal BPIP	BPIP.09.02.03.02 Pengelolaan SPAN LAPOR	BPIP.09.02.03.03 Pengelolaan SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional)	BPIP.09.02.03.04 Pengordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian PANRB







BPIP.09.03- Pengaduan Masyarakat (Level 2)

BPIP.09.03 Pengaduan Masyarakat	 BPIP.09.03.01 Penerimaan Pengaduan	 BPIP.09.03.02 Penanganan Pengaduan	 BPIP.09.03.03 Dokumentasi dan Pelaporan Pengaduan
--	---	---	--

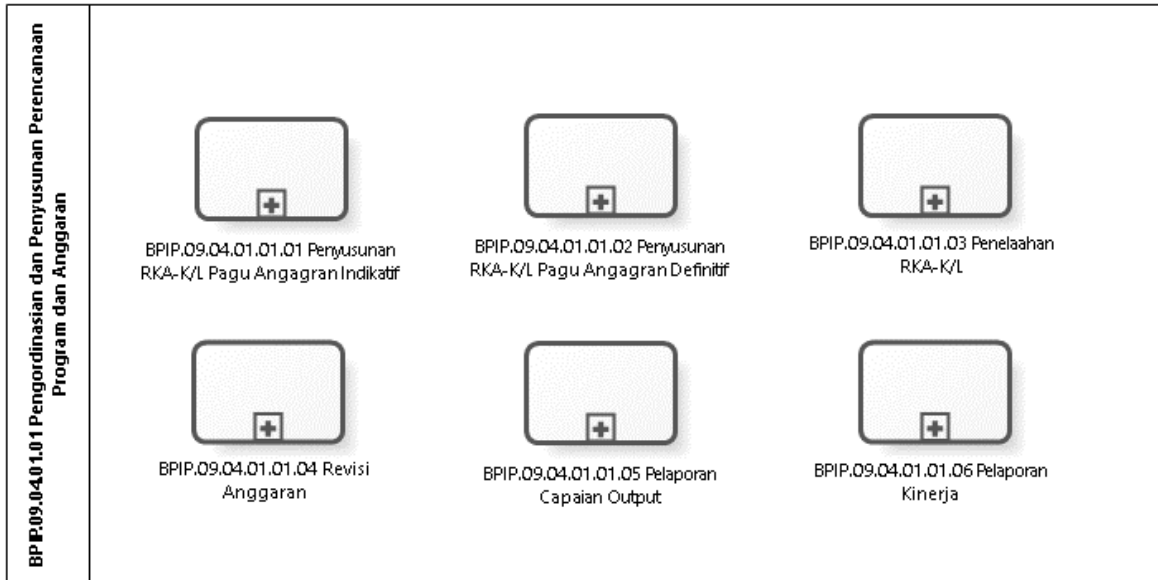
BPIP.09.04- Pengelolaan Pelayanan Administrasi (Level 2)

BPIP.09.04 Pengelolaan Pelayanan Administrasi	 BPIP.09.04.01 Pelaksanaan urusan kerumahtangaan Sekretariat Utama, Deputi, dan Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	 BPIP.09.04.02 Pengelolaan administrasi persuratan dan pengadaan, pendistribusian, dan ekspedisi surat	 BPIP.09.04.03 Pengelolaan arsip	 BPIP.09.04.04 Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri
--	--	--	---	---

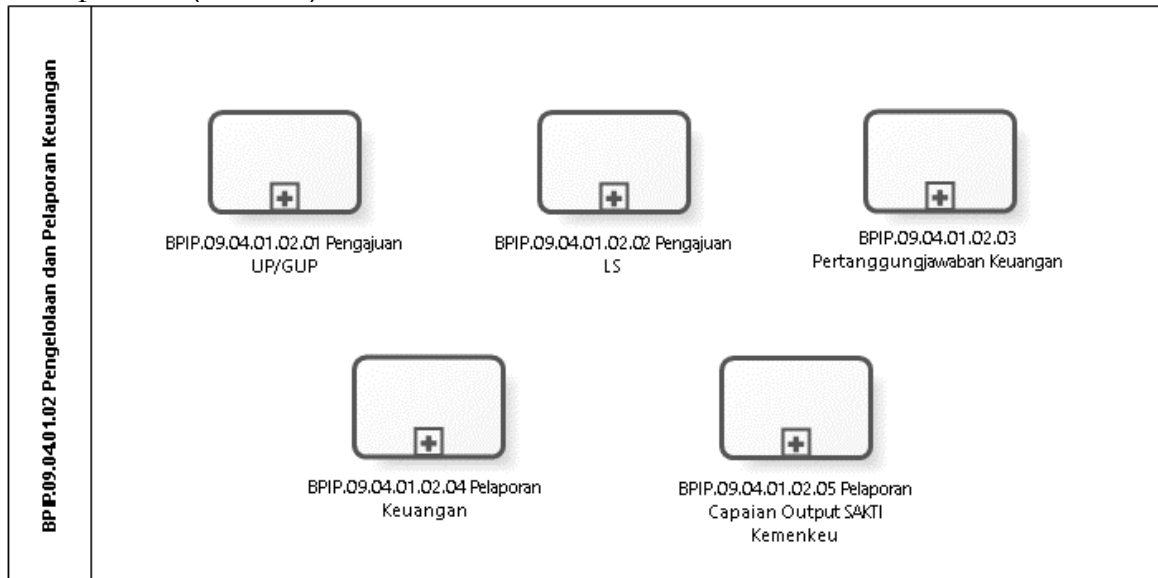
BPIP.09.04.01-Pelaksanaan urusan kerumahtangaan Sekretariat Utama, Deputi, dan Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi (Level 3)

BPIP.09.04.01 Pelaksanaan urusan kerumahtangaan Sekretariat Utama, Deputi, dan Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	 BPIP.09.04.01.01 Pengordinasian dan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	 BPIP.09.04.01.02 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	 BPIP.09.04.01.03 Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtangaan
	 BPIP.09.04.01.04 Organisasi dan Ketatalaksanaan	 BPIP.09.04.01.05 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	 BPIP.09.04.01.06 Pelaksanaan Pelaporan

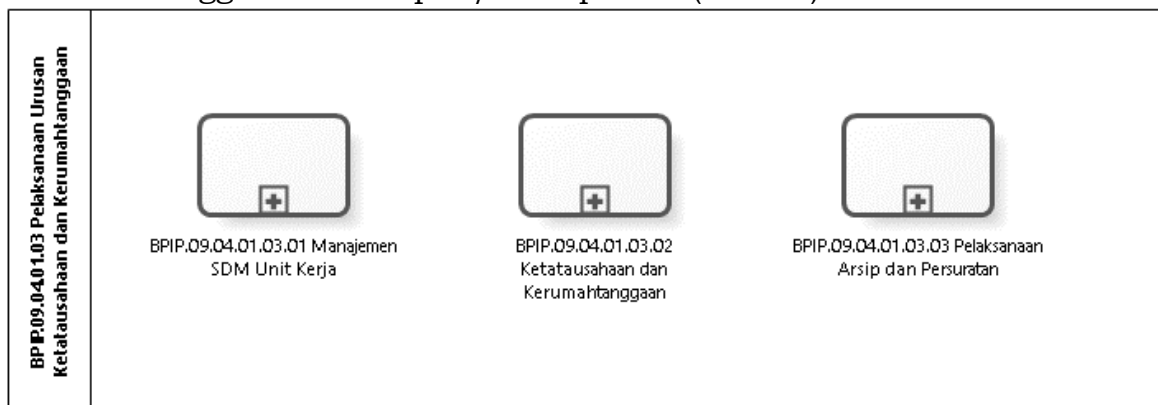
BPIP.09.04.01.01- Pengordinasian dan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Biro Faspim/ Kedeputusan (Level 4)






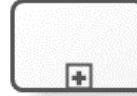
BPIP.09.04.01.02-Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Biro Faspim/ Kedeputusan (Level 4)







BPIP.09.04.01.03-Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Biro Faspim/ Kedeputusan (Level 4)






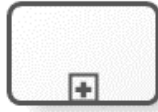
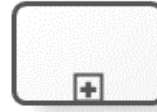
BPIP.09.04.01.03.02- Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Level 5)

BPIP.09.04.01.03.02 Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan	 <p>BPIP.09.04.01.03.02.01 Penerbitan Surat Bebas Temuan</p>	 <p>BPIP.09.04.01.03.02.02 Pengajuan ATK</p>	 <p>BPIP.09.04.01.03.02.03 Fasilitasi Rapat</p>	 <p>BPIP.09.04.01.03.02.04 Permohonan Perbaikan dan/ Penambahan Fasilitas</p>
--	---	---	---	--




BPIP.09.04.01.03.02.03.01-Fasilitasi Rapat (Level 6)

BPIP.09.04.01.03.02.03 Fasilitasi Rapat	 <p>BPIP.09.04.01.03.02.03.01 Fasilitasi Penyediaan Ruang Rapat</p>	 <p>BPIP.09.04.01.03.02.03.02 Fasilitasi Konsumsi Kegiatan</p>	 <p>BPIP.09.04.01.03.02.03.03 Fasilitasi Penyediaan Narasumber</p>	 <p>BPIP.09.04.01.03.02.03.04 Fasilitasi Link Zoom</p>
--	--	---	--	---

BPIP.09.04.01.03.03- Pelaksanaan Arsip dan Persuratan (Level 5)

BPIP.09.04.01.03.03 Pelaksanaan Arsip dan Persuratan	 <p>BPIP.09.04.01.03.03.01 Pengelolaan Surat Masuk</p>	 <p>BPIP.09.04.01.03.03.02 Pengelolaan Surat Keluar</p>	 <p>BPIP.09.04.01.03.03.03 Pemberkasan Arsip Aktif</p>
	 <p>BPIP.09.04.01.03.03.04 Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif</p>	 <p>BPIP.09.04.01.03.03.05 Layanan Peminjaman Arsip</p>	

BPIP.09.04.01.04- Organisasi dan Ketatalaksanaan Biro (Level 4)

BPIP.09.04.01.04 Organisasi dan Ketatalaksanaan	 <p>BPIP.09.04.01.04.01 Penyusunan Proses Bisnis</p>	 <p>BPIP.09.04.01.04.02 Penyusunan SOP</p>	 <p>BPIP.09.04.01.04.03 Manajemen Risiko</p>
--	---	---	---

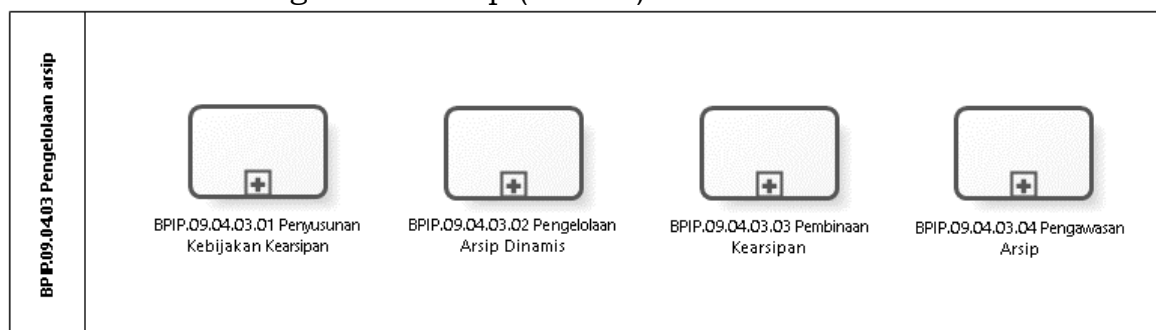
BPIP.09.04.01.05-Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro (Level 4)



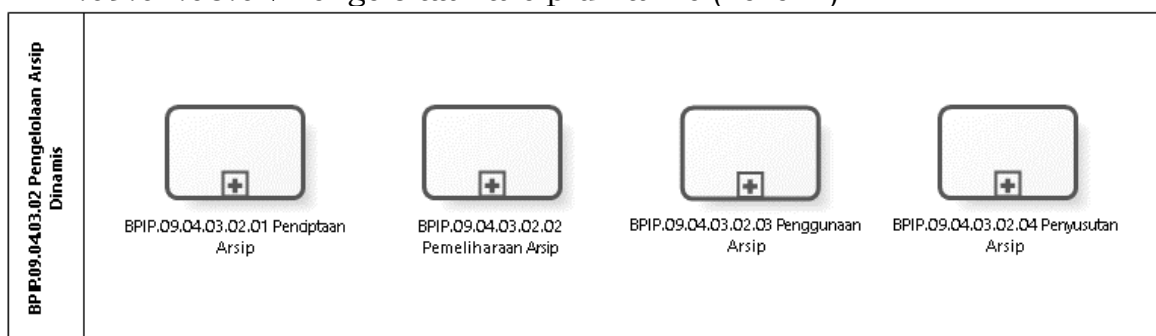
BPIP.09.04.01.05.01-Penyusunan Rencana Kerja RB

BPIP.09.04.01.06-Pelaksanaan Pelaporan (Level 4)

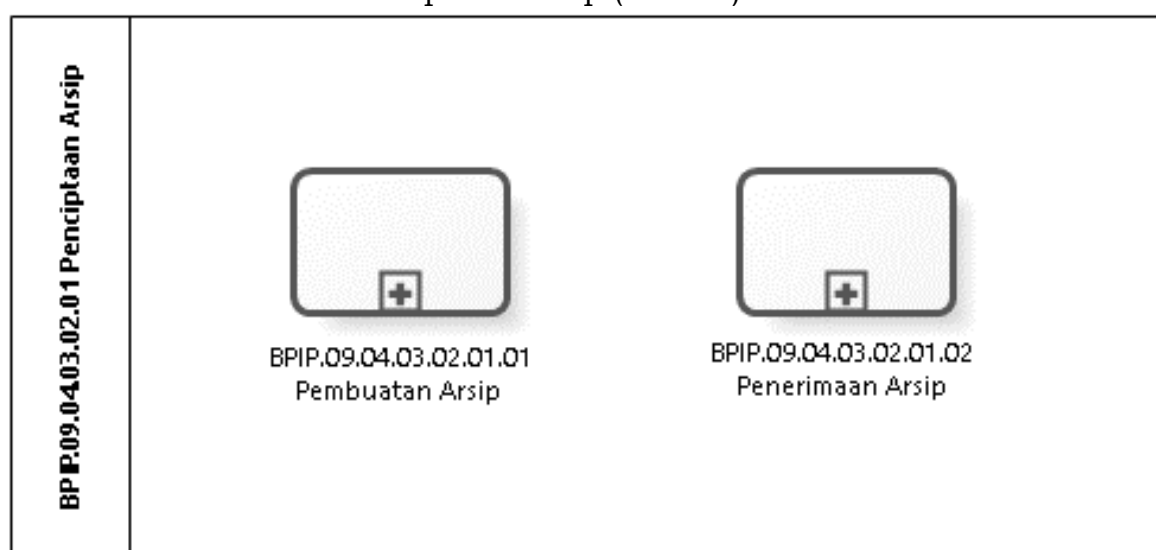
BPIP.09.04.03-Pengelolaan arsip (Level 3)







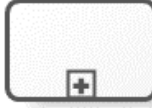
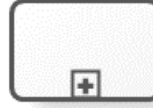
BPIP.09.04.03.02-Pengelolaan arsip dinamis (Level 4)





BPIP.09.04.03.02.01-Penciptaan arsip (Level 5)



BPIP.09.04.03.02.02-Pemeliharaan arsip (Level 5)

BPIP.09.04.03.02.02 Pemeliharaan Arsip			
	BPIP.09.04.03.02.02.01 Pemberkasan Arsip Aktif	BPIP.09.04.03.02.02.02 Penyimpanan Arsip	BPIP.09.04.03.02.02.03 Alih Media Arsip
			
	BPIP.09.04.03.02.02.04 Pemeliharaan Arsip Vital	BPIP.09.04.03.02.02.05 Pemberkasan Arsip Terjaga	BPIP.09.04.03.02.02.06 Penataan Arsip In-Aktif

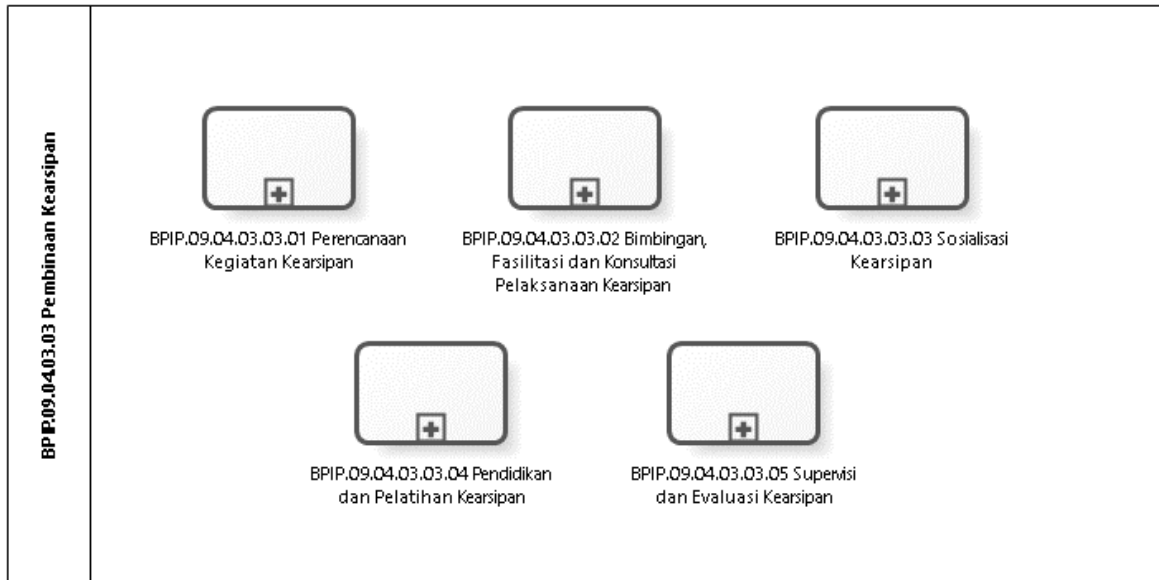
BPIP.09.04.03.02.03-Penggunaan arsip (Level 5)

BPIP.09.04.03.02.03 Penggunaan Arsip		
	BPIP.09.04.03.02.03.01 Peminjaman Arsip	BPIP.09.04.03.02.03.02 Penyajian Arsip

BPIP.09.04.03.02.04-Penyusutan arsip (Level 5)

BPIP.09.04.03.02.04 Penyusutan Arsip			
	BPIP.09.04.03.02.04.01 Pemindahan Arsip In-Aktif	BPIP.09.04.03.02.04.02 Pemusnahan Arsip	BPIP.09.04.03.02.04.03 Penyerahan Arsip Statis

BPIP.09.04.03.03-Pembinaan Kearsipan (Level 4)

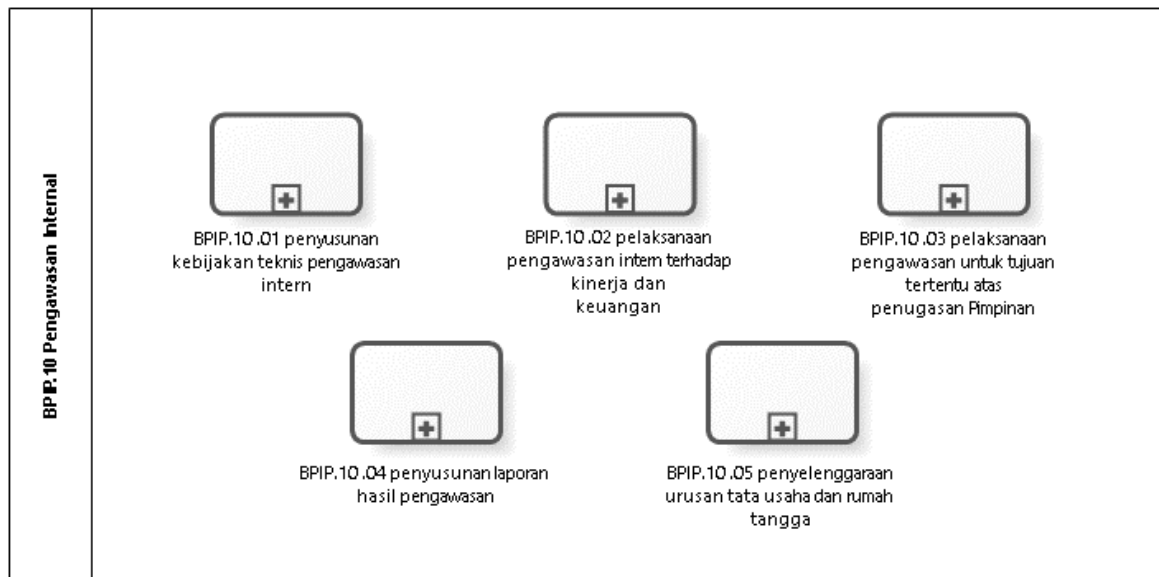


a. Biro Pengawasan Internal

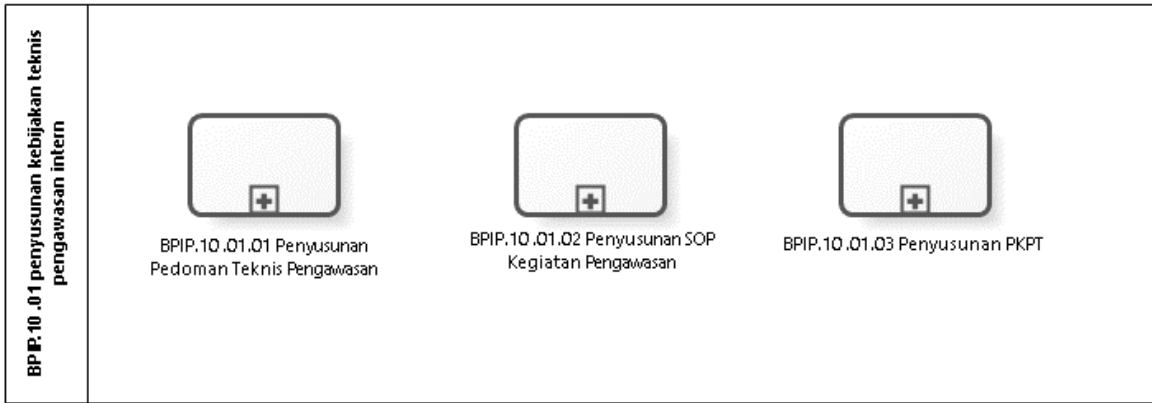
Level 1 BPIP.10-Pengawasan Internal

Level 2:

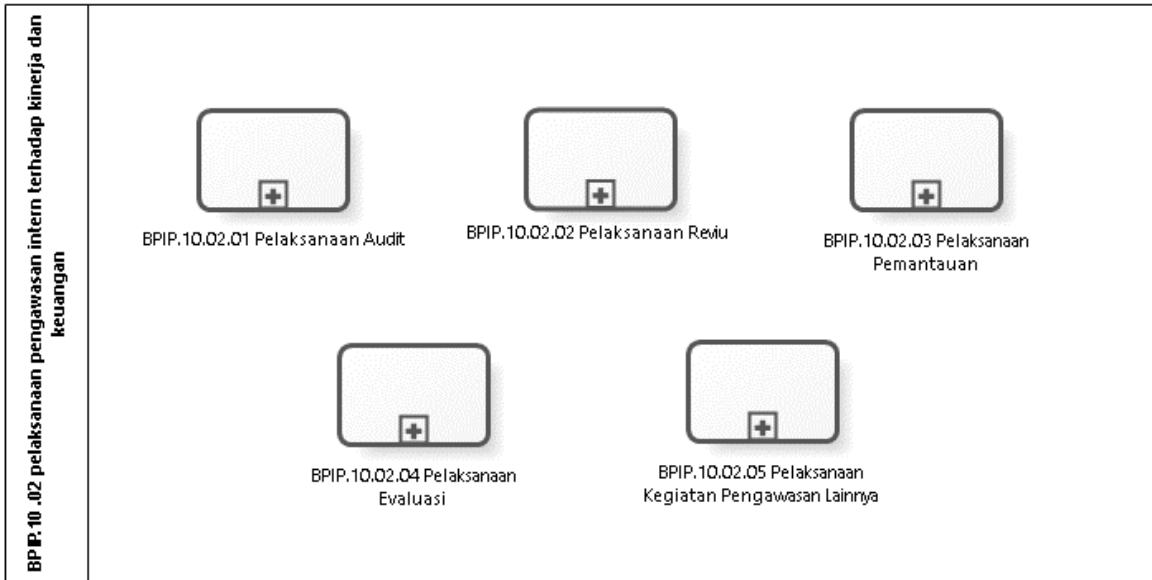
- 1) BPIP.10.01-Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern
- 2) BPIP.10.02-Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan
- 3) BPIP.10.03-Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan
- 4) BPIP.10.04-Penyusunan laporan hasil pengawasan
- 5) BPIP.10.05-Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Pengawasan Internal



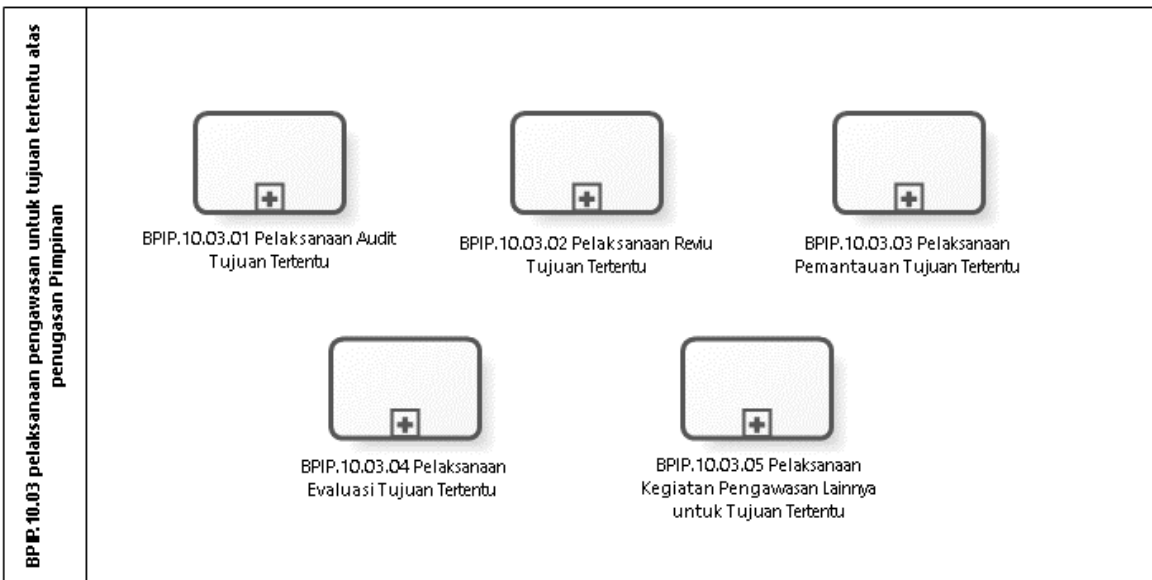
BPIP.10.01- Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern (Level 2)



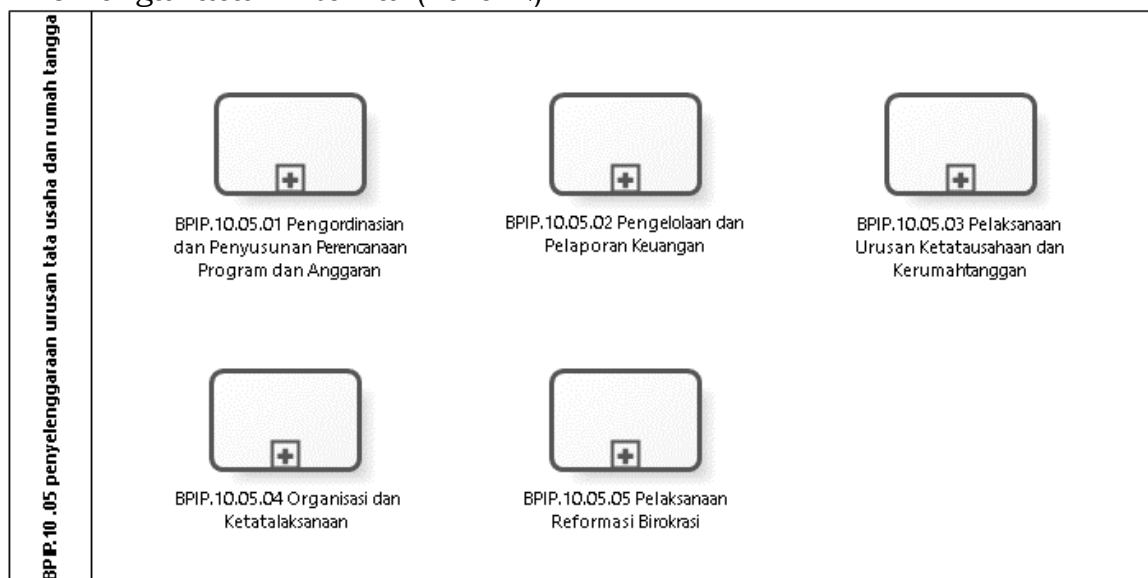
BPIP.10.02- Pelaksanaan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja dan Keuangan (Level 2)



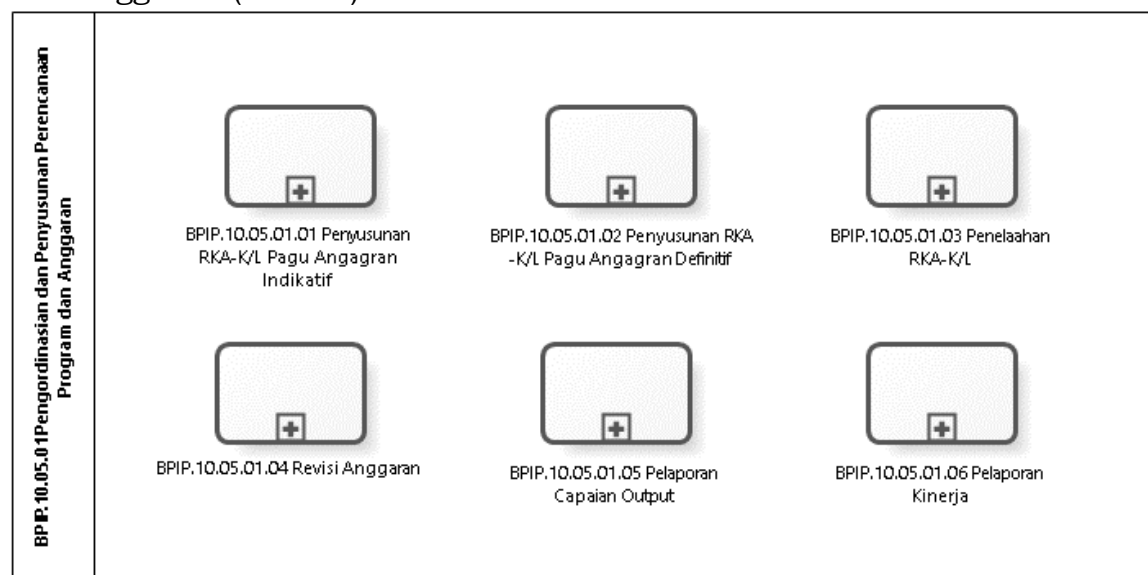
BPIP.10.03- Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Pimpinan (Level 2)



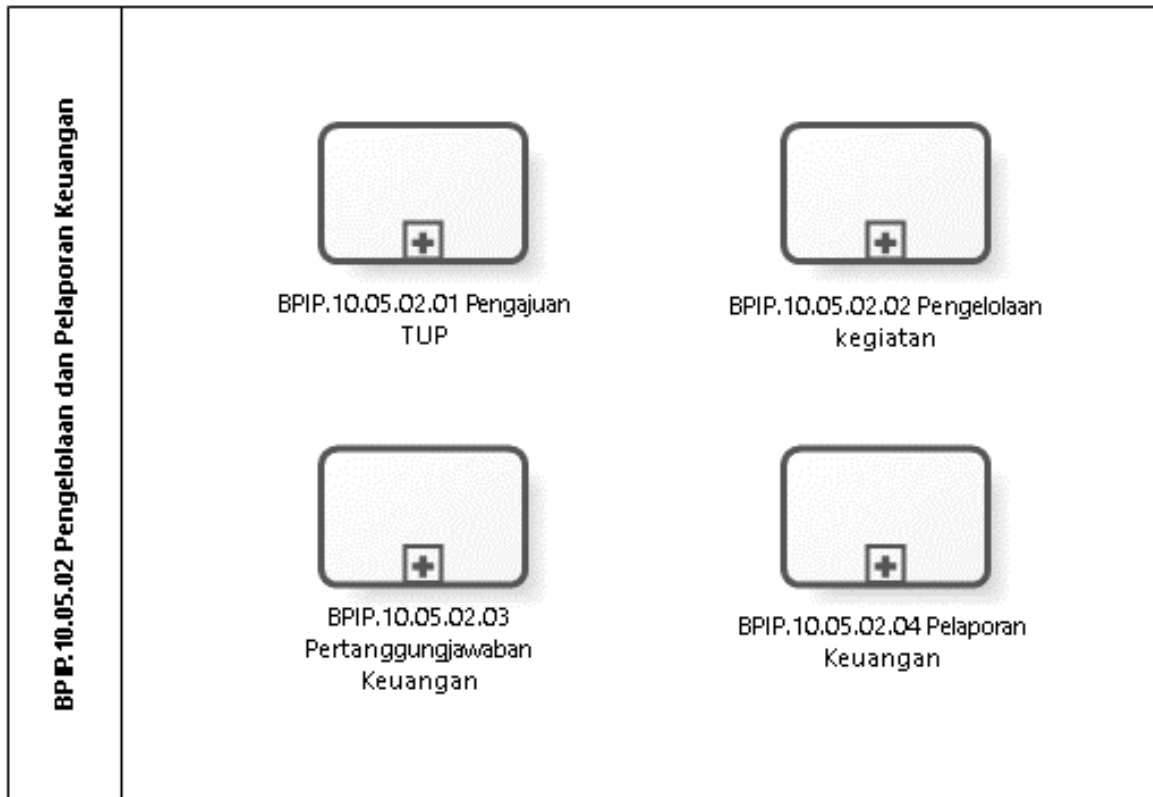
BPIP.10.05- Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Pengawasan Internal (Level 2)



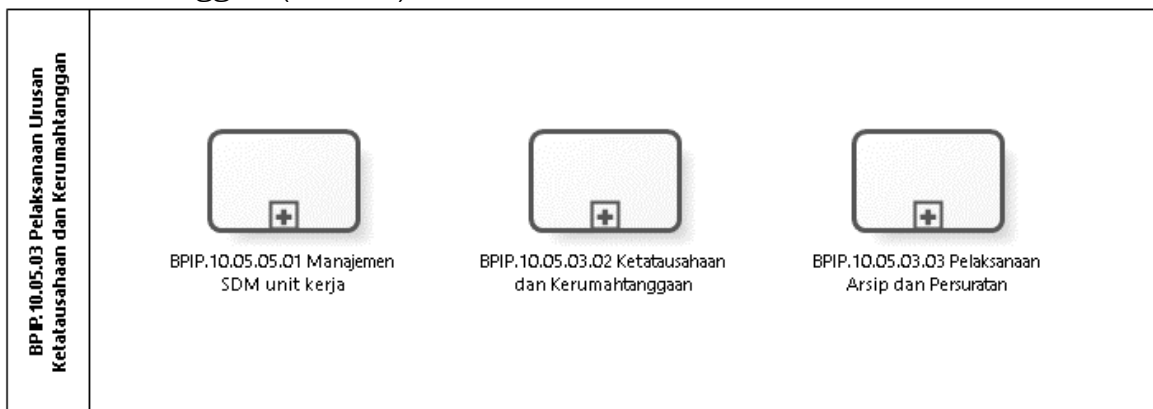
BPIP.10.05.01- Pengordinasian dan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran (Level 3)



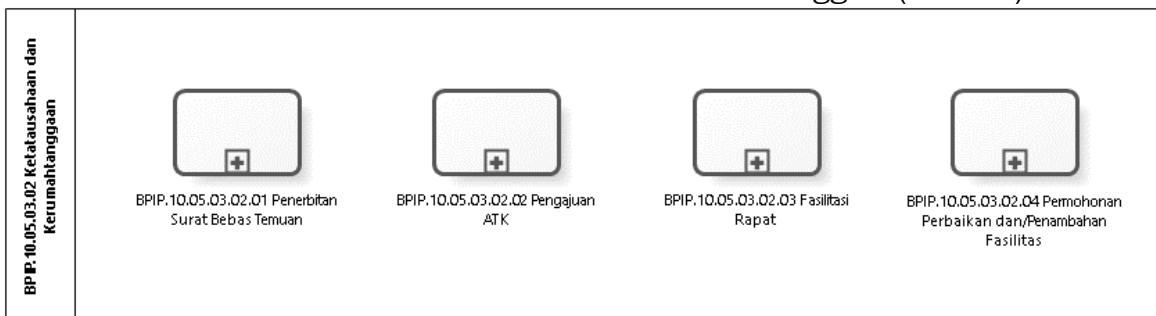
BPIP.10.05.02- Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan (Level 3)



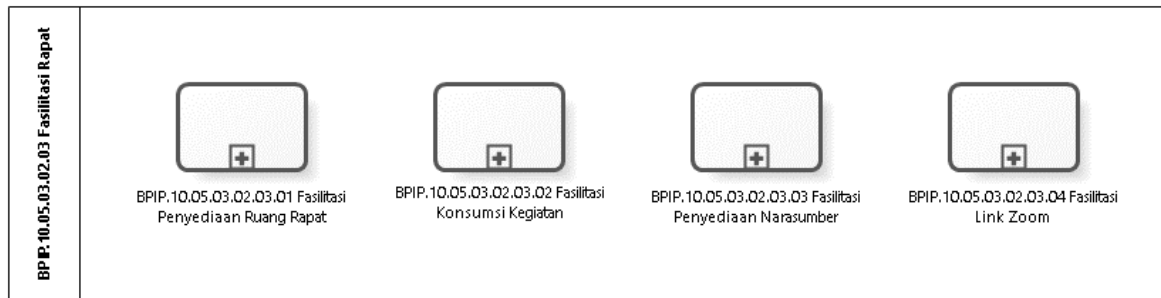
BPIP.10.05.03- Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggan (Level 3)



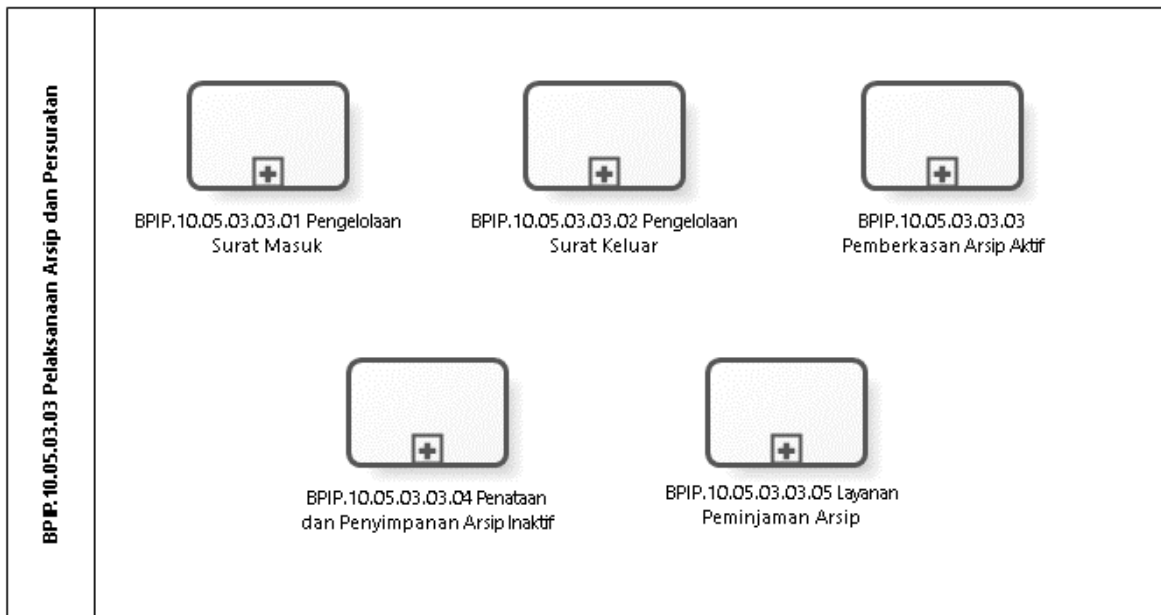
BPIP.10.05.03.02- Ketatausahaan dan Kerumahtanggan (Level 4)



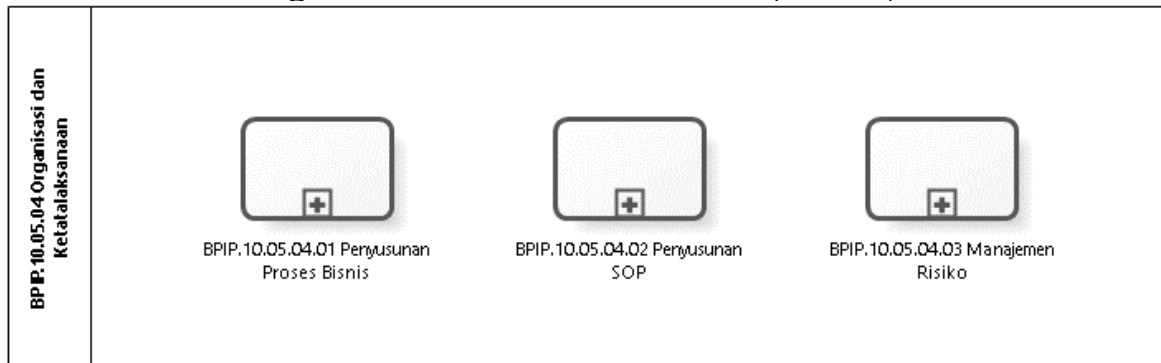
BPIP.10.05.03.02.03- Fasilitas Rapat (Level 5)



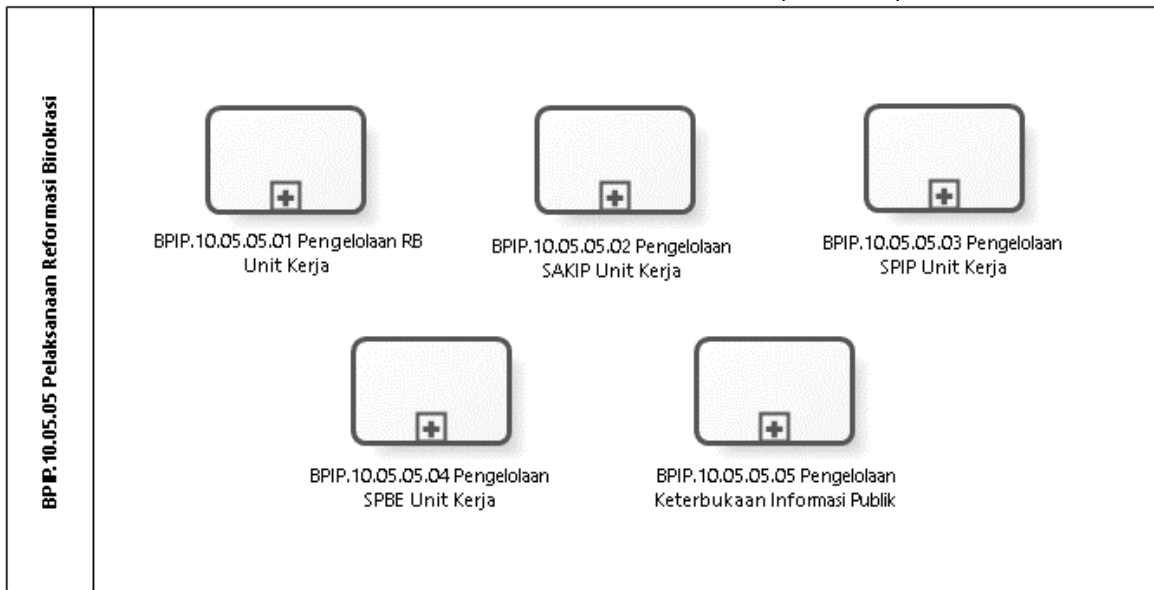
BPIP.10.05.03.03-Pelaksanaan Arsip dan Persuratan (Level 4)



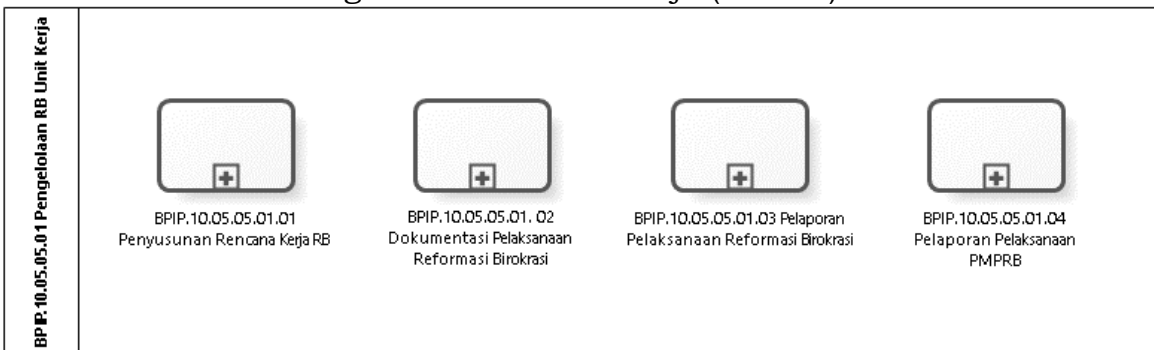
BPIP.10.05.04- Organisasi dan Ketatalaksanaan (Level 3)



BPIP.10.05.05- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Level 3)



BPIP.10.05.05.01-Pengelolaan RB Unit Kerja (Level 4)

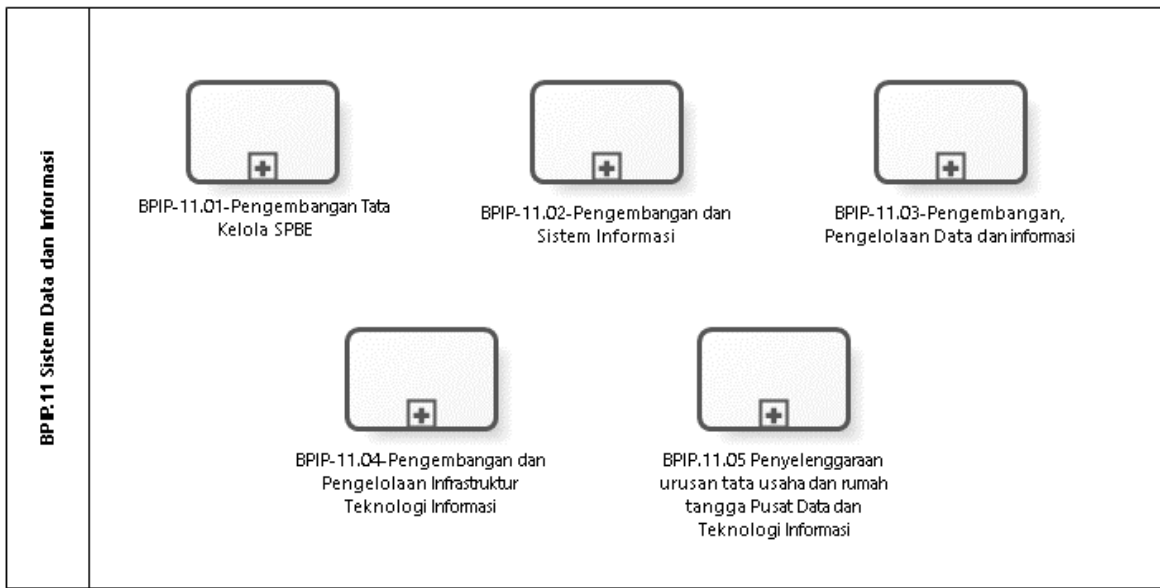


a. Pusat Data dan Teknologi Informasi

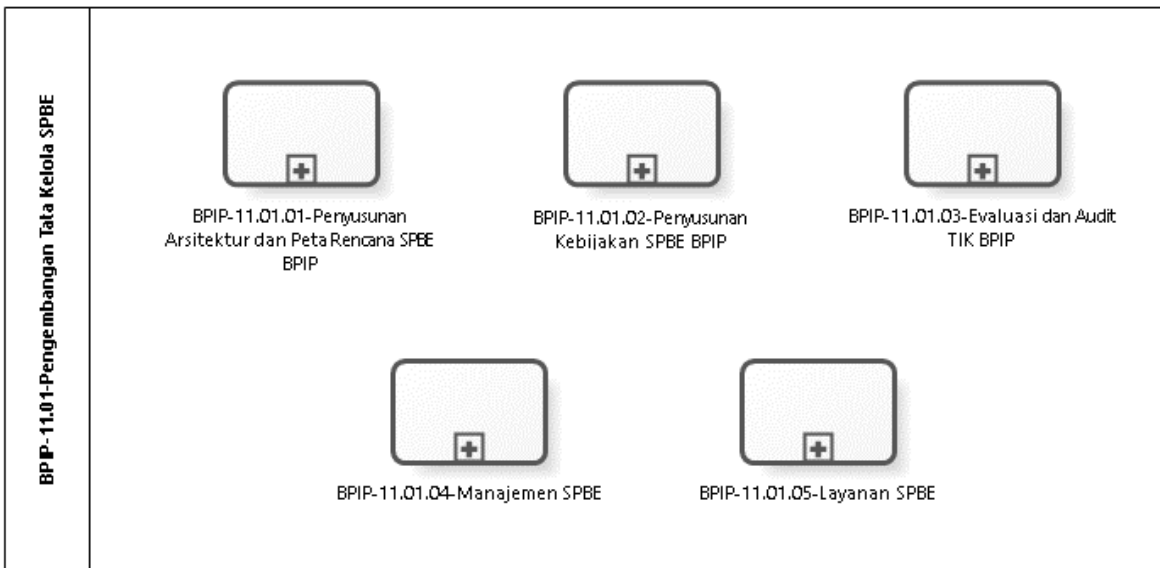
Level 1 BPIP.11- Pengembangan Sistem Informasi

Level 2:

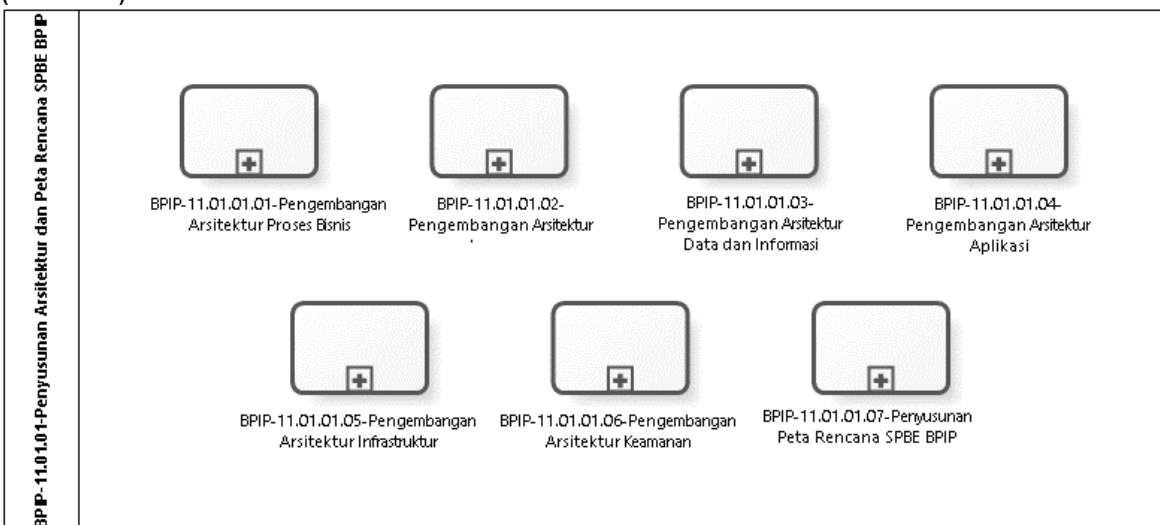
- 1) BPIP.11.01-Pengembangan Tata Kelola SPBE
- 2) BPIP.11.02-Pengembangan dan Sistem Informasi
- 3) BPIP.11.03-Pengembangan, Pengelolaan Data dan Informasi
- 4) BPIP.11.04-Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi
- 5) BPIP.11.05-Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Teknologi Informasi



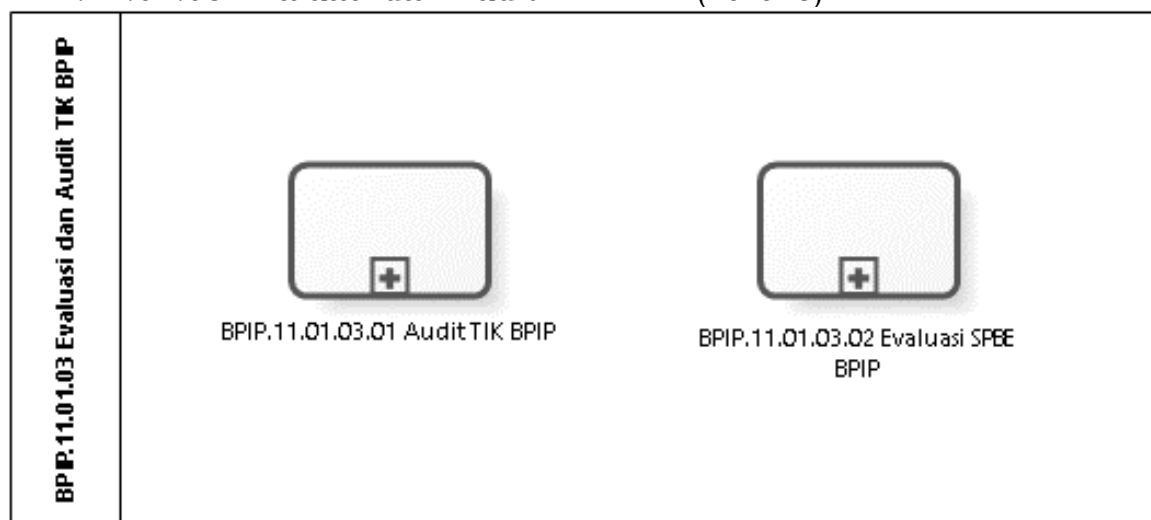
BPIP.11.01-Pengembangan Tata Kelola SPBE (Level 2)



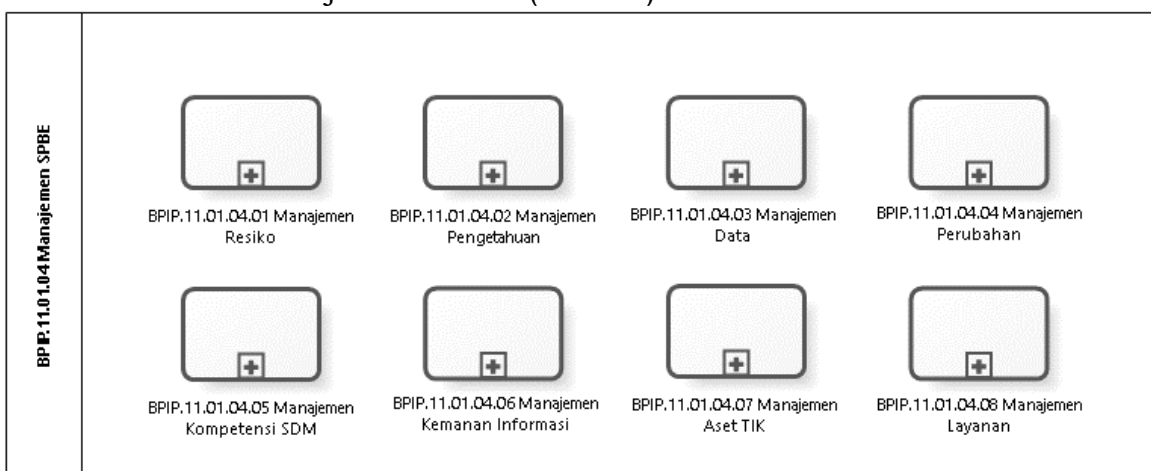
BPIP.11.01.01-Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE BPIP (Level 3)



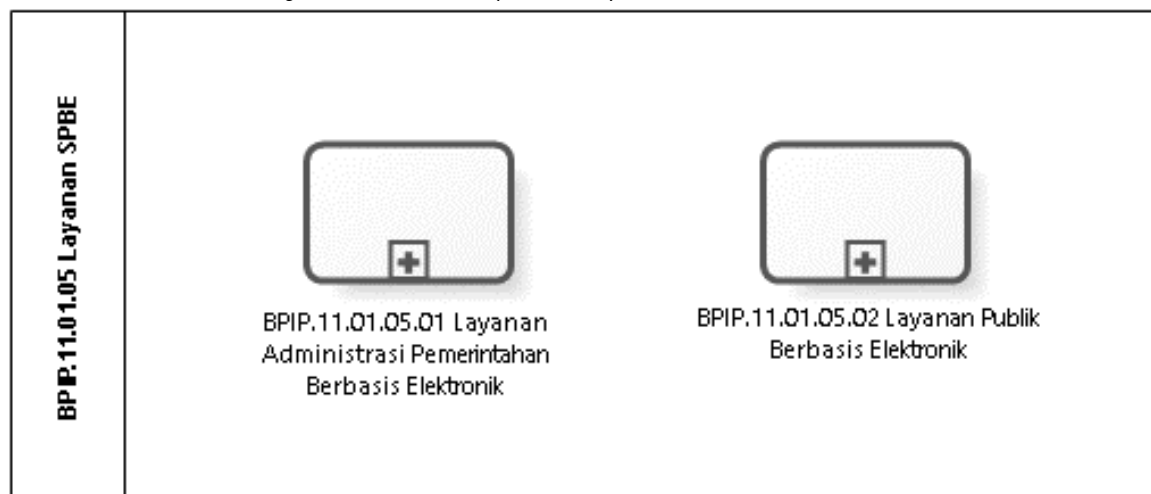
BPIP.11.01.03-Evaluasi dan Audit TIK BPIP (Level 3)



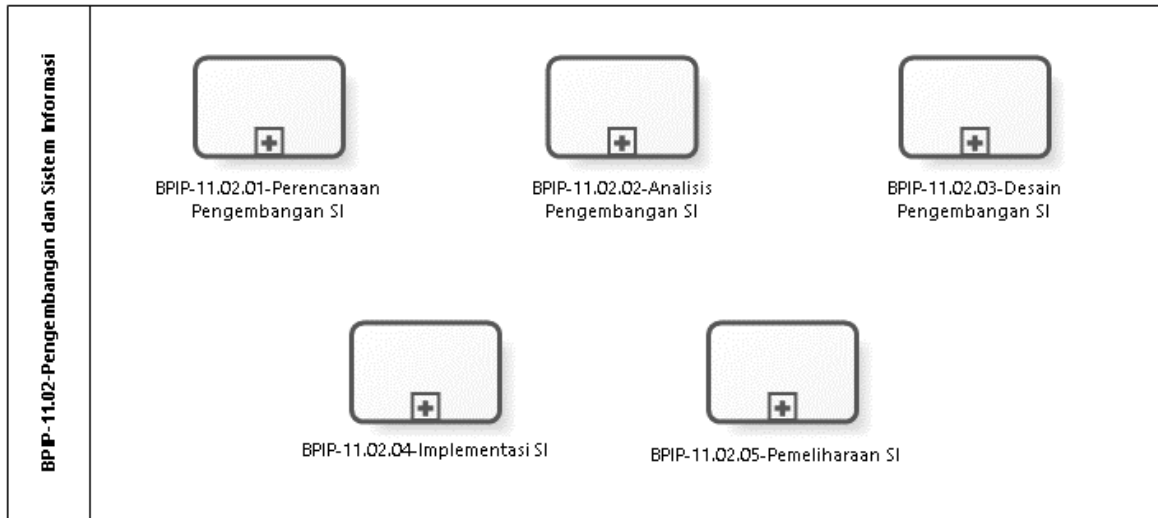
BPIP.11.01.04-Manajemen SPBE (Level 3)



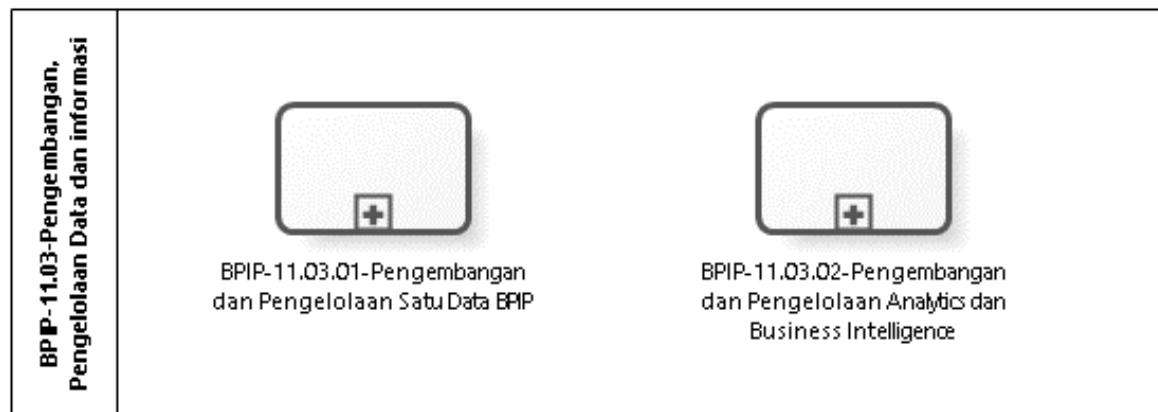
BPIP.11.01.05- Layanan SPBE (Level 3)



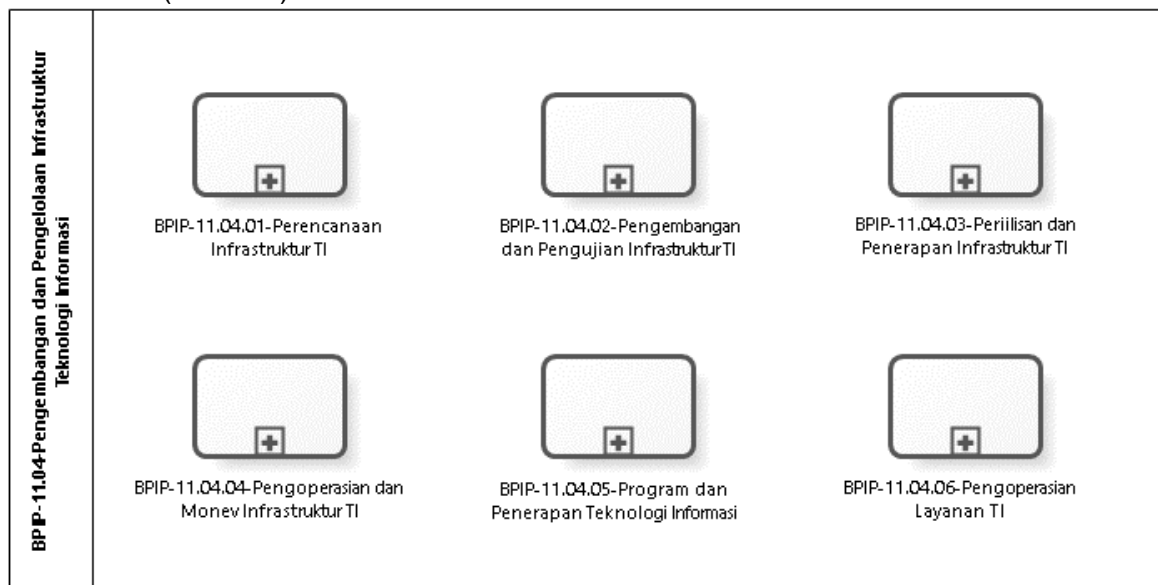
BPIP.11.02 Pengembangan dan Sistem Informasi (Level 2)



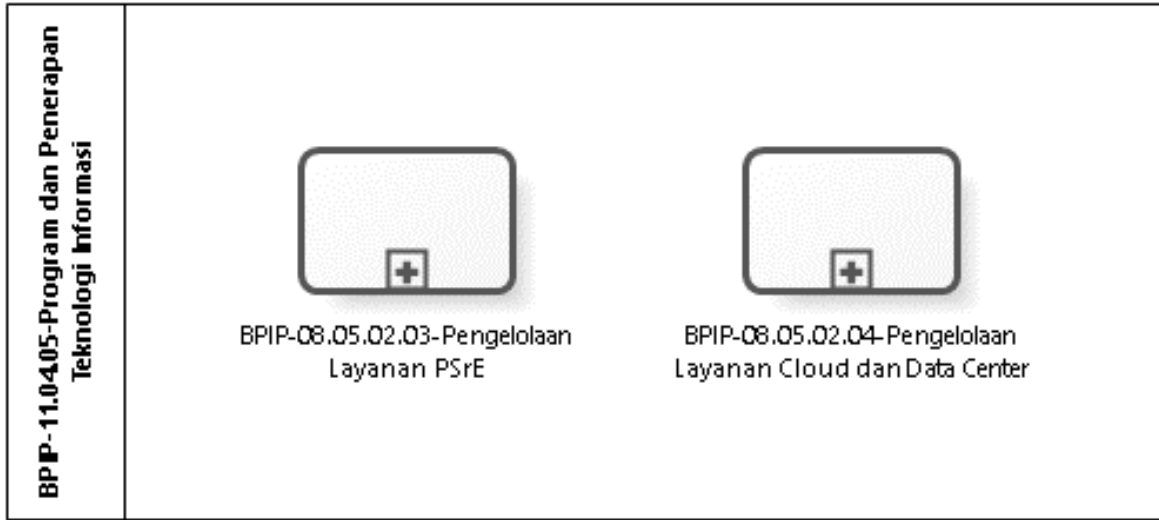
BPIP.11.03- Pengembangan, Pengelolaan Data dan Informasi (Level 2)



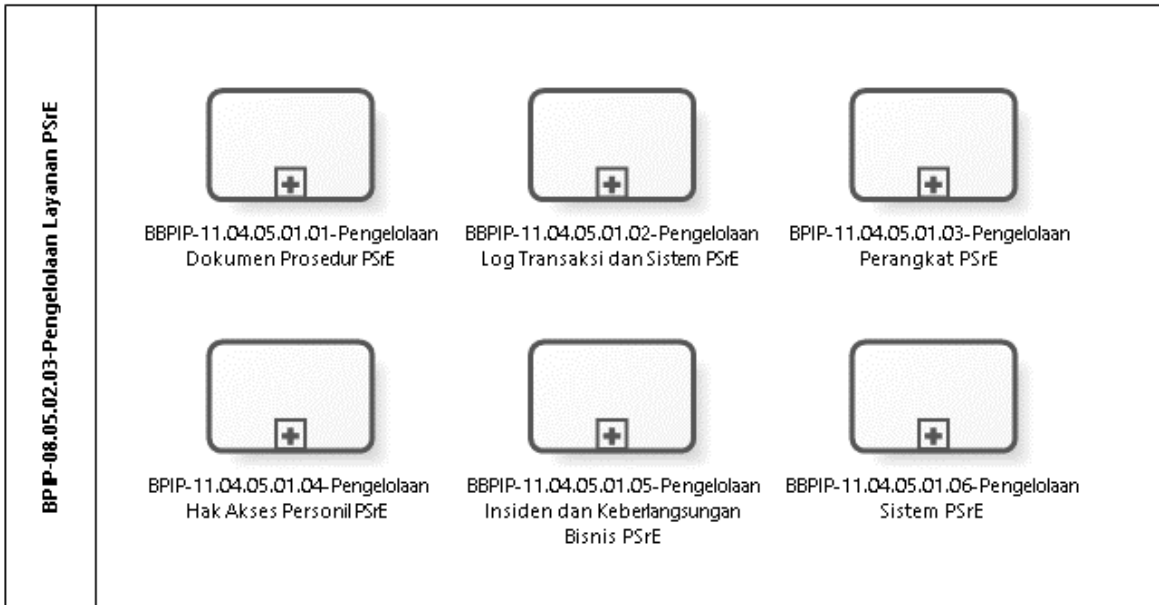
BPIP.11.04-Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi (Level 2)



BPIP.11.04.05- Program dan Penerapan Teknologi Informasi (Level 3)

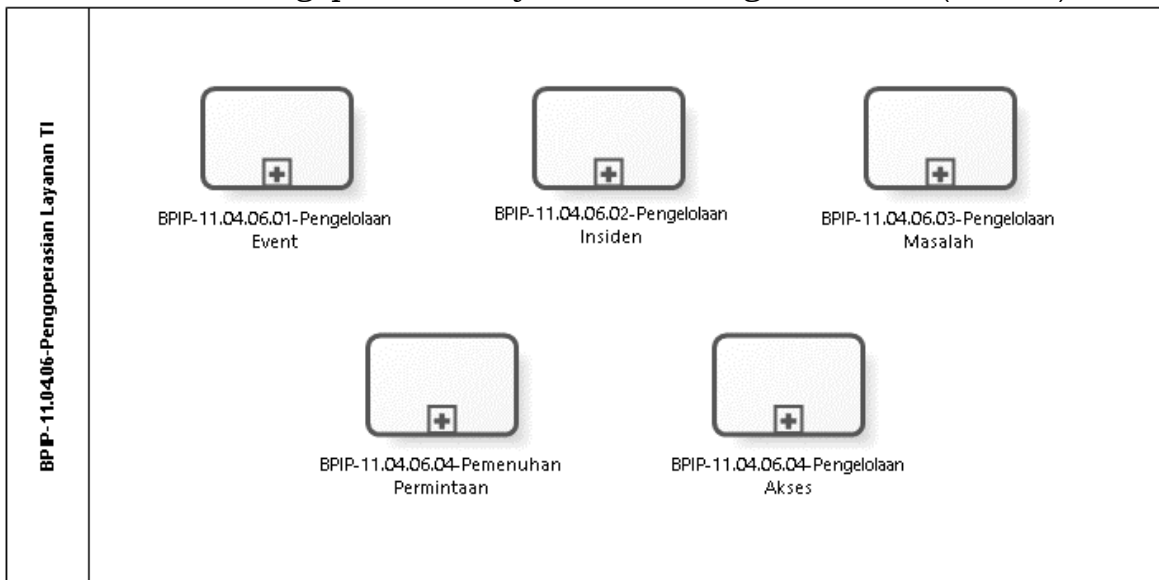


BPIP.11.04.05.01- Pengelolaan Layanan PSrE (Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Level 4)



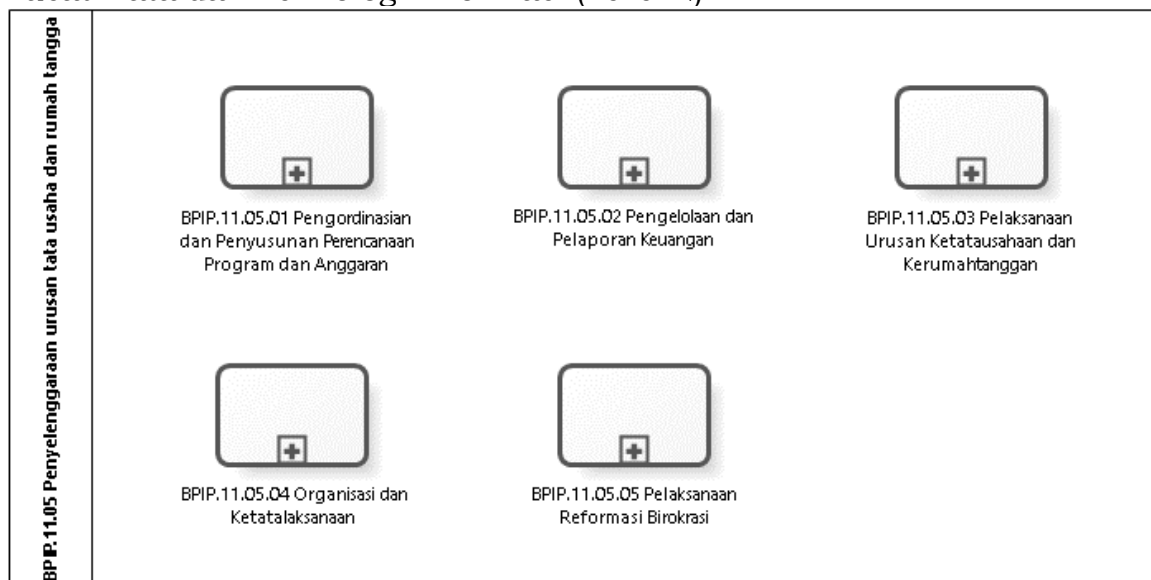
BPIP.11.04.05.02- Pengelolaan Layanan Cloud dan Data (Level 4)

BPIP.11.04.06- Pengoperasian Layanan Teknologi Informasi (Level 3)

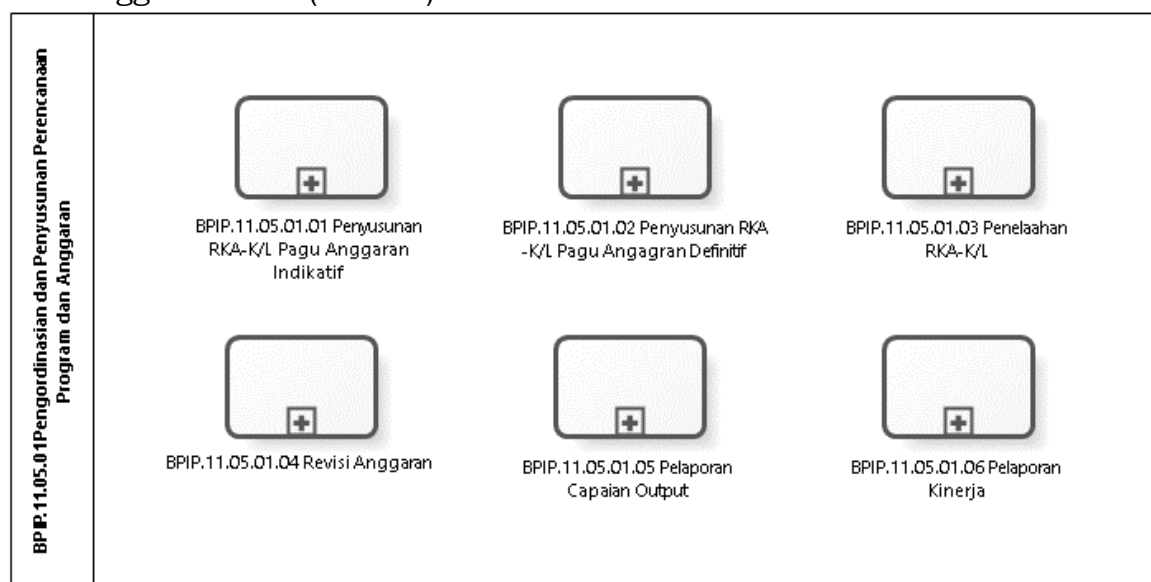


BPIP.11.05- Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

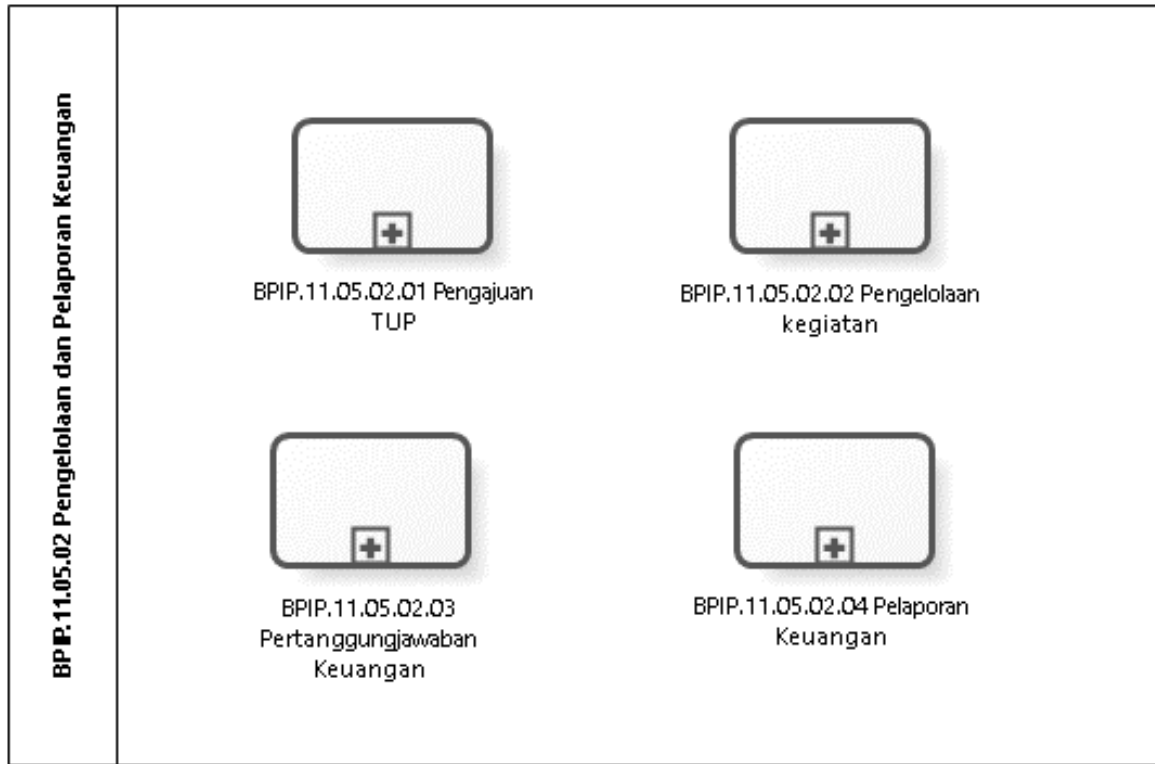
Pusat Data dan Teknologi Informasi (Level 2)



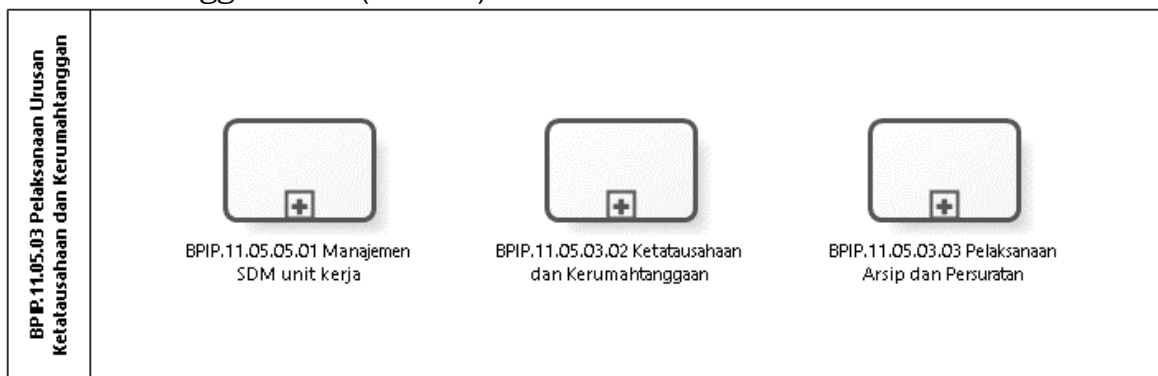
BPIP.11.05.01- Pengordinasian dan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Biro (Level 3)



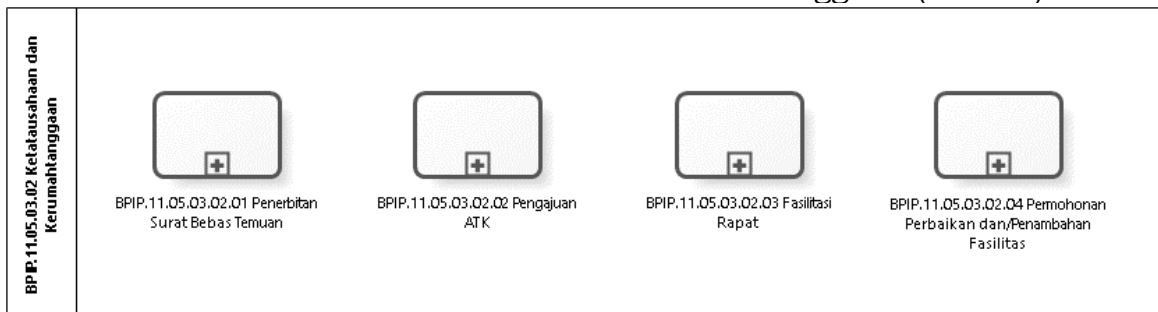
BPIP.11.05.02- Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Biro (Level 3)







BPIP.11.05.03- Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Biro (Level 3)





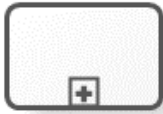
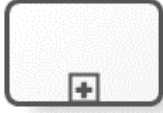

BPIP.11.05.03.02- Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Level 4)



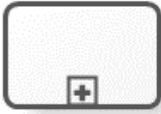
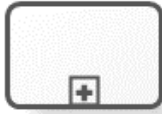
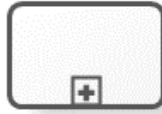
BPIP.11.05.03.02.03- Fasilitas Rapat (Level 5)

BPIP.11.05.03.02.03 Fasilitas Rapat	 <p>BPIP.11.05.03.02.03.01 Fasilitas Penyediaan Ruang Rapat</p>	 <p>BPIP.11.05.03.02.03.02 Fasilitas Konsumsi Kegiatan</p>	 <p>BPIP.11.05.03.02.03.03 Fasilitas Penyediaan Narasumber</p>	 <p>BPIP.11.05.03.02.03.04 Fasilitas Link Zoom</p>
--	--	---	--	---

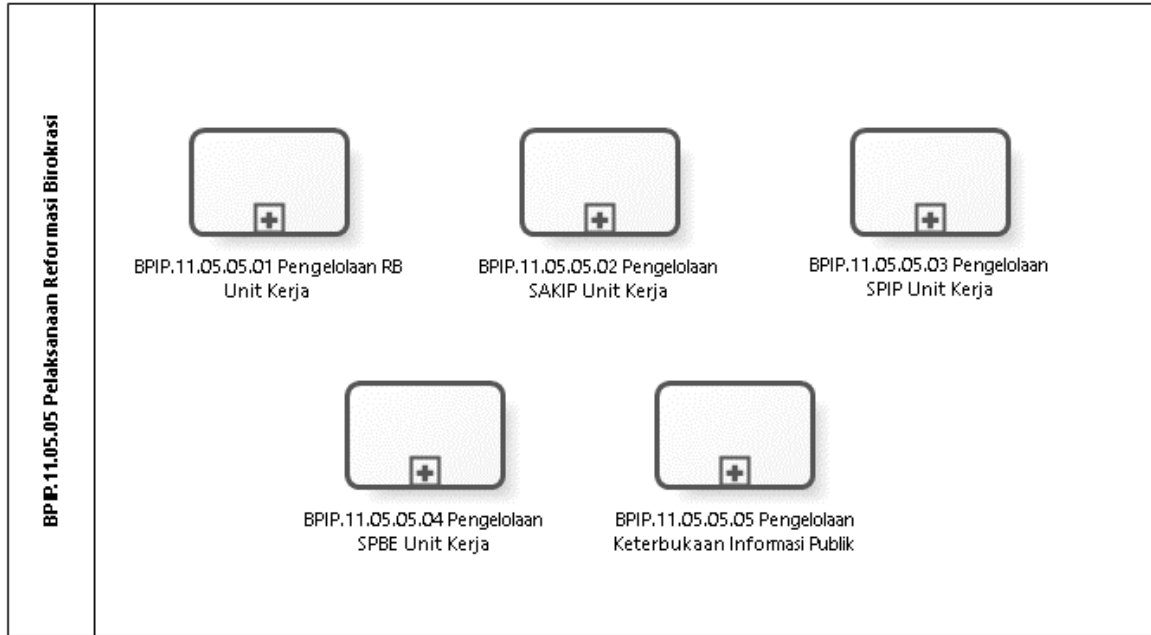
BPIP.11.05.03.03- Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Level 4)

BPIP.11.05.03.03 Pelaksanaan Arsip dan Persuratan	 <p>BPIP.11.05.03.03.01 Pengelolaan Surat Masuk</p>	 <p>BPIP.11.05.03.03.02 Pengelolaan Surat Keluar</p>	 <p>BPIP.11.05.03.03.03 Pemberkasan Arsip Aktif</p>
	 <p>BPIP.11.05.03.03.04 Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif</p>	 <p>BPIP.11.05.03.03.05 Layanan Peminjaman Arsip</p>	

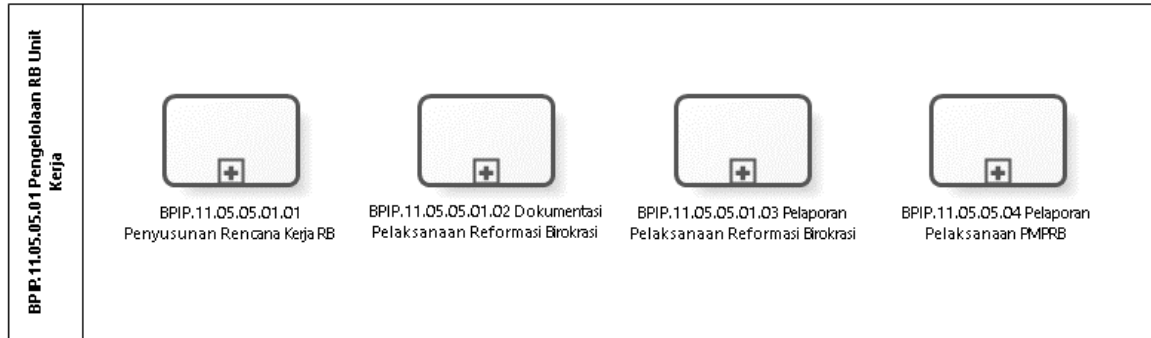
BPIP.11.05.04- Organisasi dan Ketatalaksanaan Biro (Level 3)

BPIP.11.05.04 Organisasi dan Ketatalaksanaan	 <p>BPIP.11.05.04.01 Penyusunan Proses Bisnis</p>	 <p>BPIP.11.05.04.02 Penyusunan SOP</p>	 <p>BPIP.11.05.04.03 Manajemen Risiko</p>
---	--	--	--

BPIP.11.05.05- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro (Level 3)



BPIP.11.05.05.01- Pengelolaan RB Unit Kerja (Level 4)



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI